

LKPJ 2023

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023







Benni Irwan
PJ Bupati Kabupaten Purwakarta

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim,

Assalamu'alaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh,

Syukur Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan karunia Allah SWT, Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta berkat doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Purwakarta, kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2023. Kami berusaha untuk memaparkan secara transparan dan akuntabel tentang bagaimana kami telah menggunakan anggaran daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Purwakarta.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan yang disampaikan pada prinsipnya adalah informasi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat/Provinsi. Adapun hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan dan tindak lanjut rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah tahun anggaran sebelumnya.

LKPJ Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2018-2023 dan pada tahun ini berakhir masa jabatan Bupati dan wakil Bupati Purwakarta.

Penunjukan kami selaku Pj Bupati pada bulan September 2023 menjadi awal untuk melanjutkan program dan kegiatan sampai akhir Tahun Anggaran 2023.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten Purwakarta selama Tahun 2023, telah berlangsung sangat dinamis. Dengan komitmen tinggi, yang diiringi semangat kebersamaan dan tekad kuat dari penyelenggara pemerintah dan stakeholder, *alhamdulillah* berbagai program

kerja dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi **MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA** akan dapat terwujud. Namun dalam perjalanan untuk mencapai visi tersebut, kami menyadari adanya kendala dan permasalahan serta berbagai keterbatasan, baik sumberdaya, dana, mutu perencanaan dan pengelolaannya, sehingga belum semua harapan dan tuntutan masyarakat dapat terpenuhi. Oleh karenanya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat kita jadikan sarana meningkatkan kerja sama dan partisipasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan prestasi pembangunan Purwakarta dimasa yang akan datang. Atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, khususnya Lembaga DPRD sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Purwakarta dengan tulus saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita untuk terus membangun dan berkarya dalam upaya mewujudkan Purwakarta Istimewa.

Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

Wassalamualaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh.

Purwakarta, Maret 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA



BENNI IRWAN

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR **I**
DAFTAR ISI **III**
DAFTAR TABEL **V**
DAFTAR GAMBAR **VII**
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Dasar Hukum I-2
1.2 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 1-12
1.3 Data Umum Daerah 1-20
1.3.1 Data Geografis Wilayah 1-20
1.3.2 Jumlah Penduduk 1-24
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk 1-28
1.3.4 Jumlah ASN 1-29
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 1-35
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja .. 1-37
1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan 1-39
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah II-2
2.1.1 Kebijakan dan Strategis Pendapatan Daerah II-2
2.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah II-5
2.1.3 Permasalahan dan upaya penyelesaian II-8
2.2 Pengelolaan Belanja Daerah ..... II-II
2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah ..... II-II
2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah II-13
2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah II-18
Kebijakan pembiayaan Daerah II-18
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah II-20
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan III-1
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar III-5
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..... III- 72
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan III-164
3.1.4 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan III-201
3.1.5 Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan III-218
3.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan III-248
3.1.7 Pelaksanaan Unsur Kewilayahan III-253
3.1.8 Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum III-317
3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan III-325

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Aggaran Sebelumnya III-332

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan IV-1

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan Upaya Penyelesaian IV-1

BAB V PENUTUP

5.1 Penghargaan V-1

5.2 Penutup V-3

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa / Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta	1-24
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk tahun 2023 Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta	1-25
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Usia Muda, Produktif dan Usia Tua Menurut Kelompok Umur Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	1-27
Tabel 1.4	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1-28
Tabel 1.5	Jumlah ASN Bedasarkan Jenis Kelamin	1-30
Tabel 1.6	Jumlah ASN Bedasarkan Jenis Kelamin	1-32
Tabel 1.7	Jumlah ASN Berdasarkan Usia Berdasarkan Golongan	1-33
Tabel 1.8	Jumlah ASN Berdasarkan Usia Berdasarkan Pendidikan	1-35
Tabel 1.9	Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2023	1-36
Tabel 1.10	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023	1-38
Tabel 1.11	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023	1-40
Tabel 2.1	Target Realisasi dan Kontribusi Kelompok Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023	II-6
Tabel 2.2	Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian PAD di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 …….....	II-7
Tabel 2.3	Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Pendapatan Transfer di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023	II-8
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023	II-14
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 …….....	II-15
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 …….	II-17
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 ……..	II-17
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 ….....	II-18
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 …….....	11-20
Tabel 3.1	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2023	III-2
Tabel 3.2	Rekapitulasi Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	III-2
Tabel 3.3	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023	III-6
Tabel 3.4	Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023	III-73
Tabel 3.5	Pelaksanaan Urusan Pilihan Tahun 2023	III-165

Tabel 3.6	Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2023 …	III-202
Tabel 3.7	Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2023 ….	III-219
Tabel 3.8	Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023	III-249
Tabel 3.9	Pelaksanaan Unsur Kewilayahan Tahun 2023 ……	III-254
Tabel 3.10	Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2023 ……...	III-318
Tabel 3.11	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan Tahun 2023 …….	III-326
Tabel 3.12	Tindak Lanjut Catatan/Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2021 ……	III-333
Tabel 5.1	Penghargaan/Prestasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ……...	V-I

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Peta Orientasi Kabupaten Purwakarta …….	1-21
Gambar 1.2	Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta …….....	1-23
Gambar 1.3	Komposisi Penduduk Purwakarta …….……...	1-26
Gambar 1.4	Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur ..	1-27
Gambar 1.5	Grafik Pertumbuhan Penduduk ……..…….....	1-28
Gambar 1.6	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin …….....	1-31
Gambar 1.7	Jumlah ASN Berdasarkan Usia …….....	1-32
Gambar 1.8	Jumlah ASN Berdasarkan Usia Berdasarkan Golongan ……..	1-34
Gambar 1.9	Jumlah ASN Berdasarkan Usia Berdasarkan Pendidikan ……	1-35
Gambar 1.10	Bagan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 …….....	1-36
Gambar 1.11	Bagan Realisasi Belanja Daerah dan Belanja Transfer Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	1-39

BAB I
PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkenaan dengan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagaimana diatur pada Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud berkenaan dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan; kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

Adapun hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan berupa capaian kinerja tugas pembantuan yang diterima dari pemerintahan pusat serta capaian kinerja tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

LKPJ Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2023 ini secara substansi merupakan hasil akhir evaluasi dari capaian kinerja pembangunan tahunan Kabupaten Purwakarta sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

1.1. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Kedudukan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1867);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 4);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Bank Jabar Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 8);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 11)
54. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
55. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

1.2. VISI DAN MISI

Visi Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah:

"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA".

Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun Penjelasan dari Visi **"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"** ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-konstektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila.

Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa.

Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai semangat kemanusiaan yang perwujudannya diwujudkan pada semangat toleransi terhadap berbagai problem-problem kemanusiaan, mulai dari problem bencana di berbagai daerah, toleransi kemanusiaan pada kehidupan bertetangga kita, persoalan kemiskinan, persoalan kebodohan, persoalan ketertinggalan, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, semangat solidaritas sosial dan perasaan terenyuh oleh berbagai penderitaan yang dialami orang lain. Semangat itulah yang kita miliki. Nilai-nilai persatuan perwujudannya ada pada semangat membangun kebersamaan nilai dalam bekerja setiap saat.

Nilai semangat kerakyatan perwujudannya ada pada tatanan kehidupan demokrasi yang semakin terbuka. Demikian juga dengan nilai semangat keadilan. Semangat keadilan harus ada perwujudannya dalam bangunan sistem penggarapan yang adil merata di seluruh daerah di Indonesia, yaitu dengan membangun sistem pembangunan antar kota dengan pedesaan secara adil, sehingga tidak ada lagi daerah yang jauh tertinggal, tetapi ada daerah yang sangat maju. Membangun sistem keadilan antar pusat dan daerah, membangun sistem keadilan antar provinsi dengan daerah, dan membangun sistem antara kabupaten dengan desa-desa yang kita wujudkan dengan semangat pembangunan otonomisasi pedesaan, otonomisasi daerah kabupaten. Seiring dengan semangat keadilan pembangunan, distribusi ekonomi yang merata, sistem pembangunan yang berbasis pada kewilayahan dan sistem

pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud.

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Dengan merujuk ketentuan yang sama seperti di awal Bab ini, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat.

Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju.

MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pengertian dari Misi ini adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejuangan. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan meliputi juga aspek jasmaniah, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keadaan gizinya.

Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam mem-bangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut terutama tahap awal sangat mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian yang sungguh-sungguh akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya, serta sehat jasmani dan rohaninya.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan juga bertujuan menunjang upaya mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan andal, serta mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang akan berimbas pada pemerataan dalam skala pembangunan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan nasional. Keberhasilan dalam pemerataan pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Pada masa pembangunan sekarang ini fungsi dan peran pemuda sangat strategis yaitu sebagai kekuatan moral, agen perubahan dan kontrol sosial dalam proses pembangunan sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya. Namun seiring perkembangan jaman, membangun pemuda bukanlah hal yang mudah dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan

teknologi informasi. Kemudahan akses informasi dalam segala bidang kehidupan telah mengubah gaya hidup dan pola pikir pemuda menjadi generasi yang malas berpikir, ingin serba instant dan tidak ingin bekerja keras karena dimanjakan oleh teknologi, apatis terhadap lingkungan bahkan yang lebih parah lagi adalah maraknya pergaulan bebas dan penyalahgunaan Narkoba. Jika kondisi ini terus "dibiarkan dan dibenarkan" pemuda Indonesia akan kehilangan jati dirinya sendiri yang berimplikasi pada semakin kaburnya arah pembangunan bangsa dimasa depan.

Oleh itu karakter pemuda di Kabupaten Purwakarta harus terus dikuatkan dan diberdayakan agar mampu memiliki karakter kepemimpinan yang kuat serta mimiliki daya saing guna menghadapi segala tantangan, kebutuhan, tuntutan di era global seperti saat ini. Salah satu upaya pembentukan generasi yang tangguh adalah olahraga yang merupakan salah satu media strategis bagi pembentukan karakter bangsa, karena dalam olahraga selalu ditanamkan semangat kerjasama dan sportifitas. Dua karakter inilah yang menjadi dasar utama dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan olahraga dapat membentuk karakter bangsa karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat dan produktif.

Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa untuk membangun pemuda diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasar pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam undang-undang itu pula mengamanatkan Pemerintah bertanggungjawab untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

MISI 2 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Masyarakat dan pemerintah daerah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan wilayah dan saling bersinergi dengan provinsi dan nasional. Penyusunan program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dikembangkan secara terpadu dan efisien, sejalan dengan pekembangan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perlu makin ditingkatkan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

MISI 3 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN.

Pengertian dari Misi ini adalah terwujudnya interkonektiftas antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik fokus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pengembangan konsep pembangunan perumahan permukiman, kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan permukiman, dan

penyediaan dan pengelolaan air bersih secara merata di perkotaan dan perdesaan. Pengembangan kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusahaan, objek dan daya tarik wisata, serta usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pengembangan objek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, seperti biro perjalanan, jasa konvensi, penyediaan akomodasi dan penyediaan transportasi wisata, akan berfungsi di samping meningkatkan daya tarik bagi berkembangnya jumlah wisatawan juga mendukung pengembangan objek dan daya tarik wisata baru.

Hasil yang optimal akan diperoleh apabila upaya pengembangan tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai. Dengan memperhatikan ciri tersebut, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dilakukan secara terpadu antara berbagai komponen yang menentukan dan menunjang keberhasilannya, seperti objek dan daya tarik wisata, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, dan industri cenderamata, serta melibatkan koperasi, swasta, dan masyarakat luas. Selain itu, sumber daya manusia yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan sangat penting untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan melalui pengembangan kekayaan alam Purwakarta serta kekayaan budaya sunda dan suku bangsa yang beraneka ragam, juga harus mampu menjadi sarana untuk mengejawantahkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia, melestarikan dan memperkukuh jati diri dan kemandirian daerah, serta dapat menjadi peranti untuk ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial guna mewujudkan perdamaian yang abadi antar suku dalam tatanan kebhinekaan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia. Pembangunan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek pembangunan, baik ekonomi, teknologi, sosial maupun budaya, dan amat erat kaitannya dengan pembangunan berbagai sektor seperti industri, pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi, perhubungan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan dan hubungan luar negeri, teknologi, dunia usaha, dan pembangunan daerah.

MISI 4 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG KOKOH BERBASIS DESA.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis perdesaan perlu dilakukan secara terpadu, dengan meningkatkan peran serta, pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakatnya. Selanjutnya, sebagai perwujudan perekonomian rakyat yang berimbang dan seimbang serta proporsional, pembangunan perkotaan dan perdesaan diselenggarakan dengan memperhatikan tingkat pengembangan dan penyerasian laju pertumbuhan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional, perkotaan dan perdesaan saling melengkapi dan membentuk satu sistem yang saling terkait. Keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan terlihat dalam penyediaan bahan pokok, fasilitas dan pelayanan dasar, penyediaan bahan baku, serta bahan setengah jadi dan sumber daya manusia untuk industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ini merupakan dasar bagi

pertumbuhan yang serasi antara desa dan kota lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta.

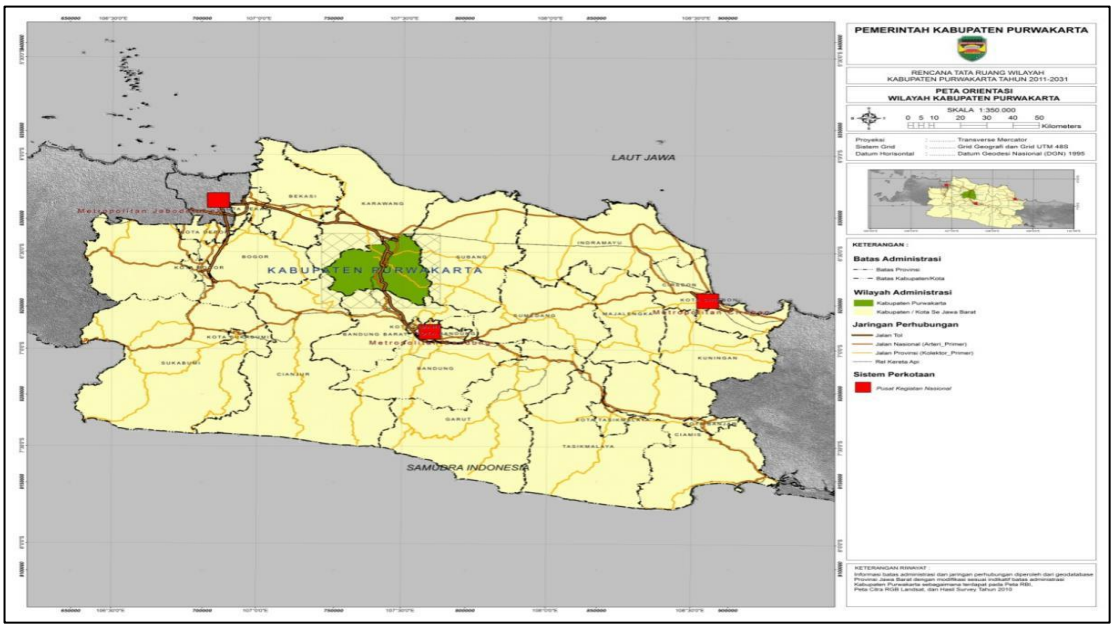
Dengan memperhatikan karakteristik kota dan desa, setiap pelaksanaan pembangunan di daerah perkotaan dan perdesaan akan berbeda sesuai dengan ciri dan permasalahan yang ada. Keragaman ini membutuhkan cara pengelolaan pembangunan yang lebih terkoordinasi dan lebih terpadu berdasarkan karakteristiknya. Kedua hal ini akan menjadi ciri yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di perkotaan dan perdesaan.

1.3. DATA UMUM DAERAH

1.3.1. Data Geografis Wilayah

Secara geografis wilayah Kabupaten Purwakarta terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 107^{o}30'-107^{o}40' Bujur Timur dan 6^{o}25'-6^{o}45' Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Purwakarta terletak dipersimpangan jalan nasional yang menghubungkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dan yang menghubungkan Jakarta dengan Cirebon. Peta orientasi Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1
Peta Orientasi Kabupaten Purwakarta



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta, 2022.

Kabupaten Purwakarta berbatasan dengan 5 kabupaten, yaitu dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.

Luas wilayah Kabupaten Purwakarta 97.172 ha atau 2,81 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa, 9 kelurahan, 505 dusun, 1.125 Rukun Warga (RW), dan 3.498 Rukun Tetangga (RT).

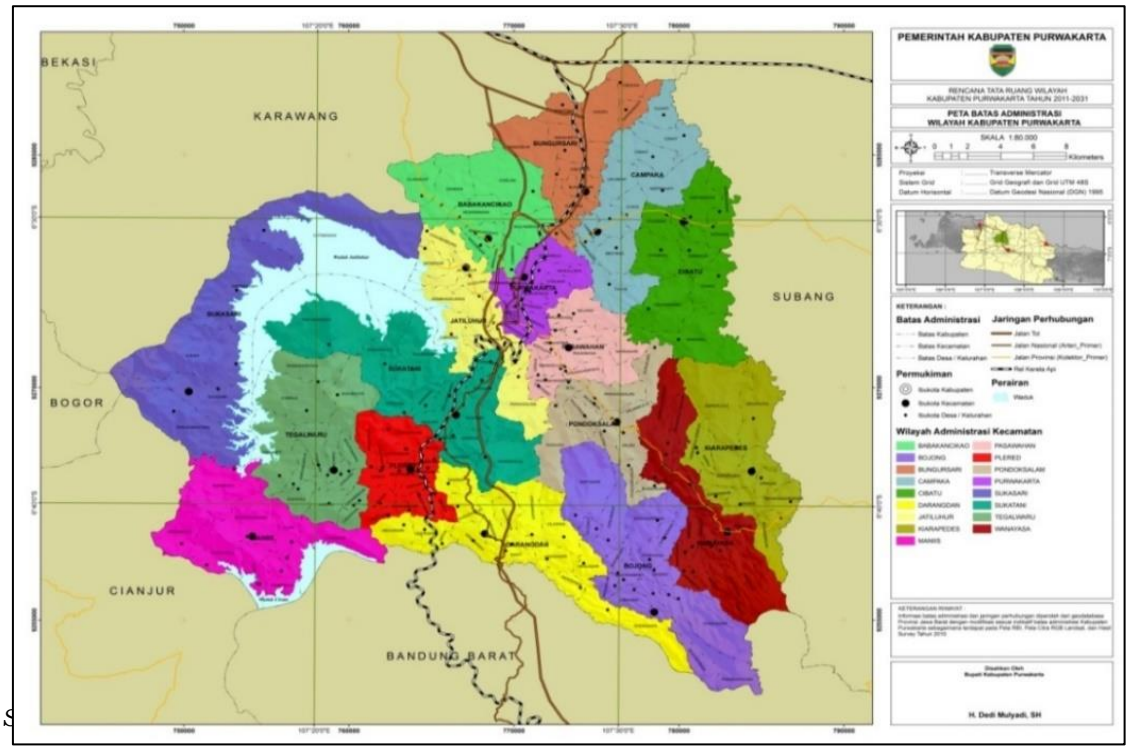
Ditinjau dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Bagian Barat, Bagian Selatan dan Bagian Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25-500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah Bagian Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan Sukasari dimana sebagian wilayahnya merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda yang mempunyai ketinggian 107 mdpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 mdpl. Wilayah bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200 mdpl.

Dilihat dari Aspek Topografi, Kabupaten Purwakarta dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah, yaitu:

a. Wilayah Pegunungan, yang terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian 1.100-2.036 mdpl, dan meliputi 29,73% dari total luas wilayah.
b. Wilayah Perbukitan, yang terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 500-1.100 mdpl, dan meliputi 33,80% dari total luas wilayah.
c. Wilayah Dataran, yang terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 35-499 mdpl, dan meliputi 36,47% dari total luas wilayah.

Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.2
Peta Administrasi Kabupaten Purwakarta



Luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta

Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa/Kel
	km²	**%**	
1. Jatiluhur	60,11	6,19	10
2. Sukasari	92,01	9,47	5
3. Maniis	71,64	7,37	8
4. Tegalwaru	73,23	7,54	13
5. Plered	31,48	3,24	16
6. Sukatani	95,43	9,82	14
7. Darangdan	67,39	6,94	15
8. Bojong	68,69	7,07	14
9. Wanayasa	56,55	5,82	15
10. Kiarapedes	52,16	5,37	10
11. Pasawahan	36,96	3,80	12
12. Pondoksalam	44,08	4,54	11
13. Purwakarta	24,83	2,56	10
14. Babakancikao	42,40	4,36	9
15. Campaka	43,60	4,49	10
16. Cibatu	56,50	5,81	10
17. Bungursari	54,66	5,63	10
Jumlah	**971,72**	**100,00**	**192**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, 2022.

Dari tabel di atas terlihat bahwa kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Sukatani yaitu seluas 95,43 km² atau 9,82%, sedangkan kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Purwakarta yaitu seluas 24,83 km² atau 2,56%. Untuk jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Plered sebanyak 16 desa, sedangkan Kecamatan Sukasari merupakan kecamatan yang paling sedikit jumlah desanya yaitu 5 desa.

1.3.2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri semester II, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebanyak 1.036.768 jiwa terdiri dari 525.101 laki-laki dan 511.667 perempuan. Bila dibandingkan dengan jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sebanyak 1.020.994 jiwa terdiri dari 517.156 laki-laki dan 503.838 perempuan, berarti mengalami peningkatan sebesar 15.774 jiwa. hal ini disebabkan oleh faktor pertumbuhan penduduk alami dan dipengaruhi juga oleh faktor migrasi penduduk.

Sedangkan berdasarkan gender, penduduk Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 hampir seimbang, yaitu laki-laki sebanyak 50,65% dan perempuan sebanyak 49,35%, seperti terlihat pada tabel berikut:

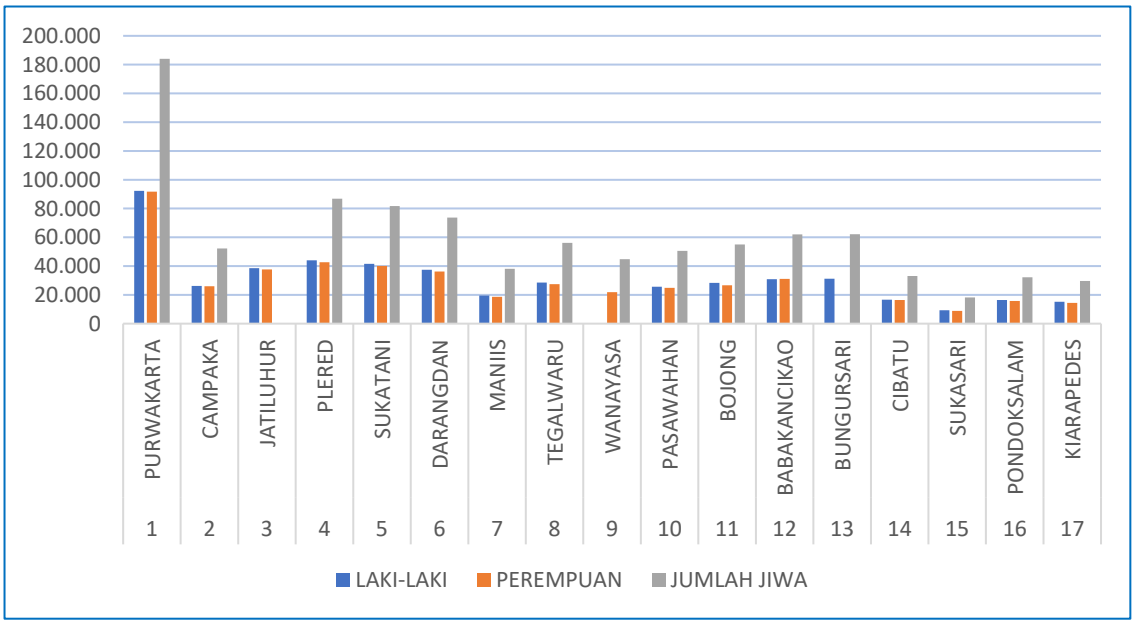
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Tahun 2023
Menurut Kecamatan di Kabupaten Purwakarta

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	PURWAKARTA	92.326	91.748	184.074
2	CAMPAKA	26.237	25.983	52.220
3	JATILUHUR	38.535	37.723	76.258
4	PLERED	44.056	42.727	86.783
5	SUKATANI	41.571	40.151	81.722
6	DARANGDAN	37.462	36.264	73.726
7	MANIIS	19.528	18.603	38.131
8	TEGALWARU	28.599	27.486	56.085
9	WANAYASA	22.970	21.828	44.798
10	PASAWAHAN	25.705	24.900	50.605
11	BOJONG	28.377	26.677	55.054
12	BABAKANCIKAO	30.942	31.059	62.001
13	BUNGURSARI	31.206	30.95'8	62.164
14	CIBATU	16.621	16.482	33.103
15	SUKASARI	9.331	8.835	18.166
16	PONDOKSALAM	16.398	15.787	32.185
17	KIARAPEDES	15.237	14.456	29.693
JUMLAH TOTAL		**525.101**	**511.667**	**1.036.768**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, 2023.

Berikut adalah Komposisi Penduduk di Kabupaten Purwakarta yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.3
Komposisi Penduduk Purwakarta



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta (Data Diolah), 2023.

Data jumlah penduduk yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data yang disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada perbedaan, hal ini dikarenakan tidak samanya indikator yang digunakan, misalnya BPS tidak menghitung penduduk yang tidak berada di Kabupaten Purwakarta minimal selama 6 bulan, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap menghitung penduduk tersebut selama masih mempunyai KTP dan terdaftar di Kartu Keluarga. Penyebaran penduduk Kabupaten Purwakarta menurut kelompok umur Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

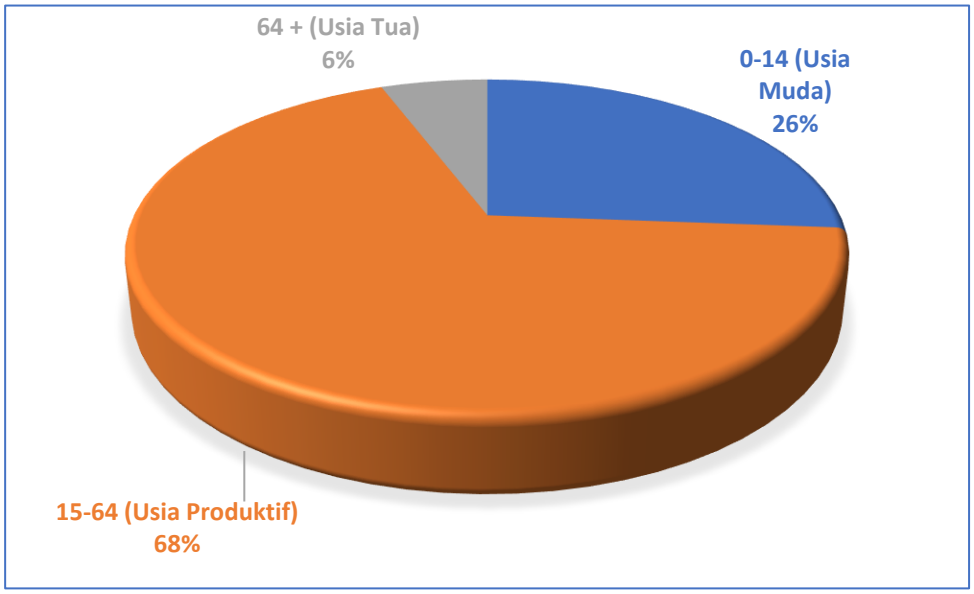
Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Usia Muda, Produktif dan Usia Tua
Menurut Kelompok Umur Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Kelompok Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14 (Usia Muda)	140.365	131.216	271.581
15-64 (Usia Produktif)	355.656	349.765	705.421
64 + (Usia Tua)	29.080	30.686	59.766
JUMLAH	**525.101**	**511.667**	**1.036.768**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, 2023.

Berikut adalah Persentase Usia Penduduk di Kabupaten Purwakarta yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.4
Persentase Usia Penduduk



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta (Data Diolah), 2023.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang terbanyak antara usia 15-64 tahun yaitu sebesar 68%, hal ini menunjukkan penduduk Kabupaten Purwakarta berada dalam usia produktif.

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Data aggregat jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2017 -2023 dan keadaan Laju Pertambahan Jumlah Penduduk (LPP) berdasarkan mampir (lahir, mati, pindah dan datang) sebagaimana tabel berikut:

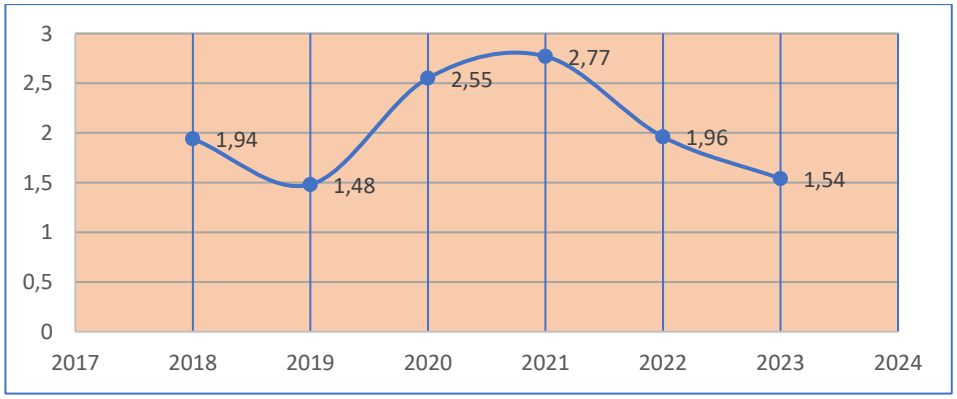
Tabel 1.4
Laju Pertambahan Penduduk (LPP)

No.	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah (Jiwa)	LPP	Ket
		Laki-Laki	Perempuan			
1	2018	473.558	462.656	936.214	1,94	% dari Tahun 2018
2	2019	479.466	470.600	950.066	1,48	
3	2020	493.002	481.302	974.304	2,55	
4	2021	506.679	494.659	1.001.338	2,77	
5	2022	517.156	503.838	1.020.994	1,96	
6	2023	525.101	511.667	1.036.768	1,54	
Rata-Rata LPP					**2,04**	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, 2023.

Berikut adalah Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Purwakarta yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.5
Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta (Data Diolah), 2023.

1.3.4. Jumlah PNS

Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu unsur penting dalam reformasi birokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-Undang ini mengamanatkan perubahan pengelolaan sumber daya aparatur dari perspektif lama yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai, menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis (*strategic human resource management*). Perspektif baru ini bertujuan menciptakan sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan dinamika perubahan dan misi ASN.

Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan kondisi ASN yang ideal adalah membentuk aparatur negara yang profesional, visioner, mampu bersinergi dengan *stakeholder* lain, berkinerja tinggi, akuntabel, bersih dari praktik KKN, independen dari kepentingan politik, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK adalah merupakan warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Salah satu amanat Pemerintah Pusat yang diselenggarakan adalah dianutnya sistem merit. Penerapan sistem merit bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mendapatkan ASN profesional, berintegritas, berkompeten, dan berkinerja secara optimal. Formasi ASN yang berdasarkan pada sistem merit akan menjadi mesin penggerak untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023.

Pada Tahun 2023 jumlah Jumlah ASN Kabupaten Purwakarta sebanyak 6.909 pegawai. Terdiri dari 6.515 PNS dan 394 PPPK. Apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai pada tahun 2022 dengan jumlah 6.935 pegawai, maka terdapat Penurunan sebanyak 26 Pegawai.

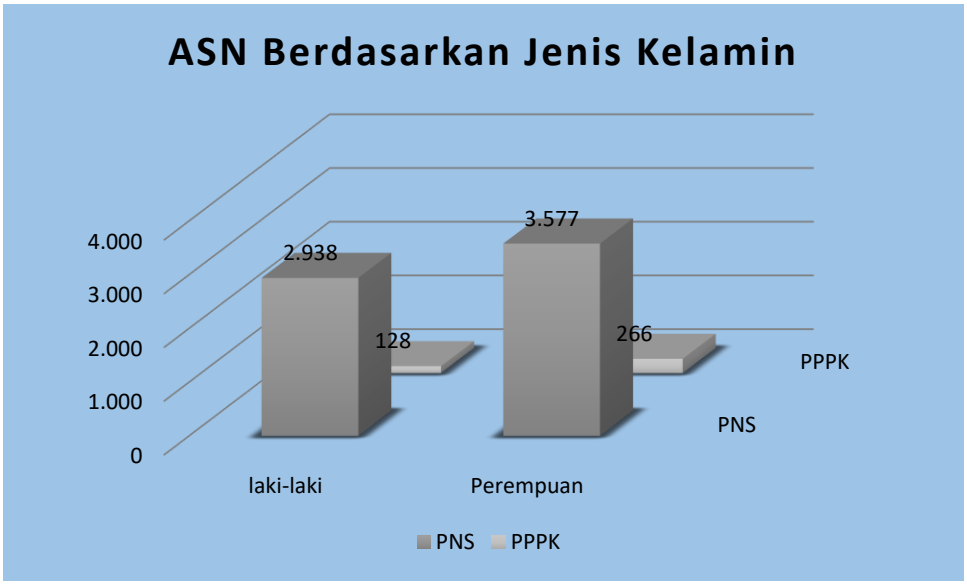
1. **ASN Pemerintah Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jenis Kelamin.**

   Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dikaitkan dengan isu pengarusutamaan gender menunjukkan angka yang cukup proporsional dan berimbang. Pada tahun 2023, dari 6.909 ASN, terdiri dari 3.066 laki-laki atau sebanyak 44%, dan 3.843 perempuan atau sebanyak 56%. Secara lebih rinci kondisi tersebut diuraikan pada Tabel dan gambar dibawah ini:

Tabel 1.5
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

PEGAWAI	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
PNS	2.938	3.577	6.515
PPPK	128	266	394
JUMLAH			**6.909**

Gambar 1.6
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin



Keseimbangan proporsi PNS laki-laki dan perempuan masih terus ditingkatkan untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam jajaran birokrasi di Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

2. **ASN Pemerintah Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Usia.**

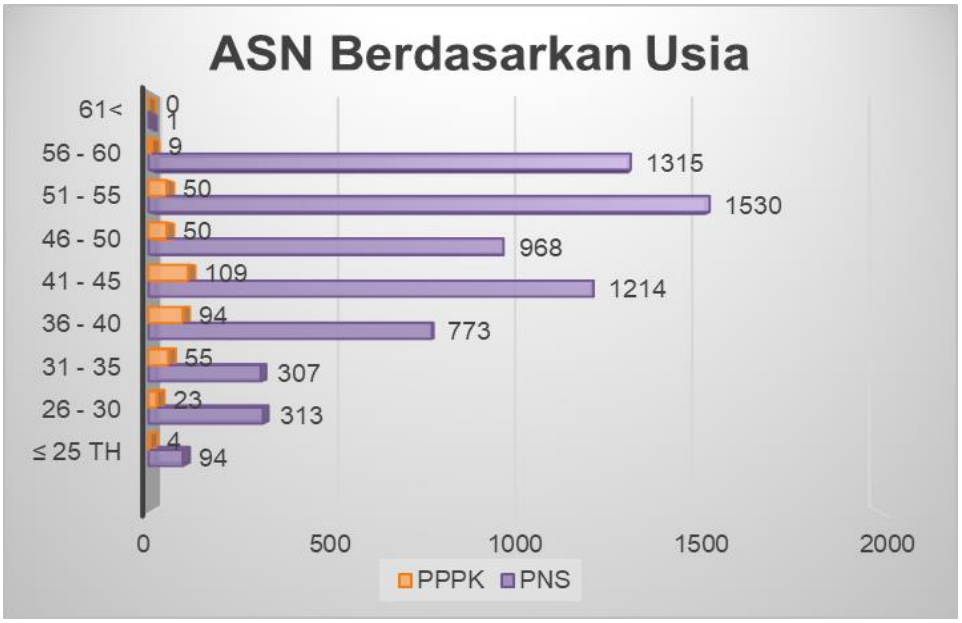
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang berjumlah 6.909 orang terdistribusi di 47 Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dari total ASN tersebut, kelompok usia 51-55 tahun masih mendominasi jumlah ASN berdasarkan usia dengan 1.580 orang terdiri dari 1.530 PNS dan 50 PPPK. Dari total ASN tersebut Jumlah ASN berdasarkan usia, kelompok usia 51-55 tahun masih mendominasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok pegawai tersebut akan pensiun dalam kurun waktu 3-7 tahun mendatang. Sebagai upaya antisipasi, Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus sudah siap dengan upaya pengadaan pegawai baru,

baik itu yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pelamar umum maupun melalui perpindahan guna memenuhi kebutuhan organisasi. Secara rinci data ASN Purwakarta berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 1.6
Jumlah ASN Berdasarkan Usia

PEGAWAI	USIA									JUMLAH
	>25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	51-60	61<	
PNS	94	313	307	773	1214	968	1530	1315	1	6.515
PPPK	4	23	55	94	109	50	50	9	0	394
JUMLAH										**6.909**

Gambar 1.7
Jumlah ASN Berdasarkan Usia



Berdasarkan Gambar 1.7, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta didominasi usia 41 tahun ke atas dengan jumlah sebanyak 5.246 pegawai. Adapun jumlah PNS berusia 20-40 tahun sebanyak 1.663 pegawai. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan usia ASN yang menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kompetensi PNS di setiap kelompok usia ASN.

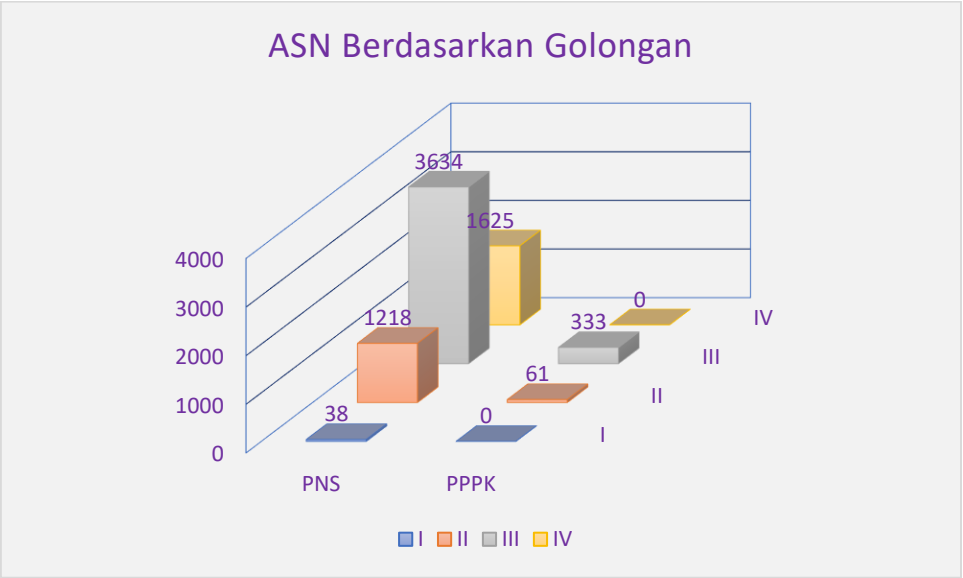
3. ASN Pemerintah Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Golongan

Distribusi pegawai antar golongan secara proporsional dapat menunjang peningkatan profesionalisme ASN. Jumlah Pegawai Berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 1.7
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

PEGAWAI	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	JUMLAH
PNS	38	1218	3634	1625	6.515
PPPK	0	61	333	0	394
JUMLAH					**6.909**

Gambar 1.8
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan



Komposisi ASN Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagian besar merupakan pegawai golongan III dengan persentase sebanyak 3.967 orang (57,42%), diikuti dengan golongan IV sebanyak 1.625 Orang (23,5%), golongan II sebanyak 1.279 orang (18,51%) dan golongan I sebanyak 38 Orang (0,55%).

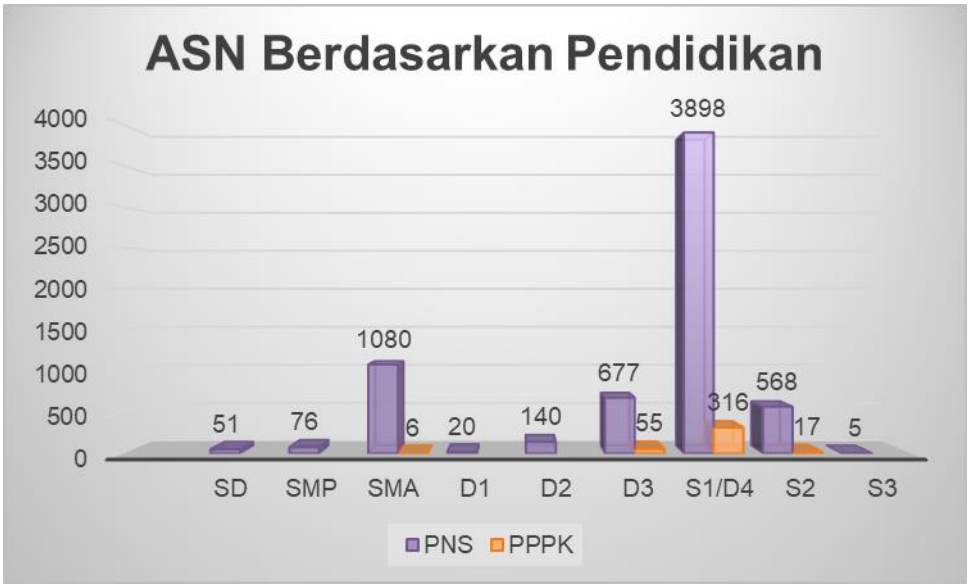
4. ASN Pemerintah Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pendidikan

Secara umum kondisi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai apabila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir. Kondisi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta menurut tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagaimana Tabel dan gambar dibawah ini:

Tabel 1.8
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

PEGAWAI	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	JUMLAH
PNS	51	76	1080	20	140	677	3898	568	5	6.515
PPPK	0	0	6	0	0	55	316	17	0	394
JUMLAH										**6.909**

Gambar 1.9
Jumlah ASN Berdasarkan Usia Berdasarkan Pendidikan



Tingkat Pendidikan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagian besar berpendidikan Diploma IV/Sarjana (S1) yaitu sebanyak 4.214 orang.

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Purwakarta terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer.

Adapun Realisasi Pendapatan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada tabel sebagai berikut:

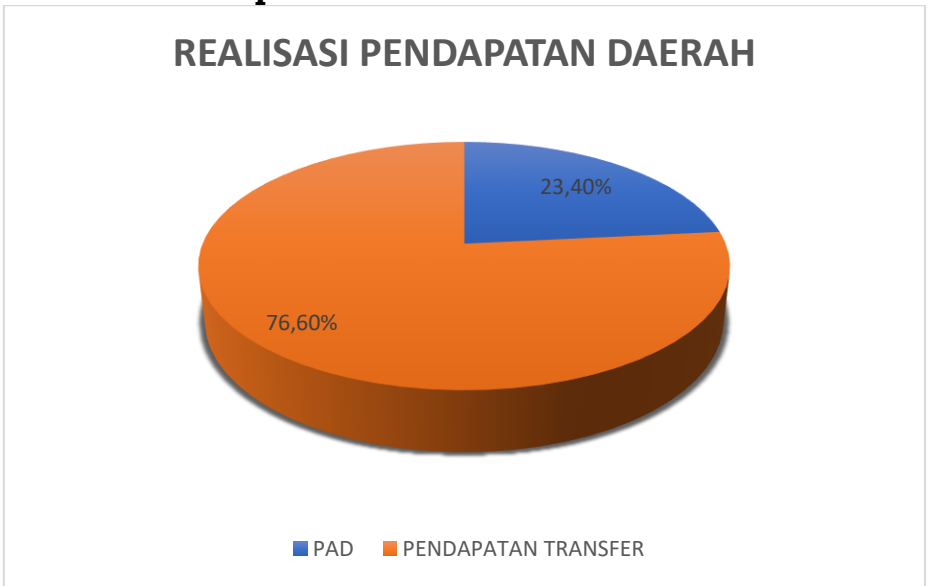
Tabel 1.9
Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	2.632.274.264.199,00	2.371.773.861.872,00	90,10
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	788.084.780.295,00	554.854.389.899,00	70,41
4.1.1	Pajak Daerah	510.759.250.000,00	338.160.104.269,00	66,21
4.1.2	Retribusi Daerah	41.449.934.774,00	20.397.567.606,00	49,21
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.717.532.000,00	7.427.509.729,00	76,43
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	226.158.063.521,00	188.869.208.295,00	83,51
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	1.844.189.483.904,00	1.816.919.471.973,00	98,52
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.546.734.146.787,00	1.534.341.225.263,00	99,20
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	297.455.337.117,00	282.578.246.710,00	95,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023 (unaudited)

Bagan pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.10
Bagan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023



Sumber: LRA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta (Data Diolah), 2023.

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. Belanja Operasi

   Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja Modal

   Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja Tidak Terduga

   Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer

   Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Adapun Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.10

Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

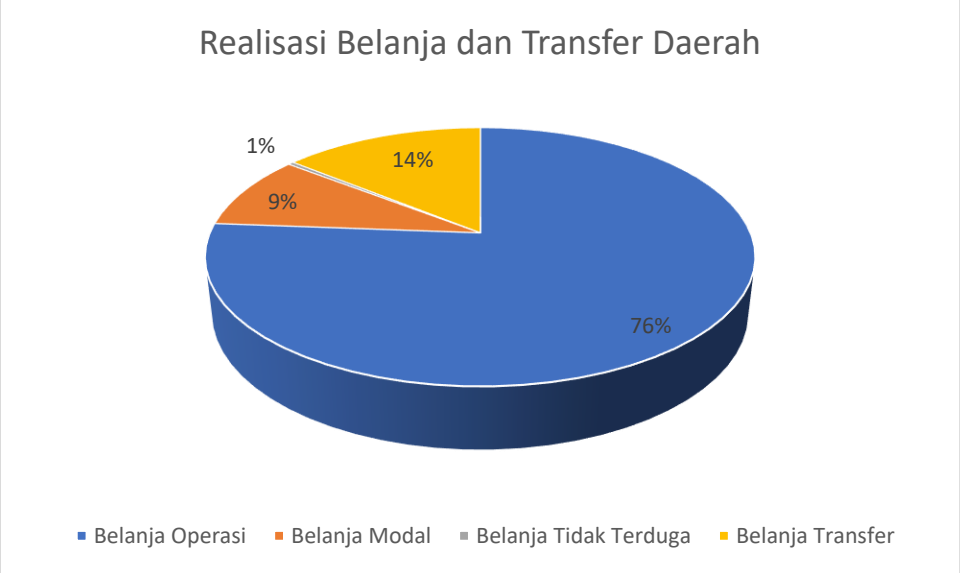
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5	**BELANJA DAERAH**	**2.683.118.098.212,00**	**2.385.366.153.224,00**	**88,90**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.046.709.839.124,00**	**1.817.915.407.513,00**	**88,82**
5.1.1	Belanja Pegawai	982.096.972.847,00	884.567.140.660,00	90,07
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	981.546.686.439,00	856.592.355.153,00	87,27
5.1.5	Belanja Hibah	79.417.369.338,00	74.293.778.700,00	93,55
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.648.810.500,00	2.462.133.000,00	67,48
5.2	**BELANJA MODAL**	**269.405.874.336,00**	**221.687.313.491,00**	**82,29**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.962.113.900,00	987.440.000,00	24,92
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.160.325.644,00	95.977.193.325,00	81,23
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.785.476.503,00	62.085.346.580,00	85,30
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.309.152.233,00	51.045.921.061,00	76,98
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.188.806.056,00	11.591.412.525,00	141,55
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**16.598.701.646,00**	**9.290.031.314,00**	**55,97**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	16.598.701.646,00	9.290.031.314,00	55,97
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**350.403.683.106,00**	**336.473.400.906,00**	**96,02**
5.4.1	Transfer Bagi Hasil	44.962.193.106,00	43.864.193.106,00	97,56
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	305.441.490.000,00	292.609.207.800,00	95,80

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d 31 December 2022 (unaudited)

Bagan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.11
Bagan Realisasi Belanja Daerah dan Belanja Transfer
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta (Data Diolah), 2023.

1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Adapun Realisasi Pembiayaan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.12
Realisasi Pembiayaan Daerah Menurut Jenis Pembiayaan
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
7.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**55.843.834.013,00**	**55.843.834.013,00**	**100,00**
7.1.1	Penggunaan SILPA	55.843.834.013,00	55.843.834.013,00	100,00
7.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**100,00**
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**50.843.834.013,00**	**50.843.834.013,00**	**100,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**37.251.937.661,00**	**-**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023 (unaudited)

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tertanggal 30 Desember 2022, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tertanggal 30 Desember 2022. Setelah penetapan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan 3 kali pergeseran anggaran dan Perubahan Anggaran, yaitu:

1. Pergeseran Parsial I ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tertanggal 30 Januari 2023. Perubahan Parsial I dilaksanakan untuk mengakomodir Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, efisiensi belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pengurangan Pagu SiLPA Penerima Bantuan Iuran (PBI) Tahun 2022, Penganggaran Pembayaran atas Perjanjian/Kontrak/ Perikatan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan pada tahun anggaran 2022 yang melampaui tahun anggaran, dan

Penambahan Pagu Belanja Tidak Terduga.

2. Pergeseran Parsial II ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tertanggal 14 April 2023. Perubahan Parsial II dilaksanakan untuk mengakomodir Pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
3. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tertanggal 31 Oktober 2023, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tertanggal 31 Oktober 2023. Setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan 1 kali pergeseran anggaran.
4. Pergeseran Parsial III ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tertanggal 24 November 2023. Perubahan Parsial III dilaksanakan untuk mengakomodir Bantuan Keuangan bersifat Khusus Provinsi Jawa Barat.

2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

2.1.1 Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2023, diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan), Pendapatan Transfer (Transfer Pemerintah Pusat dan Antar Daerah), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020 sampai sekarang masih menyisakan dampak yang signifikan terhadap pencapaian target pembangunan daerah, khususnya target pendapatan daerah untuk membiayai kebutuhan belanja pelaksanaan pembangunan. Capaian pendapatan daerah relatif menurun akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi terhadap aspek perekonomian daerah, namun demikian upaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah meskipun dengan keadaan dan situasi yang tidak bisa diprediksikan, agar

pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan normal dan tercapai secara optimal.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purwakarta antara lain:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana transfer dan pendapatan lainnya yang sah;
3. Merasionalisasikan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
4. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
6. Meningkatkan dan mengoptimalisasi sarana dan prasarana teknis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
7. Mengoptimalisasi kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
8. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima;
9. Meningkatkan iklim investasi dalam penanaman modal di daerah yang ramah, cepat, transparan dan mudah diakses;

10. Meningkatkan promosi daerah dan penataan destinasi wisata yang berpotensi terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan perkembangan penyebaran Covid-19;
11. Meningkatkan penataan sarana dan prasarana lokasi/tempat yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan daerah dari sektor retribusi.

Sedangkan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan;
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada obyek pendapatan yang menjadi hak dan kewenangan Kabupaten Purwakarta; dan
4. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk merealisasikan secara optimal penerimaan Pendapatan Daerah dari pos Pendapatan Transfer dilakukan dengan cara melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat penyaluran dana transfer secara tertib dan tepat waktu.

2.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Purwakarta terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD),

2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai aturan yang berlaku.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan sebesar 90,10 persen dari target yang telah ditetapkan. Target, realisasi dan kontribusi masing-masing kelompok pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Target, Realisasi dan Kontribusi Kelompok Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

KOD REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.632.274.264.199**	**2.371.773.861.872**	**90,10**
4.1	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	788.084.780.295	554.854.389.899	70,41
4.2	Pendapatan Transfer	1.844.189.483.904	1.816.919.471.973	98,52

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d 31 December 2023 (unaudited)

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp788.084.780.295,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp554.854.389.899,00 atau sebesar 70,41 persen dari target yang telah ditetapkan, dimana Sektor Lain-lain PAD yang Sah menjadi penyumbang utama yaitu sebesar 83,51persen terhadap PAD. Target, realisasi dan kontribusi masing-masing rincian PAD terhadap total PAD Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian PAD
di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

KOD REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	788.084.780.295	554.854.389.899	70,41
4.1.1	Pajak Daerah	510.759.250.000	338.160.104.269	66,21
4.1.2	Retribusi Daerah	9.919.455.937	8.233.516.575	83,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.717.532.000	7.427.509.729	76,43
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	226.158.063.521	188.869.208.295	83,51

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d 31 December 2023 (unaudited)

Pada Pendapatan Transfer, dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.844.189.483.904,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp1.816.919.471.973,00 atau 98,52 persen dari target yang ditetapkan. Adapun Pendapatan Transfer ini terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang realisasinya mencapai sebesar Rp1.338.050.912.063,00 atau 98,71 persen; dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang mencapai sebesar Rp282.578.246.710,00 atau 95,00 persen dari target yang ditetapkan Kontribusi masing-masing rincian Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Target, Realisasi, dan Kontribusi
Rincian Pendapatan Transfer
di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

KOD REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	1.844.189.483.904	1.816.919.471.973	98,52
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.355.529.282.787	1.338.050.912.063	98,71
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	297.455.337.117	282.578.246.710	95,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d 31 December 2023 (unaudited)

2.1.3 Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

Pada Tahun Anggaran 2023, SKPD mengalami beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja keuangan. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Target Pendapatan yang ditetapkan belum terukur secara rasional dengan memperhatikan pertumbuhan rasio perpajakan daerah.
2. Ketaatan Wajib Pajak terhadap pembayaran pajak masih rendah.
3. Sumber Daya Manusia dan Sarana prasarana yang masih terbatas.
4. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Pajak Reklame Hilangnya Beberapa Potensi Pajak Reklame Dampak Dari Kegiatan Politik Yang Akan Berlangsung Pada Tahun 2024 Sehingga Tidak Dapat Dipungut Pajaknya, Berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022.
5. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Pajak BPHTB antara lain:
   - Karena Sistem Bphtb Termasuk Self-Assessment (Sesuai Uu No. 1 Th.2022) Maka Nilai Transaksi/

Harga Pasar Yang Dicantumkan Oleh Wajib Pajak Tidak Mencerminkan Harga Riil Pembelian;

- Njop Di Kabupaten Purwakarta Masih Sangat Rendah Dari Harga Riil Di Lapangan;
- Masih Adanya Transaksi Utang-Piutang Di Lapangan Dengan Jaminan Tanah Dan Ditemukan Transaksi tahun-tahun Sebelumnya Yang Baru Mengajukan Validasi Bphtb Tahun Ini Sehingga Harga Di Lapangan Tidak Sesuai;
- Sulit Untuk Mendapatkan Bukti Transaksi Yang Riil Di Lapangan Sehingga Nilai Transaksi/ Harga Pasar Yang Dicantumkan Tidak Sesuai.

6. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Pajak MBLB antara lain:
   - Tidak Adanya Potensi Baru
   - Sumber Daya Yang Terbatas
   - Beberapa Wajib Pajak Tutup, jumlah Wajib Pajak Semula Ada 15, Berkurang 2 Yang Sudah Tidak Produksi.

Adapun solusi untuk pemecahan masalah pada Pendapatan daerah, meliputi:

1. Penyusunan 1 perda PDRD dan 16 perbup dan kepbup turunan dari UU No.1 ttg HKPD.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta menerapkan stimulus penghapusan sanksi administrasi yakni relaksasi denda pajak disetiap tahunnya dengan tujuan agar Wajib Pajak merasa ringan dalam membayar pajak dimana denda pajak tidak dikenakan jika Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu.
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta menjalin Kerjasama dengan Pihak Kejaksaan dalam

Upaya meningkatkan Realisasi piutang pajak daerah.

4. Badan Pendapatan daerah Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan Operasi Sisir dan Uji Petik dalam Upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah dengan terjun langsung kelapangan untuk semua mata pajak, dengan maksud mempercepat proses pembayaran dan memperoleh nilai real dilapangan terkait perolehan pendapatan Wajib Pajak dengan yang dilaporankan dan dibayarkan.
5. Badan pendapatan Daerah saat ini sedang melakukan usaha membuat MOU dengan Badan Pertanahan Nasional dalam Upaya Optimaisasi BPHTB.
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta telah melakukan pemasangan Tapping Box dalam Upaya optimalisasi pencapaian Pajak khususnya pada mata pajak Hotel, Resto dan parkir.
7. Sinergitas dengan Notaris/PPAT/PPATS berkaitan dengan nilai transaksi riil yang dicantumkan wajib pajak dalam melakukan validasi SSPD-BPHTB.
8. Senergitas dengan Satpol PP dalam penegakan Perda.
9. Senergitas dengan DBMPTSP dalam integritas data perizinan.
10. Senergitas dengan DPMD dalam optimalisasi BPHTB.
11. Sinergitas dengan BJB selaku RKUD
12. SPPT berbasis elektronik, QRCode dan Qrismelalui E-PBB
13. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan dilaksanakannya BIMTEK Pengelolaan Pendapatan Daerah.
14. Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan

Retribusi Daerah serta Paerda Pajak dan Retribusi Daerah.

15. Penempatan pegawai yang bertugas khusus untuk melakukan pengecekan terkait pajak mineral batuan dan logam dilokasi secara factual.
16. Penyesuaian NJOP pada Tahun 2024 untuk meningkatkan nilai minimal dari BPHTB.
17. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan dilaksanakannya BIMTEK Pengelolaan Pendapatan Daerah.

2.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran Tahun 2023 tetap diarahkan sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, meliputi belanja pegawai, belanja Listrik, air, telepon/internet, belanja premi asuransi Kesehatan, dll;
2. Dukungan pendanaan dalam penanganan Kesehatan masyarakat, insentif tenaga Kesehatan, belanja

Kesehatan lainnya, dan pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan lainnya.

3. Dukungan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah, baik provinsi maupun Kabupaten Purwakarta;
4. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) bidang, urusan wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) bidang dan urusan pilihan sejumlah 8 (delapan) bidang serta fungsi penunjang, fungsi pendukung dan fungsi pemerintahan lainnya sejumlah 10 (sepuluh) bidang;
6. Dukungan terhadap program Sustainable Development Goals (SDGs);
7. Pemenuhan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dalam rangka peningkatan pemenuhan penyelenggaraan pendidikan;
8. Pemenuhan dana fungsi kesehatan sebesar 10% dalam rangka peningkatan pemenuhan penyelenggaraan kesehatan;
9. Pemenuhan dana Pemulihan Ekonomi Daerah sebesar 25% untuk infrastruktur, sosial dan ekonomi;
10. Penyediaan bantuan keuangan desa, hibah dan bantuan sosial serta pemberian subsidi yang dibutuhkan;
11. Penyediaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan belanja yang sifatnya darurat dan mendesak;
12. Penyediaan belanja modal pembangunan daerah, seperti, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi; dan

13. Penyediaan belanja pegawai, belanja barang dan jasa untuk pembayaran gaji pegawai dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan lain lain.
14. Dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak beserta pengamanannya.

2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. Belanja Operasi

   Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja Modal

   Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja Tidak Terduga; dan

   Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer

   Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.683.118.098.212,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp2.385.317.441.760,00 atau sebesar 88,90 persen dari target yang telah

ditetapkan. Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

KOD REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5	**BELANJA DAERAH**	**2.683.118.098.212,00**	**2.385.366.153.224,00**	**88,90**
5.1	Belanja Operasi	2.046.709.839.124,00	1.817.915.407.513,00	88,82
5.2	Belanja Modal	269.405.874.336,00	221.687.313.491,00	82,29
5.3	Belanja Tidak Terduga	16.598.701.646,00	9.290.031.314,00	55,97
5.4	Belanja Transfer	350.403.683.106,00	336.473.400.906,00	96,02

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d 31 December 2023 (unaudited)

Secara terperinci, Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Operasi

   Belanja Operasi Pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp2.046.709.839.124,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp1.817.915.407.513,00 atau 88,82 persen dari target yang telah ditetapkan. Adapun rincian target dan realisasi Belanja Operasi ini terdiri atas:

   a) Belanja Pegawai pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp982.096.972.847,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp884.567.140.660,00 atau 90,07 persen;
   b) Belanja Barang dan Jasa pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp981.546.686.439,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp856.592.355.153,00 atau 87,27 persen;

c) Belanja Hibah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp79.417.369.338,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp74.293.778.700,00 atau 93,55 persen; serta

d) Belanja Bantuan Sosial pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp3.648.810.500,00 dan realisasnya mencapai sebesar Rp2.462.133.000 atau 67,48 persen;

Berikut adalah rincian target dan realisasi Belanja Operasi pada APBD Tahun Anggaran 2023 yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

KOD REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.046.709.839.124,00**	**1.817.915.407.513,00**	**88,82**
5.1.1	Belanja Pegawai	982.096.972.847,00	884.567.140.660,00	90,07
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	981.546.686.439,00	856.592.355.153,00	87,27
5.1.5	Belanja Hibah	79.417.369.338,00	74.293.778.700,00	93,55
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.648.810.500,00	2.462.133.000,00	81,42

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d 31 December 2023 (unaudited)

2. Realisasi Belanja Modal

Belanja Modal pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp269.405.874.336,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp221.687.313.491,00 atau 82,29 persen dari target yang telah ditetapkan. Adapun rincian target dan realisasi Belanja Modal ini terdiri atas:

a) Belanja Modal Tanah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar

Rp3.962.113.900,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp987.440.000,00 atau 24,92 persen;

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp118.160.325.644,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp95.977.193.325,00 atau 81,23 persen;

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp72.785.476.503,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp62.085.346.580,00 atau 85,30 persen;

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp66.309.152.233,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp51.045.921.061,00 atau 76,98 persen;

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp8.188.806.056,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp11.591.412.525,00 atau 141,55 persen.

Berikut adalah rincian target dan realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

KOD REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.2	**BELANJA MODAL**	**269.405.874.336,00**	**221.687.313.491,00**	**82,29**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.962.113.900,00	987.440.000,00	24,92
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.160.325.644,00	95.977.193.325,00	81,23
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.785.476.503,00	62.085.346.580,00	85,30
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.309.152.233,00	51.045.921.061,00	76,98
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.188.806.056,00	11.591.412.525,00	141,55

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d 31 December 2023 (unaudited)

3. Realisasi Belanja Tidak Terduga

   Belanja Tidak Terduga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp16.598.701.646,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp9.290.031.314,00 atau 55,97 persen dari target yang telah ditetapkan.

   Berikut adalah rincian target dan realisasi Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2023 yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

KOD REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**16.598.701.646,00**	9.290.031.314,00	**55,97**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	16.598.701.646,00	9.290.031.314,00	55,97

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d 31 December 2023 (unaudited)

4. Realisasi Belanja Transfer

   Belanja Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar

Rp350.403.683.106,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp336.473.400.906,00 atau 96,02 persen dari target yang telah ditetapkan. Adapun rincian target dan realisasi Belanja Transfer ini terdiri atas:

a) Belanja Transfer Bagi Hasil pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp44.962.193.106,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp43.864.193.106,00 atau 97,56 persen; dan
b) Belanja Transfer Bantuan Keuangan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp305.441.490.000,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp292.609.207.800,00 atau 95,80 persen.

Berikut adalah rincian target dan realisasi Belanja Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2023 yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

KOD REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**350.403.683.106,00**	**336.473.400.906,00**	**96,02**
5.4.1	Transfer Bagi Hasil	44.962.193.106,00	43.864.193.106,00	97,56
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	305.441.490.000,00	292.609.207.800,00	95,80

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d 31 December 2023 (unaudited)

2.3 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah

dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Daerah terdiri atas:
    1) penerimaan pembiayaan; dan
    2) pengeluaran pembiayaan.
b. Pembiayaan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Anggaran Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2023 yang diperoleh dari Penggunaan SiLPA mencapai sebesar Rp55.843.834.013,00. Angka ini adalah merupakan hasil koreksi berdasarkan Hasil Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Hal ini menjadi dasar perubahan proyeksi dan kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100 persen.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Berikut adalah anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan
di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023

KOD REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**55.843.834.013,00**	**55.843.834.013,00**	**100**
6.1.1	Penggunaan SILPA	55.843.834.013,00	55.843.834.013,00	100
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**100**
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	**100**
	PEMBIAYAAN NETTO	**50.843.834.013,00**	**50.843.834.013,00**	**100**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**37.251.937.661,00**	**-**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d 31 December 2023 (unaudited)

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan jenis/komponen penerimaan pembiayaan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp55.843.834.013,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp55.843.834.013,00 atau telah mencapai 100 persen. Selanjutnya untuk Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Perubahan Tahun

Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp5.000.000.000,00 atau telah mencapai 100 persen.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini, dan pendapatan per kapita.

Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, dan pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2022-2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2022	2023
1	2	3	4	5
1	Indek Pembangunan Manusia	Poin	71,56	73,43
2	Angka Kemiskinan	Persen	8,70	8,46
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,75	7,72
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,24	4,97
5	Pendapatan Per kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	Rp. (ribu)	74.345	79.194
6	Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,367	0,372

Sumber : - BPS (Kabupaten Purwakarta Dalam Angka 2023)
- Data Olahan Bappelitbangda

Adapun Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6
A.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	5	20	92,13
2a	Kesehatan	Dinas Kesehatan	5	7	106,15
3b	Kesehatan	RSUD Bayu Asih	2	12	102,38
4a	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8	28	97,19
4b	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	7	71,43
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	7	85,97
6a	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	2	12	101,19
6b	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	5	97,81

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
6c	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	3	92,77
7	Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	9	112,3
B.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8	8	69,83*
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	6	102,37
3	Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	4	7	87,88
4	Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	4	6	87,91
5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	10	11	78,72
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	16	96,59
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	9	102,06
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	6	95,7
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan	3	4	92,12
10	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	14	99,63
11	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	2	100
12	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	3	100
13	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	7	18	85,05
14	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	8	101,04
15	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	4	9	87,33
16	Kebudayaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	5	8	91,95
17	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3	15	90,33
18	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2	12	120,36
C.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
1	Transmigrasi	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3	3	82,2
2	Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	5	19	98,26

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
3	Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	6	6	100
4	Perindustrian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	3	7	90,57
5	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	4	6	91,51
6	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan	5	15	118,1
7	Pertanian	Dinas Perikanan dan Peternakan	4	20	107,17
D.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	3	18	87,35
2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	2	5	90,89
E.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
1	Pengelolaan Perbatasan	Sekretariat Daerah	1	1	100
2	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	8	101,4
3	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	2	88,54
4	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	9	102,16
5	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	2	4	84,22
6	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	13	103,55
7	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	3	96,39
F.	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
1	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	3	9	93,88
G.	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
1	Kecamatan	Kecamatan Jatiluhur	6	7	98,87
2	Kecamatan	Kecamatan Sukasari	6	7	93,49
3	Kecamatan	Kecamatan Maniis	6	7	73,02
4	Kecamatan	Kecamatan Tegalwaru	6	7	100,06
5	Kecamatan	Kecamatan Plered	6	7	88,22
6	Kecamatan	Kecamatan Sukatani	6	7	92,86
7	Kecamatan	Kecamatan Darangdan	6	7	103,63
8	Kecamatan	Kecamatan Bojong	6	7	106,51
9	Kecamatan	Kecamatan Wanayasa	6	7	85,84

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
10	Kecamatan	Kecamatan Kiarapedes	6	7	87,8
11	Kecamatan	Kecamatan Pasawahan	6	7	98,87
12	Kecamatan	Kecamatan Pondoksalam	6	7	86,33
13	Kecamatan	Kecamatan Purwakarta	6	7	94,2
14	Kecamatan	Kecamatan Babakan Cikao	6	7	95,03
15	Kecamatan	Kecamatan Campaka	6	7	99,62
16	Kecamatan	Kecamatan Cibatu	6	7	75,5
17	Kecamatan	Kecamatan Bungursari	6	7	94,12
H.	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	10	90,17

Sumber : Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun Anggaran 2023

Keterangan : *Capaian akhir RPJMD

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Tingkat pencapaian Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar di Kabupaten Purwakarta sangat didukung oleh perangkat daerah pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar selama Tahun 2023. Kabupaten Purwakarta mengalokasikan Pagu anggaran untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp 1.509.852.280.796,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.341.905.824.667,00 atau terealisasi sebesar 88,88%, dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Tahun 2023

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							10.082.848.541.824	8.702.100.710.622	86,31			
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**1.509.852.280.796**	**1.341.905.824.667**	**88,88**			
1		**Dinas Pendidikan**					**703.240.947.692**	**675.470.465.218**	**96,05**			
		Pendidikan					**703.240.947.692**	**675.470.465.218**	**96,05**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**A**	**462.542.183.340**	**434.987.646.922**	**94,04**			
			Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	**Persen**	**100,00**	**94,04**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**89.733.100**	**88.813.100**	**98,97**	-	-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	11.955.900	11.955.900	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	11.821.700	11.821.700	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	10.420.600	10.420.600,00	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	11.232.700	10.772.700	95,90			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	10.020.900	9.560.900,00	95,41			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	11.632.600	11.632.600	100,00			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	22.648.700	22.648.700,00	100,00			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**445.221.605.530**	**418.955.053.704**	**94,10**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	1	445.206.635.530	418.940.083.704	94,10			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	Dokumen	2	2	14.970.000	14.970.000	100,00			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**352.434.100**	**351.904.100**	**99,85**			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	154	154	100.100.000	100.100.000	100,00			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	470	470	200.000.000	199.890.000				
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	400	400	52.334.100	51.914.100	99,20			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**1.892.434.875**	**1.886.857.875**	**99,71**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	119.999.300	119.999.300	100,00			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	124.999.700	124.999.700	100,00			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	401.038.275	401.020.775	100,00			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	264.800.000	264.600.000	99,92			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	177.010.000	176.988.000	99,99			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	3	804.587.600	799.250.100	99,34			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**1.413.508.800**	**1.406.754.200**	**99,52**			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	4	769.776.000	765.025.000	99,38			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	45	45	98.825.200	98.619.000	99,79			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	18	146.010.500	144.567.300	99,01			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	26	26	398.897.100	398.542.900	99,91			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**12.802.847.235**	**11.564.256.243**	**90,33**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	546.981.123	497.545.105	90,96			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12.255.866.112	11.066.711.138	90,30			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**769.619.700**	**734.007.700**	**95,37**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	123	123	416.570.900	381.789.300	91,65			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	298.298.800	297.535.300	99,74			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	75	75	54.750.000	54.683.100	99,88			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	**Program Pengelolaan Pendidikan**	APK Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	79,87	61,81	**240.195.264.752**	**239.996.807.696**	**99,92**			
			Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	99,59	99,58						
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Sederajat	Persen	99,56	99,96						
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Sederajat	Persen	99,75	99,80						
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI Sederajat	Persen	0,00	0,00						
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs Sederajat	Persen	0,00	0,00						
			Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	Persen	100,00	100,00						
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00	100,00						
			Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	Persen	100,00	100,00						
			Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik	Persen	87,96	49,20						
			Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik	Persen	90,42	77,10						
			Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Persen	59,90	62,03						
			Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	95,42	94,83						
			Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	96,23	94,25						

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					**149.244.994.747**	**146.606.404.431**	**98,23**			
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	5	5	1.500.000.000	1.473.548.400	98,24			
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	2	2	474.140.000	458.608.960	96,72			
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	1	226.217.000	223.953.500	99,00			
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	70	70	25.490.754.000	25.362.333.487	99,50			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	78	78	13.399.119.711	13.005.526.910	97,06			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	12	12	1.354.300.000	1.323.461.239	97,72			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	11	11	957.910.000	942.681.810	98,41	Realisasi tercapai		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	unit	8	8	664.221.000	655.832.394	98,74			
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	unit	2	2	130.000.000	129.896.700	99,92			
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1	1	-	-	-			
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	421	421	100.177.700	100.097.700	99,92			
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	421	421	28.337.300	28.337.300	100,00			
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1690	1690	554.540.200	553.690.200	99,85	-	-	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	449	449	3.647.199.700	3.586.799.700	98,34			
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi	Orang	138	138	839.739.900	826.937.400	98,48			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi									
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	21	21	188.540.200	188.040.000	99,73			
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	416	416	99.290.736.036	97.362.874.681,0	98,06			
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dokumen	9	9	24.062.300	23.709.700	98,53			
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	180	180	74.999.800	60.999.800	81,33			
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	150.000.000	149.500.000	99,67			
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	75.000.000	74.850.000	99,80			
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	80	80	74.999.900	74.724.550	99,63			
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					**59.160.744.505**	**60.713.040.015**	**102,62**			
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	13	13	3.170.000.000	3.116.077.000	98,30			
		Penambahan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1	1	205.000.000	204.367.000	99,69			
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	7	7	3.989.890.500	3.897.857.000	97,69			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	14	14	1.391.740.841	1.370.907.200	98,50			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	1	260.000.000	256.898.000	98,81			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	3	3	862.664.500	846.517.000	98,13			
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	2	2	250.000.000	249.900.000	99,96			
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Unit	2	2	130.000.000	129.966.000	99,97			
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	121	121	35.574.300	35.574.300	100,00			
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	121	121	30.145.800	29.745.800	98,67			
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1760	1760	604.540.200	601.649.700	99,52			
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	406	406	3.363.997.300	3.310.997.300	98,42			
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	244	244	811.347.100	803.788.300	99,07			
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	14	14	192.903.600	192.403.600	99,74			
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	115	115	43.518.163.964	45.336.555.415	104,18			
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	9	9	19.776.700	19.556.700	98,89			
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,	Orang	180	180	74.999.800	60.999.800	81,33			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	100.000.000	99.500.000	99,50			
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	80	80	75.000.000	74.850.000	99,80			
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	1	1	74.999.900	74.929.900	99,91			
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					**28.249.445.700**	**28.443.435.500**	**100,69**			
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya Pembangunan Ruang Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Ruang	2	2	612.000.000	607.245.000	99,22			
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	4	4	738.806.000	736.565.500	99,70			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	2	276.000.000	275.383.500	99,78			
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	2	2	17.555.720.000	17.555.360.000	100,00			
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	1	1	50.000.000	49.813.500	99,63			
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	50	50	49.999.800	49.999.800	100,00			
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	60	60	279.020.000	278.740.800	99,90			
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	400	400	100.000.000	100.000.000	100,00			
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	414	414	8.362.900.000	8.577.564.000	102,57			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	75.000.000	75.000.000	100,00			
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	75.000.000	63.000.000	84,00			
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	80	80	74.999.900	74.763.400	99,68			
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					**3.540.079.800**	**4.233.927.750**	**119,60**			
		Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	1	1	104.000.000	103.627.950	99,64			
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	50	50	249.999.800	249.499.800	99,80			
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	50	50	50.000.000	50.000.000	100,00			
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	21	21	3.136.080.000	3.830.800.000	122,15			
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	**Program Pengembangan Kurikulum**	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	1,00	1,00	**330.299.700**	**313.636.700**	**94,96**			
			Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Dokumen	1,00	1,00						
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					**230.300.000**	**226.637.000**	**98,41**			
		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku	450	450	230.300.000	226.637.000	98,41			
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan					**99.999.700**	**86.999.700**	**87,00**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal										
		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	49.999.800	43.499.800	87,00			
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	Dokumen	1,00	1,00	49.999.900	43.499.900	87,00			
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	**Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**	**Dokumen Hasil Pengawasan**	**Dokumen**	**1,00**	**1,00**	**173.199.900**	**172.373.900**	**99,52**			
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					**73.200.000**	**72.374.000**	**98,87**			
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1,00	1,00	23.200.000	22.540.000	97,16			
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1,00	1,00	50.000.000	49.834.000,00	99,67			
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					**99.999.900**	**99.999.900**	**100,00**			
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1,00	1,00	49.999.900	49.999.900	100,00			
		Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang	Dokumen	1,00	1,00	50.000.000	50.000.000	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Diselenggarakan oleh Masyarakat									
2		**Dinas Kesehatan**					**213.826.963.630**	**188.224.677.187**	**88,03**			
		Kesehatan					**213.826.963.630**	**188.224.677.187**	**88,03**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah;**	**Opini**	**B**	**A**	**108.937.708.246**	**93.984.291.519**	94,42			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**85,00**	**87,00**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**429.999.400**	**266.897.900**	**62,07**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	131.999.900	75.799.900	57,42			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	2	54.500.000	27.239.300	49,98			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	2	2	54.499.900	30.050.000	55,14			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	2	2	54.499.900	26.062.400	47,82			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	laporan	1	1	54.499.900	32.619.500	59,85			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	39.999.800	39.775.300	99,44			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	40.000.000	35.351.500	88,38			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**56.575.820.020**	**53.149.390.931**	**93,94**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	578	578	56.456.501.420	53.038.610.720	93,95			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1	41.140.000	34.497.900	83,85			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	40.000.000	39.307.811	98,27			
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	1	1	13.178.600	12.946.150	98,24			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	25.000.000	24.028.350	96,11			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**19.899.900**	**17.789.000**	**89,39**			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	19.899.900	17.789.000	89,39			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**175.704.800**	**126.534.000**	**72,02**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	155.705.000	111.750.000	71,77			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	50	19.999.800	14.784.000	73,92			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**1.521.932.200**	**880.152.725**	**57,83**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	88.844.500	69.416.000	78,13			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah PaketPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	2	2	437.058.800	131.400.000	30,06			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	79.999.900	29.998.000	37,50			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	449.999.200	278.753.875	61,95			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	179.999.800	154.687.450	85,94			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	75.000.000	61.710.000	82,28			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	141.030.000	84.768.000	60,11			
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	1	70.000.000	69.419.400	99,17			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**1.113.624.129**	**398.161.000**	**35,75**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	20	20	400.000.000	199.012.000	49,75	Dibayarkan tahun 2024		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	20	20	79.999.800		0,00	Dibayarkan tahun 2025		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	433.624.329		0,00	Dibayarkan tahun 2026		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	20	200.000.000	199.149.000	99,57			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**3.164.373.020**	**2.496.908.657**	**78,91**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	938.953.820	573.341.302	61,06	Dibayarkan tahun 2024		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	2.225.419.200	1.923.567.355	86,44			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**2.931.732.000**	**1.165.051.300**	**39,74**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	20	312.400.000	219.977.300	70,42	Dibayarkan tahun 2024		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	2.269.400.000	945.074.000	41,64	Dibayarkan tahun 2024		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit gedung kantor	Unit	1	1	174.966.000		0,00	Dibayarkan tahun 2024		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	174.966.000		0,00	Dibayarkan tahun 2024		
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**43.004.622.777**	**35.483.406.006**	**82,51**			
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Labkesda dan Puskesmas)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	21	21,00	43.004.622.777	35.483.406.006	82,51			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan**	Persen	80	85	**88.450.097.184**	**80.807.488.147**	**91,36**			
			Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Persen	95	100						
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**18.172.063.482**	**16.323.852.990**	**89,83**			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	3	2,00	2.063.870.350	1.913.523.154	92,72			
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1		200.000.000		0,00	pengadaan bangunan tdk		

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
										direalisasi sehingga kebutuhan mebeler saung ambu tidak dibutuhkan		
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket	1	1	12.117.380.000	11.522.344.136	95,09			
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	1	1,00	800.000.000	480.446.100	60,06	Dibayarkan tahun 2024		
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1,00	2.990.813.132	2.407.539.600	80,50			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**69.682.464.802**	**64.065.368.557**	**91,94**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17.766	17.474	1.971.080.000	1.831.380.000	92,91			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16.959	16.609	70.000.000	67.040.000	95,77			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16.151	16.151	215.140.000	192.858.000	89,64			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	78.020	71.157	853.600.000	851.840.000	99,79			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	143.607	143.607	419.900.000	410.970.000	97,87			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	108.372	82.841	485.480.000	439.864.800	90,60			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	3.074.684.215	2.772.408.681	90,17			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	1	328.114.000	319.360.000	97,33			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	806.350.000	758.810.000	94,10			
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	1	1	100.000.000	100.000.000	100,00			
		Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	dokumen	1	1	1.705.804.200	1.569.217.800	91,99			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	337.002.600	254.495.500	75,52			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	22.799	20.906	495.400.000	488.840.000	98,68			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	23.675	21.541	197.850.000	196.219.100	99,18			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	dokumen	1	1	1.296.085.250	926.422.300	71,48	Dibayarkan tahun 2024		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	dokumen	1	1	6.255.122.000	3.993.339.503	63,84	Dibayarkan tahun 2024		
		Pengelolaan PelayananKesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	621.023	504.008	346.638.000	338.428.000	97,63			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	70.532	67.812	74.500.000	74.372.000	99,83			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13.202	13.202	70.000.000	69.086.000	98,69			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1.352	1.352	322.000.000	322.000.000	100,00			
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	0	0	50.000.000	50.000.000	100,00			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	dokumen	1	1	40.000.000	39.812.900	99,53			
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	dokumen	1	1	171.882.500	165.164.500	96,09			
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	1	45.139.173.387	43.377.038.000	96,10			
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Perbekkes)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan UPTD Perbekkes	dokumen	1	1	284.042.450	245.495.500	86,43			
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Labkesda)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan UPTD Labkesda	dokumen	1	1	900.000.000	885.819.629	98,42			
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Puskesmas)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan UPTD 20 Puskesmas	dokumen	20	20	3.547.622.300	3.215.110.444	90,63			
		Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	dokumen	1	1	75.000.000	60.552.300	80,74			
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	20	20	49.993.900	49.423.600	98,86			
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**445.590.000**	**275.434.300**	**61,81**			
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen	1	1,00	40.000.000	39.999.900	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	1,00	205.590.000	40.583.300	19,74	Dibayarkan tahun 2024		
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Unit	7	7,00	200.000.000	194.851.100	97,43			
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**149.978.900**	**142.832.300**	**95,23**			
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dokumen	1	1,00	100.000.000	93.683.800	93,68			
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	20	20,00	49.978.900	49.148.500	98,34			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan**	**%**	**100**	**90,00**	**15.188.279.100**	**12.224.813.121**	**80,49**			
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**80.000.000**	**62.493.700**	**78,117**			
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokumen	1	1,00	40.000.000	26.200.000	65,50			
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokumen	1	1,00	40.000.000	36.293.700	90,73			
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**14.146.641.100**	**11.461.470.021**	**81,02**			
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	1	1,00	40.000.000	40.000.000	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	624	624,00	14.066.641.100	11.389.345.021	80,97			
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	1	1,00	40.000.000	32.125.000	80,31			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**961.638.000**	**700.849.400**	**72,88**			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	250	250,00	961.638.000	700.849.400	72,88			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	**Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina**	**%**	**100**	**100,00**	**565.198.100**	**561.573.900**	**99,36**			
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**103.730.000**	**102.659.600**	**98,97**			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen	1	1,00	103.730.000	102.659.600	98,97			
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**421.468.100**	**418.914.300**	**99,39**			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1	dokumen	1	1,00	421.468.100	418.914.300	99,39			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga									
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100,00**			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dokumen	1	1,00	20.000.000	20.000.000	100,00			
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100,00**			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	dokumen	1	1,00	20.000.000	20.000.000	100,00			
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri**	**%**	**65,16**	**72,10**	**685.681.000**	**646.510.500**	**94,29**			
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**45.000.000**	**43.895.000**	**97,54**			
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	1	1,00	45.000.000	43.895.000	97,54			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**246.481.000**	**225.231.000**	**91,38**			
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	1	1,00	171.481.000	166.711.000	97,22			
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	262	262,00	75.000.000	58.520.000	78,03			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75,00**	**82**	**394.200.000**	**377.384.500**	**95,73**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	1,00	394.200.000	377.384.500	95,73			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**	**%**	**75**	**75**	**55.227.207.615**	**45.912.246.969**	**83,13**			
		Operasional Pelayanan Puskesmas					**53.366.847.865**	**44.454.401.438**	83,30			
		Puskesmas Purwakarta	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	2.397.818.632	1.884.311.293	78,58			
		Puskesmas Maracang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	1.730.751.228	1.460.925.379	84,41			
		Puskesmas Mulyamekar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	1.734.203.574	1.405.559.250	81,05			
		Puskesmas Jatiluhur	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	2.735.481.466	2.443.343.199	89,32			
		Puskesmas Campaka	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	2.915.580.573	1.901.423.449	65,22			
		Puskesmas Bungursari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	1.794.188.990	1.498.677.673	83,53			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Puskesmas Cibatu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	2.386.014.031	1.798.801.313	75,39			
		Puskesmas Pasawahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	2.638.724.444	2.093.945.276	79,35			
		Puskesmas Pondoksalam	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	2.034.870.796	1.795.917.638	88,26			
		Puskesmas Wanayasa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	3.061.638.842	2.770.084.971	90,48			
		Puskesmas Kiarapedes	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	2.085.748.846	2.016.144.730	96,66			
		Puskesmas Sukatani	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	3.732.592.579	3.319.171.803,00	88,92			
		Puskesmas Darangdan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	3.801.704.180	3.709.282.062	97,57			
		Puskesmas Bojong	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	3.272.664.285	2.536.285.283	77,50			
		Puskesmas Plered	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	4.306.326.753	3.640.843.189	84,55			
		Puskesmas Tegalwaru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	4.216.169.786	3.249.453.705	77,07			
		Puskesmas Maniis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	2.962.151.434	2.343.336.882,00	79,11			
		Puskesmas Sukasari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	1.751.699.760	1.354.483.874	77,32			
		Puskesmas Koncara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	1.718.184.130	1.381.891.716	80,43			
		Puskesmas Munjuljaya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	1	2.090.333.536	1.850.518.753	88,53			
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					**884.975.000**	**867.024.351**	**97,97**			
		UPTD Perbekalan Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen	1	1	184.975.000	184.856.685	99,94			
		UPTD Laboratorium Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen	1	1	700.000.000	682.167.666	97,45			
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Retribusi)					**975.384.750**	**590.821.180**	**60,57**			
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan	dokumen	1	1	205.026.000	140.330.075	68,45			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Purwakarta)	Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan									
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Bungursari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	51.484.500	37.524.600	72,89			
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Sukatani)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	6.098.250	0	0,00	Adanya perubahan status Puskesmas menjadi Puskesmas BLUD, APBD Pergeseran sehingga menunda pencairan anggaran	Kesulitan dalam pelaksanaan pencairan sehingga dimasukan ke silpa tahun berikutnya	
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Darangdan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	507.000	0	0,00			
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Campaka)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	5.552.250	5.552.250	100,00			
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Plered)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	143.086.500	35.836.580	25,05			
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Tegalwaru)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	48.796.500	44.186.675	90,55			
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Mulyamekar)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	161.902.500	112.948.650	69,76			
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan	dokumen	1	1	36.994.500		0,00	Adanya perubahan status	Kesulitan dalam pelaksan	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Kesehatan (UPTD Puskesmas Cibatu)	Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan							Puskesmas menjadi Puskesmas BLUD, APBD Pergeseran sehingga menunda pencairan anggaran	aan pencairan sehingga dimasukan ke silpa tahun berikutnya	
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Wanayasa)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	14.682.000		0,00			
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Pasawahan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	24.284.250	-	0,00			
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	165.375.000	163.436.350	98,83			
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Jatiluhur)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	49.311.000	49.311.000	100,00			
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Munjuljaya)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	47.394.750	0,00	0,00	Adanya perubahan status Puskesmas menjadi Puskesmas BLUD, APBD Pergeseran sehingga menunda pencairan anggaran	Kesulitan dalam pelaksanaan pencairan sehingga dimasukan ke silpa tahun berikutnya	
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (UPTD Puskesmas Maracang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	2.118.750	1.695.000,00	80,00			
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	1	1	12.771.000		0,00	Adanya perubahan status Puskesma	Kesulitan dalam pelaksanaan	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Kesehatan (UPTD Puskesmas Koncara)								s menjadi Puskesmas BLUD, APBD Pergeseran sehingga menunda pencairan anggaran	pencairan sehingga dimasukan ke silpa tahun berikutnya	
3		**RSUD Bayu Asih**					**234.731.069.094**	**213.953.388.548**	**99,42**			
		Kesehatan					**234.731.069.094**	**213.953.388.548**	**99,42**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**A**	**229.879.819.996**	**209.495.434.912**	**102,49**			
			Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	**Opini**	**Paripurna**	**Paripurna**						
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**Persen**	**85,00**	**85,00**						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Rumah Sakit Bayu Asih)	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	Bulan	14	14	31.806.840.678	28.616.283.630	89,97	-	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Rumah Sakit Bayu Asih)	Jumlah Penyediaan Tenaga PTT dan Premi AsuransI yang dibayarkan	Tahun	1	1	15.199.593.919	5.979.316.914	39,34			
		Pelayanan Penunjang Pelayanan BLUD (Rumah Sakit Bayu Asih)	Jumlah Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang dibutuhkan	Paket	1	1	182.873.385.399	174.899.834.368	95,64	-	-	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Presentase pencapaian target SPM Pelayanan Medis**	**Persen**	**85,00**	**85,00**	**4.851.249.098**	**4.457.953.636**	**96,29**			
			Tingkat Mutu Keperawatan	**Persen**	**85,00**	**85,00**						
			Cakupan Pelyanan Penunjang	**Persen**	**85,00**	**85,00**						
			Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana prasarana Rumah Sakit	**Persen**	**85,00**	**85,00**						
			Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**Persen**	**85,00**	**85,00**						
			Presentase Perencanaan dan Pelporan Kinerja dan	**Persen**	**85,00**	**85,00**						

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang undangan									
			Presentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	**Persen**	**85,00**	**85,00**						
			Presentase pemenuhan Kebutuhan Operasional	**Persen**	**85,00**	**85,00**						
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Bayu Asih)	Tersedianya alat kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas pelayana kesehatan	Persen, tempat tidur	80; 10	80; 11	2.784.936.748	2.765.100.000	99,29	-	-	
		Pengadaan Obat Vaksin (Rumah Sakit Bayu Asih)	Jenis Obat Vaksin yang diadakan	Persen			2.066.312.350	1.692.853.636	81,93			
3		**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**					**202.395.019.846**	**133.818.164.454**	**66,12**			
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					**202.395.019.846**	**133.818.164.454**	**66,12**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**BB**	**29.908.801.875**	**24.642.424.493**	**82,39**			
			Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	**Persen**	**90,00**	**90,00**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**140.000.000**	**114.480.000**	**81,77**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	40.000.000	30.320.000	75,80	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	15.000.000	15.000.000	100,00	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	15.000.000	15.000.000	100,00	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	15.000.000	15.000.000	100,00	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	1	1	15.000.000	15.000.000	100,00	-	-	-

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD									
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	40.000.000	24.160.000	60,40	-	-	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	0	-	-	**#DIV/0!**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**16.422.467.641**	**13.837.161.324**	84,26	-	-	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	16.332.467.641	13.747.161.924	84,17	-	-	-
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Jumlah orang tenaga administrasi ASN	OH, Laporan	84; 1	0	-	-	#DIV/0!	-	-	-
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	12.500.000	12.499.900	100,00	-	-	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	12.500.000	12.500.000	100,00	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	20.000.000	20.000.000	100,00	-	-	-
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	10.000.000	9.999.900	100,00	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	10.000.000	9.999.900	100,00	-	-	-
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2	25.000.000	24.999.700	**100,00**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**90.000.000**	**36.426.900**	40,47	-	-	-
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	25.000.000	13.147.900	52,59	-	-	-
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	15.000.000	2.424.900	16,17	-	-	-
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	15.000.000	3.315.000	22,10	-	-	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	35.000.000	17.539.100	**50,11**			
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					**50.000.000**	**50.000.000**	100,00	-	-	-
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah RKA	Dokumen	1	1	10.000.000	10.000.000	100,00	-	-	-
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	1	1	10.000.000	10.000.000	100,00	-	-	-
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	1	1	10.000.000	10.000.000	100,00	-	-	-
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	20.000.000	20.000.000	**100,00**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**811.666.100**	**510.965.600**	62,95	-	-	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	376.666.100	354.230.000	94,04	-	-	-
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	35.000.000	8.823.300	25,21	-	-	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	20.000.000	12.764.300	-	-	-	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Orang	12	12	175.000.000	29.167.600	16,67	-	-	-

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan									
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	85	0	90.000.000	-	0,00	-	-	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	120	120	115.000.000	105.980.400	**92,16**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**1.670.915.956**	**1.060.512.990**	63,47	-	-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	item	27	15	150.000.000	71.233.200	47,49	-	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21 Item	Item	23	21	200.000.000	196.398.700	98,20	-	-	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	item	32	45	200.000.000	134.631.240	67,32	-	-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sewa gedung	item; tahun	19 item; 1 tahun	38 Item; 1 Tahun	250.000.000	195.694.800	78,28	-	-	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan bahan cetakan dan Penyediaan bahan penjilidan	item	21 item	14 item	200.000.000	199.621.800	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	item	10	0	-	-	#DIV/0!	-	-	-
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu, Jamuan Tamu	dus; Paket	650 Dus; 30 Paket	0 Dus; 0 Paket	30.000.000	-	0,00	-	-	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan DInas Dalam Kota, Perjalanan DInas Dalam Provinsi	OH	1712 OH	560 OH	485.915.956	158.864.200	32,69	-	-	-
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Unit	5	5	50.000.000	5.463.500	10,93	-	-	-
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Paket	3	1	105.000.000	98.605.550	**93,91**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**2.518.288.300**	**2.086.779.702**	82,87	-	-	-
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	11	0	-	-	#DIV/0!	-	-	-

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	3	0	-	-	#DIV/0!	-	-	-
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Paket	1	1	205.000.000	200.444.300	-	-	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Item; Paket	305	303	1.270.878.300	1.255.466.700	98,79	-	-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Bangunan	2	2	600.000.000	211.786.846	35,30	-	-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Bangunan	2	2	442.410.000	419.081.856	94,73	-	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**5.274.501.278**	**4.332.899.107**	**82,15**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	lembar	1000	1000	10.000.000	10.000.000	100,00	-	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	487.262.430	291.027.146	59,73	-	-	-
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	194	194	122.454.600	43.524.600	35,54	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Non ASN	Bulan	12	12	4.654.784.248	3.988.347.361	85,68	-	-	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**2.930.962.600**	**2.613.198.870**	**89,16**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	22	15	662.636.800	565.787.953	85,38	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	35	27	669.132.500	616.239.709	92,10	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Unit	14	14	409.412.500	380.773.890	93,00	-	-	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	60	0	125.000.000	-	0,00	-	-	-

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bangunan	2	2	864.780.800	859.863.707	99,43	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Bangunan	1	1	200.000.000	190.533.611	95,27	-	-	-
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Persentase Turap/Talud/Bronjong yang berfungsi**	**Persen**	**40,06**	**40,06**	**22.985.654.756**	**18.545.950.725**	**80,68**			
			Persentase Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	**Persen**	**40,06**	**40,06**						
			Persentase Penelitian dan Perancangan Pengembangan Jaringan Irigasi yang dimanfaatkan	**Persen**	**20,00**	**20,00**						
			Persentase Jaringan Irigasi yang dibangun	**Persen**	**3,10**	**3,10**						
			Persentase Sistem Informasi/Data Base Irigasi yang dikembangkan	**Persen**	**25,00**	**25,00**						
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) daerah Kabupaten/Kota**	**sub kegiatan**	**1**	**1**	**925.800.000**	**906.268.800**	**97,89**			
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Dokumen	7	7	925.800.000	906.268.800	97,89	-	-	-
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	0	-	-	0,00	-	-	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi**	**sub kegiatan**	**6**	**6**	**22.059.854.756**	**17.639.681.925**	**79,96**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen Perencanaan dan Teknis Pengembangan Irigasi	Dokumen	9	9	1.834.650.000	608.818.525	33,18	Dibayarkan tahun 2024		-
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km	5.825	5.825	11.707.664.016	10.334.774.300	88,27	Dibayarkan tahun 2024		-
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	2.529	2.526	5.092.540.740	4.862.016.100	95,47	-		-
		Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung	5	5	542.500.000	209.159.000	38,55	Dibayarkan tahun 2024		-
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	0,78	0,78	2.341.500.000	1.417.323.000	60,53	Dibayarkan tahun 2024		-
		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung	5 Bendung	5 Bendung	541.000.000	207.591.000	38,37	Dibayarkan tahun 2024		-
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Persentase Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang berfungsi**	**Persen**	**25,00**	**25,00**	**1.846.000.000**	**1.405.071.800**	**76,11**			
			Persentase Pemeliharaan saluran drainase/Gorong - gorong	**Persen**	**25,00**	**25,00**						
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten	**Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai**	**sub kegiatan**	**4,00**	**3,00**	**1.846.000.000**	**1.405.071.800**	**76,11**			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen Perencanaan, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	1	1	106.000.000	105.277.800	99,32	-	-	-
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	2	0	14.400.000	-	0,00	-	-	-
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Meter	334	288,8	804.500.000	404.095.000	50,23	Dibayarkan tahun 2024	-	-
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitas	Meter	392	392	921.100.000	895.699.000	97,24	-	-	-
			Panjang Ruas Jalan Baru	**Km**	**1,30**	**1,30**	**102.887.194.725**	**60.917.333.766**	**59,21**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Jumlah Jembatan Baru**	**Titik**	**1,00**	**1,00**						
			Persentase Jalan dan Jembatan yang dibangun	**Persen**	**15,16**	**15,16**						
			Persentase Jalan yang ditingkatkan	**Persen**	**8,78**	**8,78**						
			Persentase Jembatan yang ditingkatkan	**Persen**	**1,00**	**1,00**						
			Persentase jalan kondisi mantap (rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan)	**Persen**	**86,82**	**86,82**						
			Tingkat Pemenuhan Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	**Persen**	**18,20**	**18,20**						
			Persentase Penanggulangan Tanggap darurat Jalan dan Jembatan	**Persen**	**95,00**	**95,00**						
			Tingkat Pemenuhan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	**Persen**	**20,00**	**20,00**						
			Presentase pengawasan dan pengendalian Kebinamargaan dan Pengairan yang dilsakanakn dengan baik	**Persen**	**40,06**	**40,06**						
			Panjang Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan	**Km**	**1,00**	**1,00**						
			Jumlah Jembatan Yang Ditingkatkan	**Unit**	**1,00**	**1,00**						
			Tingkat Pemenuhan Penelitian dan Perencanaan Jalan dan Jembatan	**Persen**	**20,00**	**20,00**						
			Persentase Bahan dan Alat Laboratorium teknik yang berfungsi dengan baik	**Persen**	**25,00**	**25,00**						
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**sub kegiatan**	**14**	**14**	**102.887.194.725**	**60.917.333.766**	**59,21**			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis	Dokumen Perencanaan Kegiatan	Dokumen	16	16	4.350.000.000	1.721.480.950	39,57	Dibayarkan tahun 2024	-	-

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan										
		Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	MA2	2000	0	4.836.875.000	15.675.000	0,32	Terkendala waktu pelaksanaan dan blm tercapainya kesepakatan harga dengan pemilih lahan	Diusulkan kembali untuk dilaksanakan pada tahun 2024	-
		Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen Leger Jalan	Dokumen	2	2	839.940.000	827.476.000	98,52	-	-	-
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	2	2	946.057.500	182.122.440	19,25	Dibayarkan tahun 2024	-	-
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km	7.688	7.688	26.126.632.898	13.862.811.811	53,06	Dibayarkan tahun 2024	-	-
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	14.555	14.555	20.266.392.809	8.809.923.185	43,47	Dibayarkan tahun 2024	-	-
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km	56.581	56.581	21.153.460.664	16.075.827.900	76,00	Dibayarkan tahun 2024	-	-
		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun (Jembatan Cikanyayan dan Jembatan Darurat Jatimulya)	Meter	60; 48	60; 48	18.663.083.068	16.666.096.180	89,30	-	-	-
		Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	Meter	142.636	0	-	-	0,00	-	-	-
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Meter	409.709	0	-	-	0,00	-	-	-
		Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Meter	182.235	0	-	-	0,00	-	-	-
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	Meter	486.414	486.414	3.545.808.036	2.308.339.000	65,10	-	-	-

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	5	5	400.000.000	60.860.000	15,22	-	-	-
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	15	15	1.758.944.750	386.721.300	21,99	-	-	-
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Jumlah Bangunan Ber-IMB Per satuan Bangunan**	**Unit**	**2.200,00**	**1.550,00**	**39.133.607.180**	**27.548.403.320**	**70,40**			
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					**39.133.607.180**	**27.548.403.320**	**70,40**			
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	3	3	659.256.000	397.133.000	60,24	Dibayarkan tahun 2024	-	-
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	14	14	23.479.695.188	15.624.677.720	66,55	Dibayarkan tahun 2024	-	-
		Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	1	159.310.000	147.990.000	92,89	-	-	-
		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	210.028.100	67.233.100	32,01	-	-	-
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	20.000.100	6.350.100	31,75	-	-	-
		Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	Dokumen	1	1	190.000.000	32.500.000	17,11	-	-	-

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit	10	9	10.823.149.835	8.486.489.400	78,41	Dibayarkan tahun 2024	-	-
		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit	4	5	3.592.167.957	2.786.030.000	77,56	Dibayarkan tahun 2024	-	
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Jumlah Ruang Publik Yang Direvitalisasi / Dibangun**	**Unit**	**15,00**	**15,00**	**307.999.600**	**255.489.600**	**82,95**			
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		**425000**			**307.999.600**	**255.489.600**	**82,95**			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	307.999.600	255.489.600	82,95	-	-	-
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Persentase Peserta Pembinaan**	**%**	**100,00**	**100**	**300.250.000**	**265.698.350**	**88,49**			
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan**	**Paket**	**1**	**1**	**273.050.000**	**263.358.350**	**96,45**			
		Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan Ahli	Dokumen	1	0	-	-	0,00	-	-	-
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	20	20	104.028.000	102.549.500	98,58	-	-	-
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	50	50	169.022.000	160.808.850	95,14	-	-	-
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**sub kegiatan**	**1**	**1**	**27.200.000**	**2.340.000**	**8,60**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan	1	1	27.200.000	2.340.000	8,60	-	-	-
		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen	1	0	-	-	0,00	-	-	-
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota**	**%**	**100,00**	**100,00**	**5.025.511.710**	**237.792.400**	**4,73**			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	**%**	**100,00**	**100,00**						
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	**%**	**100,00**	**100,00**						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	**%**	**100,00**	**100,00**						
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Sinkronisasi Data dan Informasi untuk Investasi dan Pembangunan Daerah**	**Dokumen**	**1**	**1**	**854.712.910**	**73.057.400**	**8,55**			
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	854.712.910	73.057.400	8,55	Dibayarkan tahun 2024		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**5**	**5**	**753.152.800**	**68.589.400**	**9,11**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	5	5	753.152.800	68.589.400	9,11	Dibayarkan tahun 2024		

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten**	**sub kegiatan**	**2**	**2**	**3.352.519.800**	**32.519.600**	**0,97**	-	-	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	3.268.199.800	18.199.700	0,56	Dibayarkan tahun 2024	-	-
		Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	1	1	84.320.000	14.319.900	16,98			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang**	**Dokumen**	**1**	**1**	**65.126.200**	**63.626.000**	**97,70**	-	-	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	1	28.420.000	28.419.900	100,00			
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	36.706.200	35.206.100	95,91	-	-	-
								0				
4		**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**					**108.262.720.436**	**87.626.259.518**	**80,94**			
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					**87.743.437.820**	**68.885.662.011**	**78,51**			
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	Jumlah Sarana Prasarana Air Bersih Komunal Yang Dibangun	Unit	1.471	1.471	**14.907.659.000**	**13.345.880.614**	**89,52**			
			Panjang Saluran Air Bersih Perpipaan Yang Dibangun	Km	2	2						
			Unit Pengolah Air Baku Yang Terbangun	Unit	15	15						
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					**14.907.659.000**	**13.345.880.614**	**89,52**			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Paket	1	1	400.000.000	186.984.900	46,75	Keterbatasan Anggaran	Masuk kedalam nggaran	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								Tahun 2024	
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Paket	1	1	312.900.000	288.070.000	92,06			
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Paket	1	1	2.000.000.000	1.861.957.837	93,10	Keterbatasan Anggaran	Masuk kedalam nggaran Tahun 2024	
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan Perdesaan	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Paket	1	1	250.653.000	250.653.000	100,00			
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi	15	15	9.029.106.000	9.010.439.250	99,79			
		Pembinanaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Paket	1	1	55.000.000	54.496.900	99,09			
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi / Paket	18/1	18/1	2.860.000.000	1.693.278.727	59,21	Keterbatasan Anggaran	Masuk kedalam nggaran Tahun 2024	
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun / Diperbaiki	Unit	1.451	1.451	**11.412.274.000**	**11.171.380.900**	**97,89**			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					**11.412.274.000**	**11.171.380.900**	**97,89**			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Kebijakan	Unit	2	2	730.424.000	697.641.000	95,51			
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi Yang Dibangun/Diperbaiki	Lokasi	4	4	10.357.000.000	10.157.000.000	98,07	Keterbatasan Anggaran	Masuk kedalam nggaran	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
											Tahun 2024	
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Terlaksananya Konsultaansi Supervisi Pembangunan	Unit	2	2	324.850.000	316.739.900	97,50			
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Jumlah Panjang Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Lingkungan Yang Dibangun / Diperbaiki**	**Meter**	**1.000**	**600**	**6.142.514.850**	**5.025.966.447**	**96,08**			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Drainase yang di bangun/ dipelihara /direhabilitasi di Kabupaten Purwakarta				**6.142.514.850**	**5.025.966.447**	**81,82**			
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang dbangun	Lokasi	30	30	836.607.350	836.607.350	100,00			
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Saluran Drainase Perkotaan	Lokasi/ Paket	9/ 1	9/ 1	5.305.907.500	4.189.359.097	78,96	Keterbatasan Anggaran	Masuk kedalam nggaran Tahun 2024	
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Program Pengembangan Permukiman**	**Jumlah Sarana dan Peasarana Permkiman Yang Dibangun**	**Unit**	**134**	**190**	**55.280.989.970**	**39.342.434.050**	**71,17**			
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Purwakarta**	**Paket**	1	1	**55.280.989.970**	**39.342.434.050**	**71,17**			
		Pembangunan dann Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Dibangun	Lokasi/ Paket	186, 1	186, 1	24.808.495.900	10.651.893.647	42,94	Keterbatasan Anggaran	Masuk kedalam nggaran Tahun 2024	
		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastrktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan saranaPermukiman yang dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /kota	Unit / paket	172/ 5	172/ 5	9.338.397.867	8.219.129.536	88,01	Keterbatasan Anggaran	Masuk kedalam Anggaran Tahun 2024	
		Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan	paket	5	5	19.242.372.303	18.698.845.967	97,18	-	-	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SaranaPermukiman yang Diawasi dan Dikendalikan DiKawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
		Pembinaan Penyelenggaraan Infrastrktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur KawasanPermukiman di Kawasan strategis Daerah Kabupaten/kota	Dokumen Paket Orang	1 1 125	1 1 125	1.891.723.900	1.772.564.900	93,70	Keterbatasan Anggaran	Masuk kedalam Anggaran Tahun 2024	
		Perumahan dan Kawasan Permukiman					**20.519.282.616**	**18.740.597.507**	**91,33**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**A**	**A**	**16.590.933.616**	**14.868.134.939**	**89,62**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**%**	**100,00**	**100,00**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**273.002.924**	**268.004.904**	**98,17**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Buku	55	55	63.054.824	62.628.500	99,32			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Buku	25	25	45.459.600	43.918.236	96,61			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Buku	30	30	45.182.700	42.487.100	94,03			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku	30	30	45.469.500	45.229.200	99,47			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Buku	69	69	73.836.300	73.741.868	99,87			
		Administrasi Keuangan perangkat Daerah					**6.765.218.813**	**5.785.719.379**	**85,52**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	1	6.689.075.313	5.712.547.579	85,40			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Buku	6	6	24.840.600	23.845.800	96,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Buku	21	21	26.302.900	26.302.900	100,00			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Paket	1	1	25.000.000	23.023.100	92,09			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**24.937.000**	**24.937.000**	**100,00**			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	24.937.000	24.937.000	100,00			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**543.550.000**	**539.207.500**	**99,20**			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pcs	1.562	1.562	368.550.000	367.682.500	99,76			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Paket	1	1	175.000.000	171.525.000	98,01			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**1.519.135.873**	**1.510.618.150**	**99,44**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	257.489.000	257.484.200	100,00			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	129.984.800	129.931.800	99,96			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	330.001.600	329.972.700	99,99			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	304.677.074	304.551.900	99,96			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	1	1	255.992.000	248.286.650	96,99			
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	per tayang	24	24	240.991.399	240.390.900	99,75			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**414.517.550**	**413.128.200**	**99,66**			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	71.500.000	71.300.000	99,72			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	133.877.850	133.413.500	99,65			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	15	209.139.700	208.414.700	99,65			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**5.711.085.306**	**5.027.256.906**	**88,03**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	1965	1965	19.658.448	19.650.000	99,96			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	12	189.474.386	174.504.475	92,10			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	OB	170	170	5.501.952.472	4.833.102.431	87,84			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**1.339.486.150**	**1.299.262.900**	**97,00**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	53	53	236.800.000	217.945.700	92,04			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	m2	88132	88132	962.186.150	940.817.200	97,78			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	1	1	140.500.000	140.500.000	100,00			
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Program Pengembangan Perumahan**	**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki**	**Unit**	**10,00**	**10,00**	**212.500.000**	**212.500.000**	**99,83**			
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Becana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota					212.500.000	212.500.000	100,00			
		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Meningkatnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Paket	1	1	212.500.000	212.500.000	100,00			
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Program Kawasan Permukiman**					**2.889.264.400**	**2.860.209.150**	**98,99**			
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**pendataan lokasi kumuh**	**paket**	1	1	**961.134.400**	**948.403.700**	**98,68**			
		Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Meningkatmya Luas Kawasan Kumuh Yang ditangani Sesuai dengan surat keputusan	Paket	1	1	961.134.400	948.403.700	98,68			
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Pendamping RUTILAHU di Kabupaten Purwakarta**	**Paket**			**1.928.130.000**	**1.911.805.450**	**99,15**			
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Terlaksnanya Rencana Tapak	Ha	4	4	340.000.000	335.972.950	98,82			
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatanya Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani sesuai dengan surat keputusan	Lokasi / 1 Paket	53/1	53/1	1.407.630.000	1.407.630.000	100,00			
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi	Ha	4	4	180.500.000	168.202.500	93,19			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**Jumlah Pembangunan Prasarana Sarana Unitilitas Penunjang Perumahan**	**Unit**	**10**	**2**	**826.584.600**	**799.753.418**	**96,75**			
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					**826.584.600**	**799.753.418**	**96,75**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi	Unit	10	10	826.584.600	799.753.418	96,75			
5		**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana**					**15.557.043.611**	**13.602.958.204**	**87,44**			
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					**15.557.043.611**	**13.602.958.204**	**95,53**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B	BB	**14.126.419.397**	**12.542.585.654**	**88,79**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	86,42						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**69.833.100**	**68.443.600**	**98,01**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	2	2	14.961.800	14.961.800	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun	Dokumen	1	1	14.988.400	14.988.400	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	14.996.200	14.996.200	100,00			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perengkat daerah	Dokumen	1	1	24.886.700	23.497.200	94,42			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**7.443.165.250**	**6.468.518.200**	**86,91**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	orang/bulan	42	42	7.399.179.050	6.426.415.000	86,85			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	1	1	14.962.400	14.962.400	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dokumen	1	1	14.061.900	14.018.900	99,69			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	12	12	14.961.900	13.121.900	87,70			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**29.999.700**	**17.802.500**	**59,34**			
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	**1**	**1**	10.000.000	850.000	8,50			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Laporan	1	1	9.999.900	8.833.400	88,33			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dilaksanakan	Laporan	1	1	9.999.800	8.119.100	81,19			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**463.965.400**	**442.406.100**	**95,35**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibutuhkan	Paket	4	4	393.965.400	391.227.200	99,30			
		Monitaring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	20.000.000	19.048.900	95,24			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah paket diklat yang dilaksanakan	Paket	1	1	50.000.000	32.130.000	64,26	ada diklat yang anggarannya ditanggung oleh pihak penyelenggara		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**865.860.804**	**828.447.578**	**95,68**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan	paket	1	1	73.288.800	73.285.900	100,00			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan	paket	4	4	67.499.200	67.484.300	99,98			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan-bahan logistik kantor yang disediakan	paket	16	16	492.612.250	467.477.450	94,90			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	paket	1	1	58.460.554	53.826.000	92,07			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laoran fasilitasi penyediaan makanan dan minuman yang dibutuhkan	laporan	1	1	20.000.000	20.000.000	100,00			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan kegiatan rapat dan konsultasi yang dilaksanakan	Laporan	12	12	154.000.000	146.373.928	95,05			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**238.204.500**	**234.631.000**	**98,50**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah barang mebeleur yang akan dibeli	Unit	2	2	107.259.900	106.813.500	99,58			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah aset lainnya yang dibeli	item	1	1	24.999.800	24.967.500	99,87			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah barang yang akan dibeli	item	10	10	105.944.800	102.850.000	97,08			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**4.563.261.443**	**4.056.846.476**	**88,90**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan materai dan buku cek yang dibutuhkan	Laporn	1	1	10.000.000	10.000.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan	bulan	12	12	169.947.755	132.094.310	77,73			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Jasa Tenaga Kebersihan yang dibutuhkan	orang/bulan	111	111	4.383.313.688	3.914.752.166	89,31			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**452.129.200**	**425.490.200**	**94,11**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan jabatan yang dipelihara/ditingkatkan	unit	12	12	94.999.800	89.186.900	93,88			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/dibayarkan pajaknya	unit	23	0	29.999.600	9.921.400	33,07	adanya subsidi pajak kendaraan bermotor		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	unit	70	70	50.000.000	50.000.000	100,00			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bagian gedung kantor yang dipelihara/ditingkatkan/dipeliharа	unit	2	2	227.130.600	226.383.000	99,67			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara/ditingkatkan	unit	25	0	24.999.800	24.999.500	100,00			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	25	0	24.999.400	24.999.400	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**Persen**	**100,00**	**77,61**	**1.430.624.214**	**1.060.372.550**	**74,12**			
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					**1.078.124.214**	**751.784.650**	**69,73**			
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah personil kegiatan pencegahan kebakaran dalam daerah yang dilaksankan	Orang	50	50	25.000.000	21.220.000	84,88			
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	48	48	97.500.000	91.099.900	93,44			
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jenis Pemeliharaan	29	15	450.000.000	218.000.000	48,44			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegaha, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, Bahan Bakar Minyak	Jenis	25	25	344.424.214	290.659.750	84,39			
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlahpeserta Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	32	32	136.200.000	130.805.000	96,04			
		Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	6	0	0	0	0,00			
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah peserta Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	20	20	25.000.000	12.708.800	50,84			
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					**50.000.000**	**49.999.200**	100,00			
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	1	25.000.000	24.999.600	100,00			
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	37	37	25.000.000	24.999.600	100,00			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					**165.000.000**	**163.079.700**	**98,84**			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyaraka	Kegiatan	34	34	50.000.000	50.000.000	100,00			
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran	Orang	65	65	50.000.000	50.000.000	100,00			
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Barang Bantuan Sarana Pemadam Kebakaran yang diberikan	Paket	1	1	65.000.000	63.079.700	97,05			
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					**137.500.000**	**132.799.400**	**96,58**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyelenggaraan Operasi Pencairan dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	laporan	48	48	137.500.000	132.799.400	96,58			
6		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**					**6.416.900.064**	**5.694.785.180**	**88,75**			
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					**6.416.900.064**	**5.694.785.180**	**88,75**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah;**	**Opini**	**B**	**BB**	**4.982.049.608**	**4.436.452.580**	**89,05**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**100,00**	**89,05**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**53.090.600**	**52.210.600**	**98,34**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	13.394.800	13.394.800	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	6.553.300	6.533.300	99,69			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	4.978.100	4.978.100	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	11.544.000	11.544.000	100,00			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	16.620.400	15.760.400	94,83			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**1.849.918.950**	**1.631.505.292**	**88,19**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	17	17	1.835.002.350	1.616.588.692	88,10			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	4.997.800	4.997.800	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	4.951.900	4.951.900	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	1	4.966.900	4.966.900	100,00			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**15.769.100**	**11.610.000**	**73,63**			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	4.883.200	4.220.000	86,42			
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	3.150.000	1.770.000	56,19			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	7.735.900	5.620.000	72,65			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**186.798.800**	**143.637.700**	**76,89**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	60	60	124.820.000	124.665.800	99,88			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	2.999.900	2.993.000	**99,77**			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	2.980.000	1.860.000	62,42			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	5.998.900	4.618.900	77,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	5	50.000.000	9.500.000	19,00			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**351.426.368**	**321.597.143**	**91,51**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	29.986.500	29.928.500	99,81			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	16.119.000	16.000.000	99,26			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	92.418.118	64.712.100	**70,02**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	17.902.750	17.900.000	99,98			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	36	20.000.000	19.300.000	96,50			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	175.000.000	173.756.543	99,29			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**675.224.250**	**614.525.000**	**91,01**			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	402.230.000	342.380.000	85,12			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	25	26.598.000	26.570.000	99,89			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21	21	46.867.200	46.435.000	99,08			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	14	14	141.893.750	141.815.000	99,94			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7	57.635.300	57.325.000	99,46			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.571.419.240**	**1.393.654.214**	**88,69**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	2.500.000	2.500.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	76.101.000	56.268.079	73,94			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.492.818.240	1.334.886.135	89,42			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**278.402.300**	**267.712.631**	**96,16**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	17.000.000	15.000.000	88,24			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	147.688.700	141.885.890	96,07			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	3.090.400	1.155.741	37,40			
		Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	99.823.200	99.711.000	99,89			
		Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	Unit	4	4	2.440.000	2.440.000	100,00			
		Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	Unit	14	14	8.360.000	7.520.000	89,95			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administra	**Program Penanggulangan Bencana**	**Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**1.434.850.456**	**1.258.332.600**	**87,70**			
			Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhada Bencana	**Persen**	**100,00**	**100,00**						

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	si Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE		**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**				**403.177.506**	**355.782.650**	**88,24**			
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	175.000.000	172.383.000	98,50			
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	250	250	228.177.506	183.399.650	80,38			
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Sub Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				**666.672.850**	**567.063.300**	**85,06**			
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	50	77	75.000.000	74.900.000	99,87	-	-	
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	5	5	431.672.850	382.278.300	88,56			
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	50	54	60.000.000	59.900.000	99,83	-	-	
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	50	50	50.000.000	-	0,00	-	-	
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	50	63	50.000.000	49.985.000	99,97	-	-	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Sub Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				**210.000.100**	**196.193.000**	**93,43**			
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1	2	15.000.000	14.620.000	97,47	-	-	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	50	12002	15.000.100	14.999.900	100,00	-	-	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100	105	150.000.000	140.513.100	93,68			
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	1	15.000.000	15.000.000	100,00	-	-	
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan	Dokumen	1	1	15.000.000	11.060.000	73,73			
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Sub Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				**155.000.000**	**139.293.650**	**89,87**			
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	75.000.000	74.582.500	99,44			
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	1	1	50.000.000	49.922.250	99,84			
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	1	30.000.000	14.788.900	49,30	-	-	
7		**Satuan Polisi Pamong Praja**					**21.813.975.402**	**20.465.173.514**	**93,82**			
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					**21.813.975.402**	**20.465.173.514**	**93,82**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**BB**	**19.833.827.152**	**18.603.550.814**	**93,80**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**90,00**	**90,00**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**45.411.900**	**45.411.900**	**100,00**	-	-	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	14.243.900	14.243.900	100,00	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	17.064.000	17.064.000	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	14.104.000	14.104.000	100,00	-	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**11.792.841.718**	**11.190.485.720**	**94,89**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	97	97	11.785.097.418	11.183.661.420	94,90	-	-	
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapora	1	-	7.744.300	6.824.300	88,12	-	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**371.866.100**	**369.775.300**	**99,44**	-	-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3	3	301.802.500	301.100.000	99,77	-	-	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	10.019.300	9.979.300	99,60	-	-	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	10.044.300	8.804.300	87,65	-	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	100	50.000.000	49.891.700	99,78	-	-	
		Administrasi Umum Perangkat Derah					**615.216.865**	**604.376.400**	**98,24**	-	-	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	42.811.000	42.811.000	100,00	-	-	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1	20.266.400	20.266.400	100,00	-	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	6	6	307.878.500	307.819.500	99,98	-	-	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	Paket	2	2	96.231.500	85.731.500	89,09	-	-	
		Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	148.029.465	147.748.000	99,81	-	-	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.					**239.775.800**	**239.015.150**	**99,68**	-	-	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	57	57	122.015.000	121.865.000	99,88	-	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7	117.760.800	117.150.150	99,48	-	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.					**5.823.098.469**	**5.262.540.444**	**90,37**	-	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	92.008.733	82.960.904				
		Penyediaan jasa pelayananan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakn	Laporan	12	12	5.731.089.736	5.179.579.540	90,38		-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.					**945.616.300**	**891.945.900**	**94,32**	-	-	
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	30	30	641.355.300	605.785.100				
		Pemeiharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	15	15	64.600.000	47.100.000	72,91	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	2	239.661.000	239.060.800	99,75	-	-	
	Meningkatnya Penerapan Reformasi	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Frekuensi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum**	**%**	**100,00**	**100,00**	**1.980.148.250**	**1.861.622.700**	**94,01**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		**Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Ketertiban Umum Yang Tertangani**	**%**	**100,00**	**100,00**						
			Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian / Penertiban Trantibmas	**Kegiatan**	**40,00**	**40,00**						
			Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban Terhadap Asset Daerah	**Kegiatan**	**8,00**	**8,00**						
			Jumlah Warga Negara, Badan Hukum dan Aparatur Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	**%**	**72,00**	**72,00**						
			Jumlah Anggota Satpol. PP. Yang Mengikuti Diklat/Bimtek	**Jumlah**	**98,00**	**98,00**						
			Persentase Anggota Satpol. PP. Yang Dibina Karena Pelanggaran Disiplin (PNS/Non PNS)	**%**	**100,00**	**100,00**						
			Frekuensi Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Anggota Satpol. PP. (PNS/Non PNS)	**Kali**	**48,00**	**48,00**						
			Persentase Anggota Satlinmas Yang Dibina	**%**	**20,00**	**20,00**						
			Jumlah Pembinaan Potensi Masyarakat	**Kegiatan**	**10,00**	**10,00**						
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah					**1.398.234.650**	**1.397.220.500**	**99,93**	-	-	
		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.	Jumlah Kasus gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus	95	95	641.123.650	641.123.500	**100,00**	-	-	
		Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan	Kasus	30	30	302.425.000	302.425.000	**100,00**	-	-	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan									
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	4	4	260.687.000	259.997.000	**99,74**	-	-	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Kegiatan SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Manusia	Kegiatan	3	3	100.000.000	99.676.000	**99,68**	-	-	
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	3	3	93.999.000	93.999.000	**100,00**	-	-	
		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota					**581.913.600**	**464.402.200**	**79,81**	-	-	
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kegiatan	2	2	202.765.440	139.190.900	68,65	-	-	
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	22	22	75.000.000	72.383.100	96,51	-	-	
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	5	5	304.148.160	252.828.200	83,13	-	-	
8		**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					**10.024.541.085**	**8.744.738.024**	**16,14**			
		Sosial					**10.024.541.085**	**8.744.738.024**	**15,30**			
	Meningkatnya		**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**B**	**7.998.641.735**	**6.874.557.924**	**85,95**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran**	**Persen**	**90,00**	**88,60**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**123.350.000**	**35.766.400**	**29,00**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	10.153.900	9.645.200	94,99			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	4.960.000	4.036.300	81,38			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	4.937.900	4.474.800	90,62			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	43.984.000	8.767.300	19,93			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	59.314.200	8.842.800	14,91			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**6.293.558.319**	**5.484.839.518**	87,15			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	41	41	6.280.434.019	5.475.895.218	87,19			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	13.124.300	8.944.300	68,15			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**4.903.400**	**4.899.600**	**99,92**			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	20	4.903.400	4.899.600	99,92			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**130.638.000**	**128.192.000**	**98,13**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	67.450.000	67.450.000	100,00			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	40	63.188.000	60.742.000	96,13			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**279.106.950**	**247.614.100**	**88,72**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	29.999.100	29.543.000	98,48			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	24.986.000	24.944.700	99,83			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	106.382.150	106.111.200	99,75			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	34.440.000	31.000.000	90,01			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	9	21.000.000	8.900.000	42,38			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	52.300.000	37.120.000	70,98			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	9.999.700	9.995.200	99,95			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**184.645.050**	**94.475.000**	**51,17**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	44	44	89.777.750	-	-			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	27.321.400	27.230.000	99,67			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	67.545.900	67.245.000	99,55			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**745.597.016**	**646.641.306**	**86,73**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	119.222.000	88.520.147	74,25			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	7	626.375.016	558.121.159	89,10			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**236.843.000**	**232.130.000**	**98,01**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	8	60.600.000	59.129.000	97,57			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	34.500.000	32.146.000				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	101.943.000	101.465.000	-			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	65	65	39.800.000	39.390.000	98,97			
	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina**	**Lembaga**	**30,00**	**30,00**	**284.476.000**	**246.313.500**	**86,58**			
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1		**284.476.000**	**246.313.500**	**86,58**			
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga kesejahteraan sosial yang melaksankan pendataan	Orang	19	19	55.035.900	16.935.900	31,00	belum tersedianya SLRT sistem layanan rujukan terpadu dan puskessos	Mengusulkan Peminda h tangana n Aset Provinsi Jabar yang berlamat di desa ciwareng berupa Rumah	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
											singgah untuk dijadikan SLRT	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan yang melaksanakan pendataan	Orang	17	17	29.440.200	29.440.200	100,00			
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang mengikuti kegiatan	LKSA	31	31	199.999.900	199.937.400	100,00	-	-	
	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Persen**	**85,00**	**94,23**	**339.997.700**	**321.541.700**	**94,57**			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1	**93,57**	**249.999.100**	**249.903.100**	**99,96**			
		Penyediaan Permakanan	Penanganan Disabilitas; Pemberian bantuan kepada Lansia usia produktif terlantar, pemberian Bantuan LKS	Penangan Disbilitas = 50 org Lansia terlantar = 200 org LKS = 2 lembaga	42	42	49.999.300	49.903.300	100,00	Jumlah Penyandang disabiltas terlantar , lanjut uisa terlantar, serta gelandangan dan pengemis unpredictabel sehingga kesulitan dalam menganalisa jenis permakanan	unpredictable, satuan berupa paket pada SIPD tidak usah di rinci komponen belanja	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas	orang	72	72	149.999.800	149.999.800	100,00	penyedian alat	menmgusulkan	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
										bantutidak berbanding lurus dengan populasi	pada tim TAPD untuk menambah item alat bantu dan kuantiti pada SIPD	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terfasilitasinya Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	orang	40	40	49,999,300	49,999,301	100,00			
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi akses layanan pendidikan kesehatan dasar	orang	20	20	50.000.000	50.000.000	100,00	-	-	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					**89.998.600**	**71.638.600**	**79,60**			
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Terfasilitasi layanan kedaruratan	orang	17	17	49.999.600	31.699.600	63,40	-	-	
		Penyediaan Sandang	Tersedianya Sandang	org	70	70	39.999.000	39.939.000	100,00	-	-	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terfasilitasinya penelusuarn keluarga	org			41.385.400	41.385.400	83,00			
	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Jumlah Anak Terlantar Yang Dibina**	**Persen**	**20,00**	**206,00**	**1.143.374.550**	**1.049.309.900**	**91,77**	**-**	**-**	
			Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Diberdayaankan	**Persen**	**90,00**	**87,00**						
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					**39.029.600**	**38.391.100**	98,36			
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dijankau	org	25	46	22.529.900	22.179.500	98,44	-	-	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah LKSA yang melaksaanakan Pemeliharaan anak terlantar	org	25	46	7.000.000	6.711.900	95,88	-	-	
		Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah LKSA yang melaksanakan Layanan Kepada Anak Terlantar	LKSA	25	46	9.499.700	9.499.700	100,00	-	-	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					**1.104.344.950**	**1.010.918.800**	**91,54**			
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data PBI JKN yang telah di Verifikasi dan Validasi	dokumen	1	1	94.899.900	90.644.400	95,52	Pendataan Fakir miskin oleh desa melalui operator Desa blm updating secara berkala dilakukan	Meningkatkan Kualitas SDM dan Sarpras	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin/DTKS yang harus dimuktakhirkan	dokumen	1	1	125.381.700	121.877.500	97,21	Ada yang diusulkan untuk di hapus karena naik status blm bisa di approval oleh Kemensos	Koordinasi secara intens dengan instansi vertikal	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitator BPNT; Jumlah Keluarga penerima manfaat dan jumlah laporan (PKH dan BPNT)	orang, kk, buku	115 org, 26391 kk dan 24 buku	115 org, 26391 kk dan 24 buku	884.063.350	798.396.900	90,31	-	-	
	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	**Program Penanganan Bencana**	**Persentase Dukungan Terhadap Penanganan Bencana**	**Persen**	**100,00**	**99,77**	**95.520.700**	**91.042.000**	**50,25**			
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					**35.060.000**	**31.420.000**	**89,62**			
		Penyediaan Makanan	Tersedinya permakanan untuk korban bencana	orang	70	**70**	43.768.000	43.489.000	**99,00**	-	-	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Sandang	Tersedinya Sandang untuk korban bencana	orang	70	**70**	34.955.000	34.955.000	**100,00**			
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Lokasi Sarana dan Prasarana Korban Bencana	Lokasi	1	1	19.200.000	15.600.000	81,25			
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	jumlah lokasi satgas bencana alam dan sosial	Lokasi	1	1	15.860.000	15.820.000	100,00			
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Pemberian bimbingan terapi healing korban bencana	orang	20	20	45.000.100	45.000.100	100,00	-	-	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					**60.460.700**	**59.622.000**	**98,61**			
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM TAGANA	orang	18	18	60.460.700	59.622.000	98,61	-	-	
	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase Dukungan Terhadap Layanan Makam Pahlawan**	**Persen**	**85,00**	**88,00**	**162.530.400**	**161.973.000**	**99,66**			
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					**162.530.400**	**161.973.000**	**99,66**			
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Taman Makam ahlawan	Persentase	100	100	20.579.950	20.579.950	**100,00**			
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Luas taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Ha	4	4	162.530.400	161.973.000	99,66	-	-	

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Tingkat pencapaian Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar di Kabupaten Purwakarta sangat didukung oleh perangkat daerah pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar selama Tahun 2023. Kabupaten Purwakarta mengalokasikan Pagu anggaran untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp269.043.589.296,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp238.107.271.631,00 atau terealisasi sebesar 88,50%, dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Tahun 2023

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**269.043.589.296**	**238.107.271.631**	**88,50**			
1		**Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**					**14.008.872.714**	**11.210.805.690**	**80,03**			
		Tenaga Kerja					**14.008.872.714**	**11.210.805.690**	**80,03**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**10.634.127.724**	**8.184.946.690**	**76,97**			
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	**Opini**	**B**	**B**						
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**100,00**	**85,00**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**70.000.000**	**69.258.300**	**98,94**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	10.000.000	9.925.900	99,26			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	9.931.700	99,32			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	9.503.700	95,04			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	1	1	10.000.000	9.996.900	99,97			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD									
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	9.977.900	99,78			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	10.000.000	9.966.000	99,66			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	10.000.000	9.956.200	99,56			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**7.185.766.144**	**5.993.197.359**	**83,40**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BulanOrang	12 45	12 45	7.165.766.144	5.973.245.859	83,36			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	10.000.000	9.996.600	99,97			
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	10.000.000	9.954.900	99,55			
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**10.000.000**	**9.983.400**	**99,83**			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	1	1	10.000.000	9.983.400	99,83			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**80**	**120.000.000**	**76.401.500**	**63,67**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	2	70.000.000	69.570.000	99,39			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	2	50.000.000	6.831.500	13,66			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**649.071.100**	**513.972.100**	**79,19**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	61.993.800	53.183.600	85,79			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	100.000.000	96.348.000	96,35			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	1	1	177.077.300	132.856.100	75,03			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	100.000.000	79.861.100	79,86			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	1	1	100.000.000	90.898.700	90,90			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100.000.000	50.825.000	50,83			
		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	9.999.600	100,00			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**400.000.000**	**0,00**	**0,00**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Paket	1	0	200.000.000	0,00	0,00			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	15	0	200.000.000	0,00	0,00			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**1.283.590.480**	**932.486.631**	**72,65**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	6.000.000	5.500.000	91,67			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	1	1	379.835.464	218.157.015	57,43			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	1	1	897.755.016	708.829.616	78,96			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**915.700.000**	**589.647.400**	**64,39**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	78.400.000	52.791.700	67,34			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	8	67.300.000	21.271.700	31,61			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	10	10	20.000.000	17.320.000	86,60			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	200.000.000	199.513.000	99,76			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	400.000.000	199.340.000	49,84			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	150.000.000	99.411.000	66,27			
	Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**					**2.476.822.290**	**2.337.532.100**	**94,38**			
			Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Bagi Pencari Kerja	**Orang**	**176**	**428**						
			Jumlah Tenaga Kerja Produktif Pada Industri Kecil	**Orang**	**45**	**16**						
		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih**	**Persen**	**95,00**	**97,87**	**1.976.822.290**	**1.934.762.100**	**97,87**			
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Orang	176	176	1.206.822.290	1.195.203.800	99,04			
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pada Tahun n	Lembaga	4	4	770.000.000	739.558.300	96,05			
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Jumlah LPK Swasta Yang Terakreditasi**	**Persen**	**60,00**	**100,00**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100,00**			
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	Lembaga	20	20	20.000.000	20.000.000	100,00			
		Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	**Tenaga Kerja Produktif Pada Perusahaan Kecil**	**Persen**	**80,00**	**51,46**	**200.000.000**	**102.920.000**	**51,46**			
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil Yang Mendapat	Perusahaan	45	16	200.000.000	102.920.000	51,46			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Konsultasi Peningkatan Produktivitas									
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Tenaga Kerja Kompeten dan Produktif**	**Persen**	**95,00**	**99,52**	**280.000.000**	**279.850.000**	**99,95**			
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja Ditingkat Daerah	Dokumen	1	1	280.000.000	279.850.000	99,95			
	Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja	**Program Penempatan Tenaga Kerja**					**686.122.700**	**555.262.400**	**80,93**			
			Persentase Calon Tenaga Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	**Persen**	**90,00**	**152,38**						
			Persentase Pelatihan Kewirausahaan	**Persen**	**95,00**	**81,32**						
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000**	**50.000.000**	**100,00**			
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	600,00	600,00	50.000.000	50.000.000	100,00			
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persen**	**75,00**	**75,00**	**193.200.000**	**192.937.600**	**99,86**			
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	75	75	193.200.000	192.937.600	99,86	-		
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100,00**	**90,00**	**392.922.700**	**262.699.600**	**66,86**			
		Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI Yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	450	360	122.922.700	50.277.000	40,90			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna Yang Diberdayakan	Orang	32	32	270.000.000	212.422.600	78,68			
		Penertiban Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penertiban Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**80,00**	**100,00**	**50.000.000**	**49.625.200**	**99**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	Dokumen	50	100	50.000.000	49.625.200	99,25			
	Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja	**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**	**Persen**	**100,00**	**72,08**	**211.800.000**	**133.064.500**	**62,83**	Adanya ketidaksesuaian rincian kegiatan sehingga harus dirubah pada saat APBD-P	Melakukan Perubahan rincian kegiatan pada saat APBD-P, namun karena keterbatasan APBD sehingga tidak dapat dicairkan	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**84.062.500**	**63.822.800**	**75,92**			
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja Yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek Serta Pengupahan	Kegiatan	1	1	84.062.500	63.822.800	75,92		-	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan	**Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**127.737.500**	**69.241.700**	**54,21**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**									
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Yang Dicegah	Perkara	1	1	100.000.000	59.641.700	59,64			
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan Yang Terselesaikan	Perkara	1	1	27.737.500	9.600.000	34,61			
2		**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					**1.074.210.837**	**906.256.700**	**84,36**			
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					**1.074.210.837**	**906.256.700**	**84,36**			
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase Peranserta Gender Dalam Pembangunan**	**Persen**	**90,00**	**90,00**	**448.238.600**	**350.924.100**	**78,29**			
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga					**86.271.600**	**70.239.100**	**81,42**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota										
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Dokumen	1	1	46.135.200	34.589.200	74,97			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pengembangan Ruangruang Publik yang responsif Gender	Jumlah Peserta	30	30	40.136.400	35.649.900	88,82			
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					**50.677.500**	**11.591.500**	**22,87**			
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksanaya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang Politik, Hukum, sosial dn ekonomi	Dokumen	1	1	50.677.500	11.591.500	22,87	-	-	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					**311.289.500**	**269.093.500**	**86,44**			
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	311.289.500	269.093.500	86,44			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	**Program Perlindungan Perempuan**	**Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**Persen**	**90,00**	**100,00**	241.288.784	214.422.700	88,87			
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					**175.288.784**	**158.588.700**	**90,47**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; Jumlah tim penanganan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan; Jumlah visum korban kekerasan bagi perempuan	Dokumen	1	1	13.288.784	13.088.700	98,49			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peranagkat Daerah yang mengikuti advokasi Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	24	24	162.000.000	145.500.000	89,81			
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**				**66.000.000**	**55.834.000**	**84,60**			
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan korban kekerasan tingkat kab/kota yang mendapat pelayanan pengaduan	Orang	90	92	54.000.000	43.870.000	81,24			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan	Jumlah layanan tindak lanjut pen gaduan yang memerlukan koordinasi	Layanan	40	44	12.000.000	11.964.000	99,70			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	dan sinkronisasi bagi permpuan korban kekerasan kewenangan kab/kota									
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**158.425.300**	**117.550.800**	**74,20**			
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**55.229.200**	**53.930.700**	**97,65**			
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksana kegiatan pendampingan	Dokumen	1	1	55.229.200	53.930.700	97,65			
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					**103.196.100**	**63.620.100**	**61,65**			
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	103.196.100	63.620.100	61,65			
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Persentase Pemenuhan Hak Anak**	**Persen**	**67,00**	**100,00**	**185.000.000**	**184.045.400**	**99,48**			
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					**58.000.000**	**57.711.600**	**99,50**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, non Pemerintah , Media dan Dunia usaha kewenangan kab/kota	Organisasi	30	30	58.000.000	57.711.600	99,50			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					**127.000.000**	**126.333.800**	**99,48**			
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	127.000.000	126.333.800	99,48			
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase Pemenuhan Perlindungan Khusus Hak Anak**	**Persen**	**65,00**	**100,00**	**41.258.153**	**39.313.700**	**95,29**			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					**41.258.153**	**39.313.700**	**95,29**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang memperoleh bantuan kebutuhan khusus	Dokumen	1	1	41.258.153	39.313.700	95,29			
3		**Dinas Pangan dan Pertanian**					**14.376.588.314**	**13.301.015.908**	**92,52**			
		Pangan					**14.376.588.314**	**13.301.015.908**	**92,52**			
							13.849.586.989	**12.827.689.808**	**92,62**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**BB**	**BB**						
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**47.193.200**	**46.255.100**	**98,01**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengawasan Interen	Dokumen	1	1	25.000.000	24.062.800	96,25			
			Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja SKPD	Dokumen	1	1						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	1	8.763.400	8.763.400	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.457.400	3.457.400	100,00			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	9.972.400	9.971.500	99,99			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**11.089.721.126**	**10.422.986.457**	**93,99**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang	100	100	11.079.593.926	10.412.971.907	93,98			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	4	4.550.300	4.484.950	98,56			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4	5.576.900	5.529.600	99,15			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**225.000.000**	**185.250.000**	**82,33**			
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	0	25.000.000	25.000.000	100,00			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	150	150	75.000.000	75.000.000	100,00			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	150	5	75.000.000	35.250.000	47,00	Belum terlaksanany a kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Keterbatasan anggaran dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	0	50.000.000	50.000.000	100,00			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**619.451.731**	**551.813.290**	**89,08**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	19.993.300	19.993.300	100,00			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	95.348.900	92.900.000	97,43			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1	31.429.800	28.319.600	90,10			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	140.649.731	137.308.700	97,62			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	20.000.000	19.140.000	95,70			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	10	10	25.000.000	17.200.000	68,80	Kode rekening tidak sesuai dengan kebutuhan	Memperbaiki dalam pengajuan SBU	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	227.030.000	226.951.690	99,97			
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	60.000.000	10.000.000	16,67	Ada anggaran yang belum di bayarkan	Anggaran dibayar tahun berikutnya sebagai hutang	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**233.040.900**	**227.397.000**	**97,58**			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	12	2	54.834.000	54.050.000	98,57			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	2	87.530.300	87.340.000	99,78			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	90.676.600	86.007.000	94,85			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**1.022.230.032**	**885.809.879**	**86,65**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	5.000.000	2.000.000	40,00	Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Keterbatasan anggaran dalam kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	170.000.000	134.984.162	79,40			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12	12	847.230.032	748.825.717	88,39			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**612.950.000**	**508.178.082**	**82,91**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	75	75	224.500.000	188.427.807	83,93			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	25	86.000.000	65.681.275	76,37			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	62.450.000	55.070.000	88,18			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	240.000.000	198.999.000	82,92			
	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan	**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**					**515.755.825**	**462.580.600**	**89,69**			
			Persentase ketersediaan beras terhadap kebutuhan beras daerah	**Persen**	**151,47**	**163,00**						
			Persentase ketersediaan Bahan Makanan	**Persen**	**103,02**	**170,00**						
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					**258.460.000**	**207.186.200**	**80,16**			
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	1	200.100.000	149.415.600	74,67			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	1	1	9.960.000	9.960.000	100,00			
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksana Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	12	12	23.400.000	23.400.000	100,00			
		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	4	4	25.000.000	24.410.600	97,64			
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					**70.854.225**	**70.853.700**	**100,00**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	5.561.325	5.561.300	100,00			
		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton	20	20	65.292.900	65.292.400	100,00			
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					**186.441.600**	**184.540.700**	**98,98**			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemerdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	Laporan	1	1	97.441.600	97.441.600				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun.	Laporan	1	1	89.000.000	87.099.100	97,86			
	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Persentase penanganan kerawanan pangan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**11.245.500**	**10.745.500**	**95,55**			
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota					11.245.500	10.745.500	95,55			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	11.245.500	10.745.500	95,55			
4		**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**					**1.113.865.750**	**1.058.453.100**	**95,03**			
		Pertanahan					**1.113.865.750**	**1.058.453.100**	**95,03**			
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Persentase Konflik Pertanahan Yang Terfasilitasi dan SOP Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**244.209.950**	**224.247.200**	**91,83**			
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**2**	**2**	**244.209.950**	**224.247.200**	**91,83**			
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	244.209.950	224.247.200	91,83			
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Program Pengelolaan Tanah Kosong**	**Presentase Laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**869.655.800**	**834.205.900**	**95,92**			
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	**Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi**	**Laporan**	**4**	**4**	**869.655.800**	**834.205.900**	**95,92**			
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Laporan	4	4	869.655.800	834.205.900	95,92			
5		**Dinas Lingkungan Hidup**					**41.668.920.433**	**36.497.806.813**	**87,59**			
		Lingkungan Hidup					**41.668.920.433**	**36.497.806.813**	**87,59**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**36.499.962.344**	**31.947.552.639**	**87,53**			
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	**Opini**	**B**	**A**						
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**100**	**87,53**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**39.490.000**	**37.001.900**	**93,70**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	1	14.651.700	13.659.800	93,23			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	1	9.938.100	9.429.500	94,88			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reallisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	14.900.200	13.912.600	93,37			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**12.915.714.659**	**11.629.016.708**	**90,04**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gajid dan Tunjangan ASN	Bulan Orang	14 130	10	12.894.408.759	11.609.633.608	90,04			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Dokumen	4	4	9.600.000	9.600.000	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	11.705.900	9.783.100	83,57			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**1.119.219.000**	**589.919.000**	**52,71**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1	1.069.219.000	567.000.000	53,03			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	128	13	50.000.000	22.919.000	45,84			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**6.503.617.862**	**6.187.689.636**	**95,14**			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	44.998.800,00	36.498.200,00	81,11			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	6.286.519.062,00	6.015.773.450,00	95,69			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	6	72.500.000,00	61.040.000,00	84,19			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	6	25.000.000,00	5.300.000,00	21,20			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	10	74.600.000,00	69.077.986,00	92,60			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**251.443.500,00**	**248.755.000,00**	**98,93**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	29	29	28.620.500,00	28.420.000,00	99,30			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	222.823.000,00	220.335.000,00	98,88			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**12.030.005.888**	**10.872.095.993**	**90,37**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4	5.000.000	2.000.000	40,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	10	249.973.584	158.744.149	63,50			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	10	11.775.032.304	10.711.351.844	90,97			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda					**3.640.471.435**	**2.383.074.402**	**65,46**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	100.000.000	94.076.400	94,08			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	2.714.999.450	1.765.394.002	65,02			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Unit	1	1	125.471.985	124.950.000	99,58			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	Unit	3	3	700.000.000	398.654.000	56,95			
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persen**	**100,00**	**35,51**	**390.915.000**	**138.817.500**	**35,51**	Dokumen telaahan pengendalian pelaksanaan RPPLH tidak terealisasi karena harus dilaksanakan kajian-kajian terlebih dahulu	Melaksanakan kajian pada tahun berikutnya serta mengadakan konsultasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					**390.915.000**	**138.817.500**	**35,51**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota yang Disusun	Dokumen	5	5	100.000.000	98.163.500	98,16			
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaah Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten / Kota	Dokumen	5		290.915.000	40.654.000	13,97			
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Tingkat Adaptasi dan Mitigasi Perubahan iklim**	**Persen**	**100,00**	**93,60**	**1.157.545.289**	**1.083.460.914**	**93,60**			
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					**1.082.545.289**	**1.020.064.914**	**94,23**			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	90	55	100.000.000	73.227.537	73,23			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Dokumen	44	44	150.000.000	140.267.300	93,51			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	3	3	150.148.000	149.991.800	99,90			
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan	Dokumen	7	7	682.397.289	656.578.277	96,22			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Dokumen Mutu yang Dilaksanakan									
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					**75.000.000**	**63.396.000**	**84,53**			
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	1	75.000.000	63.396.000	84,53			
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**Persentase Target Pembinaan**	**Persen**	**100,00**	**89,74**	**150.000.000**	**134.614.500**	**89,74**			
		Penyimpanan Sementara Limbah B3					**50.000.000**	**38.913.500**	**77,83**			
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tercapainya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Laporan	1	1	50.000.000	38.913.500	77,83			
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					**100.000.000**	**95.701.000**	**95,70**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan	Dokumen	1	1	100.000.000	95.701.000	95,70			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya									
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Jumlah Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan ke Perusahaan Yang Ada di Purwakarta**	**Lokasi**	**6**	**5**	**126.376.000**	**122.338.800**	**96,81**			
		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota					**126.376.000**	**122.338.800**	**96,81**			
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	60	60	50.000.000	49.479.300	98,96			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen	1	1	76.376.000	72.859.500	95,40			
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Persentase peningkatan pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup yang ditangani**	**Persen**	**100,00**	**81,50**	**300.000.000**	**244.493.100**	**81,50**			
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**300.000.000**	**244.493.100**	**81,50**			
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan	Dokumen	1	1	250.000.000	196.753.200	78,70			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan									
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	Orang	50	50	50.000.000	47.739.900	95,48			
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Persentase kegiatan PROPERDA yang dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**84,46**	**75.000.000**	**63.642.500**	**84,86**			
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**75.000.000**	**63.642.500**	**84,86**			
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	20	20	75.000.000	63.642.500	84,86			
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase pengaduan yang ditangani**	**Persen**	**100,00**	**88,64**	**20.120.000**	**17.835.000**	**88,64**			
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					**20.120.000**	**17.835.000**	**88,64**			
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten / Kota yang Ditindaklanjuti / Ditangani	Dokumen	1	1	20.120.000	17.835.000	88,64			
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Persentase Layanan Persampahan**	**Persen**	**100,00**	**93,08**	**2.949.001.800**	**2.745.051.860**	**93,08**			
		Pengelolaan Sampah					**2.949.001.800**	**2.745.051.860**	**93,08**			
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan	Laporan	4	2	449.643.400	428.303.500	95,25			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali									
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	64.907	58.318,6	1.535.000.000	1.420.565.710	92,54			
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	3	3	489.000.000	425.591.550	87,03			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	3	3	475.358.400	470.591.100	99,00			
6		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					**18.396.811.517**	**17.075.375.913**	**92,82**			
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					**18.396.811.517**	**17.075.375.913**	**92,82**			
	Meningkatnya Penerapan	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**16.701.155.517**	**15.492.504.113**	**92,76**			
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	**Opini**	**B**	**A**						

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		**Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran**	**Persen**	**80,00**	**93,00**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**67.385.500**	**49.575.500**	**73,57**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	1	1	34.157.500	31.725.400	92,88			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	33.228.000	17.850.100	53,72			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**12.806.905.695**	**12.123.234.465**	**94,66**			
		Penyediaan Gaji Pegawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	110	110	12.794.902.895	12.111.532.465	94,66			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	12.002.800	11.702.000	97,49			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**2.365.112.850**	**2.099.871.764**	**88,79**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	item	18	18	71.296.800	71.238.160	99,92			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	1.595.386.850	1.444.877.680	90,57			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	40	40	49.999.100	37.369.800	74,74			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah makan dan minuman rapat	Item Dus	25 500	25 500	334.005.100	283.031.850	84,74			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	9	84.425.000	66.215.000	78,43			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan	130	130	230.000.000	197.139.274	85,71			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**1.102.051.472**	**936.736.288**	**85,00**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai	Lembar	100	100	6.000.000	6.000.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	12	730.506.000	601.620.586	82,36			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	orang	7	7	365.545.472	329.115.702	90,03			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**359.700.000**	**283.086.096**	**78,70**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan roda 4 yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	145.000.000	117.771.446	81,22			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	47	47	32.400.000	17.897.200	55,24			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	100	49.860.000	23.674.000	47,48			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	132.440.000	123.743.450	93,43			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Pendaftaran Penduduk**					**200.720.500**	**195.800.500**	**97,55**			
			Tingkat Kepemilikan KTP Elektronik	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Tingkat Kepemilikan KIA	**Persen**	**100,00**	**52,25**						
			Tingkat Kesadaran Masyarakat	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk					**200.720.500**	**195.800.500**	**97,55**			
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Frekwensi Kegiatan Pelayanan Kependudukan Keliling (Jemput Bola) - Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kali Laporan	17 25	17 25	81.176.500	76.256.500	93,94			
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan	Persen	100	100	119.544.000	119.544.000	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Pencatatan Sipil**					**46.012.000**	**37.440.000**	**76,69**			
			Tingkat Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil :									
			Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran	**Persen**	**100,00**	**100,63**						
			Tingkat Kepemilikan Akta Kematian	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Tingkat Kepemilikan Akta Perkawinan	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Tingkat kepemilikan Akta Perceraian	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
		Pelayanan Pencatatan Sipil					**46.012.000**	**37.440.000**	**81,37**			
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Layanan	17	17	46.012.000	37.440.000	81,37			
							1.448.923.500	**1.349.631.300**	**93,15**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Tingkat Akurasi Data Kependudukan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Persentase Pengelolaan Informasi Kependudukan	**Persen**	**100,00**	**94,00**						
			Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	**Persen**	**100,00**	**91,35**						
			Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Adminduk Yang di Selenggarakan	**Persen**	**100,00**	**82,35**						
			Persentase Pemanfaatan Data Oleh Instansi/Lembaga Pengguna	**Persen**	**100,00**	**80,00**						
			Persentase Inovasi Pelayanan Adminduk	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan**					**124.999.500**	**109.690.300**	**87,75**			
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	Dokumen	3	3	45.000.000	38.524.000	85,61			
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	18	18	79.999.500	71.166.300	88,96			
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					**1.323.924.000**	**1.239.941.000**	**93,66**			
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Gerai Fasilitasi Pemeliharaan Perangkat Layanan Administrasi Kependudukan	Gerai Layanan	19	19	1.209.535.500	1.129.822.000	93,41			
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	18	18	58.301.000	55.431.500	95,08			
		Sosialisasi terkait Pengolahan Informasi	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	116	116	56.087.500	54.687.500	97,50			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Administrasi Kependudukan										
7		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					**22.209.689.060**	**20.162.425.507**	**90,78**			
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					**22.209.689.060**	**20.162.425.507**	**90,78**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**17.467.309.860**	**15.811.582.675**	**90,52**			
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	**Opini**	**B**	**A**						
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**90,00**	**90,00**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**130.023.000**	**130.023.000**	**100,00**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	9.998.300	9.998.300	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	10.048.500	10.048.500	100,00			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	2	109.976.200	109.976.200	100,00			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**4.831.418.204**	**4.354.152.524**	**90,12**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	462	416	4.821.477.904	4.346.852.224	90,16			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	9.940.300	7.300.300	73,44			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					**13.400.000**	**8.400.000**	**62,69**			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	4	4	13.400.000	8.400.000	62,69			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**105.000.000**	**50.000.000**	**47,62**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	50		55.000.000		0,00			
		Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	25	50.000.000	50.000.000	100,00			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**589.663.597**	**430.388.367**	**72,99**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	48.230.900	29.995.800	62,19			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	1	1	39.994.300	37.943.000	94,87			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	3	2	195.188.397	150.156.900	76,93			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	2	2	81.250.000	71.760.000	88,32			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	225.000.000	140.532.667	62,46			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**7.661.749.600**	**7.314.932.100**	**95,47**			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	185	185	7.179.941.100	6.931.502.100	96,54			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Lapangan Yang Disediakan									
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Paket	1	1	180.000.000	99.540.000	55,30			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Untuk Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	11	11	301.808.500	283.890.000	94,06			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**3.651.922.459**	**3.334.254.862**	**91,30**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	5.000.000	2.500.000	50,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	12	207.996.355	177.035.586	85,11			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	11	3.438.926.104	3.154.719.276	91,74			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**484.133.000,00**	**189.431.822,00**	**39,13**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	15	15	138.900.000	80.666.822	58,08			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	320.233.000	99.445.000	31,05			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	40	13	25.000.000	9.320.000	37,28			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	**Program Penataan Desa**	**Persentase fasilitasi penataan wilayah, kewenangan dan sarana prasarana desa**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**1.400.000.000**	**1.383.180.500**	**98,80**			
		Penyelenggaraan Penataan Desa					**1.400.000.000**	**1.383.180.500**	**98,80**			
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Kegiatan	1	1	1.400.000.000	1.383.180.500	98,80			
	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**					**125.000.000**	**118.816.200**	**95,05**			
			Persentase kerjasama desa yang terealisasi	**Persen**	100,00	90,00						
			Persentase pembangunan kawasan pedesaan yang dibentuk	**Persen**	100,00	100,00						
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa					**125.000.000**	**118.816.200**	**95,05**			
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	3	3	125.000.000	118.816.200	95,05			
	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase pembinaan administrasi pemerintahan desa**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**1.530.930.200**	**1.293.061.500**	**84,46**			
			Persentase ketaatan pemenuhan dokumen administrasi pemerintahan desa	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa					**1.530.930.200**	**1.293.061.500**	**84,46**			
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	4	2	100.000.000	59.857.100	59,86			
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	1		50.000.000		0,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	183	183	87.500.000	87.450.000	99,94			
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Orang	549	183	86.500.000	86.450.000	99,94			
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Dokumen	3	3	272.163.200	254.819.800	93,63			
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dokumen	2	2	498.267.000	397.468.200	79,77			
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	1	1	75.000.000	70.290.000	93,72			
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	1	70.000.000	70.000.000	100,00			
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD Yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	366	366	141.500.000	136.639.900	96,57			
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	2	2	150.000.000	130.086.500	86,72			
	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**					**1.686.449.000**	**1.555.784.632**	**92,25**			
			Persentase pemberdayaan/pembinaan lembaga kemasyarakatan desa	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Persentase pengembangan teknologi dan inovasi produk unggulan desa	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan					**1.686.449.000**	**1.555.784.632**	**92,25**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	75.000.000	68.306.000	91,07			
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Yang Ditingkatkan	Desa/Kelurahan	192	192	75.000.000	74.999.500	100,00			
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Paket	2500	2500	600.000.000	514.470.600	85,75			
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	2	2	169.084.000	165.099.000	97,64			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kegiatan	2	2	112.500.000	104.032.232	92,47			
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kegiatan	1	1	529.865.000	521.695.000	98,46			
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	125.000.000	107.182.300	85,75			
8		**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					**22.063.291.753**	**20.126.347.944**	**91,22**			
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					**22.063.291.753**	**20.126.347.944**	**91,22**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**7.738.416.707**	**6.086.925.759**	**78,66**			
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	**Opini**	**B**	**A**						
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**100,00**	**90,00**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**58.680.800**	**55.561.900**	**94,68**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan perubahan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	2	8.118.400	8.023.400	98,83			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Laporan	1	1	10.293.500	10.293.500	100,00			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	4	4	40.268.900	37.245.000	92,49			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**6.369.324.264**	**5.030.159.098**	**78,97**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Orang	34	34	6.353.343.564	5.017.632.198	78,98			
		Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	15.980.700	12.526.900	78,39			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**12.750.000**	**12.750.000**	**100,00**			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	12.750.000	12.750.000	100,00			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**318.885.859**	**209.078.585**	**65,57**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen listrik/penerangan	Item	5	5	35.480.000	35.390.000	99,75			
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Item	8	8	22.618.700	19.878.000	87,88			
		Penyediaan Bahan Logostik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	4	4	106.826.059	61.182.500	57,27			
		Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Item	7	7	38.500.000	37.500.000	97,40			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	2	2	15.000.000	14.400.000	96,00			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	100.461.100	40.728.085	40,54			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**83.104.000**	**82.990.000**	**99,86**			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	3	3	83.104.000	82.990.000	99,86			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**541.571.784**	**439.261.776**	**81,11**			
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	Laporan	1	1	3.000.000	3.000.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Laporan	12	12	99.156.768	30.165.219	30,42			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	439.415.016	406.096.557	92,42			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**354.100.000**	**257.124.400**	**72,61**			
		Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5	5	50.000.000	38.390.000	76,78			
		Penyediaan Jasa pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	114	114	79.200.000	19.315.400	24,39			
		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	unit	1	1	200.000.000	199.419.000	99,71			
		Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	36		24.900.000		0,00			
	Menerapkan Rencana Pengendalian Penduduk	**Program Pengendalian Penduduk**					**328.698.900**	**293.313.900**	**89,23**			
			Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	**Persen**	**100,00**	**70,00**						
			Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat	**Persen**	**100,00**	**75,00**						

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE									
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					**145.992.800,00**	**144.207.800,00**	**98,78**			
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten	Dokumen	1	1	25.000.000	24.140.000,00	96,56			
		Pelaksanaan Saresehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Pelaksanaan Saresehat Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Laporan	1	1	53.001.000	52.576.000	99,20			
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	1	67.991.800	67.491.800	99,26			
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					**182.706.100,00**	**149.106.100,00**	**81,61**			
		Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Terlaksananya Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Dokumen	1	1	25.000.000		0,00			
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan sisytem informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Laporan	1	1	75.506.100	75.266.100	99,68			
		Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksnanya pengelolaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan	Dokumen	2	2	82.200.000	73.840.000	89,83			
	Meningkatkan Pelayanan	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif**	**Persen**	**87,00**	**98,00**	**7.681.191.900**	**7.538.041.585**	**98,14**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	dan Akseptor KB	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**					**382.150.000**	**379.775.200**	**99,38**			
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Prpgram KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kegiatan	1	1	150.000.000	149.908.200	99,94			
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terlaksananya pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Unit	1	1	152.500.000	150.412.000	98,63			
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terlaksananya pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Balai Penyuluh	9	9	79.650.000	79.455.000	99,76			
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					**2.734.375.000**	**2.713.817.700**	**99,25**			
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK DI Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Kegiatan	12	12	808.000.000	808.000.000	100,00			
		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	12	12	1.376.375.000	1.375.737.700	99,95			
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kegiatan	5	5	550.000.000	530.080.000	96,38			
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan					**3.827.971.000**	**3.724.171.000**	**97,29**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		KB di Daerah Kabupaten/Kota										
		Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	Faskes	105	105	96.900.000	96.900.000	100,00			
		Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP	Terlaksananya peningktana kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP	Jenis	7	7	2.149.393.000	2.132.514.000	99,21			
		Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Terlaksananya Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kasus	500	500	100.000.000	99.806.000	99,81			
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	1	1	861.678.000	853.338.000	99,03			
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kegiatan	2	2	620.000.000	541.613.000	87,36			
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB					**736.695.900**	**720.277.685**	**97,77**			
		Penguatan Peran serta Oraginasasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Terlaksananya peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja	Kegiatan	6	6	209.695.900	193.277.685	92,17			
		Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	Terlaksananya pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	Kampung KB	34	34	527.000.000	527.000.000	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga Sehat Sejahtera	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Persentase partisipsi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga**	**Persen**	**100,00**	**98,00**	**6.314.984.246**	**6.208.066.700**	**98,31**			
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					**5.848.000.000**	**5.799.190.700**	**99,17**			
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	Unit	20	20	360.000.000	352.200.000	97,83			
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (NKN, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (NKN, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	5	5	210.000.000	169.390.700	80,66			
		Penyediaan biaya operasioanal bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya biaya operasioanal bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	3340	3340	5.278.000.000	5.277.600.000	99,99			
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat					**466.984.246,00**	**408.876.000,00**	**87,56**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										
		Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS	Terlaskananya pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan	Laporan	4 laporan	4,00	184.858.146	184.138.000	99,61			
		Pelaksnaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	organisasi	3 organisasi	3,00	282.126.100	224.738.000	79,66			
9		**Dinas Perhubungan**					**28.396.549.443**	**25.513.398.035**	**89,85**			
		Perhubungan					**28.396.549.443**	**25.513.398.035**	**89,85**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**19.231.443.738**	**17.073.198.300**	**88,78**			
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	**Opini**	**B**	**BB**						
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**90,00**	**88,78**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**42.075.700**	**41.966.500**	**99,74**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Disusun	Dokumen	3	3	10.575.900	10.572.200	99,97			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	8.411.700	8.310.800	98,80			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	8.377.900	8.373.300	99,95			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun	Dokumen	1	1	9.924.000	9.924.000	100,00			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Disusun	Dokumen	1	1	4.786.200	4.786.200	100,00			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**10.904.919.007**	**9.966.843.247**	**91,40**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN dinas Perhubungan tersedia	Bulan	14	14	10.894.970.707	9.956.917.847	91,39			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tersedia	Dokumen	1	1	9.948.300	9.925.400	99,77			
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					**10.358.400**	**10.178.400**	**98,26**			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	4	4	10.358.400	10.178.400	98,26			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**364.640.000**	**360.549.000**	**98,88**			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Orang	256	256	249.700.000	248.900.000	99,68			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sisten Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan	Dokumen	1	1	24.940.000	24.910.000	99,88			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Pelaksanaan Sisten Informasi Kepegawaian									
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Orang	3	3	90.000.000	86.739.000	96,38			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**1.063.719.200**	**971.587.873**	**91,34**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	Paket	1	1	25.873.600	25.873.600	100,00			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Paket	1	1	13.550.500	13.550.500	100,00			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	Paket	1	1	49.999.500	49.996.500	99,99			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	1	653.900.600	597.983.471	91,45			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	1	120.000.000	119.828.800	99,86			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12	12	14.400.000	9.120.000	63,33			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	144.995.000	139.235.002	96,03			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1		25.000.000	0	0,00	Dibayarkan Pada tahun 2024		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Menu/Fitur Sistim	Dokumen	1	1	16.000.000	16.000.000	100,00			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**328.873.800**	**328.723.800**	**99,95**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	15	15	328.873.800	328.723.800	99,95			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**5.193.227.631**	**4.625.914.780**	**89,08**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat tersedia	Laporan	1	1	2.000.000	2.000.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedia	Laporan	12	12	172.043.303	155.312.244	90,28			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gaji Tenaga Harian Lepas,PTT, Penjaga Malam,Pembantu Penguji dan Premi Asuransi	Laporan	12	12	5.019.184.328	4.468.602.536	89,03			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**1.323.630.000**	**767.434.700**	**57,98**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	26	26	99.700.000	81.014.300	81,26			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	21	21	264.000.000	222.803.200	84,40			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	144	144	99.930.000	65.850.000	65,90	Dibayarkan pada tahun 2024		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	2	260.000.000		0,00	Dibayarkan pada tahun 2024		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	3	3	600.000.000	397.767.200	66,29	Dibayarkan pada tahun 2024		
	Meningkatnya Kapasitas	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Presentase Prasarana Perlengkapan lalulintas dan Angkutan jalan**	**Persen**	**90,00**	**92,55**	**9.064.969.805**	**8.390.063.835**	**92,55**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**					**304.728.905**	**249.466.470**	**81,87**			
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	304.728.905	249.466.470	81,87	Dibayarkan pada tahun 2024		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota					**5.605.207.100**	**5.313.393.430**	**94,79**			
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	71	71	254.420.000	253.939.700	99,81			
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	47	47	5.183.804.600	5.001.903.230	96,49			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Unit	65	65	166.982.500	57.550.500	34,46	Dibayarkan pada tahun 2024		
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					**263.630.000**	**113.630.000**	**43,10**			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Termninal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah fasilitas terminal yang terpeliharan	Unit	1	1	150.000.000		0,00	Dibayarkan pada tahun 2024		
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	28	28	113.630.000	113.630.000	100,00			
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					**199.999.400**	**199.988.100**	**99,99**			
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	TerFasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kegiatan	1	1	119.999.700	119.999.700	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	Telah dilakasankannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	Kegiatan	1	1	79.999.700	79.988.400	99,99			
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					**309.999.000**	**207.465.735**	**66,92**			
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tersedia	Unit	1	1	209.999.300	149.210.735	71,05	Dibayarkan pada tahun 2024		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Penguijian Kendaraan Bermotor	Orang	2	2	7.000.000	7.000.000	100,00			
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Registrasi Kendaraan Wajib Uji Kendaraan Bermotor	Unit			5.500.000	-	0,00			
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tersedia	Dokumen	1	1	7.499.700	3.855.000	51,40	Dibayarkan pada tahun 2024		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	Unit	2	2	80.000.000	47.400.000	59,25	Dibayarkan pada tahun 2024		
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota					**1.520.498.700**	**1.518.365.400**	**99,86**			
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Laporan	1	1	49.899.000	48.969.000	98,14			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	Laporan	12	12	1.445.600.000	1.444.756.700	99,94			
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota	Laporan	2	2	24.999.700	24.639.700	98,56			
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten / Kota					**424.861.500**	**366.767.000**	**86,33**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	1	1	368.261.000	325.366.500	88,35			
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Laporan	1	1	56.600.500	41.400.500	73,15			
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					**250.045.100**	**236.787.600**	**94,70**			
		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang ditingkatkan Kapasitasnya	Laporan	1	1	50.000.000	50.000.000	100,00			
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	1	75.000.000	74.480.000	99,31			
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	1	1	25.000.000	25.000.000	100,00			
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan	Laporan	1	1	50.044.800	50.044.800	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota									
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah KegiatanPelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan			50.000.300	37262800	74,53			
		Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota					**186.000.100**	**184.200.100**	**99,03**			
		Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota tersedia	Unit	1	1	150.000.100	148.200.100	98,80			
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	36.000.000	36.000.000	100,00			
	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	**Program Pengelolaan Pelayaran**	**Prosentase konektivitas dan perlengkapan Angkutan Sungai dan Penyebrangan**	**Persen**	**95,00**	**50,07**	**100.135.900**	**50.135.900**	**50,07**			
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak padaJaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalan Kereta Api Kabupaten/Kota					**50.135.900**	**50.135.900**	**100,00**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	50.135.900	50.135.900	100,00			
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau					**50.000.000**	**0**	**0,00**			
		Pengawasan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	50.000.000	0	0,00	Dibayarkan pada tahun 2024		
10		**Dinas Komunikasi dan Informatika**					**27.761.912.573**	**25.159.759.888**	**90,63**			
		Komunikasi dan Informatika					**26.641.959.473**	**24.239.661.688**	**90,98**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**12.832.254.973**	**11.268.232.437**	**87,81**			
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	**Opini**	**BB**	**A**						
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**100,00**	**97,97**						

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**54.592.600**	**53.992.600**	**98,90**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	21.337.700	20.937.700	98,13			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.124.200	5.124.200	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.002.500	5.002.500	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.668.100	5.668.100	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	4.537.900	4.337.900	95,59			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	6.586.000	6.586.000	100,00			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	6.336.200	6.336.200	100,00			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100,00**	**48,50**	**6.925.526.944**	**5.901.525.315**	**85,21**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	48	48	6.917.976.644	5.893.978.315	85,20			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	7.550.300	7.547.000	99,96			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Meningkatnya Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**5.339.100**	**5.339.100**	**100,00**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	5.339.100	5.339.100	100,00			
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**8.799.900**	**8.799.900**	**100,00**			
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Dokumen	4	4	8.799.900	8.799.900	100,00			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**391.750.150**	**289.438.500**	**73,88**			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	1	1	191.750.150	122.550.000	63,91			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	48	48	200.000.000	166.888.500	83,44			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**686.580.039**	**681.103.152**	**99,20**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	20.943.700	20.943.700	100,00			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	27	27	70.005.600	69.169.900	98,81			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	46	46	154.553.539	150.956.039	97,67			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	10	303.727.200	303.527.200	99,93			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	137.350.000	136.506.313	99,39			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Item**	**100,00**	**100,00**	**118.849.600**	**118.570.000**	**99,76**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	87	87	118.849.600	118.570.000	99,76			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**4.220.796.640**	**3.840.538.170**	**90,99**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	281.541.920	244.594.174	86,88			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	3.939.254.720	3.595.943.996	91,28			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**420.020.000**	**368.925.700**	**87,84**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	90.000.000	88.907.900	98,79			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	2	2	20.000.000	20.000.000	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	73	73	60.020.000	60.019.800	100,00			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	2	2	250.000.000	199.998.000	80,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**					**5.039.580.950**	**4.854.112.649**	**96,32**			
			Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**5.039.580.950**	**4.854.112.649**	**96,32**			
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	1	1	263.710.000	225.082.100	85,35			
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	1	3.060.000.000	3.037.317.930	99,26			
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	1	542.496.000	492.190.950	90,73			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	1	261.130.050	196.123.800	75,11			
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	1	1	635.301.700	634.535.900	99,88			
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	1	1	26.943.200	19.242.949	71,42			
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	50	50	100.000.000	99.844.500	99,84			
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	1	1	150.000.000	149.774.520	99,85			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**					**8.770.123.550**	**8.117.316.602**	**92,56**			
			Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastuktur Informatika	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi	**Persen**	**100,00**	**100,00**						

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**1**	**1**	**5.373.464.900**	**5.367.021.692**	**99,88**			
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	1	1	162.806.000	162.206.000	99,63			
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	4	4	5.210.658.900	5.204.815.692	99,89			
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**3.396.658.650**	**2.750.294.910**	**80,97**			
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	3.801.700	3.801.700	100,00			
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	1	153.069.000	144.661.210	94,51			
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	4	4	2.299.790.750	1.768.946.400	76,92			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	1	1	99.999.800	99.699.800	99,70			
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	Perangkat Daerah	3	3	322.489.900	221.699.400	68,75			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemerintahan Berbasis Elektronik	Elektronik yang Dikembangkan									
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	2	2	51.604.900	50.378.300	97,62			
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	1	150.748.600	146.467.100	97,16			
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	3	3	315.154.000	314.641.000	99,84			
		Statistik					**376.808.200**	**373.130.500**	**99,02**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**					**376.808.200**	**373.130.500**	**99,02**			
			Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisasa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Kualitas Informasi melalui Data Statistik Sektoral**	Persen	1	1	**376.808.200**	**373.130.500**	**99,02**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Penyusunan Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	1	79.312.200	78.882.200	99,46			
		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan kapasitas	Tahun	1	1	45.000.000	45.000.000	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistis yang Terintegrasi									
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terwujudnya Sosialisasi Data Statistik Sektoral	Kali	1	1	52.497.700	49.900.000	95,05			
		Pengembangan Infrastruktur	Terlaksananya Pengembangan Sistem Database Statistik	Sistem	1	1	199.998.300	199.348.300	99,67			
		Persandian					**743.144.900**	**546.967.700**	**73,60**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**					**743.144.900**	**546.967.700**	**73,60**			
			Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D)	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR)	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi (PP)	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan SDM Seksi Persandian dan Tenaga Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab. Purwakarta**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**629.045.400**	**433.213.200**	**68,87**			
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi	Kegiatan Persandian dan Tata Kelola Keamanan Informasi	Kegiatan/ Item	2	2	259.045.400	258.595.400	99,83			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1	170.000.000	169.857.800	99,92			
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Laporan	2	2	200.000.000	4.760.000	2,38			
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terlayaninya Seluruh Jaring Komunikasi Sandi Di Setiap OPD Kab. Purwakarta**	**Persen**	**1**	**1**	**114.099.500**	**113.754.500**	**99,70**			
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	6	6	114.099.500	113.754.500	99,70			
11		**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian**					**19.090.281.840**	**15.548.160.942**	**81,45**			
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					**19.090.281.840**	**15.548.160.942**	**81,45**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**15.597.534.140**	**13.276.821.242**	**85,12**			
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	**Opini**	**B**	**A**						
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**80,00**	**81,90**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**Kegiatan**	**7**	**7**	**147.519.700**	**142.312.150**	**96,47**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	66.475.500	61.386.050	92,34			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	9.481.700	9.481.700	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	9.240.000	9.121.900	98,72			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	9.368.100	9.368.100	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	9.177.900	9.177.900	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	13.928.500	13.928.500	100,00			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	29.848.000	29.848.000	100,00			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kegiatan**	**3**	**3**	**10.662.095.376**	**8.939.862.474**	**83,85**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	10.649.925.676	8.927.692.774	83,83	Tidak dapat terserap dikarenakan banyak nya pegawai yang pensiun dan		

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
										mutasi/promosi		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	7.142.800	7.142.800	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4	5.026.900	5.026.900	100,00			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kegiatan**	**2**	**2**	**10.558.000**	**10.558.000**	**100,00**			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	5.467.200	5.467.200	100,00			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	5.090.800	5.090.800	100,00			
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Jumlah Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**94.790.800**	**94.690.800**	**99,89**			
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	94.790.800	94.690.800	99,89			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**242.990.000**	**215.934.200**	**88,87**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel	120	120	78.000.000	78.000.000	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	5	164.990.000	137.934.200	83,60			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kegiatan**	**7**	**7**	**1.675.645.700**	**1.565.218.810**	**93,41**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	33.175.700	33.156.473	99,94			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	35.034.000	35.003.000	99,91			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	1.163.887.500	1.161.581.105	99,80			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen	1	1	255.119.700	149.779.825	58,71	Ada kegiatan kontraktual APBD yang belum di bayar	Kegiatan kontraktual APBD akan di bayar tahun anggaran 2024	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	15.000.000	14.930.000	99,53			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	123.448.800	120.788.407	97,84			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	49.980.000	49.980.000	100,00			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Kegiatan**	**1**	1	**180.000.000**	**179.200.000**	**99,56**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	180.000.000	179.200.000	99,56			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kegiatan**	**3**	**3**	**1.649.874.564**	**1.405.788.908**	**85,21**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	2.000.000	2.000.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	286.600.116	193.332.637	67,46			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	14	14	1.361.274.448	1.210.456.271	88,92			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kegiatan**	**4**	**4**	**934.060.000**	**723.255.900**	**77,43**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	85.000.000	85.000.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	34.000.000	34.000.000	100,00			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	18.250.000	18.250.000	100,00			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	796.810.000	586.005.900	73,54	Ada kegiatan kontraktual APBD yang belum di bayar	Kegiatan kontraktual APBD akan di bayar tahun anggaran 2024	
	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Jumlah Koperasi Yang Diawasi**	**Koperasi**	**150**	**150**	**100.000.000**	**90.477.900**	**90,48**			
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,	**Jumlah Kegiatan Pemeriksaan dan**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**100.000.000**	**90.477.900**	**90,48**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**									
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	150	150	100.000.000	90.477.900	90,48			
	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	**Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi**	**Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya**	**Unit**	**150**	**150**	**150.000.000**	**149.723.600**	**99,82**			
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**	**2**	**2**	**150.000.000**	**149.723.600**	**99,82**			
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	10	10	100.000.000	99.944.000	99,94			
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	150	150	50.000.000	49.779.600	99,56			
	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian**	**Koperasi**	**150**	**150**	**471.370.000**	**460.418.900**	**97,68**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	dan Koperasi	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**	1	1	**471.370.000**	**460.418.900**	**97,68**			
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian dan UKM	Koperasi dan UKM	150	150	471.370.000	460.418.900	97,68		-	
	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Jumlah UMKM Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan**	**UMKM**	**150**	**150**	**134.588.000**	**3.409.600**	**2,53**			
			Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk	**UMKM**	**50**	**50**						
			Persentase UMKM Yang Terbina	**UMKM**	**60**	**60**						
			Prosentase UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi	**UMKM**	**60**	**60**						
			Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wirausaha Yang Profesional	**UMKM**	**50**	**50**						
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Kegiatan**	**2**	**2**	**134.588.000**	**3.409.600**	**2,53**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	UMKM	50	45	110.000.000	3.409.600	3,10	SPD tidak di buka		
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	UMKM	30	30	24.588.000		0,00	SPD tidak di buka		
	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	**Program Pengembangan UMKM**	**Jumlah Pameran Yang Diikuti Oleh UMKM**	**UMKM**	**20**	**20**	**2.636.789.700**	**1.567.309.700**	**59,44**			
			Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan/Non Perbankan dan Lembaga Lainnya	**UMKM**	**20**	**20**						
			Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan	**UMKM**	**15**	**-**						
			Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan	**UMKM**	**100**	**100**						
			Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan	**UMKM**	**50**	**-**						
			Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD	**UMKM**	**20**	**20**						
			Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar	**UMKM**	**10**	**10**						
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**2.636.789.700**	**1.567.309.700**	**59,44**			
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	300	300	2.636.789.700	1.567.309.700	59,44	Anggaran yang tidak terserap yaitu Bantuan Keuangan Provinsi, Dikarenakan perubahan CPCL tidak	Melakukan koordinasi dengan OPD vertikal (Bappeda Provinsi, DPKAD Provinsi dan Diskuk Provinsi), dan	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
										bisa, Ada kegiatan kontraktual APBD yang belum di bayar	mengirimkan surat permohonan perubahan CPCL ke Gubernur Jawa Barat, Kegiatan kontraktual APBD akan di bayar tahun anggaran 2024	
12		**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**					**13.928.745.553**	**11.778.136.776**	**84,56**			
		Penanaman Modal					**13.928.745.553**	**11.778.136.776**	**84,56**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**12.786.036.753**	**10.861.827.899**	**84,95**			
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	**Opini**	**BB**	**AA**						
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**%**	**100,00**	**99,36**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**60.000.000**	**49.568.100**	**82,61**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	20.000.000,00	19.445.900,00	97,23			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000,00	9.436.000,00	94,36			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	30.000.000,00	20.686.200,00	68,95			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**7.610.385.615**	**6.691.813.663**	**87,93**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	43	43	7.592.759.615,00	6.676.161.263,00	87,93			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	7.626.000,00	7.562.000,00	99,16			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	3	10.000.000,00	8.090.400,00	80,90			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**20.000.000**	**17.100.000**	**85,50**			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	20.000.000,00	17.100.000,00	85,50			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**216.300.000**	**137.650.000**	**63,64**			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	210	210	136.300.000	58.500.000	42,92	Pelaksanaan Pekerjaan 100% akan tetapi belum realisasi pembayaaran	Pembiayaan di Tahun 2024	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	90	90	80.000.000,00	79.150.000,00	98,94			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**700.792.530**	**591.354.118**	**84,38**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	21	21	50.000.000	49.925.300	99,85			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	32	32	57.102.930	26.901.400	47,11			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	287.733.600	231.322.982	80,39			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	18	15	124.962.000	107.685.100	86,17			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jenis	5	5	6.000.000	5.950.000	99,17			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	150.000.000	144.775.336	96,52			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata	Dokumen	10	10	24.994.000	24.794.000	99,20			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**450.000.000**	**199.243.000**	**44,28**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	100.000.000		-			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	1	1	350.000.000	199.243.000	56,93	Pelaksanaan Pekerjaan 100% tetapi belum pembayaaran	Pembiayaan di Tahun 2024	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**2.821.788.608**	**2.471.241.473**	**87,58**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	17.000.000	7.000.000	41,18			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	617.389.000	506.872.447	82,10			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	43	43	2.187.399.608	1.957.369.026	89,48			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**906.770.000**	**703.857.545**	**77,62**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	13	118.000.000	94.434.545	80,03			
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	60	60	30.000.000	30.000.000	100,00			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	1	1	150.000.000	149.509.000	99,67			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	12	12	83.770.000	83.570.000	99,76			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	525.000.000	346.344.000	65,97			
	Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Jumlah Minat Penanaman Modal**	**Investor**	**390**	**421**	**210.000.000**	**108.224.000**	**51,54**			
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					**110.000.000**	**10.000.000**	**9,09**			
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Moda	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Pembuatan Naskah Akademik)	Dokumen	1	1	110.000.000	10.000.000	9,09	Pelaksanaan Pekerjaan 100% akan tetapi belum realisasi pembayaaran	Pembiayaan di Tahun 2024	
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten	Dokumen	1	1	100.000.000	98.224.000	98,22			
	Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan**	**Event**	**8**	**8**	**124.000.000**	**112.287.100**	**90,55**			
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	80.000.000	69.737.100	87,17			
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	44.000.000	42.550.000	96,70			
	Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	**Program Pelayanan Penanaman Modal**					**174.990.600**	**130.367.957**	**74,50**			
			Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan	**Persen**	**100,00**	**98,00**						
			Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	**Poin**	**82,00**	**91,35**						
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					**174.990.600**	**130.367.957**	**74,50**			
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	520	648	55.000.000	54.274.800	98,68			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	100	126	80.000.000	54.414.800	68,02			
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	50	38	29.990.600	17.371.400	57,92			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	5	2	10.000.000	4.306.957	43,07			
	Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala**	**Persen**	**100,0000**	**81,00**	**406.900.000**	**396.004.030**	**97,32**			
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					**406.900.000**	**396.004.030**	**97,32**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	80	80	112.900.000	112.090.500	99,28			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	200	270	228.000.000	226.000.000	99,12			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang	Kegiatan Usaha	80	67	66.000.000	57.913.530	87,75			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pelaksanaan Penanaman Moda	Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan									
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui SPBE	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal**	**Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**226.818.200**	**169.425.790**	**74,70**			
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**100,00**	**99,62**	**226.818.200**	**169.425.790**	**74,70**			
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen	2	100	226.818.200	169.425.790	74,70			
13		**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**					**10.717.763.416**	**9.226.422.334**	**86,09**			
		Perpustakaan					**10.275.232.066**	**8.831.921.574**	**85,95**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**9.643.988.766**	**8.273.107.954**	**85,79**			
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	**Opini**	**B**	**A**						
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**100,00**	**85,79**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun**	**Dokumen**	**4**	**4**	**22.499.600**	**18.509.800**	**82,27**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perecanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	7.499.800	7.057.200	94,10			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	1	1	7.499.900	5.586.200	74,48			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kinerja dan Laporan Hasil Evaluasi Perangkat Daerah	Laporan	1	1	7.499.900	5.866.400	78,22			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun**	**Laporan**	**1**	**1**	**6.804.635.411**	**6.087.093.954**	**89,46**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	616		6.797.191.111	6.085.457.354	89,53			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	7.444.300	1.636.600	21,98			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD**	**Laporan**	**1**	**1**	**9.943.400**	**8.456.300**	**85,04**			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	9.943.400	8.456.300	85,04			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Ketersediaan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah**	**Kegiatan**	**2**	**2**	**70.360.000**	**60.270.000**	**85,66**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	50.000.000	49.150.000	98,30			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	3	20.360.000	11.120.000	54,62			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Kegiatan**	**6**	**6**	**514.330.900**	**434.379.758**	**84,46**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	74.994.100	52.496.900	70,00			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	75.000.000	53.278.700	71,04			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	113.000.800	103.127.000	91,26			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	72.680.000	58.980.000	81,15			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	25	25	28.656.000	18.396.000	64,20			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	10	150.000.000	148.101.158	98,73			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Kegiatan**	**2**	**2**	**151.599.250**	**74.571.000**	**49,19**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainny	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21	21	151.599.250	74.571.000	49,19			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kegiatan**	**2**	**2**	**1.351.870.205**	**1.192.338.916**	**88,20**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1.000.000	1.000.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	99.999.685	69.437.602	69,44			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.250.870.520	1.121.901.314	89,69			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara**	**Kegiatan**	**4**	**4**	**718.750.000**	**397.488.226**	**55,30**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	91.900.000	79.866.500	86,91			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	16	50.000.000	36.615.600	73,23			
		Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	31	31	26.850.000	23.243.800	86,57			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	550.000.000	257.762.326	46,87			
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	**Program Pembinaan Perpustakaan**					**581.243.300**	**512.733.320**	**88,21**			
			Persentase Ketersediaan Koleksi Buku Perpustakaan	**Persen**	**5,00**	**5,00**						
			Persentase Pembinaan Terhadap Perpustakaan Umum Dan Sekolah	**Persen**	**30,40**	**46,40**						
			Persentase Ketersediaan Ruang Baca/ Pojok Baca / Sudut Baca Di Ruang Publik	**Persen**	**20,00**	**26,80**						
			Tingkat Pemeliharaan Bahan Perpustakaan	**Persen**	**0,23**	**0,00**						
			Laju Pengunjung Perpustakaan	**Persen**	**4,00**	**7,20**						
			Laju Anggota Perpustakaan	**Persen**	**12,00**	**8,00**						

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan	**Persen**	**5,00**	**4,00**						
			Persentase Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca	**Persen**	**5,00**	**3,70**						
			Persentase Titik Layanan Perpustakaan Keliling	**Persen**	**100,00**	**94,00**						
			Tingkat Koleksi Buku Perpustakaan Digital	**Persen**	**11,00**	**0,00**						
			Persentase Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Digital Yang Dibaca	**Persen**	**11,00**	**20,00**						
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan	**Persen**	**7,00**	**5,40**						
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengelolaan Perpstakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**	**8**	**8**	**400.812.700**	**339.991.460**	**84,83**			
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Layanan	3	3	51.942.600	48.567.700	93,50			
		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	15	15	73.881.500	56.121.300	75,96			
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	75	75	50.000.000	29.779.600	59,56			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/KotaMelalui Peningkatan Koleksi	Layanan	192	84	75.000.000	57.633.100	76,84			
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Kegiatan	1	1	75.000.000	72.901.160	97,20			
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kegiatan	1	1	74.988.600	74.988.600	100,00			
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Pembudayaan Membaca tingkat daerah kabupaten/ kota**	**Kegiatan**	**2**	**2**	**180.430.600**	**172.741.860**	**95,74**			
		Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	4	4	105.006.600	104.434.400	99,46			
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	15	15	75.424.000	68.307.460	90,56			
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya	**Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno**	**Persentase Jumlah Karya Cetak Dan Karya Rekam Mengenai Kabupaten Purwakarta**	**Persen**	**100,00**	**0,30**	**50.000.000**	**46.080.300**	**92,16**			
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Ketersediaan Naskah Kuno Milik Daerah**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**50.000.000**	**46.080.300**	**92,16**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	dan Bertaqwa	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kegiatan	1	1	50.000.000	46.080.300	92,16			
		Kearsipan					**442.531.350**	**394.500.760**	**89,15**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Pengelolaan Arsip**					**429.076.400**	**382.579.660**	**89,16**			
			Persentase Pembinaan Kearsipan OPD	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	**Persen**	**100,00**	**99,00**						
			Tingkat Pelestarian Arsip Statis	**Persen**	**1,75**	**1,55**						
			Laju Pengunjung Diorama/Musium Kearsipan	**Persen**	**3,70**	**2,00**						
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Arsip Dinamis yang di audit**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**245.000.000**	**209.050.960**	**85,33**			
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Buku	25	25	50.000.000	47.779.800	95,56			
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Paket	1	1	125.000.000	104.176.460	83,34			
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	46	46	70.000.000	57.094.700	81,56			
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Arsip Statis yang diolah dan diakuisisi**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**84.076.400**	**82.126.600**	**97,68**			
		Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	1	6	34.076.400	32.426.800	95,16			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kegiatan	1	226	50.000.000	49.699.800	99,40			
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan yang dikelola**	**Kegiatan**	**1**	**226**	**100.000.000**	**91.402.100**	**91,40**			
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Arsip	4	1411	50.000.000	47.130.700	94,26			
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	2	2	50.000.000	44.271.400	88,54			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip**					**13.454.950**	**11.921.100**	**88,60**			
			Persentase OPD Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	**Persen**	**43,50**	**43,50**						
			Tingkat Pemutakhiran Sistem Informasi Kearsipan	**Persen**	**27,00**	**85,00**						
			Persentase Arsip Aktif, In Aktif Dan Vital Yang Disusun Kedalam Daftar:									
			- Arsip Aktif	**Persen**	**20,00**	**20,00**						
			- Arsip Inaktif	**Persen**	**53,30**	**53,30**						
			- Arsip Vital	**Persen**	**20,00**	**20,00**						
			Persentase Penyusutan Arsip	**Persen**	**20,00**	**37,00**						
			Indek Kepuasan Masyarakat (Ikm) Terhadap Layanan Informasi Kearsipan	**Persen**	**78,00**	**80,00**						

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Tingkat Pemeliharaan Arsip Statis	**Persen**	**19,99**	**19,99**						
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	**Jumlah pengelolaan arsip statis yang dinyatakan hilang**	**Item**	**1**	**1**	**13.454.950**	**11.921.100**	**88,60**			
		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip	2	19	13.454.950	11.921.100	88,60			
14		**Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan**					**34.236.086.093**	**30.542.906.081**	**89,21**			
		Kepemudaan dan Olahraga					**32.333.862.693**	**28.698.152.281**	**88,76**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**21.301.539.643**	**17.979.381.931**	**84,40**			
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	**Opini**	**B**	**BB**						
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**%**	**90**	**48,25**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Sub Kegiatan**	**7**	**7**	**404.367.700**	**404.334.900**	**99,99**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	2	2	69.825.900	69.825.900	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	24.951.700	24.951.700	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	44.940.000	44.939.100	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	24.958.100	24.958.100	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	44.969.800	44.937.900	99,93			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	3	3	119.936.000	119.936.000	100,00			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	74.786.200	74.786.200	100,00			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Sub Kegiatan**	**7**	**7**	**6.024.705.084**	**5.330.781.592**	**88,48**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	5.964.949.984	5.271.412.192	88,37			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	1	1	9.998.400	9.949.600	99,51			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksana akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	9.986.200	9.945.300	99,59			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	1	9.936.200	9.900.300	99,64			
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggap pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen	1	1	9.939.600	9.894.900	99,55			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulan/triwulan/semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	Laporan	1	1	9.977.300	9.971.200	99,94			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			bulanan/triwulan/semesteran SKPD									
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelapor dan analisis prognosis alisasi anggaran	Dokumen	1	1	9.917.400	9.708.100	97,89			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Sub Kegiatan**	**2**	**2**	**19.961.300**	**19.921.300**	**99,80**			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Disporaparbud Kabupaten Purwakarta	Dokumen	1	1	9.997.900	9.997.900	100,00			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah poran rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	1	1	9.963.400	9.923.400	99,60			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Sub Kegiatan**	**2**	**2**	**844.506.250**	**574.091.200**	**67,98**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	2	1	369.506.250	199.699.700	54,05			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Paket	3	2	475.000.000	374.391.500	78,82			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Sub Kegiatan**	**6**	**6**	**816.366.033**	**808.927.500**	**99,09**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Triwulan	4	4	72.077.500	72.077.500	100,00			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	2	240.210.450	235.112.400	97,88			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Triwulan	4	4	71.809.100	71.809.100	100,00			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1	183.834.783	183.824.300	99,99			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Triwulan	4	4	98.794.700	98.794.700	100,00			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	12	149.639.500	147.309.500	98,44			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Sub Kegiatan**	**3**	**2**	**5.134.288.876**	**4.955.140.225**	**96,51**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1		181.001.750	2.153.200	1,19			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Paket	4	4	4.898.287.126	4.898.287.125	100,00			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	paket	2	2	55.000.000	54.699.900	99,45			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Sub Kegiatan**	**4**	**4**	**5.728.379.000**	**4.620.797.214**	**80,67**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Helai	700	700	7.000.000	7.000.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bulan	12	12	1.896.136.704	1.247.350.836	65,78			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	76	76	57.700.000	57.700.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	12	11	3.767.542.296	3.308.746.378	87,82			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Sub Kegiatan**	**4**	**4**	**2.328.965.400**	**1.265.388.000**	**54,33**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorngan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	23	8	30.000.000	16.385.600	54,62			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	11	80.000.000	80.000.000	100,00			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	58	58	44.965.400	44.965.400	100,00			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitas	Paket	14	8	2.174.000.000	1.124.037.000	51,70			
	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**					**669.498.700**	**591.588.700**	**88,36**	1. Masih rendahnya kepercayaan diri pemuda 2. Minimnya edukasi tentang bantuan pendidikan ke jenjang lebih tinggi 3. Rendahnya motivasi pemuda untuk mampu berdaya saing 4. Aspek penganggaran yang masih belum memenuhi standar prioritas	1. Sosialisasi pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi 2. Sosialisasi bantuan Pendidikan KIP 3. Menumbuhkan kepercayaan diri melalui motivasi untuk berprestasi kepada pemuda sebagai generasi yang akan melanjutkan	
			Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	**Persen**	**60**	**53,05**						
			Cakupan Pembinaan Kepemudaan	**Persen**	**20**	**17,68**						
			Cakupan Wirausaha Muda	**Persen**	**70**	**61,89**						
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		**Sub Kegiatan**	**5**	**5**	**419.498.700**	**367.988.700**	**87,72**			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor Kab/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Kegiatan	1	1	50.000.000	50.000.000	100,00			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kab/Kota	Jumlah pemuda kader kab/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Paket	1	1	100.000.000	49.900.000	49,90			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah pemuda terpeuhi haknya melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, pastisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program stratejik pemuda	Paket	1	1	50.000.000	49.900.000	99,80	dalam pengalokasian anggaran	kepemimpinan bangsa	
		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/kota	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan kab/kota yang terkelola dan termamnfaatkan	Paket	1	1	50.000.000	49.900.000	99,80			
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan kab/kota dari seluruh kecamatan	Kegiatan	3	3	169.498.700	168.288.700	99,29			
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Sub Kegiatan**	**1**	**1**	**250.000.000**	**223.600.000**	**89,44**			
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan jumlah pemuda kader kab/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Paket	5	4	250.000.000	223.600.000	89,44			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kepramukaan	Persen	20,00	18,87	**660.000.000**	**657.400.000**	**99,61**			
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		**Sub Kegiatan**	**1**	**2**	**660.000.000**	**657.400.000**	**99,61**			
		Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kab/Kota	Jumlah pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah kab/kota yang berkualitas	Unit	6	6	260.000.000	258.950.000	99,60			
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah prasarana dan sarana kepramukaan kab/kota yang tersedia dan termanfatkan	Unit	17	17	400.000.000	398.450.000	99,61			
	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**					**9.702.824.350**	**9.469.781.650**	**97,60**	1. Kurangnya Pemdaan untuk Pembinaan Olahraga di Kabupaten Purwakarta 2. Kurangnya pendanaan Dari pemerintah Daerah 3. Kurang nyaPendanaan dari jumlah kelompok Organisasi Olahraga Rekreasi	1. Perlu ada peningkatan Penambahan Pendanaan dikerenakan Jumlah Pembinaan di Kabupaten Purwakarta Membutuhkan Dana yang Sangat Besar 2. Untuk tahun ini harus ada penambahan Anggaran Untuk Induk Cabang Olaharaga dan Cabang Olahraga 3. Untuk tahun ini khusus Organisasi	
			Cakupan Pembinaan Olahraga;	**Persen**	**23,53**	**20,27**						
			Cakupan Pembinaan Atlet Muda;	**Persen**	**15**	**12,92**						
			Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	**Persen**	**71,43**	**61,54**						
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**Sub Kegiatan**	**2**	**2**	**9.702.824.350**	**9.469.781.650**	**97,60**			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen penyelenggara kompetisi olahraga oleh perkumpulan olahraga dan satuan pendidikan dasar	Paket	9	8	9.419.429.450	9.188.563.650	97,55			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kab/kota yang tersedia dan termanfaatkan	Paket	1	1	283.394.900	281.218.000	99,23			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Prasarana Olahraga Kab/Kota									Rekreasi harus ada penambahan / Peningkatan dari segi Pembinaan /Pendanaan dari Pemerintah Daerah	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		**Sub Kegiatan**	**1**	**1**	**773.645.000**	**771.270.000**	**99,69**			
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggara, pengembangan dan permasalan festival dan olahraga kreasi	Paket	3	3	773.645.000	771.270.000	99,69			
		Kebudayaan					**1.902.223.400**	**1.844.753.800**	**96,98**			
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	**Program Pengembangan Kebudayaan**					**1.494.231.100**	**1.439.981.100**	**96,37**	1. Tidak ada kendala yang signifikan; 2. Belum maksimalnya capaian target dikarenakan adanya kendala dalam pendataan.	1. Lebih mengoptimalkan Pendataan Seni dan Budaya yang harus dibina dan dilestarikan	
			Presentase Kelompok Seni Budaya Lokal (Kelompok) Yang Dibina	**Persen**	**55**	**44**						
			Presentase Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti	**Persen**	**50**	**40**						
			Presentase Festival Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan	**Persen**	**36**	**29**						
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota		**Sub Kegiatan**	**1**	**1**	**1.494.231.100**	**1.439.981.100**	**96,37**			
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah laporan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional	Paket	25	14	1.494.231.100	1.439.981.100	96,37			
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Jumlah Kelompok Seni Budaya Lokal Yang Dibina**	**kelompok**	**3**	**2,99**	**50.000.000**	**49.850.000**	**99,70**			
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Sub Kegiatan**	**1**	**1**	**50.000.000**	**49.850.000**	**99,70**			
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan	Paket	1	1	50.000.000	49.850.000	99,70			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			dan pelatihan (di tingkatkan kompetensinya)									
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	**Program Pembinaan Sejarah**	**Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang disediakan**	**persen**	**50**	**50**	**104.993.900**	**104.399.900**	**99,43**			
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota		**Sub Kegiatan**	**1**	**1**	**104.993.900**	**104.399.900**	**99,43**			
		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	Paket	3	3	104.993.900	104.399.900	99,43			
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**					**202.998.400**	**200.622.800**	**98,83**			
			Cakupan Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	**Persen**	**100**	**99**						
			Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	**Persen**	**60**	**59**						
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		**Sub Kegiatan**	**1**	**1**	**202.998.400**	**200.622.800**	**98,83**			
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	Paket	2	2	202.998.400	200.622.800	**98,83**			
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	**Program Pengelolaan Permuseuman**	**Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan**	**Persen**	**20**	**20**	**50.000.000**	**49.900.000**	**99,80**			
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		**Sub Kegiatan**	**1**	**1**	**50.000.000**	**49.900.000**	**99,80**			
		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah sumber daya manusia permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya	Paket	1	1	50.000.000	49.900.000	99,80			

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Tingkat pencapaian Urusan Pemerintahan Pilihan di Kabupaten Purwakarta sangat didukung oleh perangkat daerah pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan Urusan Pemerintahan Pilihan selama Tahun 2023. Kabupaten Purwakarta mengalokasikan Pagu anggaran sebesar Rp36.466.863.348,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp32.939.067.128,00 atau terealisasi sebesar 90,33%, dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pelaksanaan Urusan Pilihan
Tahun 2023

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**36.466.863.348**	**32.939.067.128**	**90,33**			
1		**Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan**					**3.243.737.900**	**3.132.305.110**	**96,56**			
		Pariwisata					**3.243.737.900**	**3.132.305.110**	**96,56**			
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**		**Kegiatan**	**4**	**4**	**2.206.702.900**	**2.113.825.010**	**95,79**			
			Persentase Destinasi Wisata yang Menarik dan Diminati Dikembangkan	**Persen**	**17,78**	**16,71**						
			Persentase Jasa Usaha Pariwisata Berstandar Baik/ Tersertifikasi	**Persen**	**6,67**	**6,27**						
			Persentase Lembaga dan SDM Pariwisata Meningkat/ Tersertifikasi	**Persen**	**6,67**	**6,27**						
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota		**Kegiatan**	**4**	**4**	**705.000.000**	**693.692.110**	**98,40**			
		Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kab.kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kab/kota	Paket	2	2	200.000.000	194.392.110	97,20			
		Pengembangan daya tarik wisata kab/kota	Jumlah lokasi daya tarik sata kab/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, pengembangan, pemantapan, revitalisasi)	Paket	3	1	505.000.000	499.300.000	98,87			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengelola Kawasan Strategi Pariwisata Kab/Kota		**Sub Kegiatan**	**1**	**1**	**1.219.706.300**	**1.140.596.300**	**93,51**			
		Pengadaan/pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategi pariwisata kab/kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Paket	4	3	1.219.706.300	1.140.596.300	93,51			
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota		**Sub Kegiatan**	**2**	**2**	**216.999.700**	**215.199.700**	**99,17**			
		Pengadaan/pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana dala pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	Jumlahsarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota yang tersedia dan terpelihara	Paket	2	2	167.000.000	165.600.000	99,16			
		Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	Paket	1	1	49.999.700	49.599.700	99,20			
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		**Sub Kegiatan**	**1**	**1**	**64.996.900**	**64.336.900**	**98,98**			
		Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Paket	1	1	64.996.900	64.336.900	98,98			
		Program Pemasaran Pariwisata	**Persentase Event Promosi yang Diikuti/ Diselenggarakan**	**Persen**	**50,00**	**48,49**	**330.039.700**	**324.400.500**	**98,29**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		**Sub Kegiatan**	**3**	**3**	**330.039.700**	**324.400.500**	**98,29**			
		Penguatan promosi melaui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Paket	5	3	150.050.200	145.756.000	97,14			
		Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kab/kota	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Paket	1	1	99.999.500	99.139.500	99,14			
		Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kab/kota baik dalam dan luar negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kab/kota, baik dalam dan luar negeri	Kegiatan	1	1	79.990.000	79.505.000	99,39			
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	**Cakupan Pembangunan dan/ atau Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata**	**Persen**	**60,00**	**43,00**	**276.996.000**	**270.602.700**	**97,69**			
		Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kab/kota		**Sub Kegiatan**	**1**	**1**	**200.000.000**	**198.514.000**	**99,26**			
		Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif	Paket	1	1	200.000.000	198.514.000	99,26			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota		**Sub Kegiatan**	**1**	**1**	**76.996.000**	**72.088.700**	**93,63**			
		Pengembangan sistem pemasaran	Jumlah dokumen hasil pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif	Paket	1	1	76.996.000	72.088.700	93,63			
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**Presentasi Komunitas Ekonomi Kreatif Yang Dibina**	**Persen**	**40,00**	**39,39**	**429.999.300**	**423.476.900**	**98,48**			
		Pelaksanaan peningkatan kapsitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar		**Sub Kegiatan**	**3**	**3**	**329.999.300**	**327.826.900**	**99,34**			
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Paket	1	1	55.000.000	54.297.600	98,72			
		Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa/siswa)	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa/siswa)	Paket	2	2	129.999.300	129.189.300	99,38			
		Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumis dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah laporan hasil fasilitas proses kreasi, produkasi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	Paket	1	1	145.000.000	144.340.000	99,54			
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		**Sub Kegiatan**	**1**	**1**	**100.000.000**	**95.650.000**	**95,65**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Dukungan fasilitas menghadapi pengembangan teknologi di dunia usaha	Jumlah laporan hasil dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha	Paket	1	1	100.000.000	95.650.000	95,65			
2		**Dinas Pangan dan Pertanian**					**10.581.268.600**	**10.221.867.900**	**96,60**			
		Pertanian					**10.581.268.600**	**10.221.867.900**	**96,60**			
	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**					**2.216.186.200**	**1.936.571.300**	**87,38**		• untuk peningkatan luas panen padi melalui peningkatan indeks pertanaman (IP 400) (varietas direkomendasikan jenis super genjah/umur sangat pendek) • untuk peningkatan produktivitas padi (varietas unggul baru, bersertifikat/berlabel) • untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman/penanganan dampak lingkungan ekstrim (varietas direkomendasikan beragam) • untuk diversifikasi produk tanaman pangan (yaitu ada 11 varietas	Bantuan Benih Tanaman Pangan meliputi program di komoditas padi dan jagung. Varietas benih tanaman pangan yang disalurkan menyesuaikan program/kegiatan yang diluncurkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ada varietas benih tanaman yang merupakan paket rekomendasi program, dan ada yang merupakan pilihan petani. Untuk
			Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	**Persen**	**25,00**	**25,00**						
			Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian	**Persen**	**100,00**	**95,00**						
			Produksi Padi	**Ton**	**282.889,17**	**252.649**						
			Produksi Jagung	**Ton**	**5.400**	**1.108**						
			Peningkatan Luas Areal Tanaman dan Produksi Padi Bebas Residu	**Hektar**	**50**	**50**						
			Gerakan Pencanangan Tanam dan Panen Raya	**Kegiatan**	**2**	**2**						
			Peningkatan Luas Tanam Aneka Kacang dan Umbi	**Hektar**	**225**	**230**						
			Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan	**Unit**	**10**	**10**						
			Intensifikasi dan Pengembangan Lahan Pertanaman Manggis	**Hektar**	**4,5**	**5**						
			Pelatihan Panen dan Pasca Panen Hortikultura	**Peserta**	**30**	**30**						
			Peningkatan Luas Tanaman Durian	**Hektar**	**3**	**3**						
			Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	**Hektar**	**3**	**4**						
			Persentase Produksi Benih Padi Bersertifikat	**Persen**	**100,00**	**75,00**						

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
											unggul padi dan 2 varietas unggul jagung.)	komoditas padi didukung Pemerintah (melalui APBN) dan Pemerintah Daerah melalui (APBD Sub Kegiatan pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman). Kegiatan yang diluncurkan Pemerintah di antaranya pada komoditas padi terdapat kegiatan: 1)Padi Kaya Gizi/Biofortifikasi (untuk penanganan stunting) dengan luas bantuan 2.745 hektar, varietas yang ada adalah Inpari IR Nutri Zink. 2)Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman (IP 400) Padi dengan luas bantuan 1.401 hektar, varietas yang ditawarkan jenis super genjah Cakrabuana

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
												Agritan, Inpari Sidenuk dan Padjadjaran Agritan. 3)Budidaya Padi Ramah Lingkungan seluas 1.197 hektar, 4)Bantuan Benih Padi Inbrida (Reguler) seluas 2.400 hektar, dan 5)Bantuan Benih Padi Gernas El Nino seluas 2.160 hektar, varietas yang digunakan umumnya Inpari 32 yang disukai petani. 6)Optimalisasi Percepatan Peningkatan Produksi Padi seluas 50 hektar di lahan tebangan dengan varietas padi Inpari 42. 7)Budidaya Padi Hara Berimbang dengan luas bantuan 500 hektar, varietas yang digunakan IPB 3S, IPB 9G dan Inpari

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
												48. Jumlah total bantuan benih yang disalurkan Pemerintah (APBN) di Kabupaten Purwakarta selama tahun 2023 sebanyak 261.325 kilogram seluas 10.453 hektar, atau mencapai 58,2 % dari luas baku sawah Purwakarta (17.970 hektar). Dari luas tersebut varietas rekomendasi program seluas 4.696 hektar (44,9%) dan varietas preferensi petani (umumnya Inpari 32) seluas 5.757
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					**824.642.200**	**648.575.000**	**78,65**			
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (P2L)	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	1	271.187.300	176.475.000	65,07	Masih kurangnya pengetahuan petani mengenai penggunaan pupuk organik	Melakukan pengawasan penggunaan pupuk oragnik di tingkat petani	Koordinasi penambahan anggaran untuk pendampingan pengawasan penggunaan pupuk

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
										bagi tanaman		oragnik dilapangan
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2	1	553.454.900	472.100.000	85,30	Masih kurangnya pengetahuan petani mengenai penggunaan alat mesin pertanian	Mengajukan tambahan anggaran ditahun berikutnya untuk pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait penggunaan alat mesin pertanian	Koordinasi penambahan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan operator alat mesin pertanian untuk kelompok tani/petani.
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					**1.391.544.000**	**1.287.996.300**	**92,56**			
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	2	2	80.986.000	68.005.800	83,97	- Kurangnya Pengawasan terhadap Peredaran Benih - Tidak tersediannya Benih Unggul Bermutu	,- Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran benih - Melaksanakan Penangkaran Benih Unggul Bermutu	Mengusulkan pada Pemerintah Pusat untuk Subsidi Benih Unggul bermutu

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	3	2	810.558.000	797.670.500	98,41	- Sistem SIPD belum bisa mengakomodir semua kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Perkebunan dan Hortikultura - Terjadi proses parsial anggaran	- Koordinasi dan Konsultasi pada Bapelitbangda Kabupaten Purwakarta Terkait Pemetaan Nomenklatur Kegiatan - Koordinasi dan Konsultasi ke BKAD Kabuapten Purwakarta dan Subbag Keuangan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta	- Evaluasi terhadap kegiatan yang tidak tercakup dalam sistem SIPD. Identifikasi apa saja yang perlu ditambahkan /disesuaikan dalam sistem agar dapat mencakup kegiatan tsb. Koordinasi dilakukan dengan OPD terkait (Bapellitbangda, DPKAD) - Evaluasi dan Penyesuaian Anggaran, Koordinasi dengan pihak yang terkait, Revisi kontrak dan persyaratan administratif

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemanfaatan SDG Hewani/Tanaman	Capaian SAKIP Perangkat Daerah;	Dokumen	3	1	500.000.000	422.320.000	84,46	- Penggunaan Pupuk/Pertisida yang berlebihan - Kurangnya Bimbingan Teknis tentang Budidaya Tanaman Sehat - Dampak Perubahan Iklim mempengaruhi keberhasilan dalam budidaya pertanian - Teknologi Pasca Panen Tidak sepenuhnya diterapkan	- Penggunaan Pupuk dan Bio Pestisida - MelaksakanSosialisasi Padi ramah lingkungan - Sosialisasi Perkiraan cuaca - Melakukan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penggunaan teknologi pasca panen secara menyeluruh	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**Persentase penyediaan dan pengembagan sarana pertanian**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**7.593.507.000**	**7.591.237.000**	**99,97**			
		Pembangunan Prasarana Pertanian					**7.593.507.000**	**7.591.237.000**	**99,97**			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	20	20	4.163.954.000	4.163.954.000	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	15	15	3.103.573.000	3.103.573.000				
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	3	325.980.000	323.710.000	99,30			
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					**326.075.400**	**325.291.100**	**99,76**			
			Persentaase Pengendalian Serangan OPT	**Persen**	**3**	**3**						
			Persentase Perlindungan Lahan Dari Dampak Perubahan Iklim	**Persen**	**3**	**3**						
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					**326.075.400**	**325.291.100**	**99,76**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	17.000	750	126.075.400	125.588.100		Masih banyak serangan OPT akibat dampak perubahan iklim (DPI) bertambahnya populasi hama (OPT) yang tidak seimbang dengan musuh alami sebagai predatornya.	Mengajukan tambahan anggaran ditahun berikutnya dan melaksanakan gerakan pengendalian OPT, sosialisasi kepada pihak poktan dan petugas lapangan/pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT)	- Koordinasi dengan bagian perencaaan mengenai alokasi dan penambahan anggaran APBD Kabupaten Purwakarta - Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat bagian perlindungan tumbuhan - Sosialisasi manual teknologi informasi mengenai prakiraan cuaca - Pendampingan oleh petugas teknis mengenai prakiraan cuaca - Melaksakan koordinasi dengan Kortikab POPT

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	17.000	5.243	200.000.000	199.703.000	99,85	Masih banyak areal sawah yang belum tercaper asuransi usaha tani padi (AUTP), masih minimnya pengetahuan terkait DPI dan kurang sadar pengetahuan petani.	Mengajukan tambahan anggaran ditahun berikutnya dan melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada pihak poktan dan petugas lapangan.	- Koordinasi dengan bagian perencaaan mengenai alokasi dan penambahan anggaran APBD Kabupaten - Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat bagian perlindungan tanaman dan pembiayaan pertanian - Koordinasi ke pihak asuransi jasa indonesia - Pendampingan oleh petugas teknis mengenai prakiraan cuaca dampak perubahan iklim (DPI) - Melaksakan koordinasi dengan Kortikab POPT
							445.500.000	**368.768.500**	**82,78**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Program Penyuluhan Pertanian	**Persentase Ketersediaan Programa Penyuluhan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Persentase Pelaku Pertanian yang Terlatih	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					**445.500.000**	**368.768.500**	**82,78**			
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	17	17	100.000.000	23.276.000	23,28	Terkendala dalam proses pencairan dimana adanya perubahan mekainsme pengajuan semula GU menjadi LS di akhir tahun	Mengajukan perubahan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di tahun berikutnya	Mengurangi anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	1	150.000.000	149.992.500	100,00			
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	17	17	195.500.000	195.500.000	100,00			
3		**Dinas Perikanan dan Peternakan**					**21.123.979.048**	**18.264.385.318**	**86,46**			
		Pertanian					**2.631.742.350**	**2.496.035.250**	**94,84**			
	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**					**1.202.113.100**	**1.166.115.250**	**97,01**			
			Produksi Hasil Ternak	**Persen**	**2**	**0,8**						
			Jumlah Akseptor IB	**Ekor**	**1.788**	**2.340**						
			Jumlah Kelahiran Sapi Potong Hasil IB dan Kawin Alam	**Ekor**	**1.299**	**2.189**						
			Budidaya Ternak Ruminansia Unggul	**Lokasi**	**2**	**2**						
			Budidaya Ternak Unggas Unggul	**Lokasi**	**2**	**2**						

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Peternakan		**Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT)**	**Lokasi**	**1**	**2**						
			Jumlah Pelaku Usaha Penyedia dan Peredaran Obat Hewan Yang Dibina	**Orang**	**30**	**30**						
			Jumlah Produsen Pakan Yang Dibina:	**Produsen**	**2**	**2**						
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					**165.514.800**	**148.804.600**	**89,90**			
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	165.514.800	148.804.600	89,90			
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisma Kewenangan Kabupaten/Kota					**186.056.800**	**181.858.800**	**97,74**			
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	2	186.056.800	181.858.800	97,74			
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota					**37.562.500**	**34.440.800**	**91,69**			
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	1	1	37.562.500	34.440.800	91,69			
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer					**44.100.000**	**44.100.000**	**100,00**			
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	1	1	44.100.000	44.100.000	100,00			
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak					**67.562.500**	**67.562.500**	**100,00**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		dalam Daerah Kabupaten/Kota										
		Penjaminan Peredaran Benih / Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Ekor	55	55	40.000.000	40.000.000	100,00			
		Pengawasan Peredaran dan sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Ekor	785477	785477	27.562.500	27.562.500	100,00			
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					**701.316.500**	**689.348.550**	**98,29**			
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	862	862	250.009.300	245.559.300	98,22			
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	1	1	451.307.200	443.789.250	98,33			
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**Tersedianya RPH Yang Memenuhi Persyaratan Teknis**	**Unit**	**1**	**1**	**75.000.000**	**10.000.000**	**13,33**	Pekerjaan fisik sudah dilaksanakan 100% oleh pihak ketiga, pembayaran dilaksanakan pada TA. 2024	Koordinasi dengan BKAD	
		Pembangunan Prasarana Pertanian					**75.000.000**	**10.000.000**	**13,33**			
		Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	1	75.000.000	10.000.000	**13,33**			
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					**1.119.039.250**	**1.097.882.000**	**98,11**			
			Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik	**Persen**	**70**	**72,4**						

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	**Kasus**	**0**	**0**						
			Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	**Kecamatan**	**17**	**17**						
			Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak)	**Ekor**	**40.952**	**91.780**						
			Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	**Kecamatan**	**17**	**17**						
			Produk Hasil Ternak Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS) :									
			Daging	**Ton**	**2**	**2,50**						
			Telur	**Ton**	**5**	**5**						
			Susu	**Liter**	**1.100**	**1.000**						
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota					**235.012.750**	**232.534.000**	**98,95**			
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	1	1	155.000.000	154.999.600	100,00			
		Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	80.012.750	77.534.400	96,90			
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota					**96.908.700**	**94.166.200**	**97,17**			
		Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	1	1	30.000.000	30.000.000	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	1	45.005.000	42.262.500	93,91			
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	21.903.700	21.903.700	100,00			
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					**590.205.500**	**576.576.600**	**97,69**			
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	1	1	4.630.500	4.630.500	100,00			
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1	1	585.575.000	571.946.100	97,67			
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					**169.349.900**	**167.880.300**	**99,13**			
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	1	45.000.000	44.654.000	99,23			
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	1	107.812.500	106.852.500	99,11			
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	1	1	16.537.400	16.373.800	99,01			
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan					**27.562.400**	**26.724.900**	**96,96**			
		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan	1	1	27.562.400	26.724.900	96,96			
		Program Penyuluhan Pertanian					**235.590.000**	**222.038.000**	**94,25**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Jumlah Kelompok Usaha Peternakan	**Kelompok**	**100**	**100**						
			Jumlah Peternak Yang Terlatih	**Orang**	**25**	**25**						
			Jumlah Pelaku Peternak Yang Berpestasi	**Penghargaan**	**2**	**2**						
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					**235.590.000**	**222.038.000**	**94,25**			
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	15	15	235.590.000	222.038.000	94,25	Terdapat kelebihan pagu honor narasumber	Pagu honor disesuaikan dengan juknis	
		Kelautan dan Perikanan					**18.492.236.698**	**15.768.350.068**	**85,27**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					**13.202.321.698**	**11.257.197.159**	**85,27**			
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	**Opini**	**B**	**BB**						
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**130.387.400**	**95.554.600**	**73,29**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	34.963.900	26.388.200	75,47			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	12.394.800	11.435.100	92,26			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Lapo1ran Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	12.117.500	9.107.600	75,16			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	6.228.700	6.228.700	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	6.257.900	4.753.000	75,95			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	24.596.000	13.217.000	53,74			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	33.828.600	24.425.000	72,20			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**9.753.898.837**	**8.388.536.353**	**86,00**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN; Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tersedia; Jumlah tambahan penghasilan PNS yang Tersedia	Orang/bulan	854	854	9.726.523.537	8.361.701.953	85,97			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	14.006.900	13.646.000	97,42	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	13.368.400	13.188.400	98,65	-	-	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**18.352.800**	**16.252.800**	**88,56**			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	8.506.800	8.506.800	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Barang Milik Daerah SKPD										
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dokumen	1	1	9.846.000	7.746.000	78,67			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**782.111.100**	**722.554.000**	**92,39**			
		Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	26.093.700	25.940.300	99,41			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	214.772.600	190.700.000	88,79			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1	32.053.100	31.814.000	99,25			
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	89.617.000	88.083.000	98,29			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	265.125.000	261.831.000	98,76			
		Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	21.836.200	21.765.400	99,68			
		Fasiltasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan Tamu	Laporan	1	1	20.000.000	13.220.000	66,10		Realisasi disesuai dengan Tagihan Pembayaran (Penggunaan)	
		Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	101.601.000	89.200.300	87,79			
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					11.012.500		0,00		Sub Kegiatan masuk ke pergeseran anggaran/ perubahan	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusuan Pemerintahan Daerah					**298.458.100**	**147.845.000**	**49,54**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	39		166.697.850	121.195.000	72,70			
		Pengadaann Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	13		131.760.250	26.650.000	20,23		Sub Kegiatan Masuk ke Daftar Utang Belanja	
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**1.573.289.654**	**1.337.981.506**	**85,04**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	4.000.000	4.000.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	309.229.590	192.596.936	62,28		Realisasi disesuai dengan Tagihan Pembayaran (Penggunaan)	
		Penyediaan Jasa Pelayana Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1.260.060.064	1.141.384.570	90,58		-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**645.823.807**	**548.472.900**	**84,93**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	105.000.000	74.843.700	71,28		Realisasi disesuai dengan Tagihan Pembayaran (Penggunaan)	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	41	41	238.795.807	173.956.200	72,85		Realisasi disesuai dengan Tagihan Pembayaran (Penggunaan)	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	151	151	152.130.000	150.230.000	98,75			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0,00		Sub Kegiatan masuk ke pergeseran anggaran/ perubahan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	149.898.000	149.443.000	99,70			
	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**					**661.854.200**	**627.943.500**	**94,88**			
			Produksi Ikan Hasil Tangkapan	**Ton**	**1.470**	**1.474**						
			Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (Restocking)	**Ekor**	**600.000**	**650.000**						
			Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap Yang Dibina	**Kelompok**	**56**	**50**						
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten Kota	**Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (Restocking); Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap Yang Dibina; Produksi Ikan Hasil Tangkapan**				**576.229.700**	**547.978.000**	**95,10**			
		Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1	18.932.400	18.726.500	98,91			
		Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	10	10	100.056.400	98.021.500	97,97			
		Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	200	200	457.240.900	431.230.000	94,31			
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Ikan Yang Ditebarkan (Restocking); Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap Yang Dibina; Produksi Ikan Hasil Tangkapan**				**85.624.500**	**79.965.500**	**93,39**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	40	40	35.025.300	34.675.000	99,00			
		Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaanya	Kelompok	5	5	30.458.100	25.326.500	83,15			
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	5	5	20.141.100	19.964.000	99,12			
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					**4.057.888.000**	**3.315.834.609**	**81,71**			
			Poduksi Ikan Konsumsi	**Ton**	**15.282**	**28.055**						
			Produksi Benih Ikan UPR	**Ekor**	**1.078.038.512**	**1.117.911.000**						
			Produksi Benih Ikan BBI	**Ekor**	**7.200.000**	**7.300.000**						
			Produksi Ikan Hias	**Ekor**	**608.990**	**523.700**						
			Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	**Kelompok**	**130**	**132**						
		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil					**115.000.000**	**111.517.500**	**96,97**			
		Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	Kelompok	10	10	30.000.000	28.110.000	93,70			
		Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	Kelompok	10	10	30.000.000	29.999.000	100,00			
		Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	Jumlah Kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usahanya	Kelompok	10	10	25.000.000	24.000.000	96,00			
		Pemberian pemdampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahanan akses ilmu	Kelompok	10	10	30.000.000	29.408.500	98,03	-	-	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan									
		Pengelolaan Pembudidaya Ikan					**3.942.888.000**	**3.204.317.109**	**81,27**			
		Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	30.000.000	30.000.000	100,00			
		Penyediaan Prasarana pembudidaya ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudiayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Unit	1	1	1.129.900.000	554.077.000	49,04			
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Unit	32	32	2.722.988.000	2.566.003.109	94,23			
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam satu Daerah	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	1	1	30.000.000	25.637.000	85,46			
		Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	100	100	20.000.000	20.000.000	100,00			
		Perencanaan,pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan di darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha	4	4	10.000.000	8.600.000	86,00			
		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	**Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya**	**Kecamatan**	**17**	**17**	**50.000.000**	**50.000.000**	**100,00**			
		Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa dan Genanangan Air					**50.000.000**	**50.000.000**	**100,00**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Lainnya yang dapat diusahakan Dalam Kabupaten/Kota										
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/kota	Dokumen	1	1	25.000.000	25.000.000	100,00			
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/kota	Dokumen	1	1	25.000.000	25.000.000	100,00			
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					**520.172.800**	**517.374.800**	**99,46**			
			Angka Konsumsi Ikan	**Kg/Kap/Th**	**28,76**	**28,00**						
			Produksi Olahan Produk Perikanan	**Ton**	**105**	**300**						
			Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan	**Kelompok**	**17**	**17**						
			Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	**Unit**	**120**	**120**						
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil					**3.599.800**	**3.599.800**	**100,00**			
		Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	1	1	3.599.800	3.599.800	100,00	-	-	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan					**51.625.000**	**50.838.900**	**98,48**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemasaran Skala Mikro dan Kecil										
		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau satandar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	40	40	51.625.000	50.838.900	98,48	-	-	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					**464.948.000**	**462.936.100**	**99,57**			
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalan 1 (Satu) daerah kabupaten/Kota	Ton	0,456	0,456	25.000.000	25.000.000	100,00			
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	2	2	439.948.000	437.936.100	99,54	-	-	
4		**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian**					**1.267.877.800**	**1.124.910.150**	**88,72**			
		Perdagangan					**867.877.800**	**732.680.150**	**84,42**			
	Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**Terfasilitasinya Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**Dokumen**	**300**	**300**	**99.924.100**	**23.870.000**	**0,24**			
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat	**Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**74.924.100**		**0,00**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**									
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	1	74.924.100		0,00	Kegiatan kontraktual APBD akan di bayar tahun anggaran 2024		
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**Jumlah Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**25.000.000**	**23.870.000**	**95,48**			
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Data Tanda Daftar Gudang	Dokumen	1	1	25.000.000	23.870.000	95,48			
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	**Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat, Pasar Modern dan Distributor**	**Pelaku Usaha**	**50**	**50**	**279.999.900**	**274.778.300**	**98,14**			
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kegiatan**	**2**	**2**	**50.000.000**	**48.210.000**	**96,42**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	1	25.000.000	23.230.000	92,92			
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	1	25.000.000	24.980.000	99,92			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**	**2**	**2**	**195.000.000**	**193.308.600**	**99,13**			
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	20.000.000	19.190.000	95,95			
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	175.000.000	174.118.600	99,50			
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**34.999.900**	**33.259.700**	**95,03**			
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	1	1	34.999.900	33.259.700	95,03			
		Program Pengmbangan Eksport	**Peningkatan Nilai Export di Kabupaten Purwakarta**	**Pelaku Usaha**	**80**	**80**	**170.000.000**	**119.700.000**	**70,41**			
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**	**2**		**170.000.000**	**119.700.000**	**70,41**			
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha	50	50	50.000.000		0,00	Kegiatan kontraktual APBD akan di		

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
										bayar tahun anggaran 2024		
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	30	30	120.000.000	119.700.000	99,75			
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	**Standarisasi Produk Dalam Perlindungan Konsumen**	**Pelaku Usaha**	**80**	**80**	**217.953.800**	**214.431.850**	**98,38**			
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Unit**	**3000**	**4425**	**217.953.800**	**214.431.850**	**98,38**			
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	3000	4425	167.967.500	166.955.400	99,40			
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pelaku Usaha	300	300	49.986.300	47.476.450	94,98			
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	**Terciptanya Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta**	**Event**	**2**	**2**	**100.000.000**	**99.900.000**	**99,90**			
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**100.000.000**	**99.900.000**	**99,90**			
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	50	50	100.000.000	99.900.000	99,90			
		Perindustrian					**400.000.000**	**392.230.000**	**98,06**			
	Berkembangnya Sentra	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**					**300.000.000**	**299.550.000**	**99,85**			
			Jumlah Diseminasi	**Orang**	**100**	**74**						

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Industri Unggulan dan Perdagangan		**Jumlah Pelatihan Pengembangan Desain Kemasan**	**Buah**	**25**	**25**						
			Jumlah Pelatihan Potensi Unggulan	**Orang**	**100**	**60**						
			Jumlah Perda	**Buah**	**1**	**1**						
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**	4	**4**	**300.000.000**	**299.550.000**	**99,85**			
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	50.000.000	49.900.000	99,80			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2	2	100.000.000	99.800.000	99,80			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	50.000.000	50.000.000	100,00			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	2	100.000.000	99.850.000	99,85			
		Prgram Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota					**50.000.000**	**47.860.000**	**95,72**			
			Fasilitasi Penerbitan IUI Kecil dan Menengah	**Unit Usaha**	**10**	**10**						
			Pemenuhan dan Pengawasan Bagi IKM	**Unit Usaha**	**30**	**30**						
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	**Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**50.000.000**	**47.860.000**	**95,72**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Kewenangan Kabupaten/Kota										
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	50.000.000	47.860.000	95,72			
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	**Pengembangan Diverifikasi Produk IKM**	**Buah**	**5**	**5**	**50.000.000**	**44.820.000**	**89,64**			
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					**50.000.000**	**44.820.000**	**89,64**			
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	1	50.000.000	44.820.000	89,64			
5		**Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**					**250.000.000**	**195.598.650**	**78,24**			
		Transmigrasi					**250.000.000**	**195.598.650**	**78,24**			
	Meningkatnya Aksesibilit	**Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase kawasan transmigrasi yang di tetapkan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**75.000.000**	**66.846.150**	**89,13**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	as Kesempatan Kerja	**Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi**	**Tersedianya Lokasi Transmigrasi**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**75.000.000**	**66.846.150**	**89,13**			
		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi		Dokumen	1	1	75.000.000	66.846.150	89,13			
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	**Persentase transmigran yang diberangkatkan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000**	**45.392.500**	**90,79**			
		Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**50.000.000**	**45.392.500**	**90,79**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran Yang Mendapatkan Penyuluhan	Lokasi	3	3	50.000.000	45.392.500	90,79			
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	**Persentase transmigran yang dibina**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**125.000.000**	**83.360.000**	**66,69**	**Adanya ketidaksesuaian rincian kegiatan sehingga harus dirubah pada saat APBD-P**	**Melakukan Perubahan rincian kegiatan pada saat APBD-P, namun karena keterbatasan APBD sehingga tidak dapat dicairkan**	
		Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	**Terlaksananya Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**125.000.000**	**83.360.000**	**66,69**			
		Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran Yang Dibina	KK	3	3	125.000.000	83.360.000	66,69			

3.1.4 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Tingkat pencapaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta sangat didukung oleh perangkat daerah pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan selama Tahun 2023. Kabupaten Purwakarta mengalokasikan Pagu anggaran sebesar Rp 179.007.052.369,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 163.435.261.315,00 atau terealisasi sebesar 91,30%, dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Tahun 2023

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					**179.007.052.369**	**163.435.261.315**	**91,30**			
		Sekretariat Daerah					**92.181.648.838**	**80.739.941.183**	**87,59**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Predikat**	**BB**	**B**	**68.928.818.959**	**61.123.386.663**	**88,68**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**100,00**	**87,67**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**			**125.055.500**	**105.733.100**	**84,55**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	27.553.600	23.792.900	86,35	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Kegiatan	1 1	1 1	17.125.700	16.205.700	94,63	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen Kegiatan	1 1	1 1	16.884.000	16.883.100	99,99	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	14.178.100	10.118.100	71,36	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	14.887.900	8.427.900	56,61	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Dokumen Kegiatan	1 1	1 1	14.484.000	10.956.000	75,64	-	-	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	1	1	19.942.200	19.349.400	97,03	-	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**20.171.333.542**	**19.386.192.216**	**96,11**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah tahun	Tahun	1	1	20.085.662.041	19.324.195.916	96,21	-	-	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah buku; Jumlah jenis cetak	Dokumen Dokumen	5 5	4 3	30.181.001	20.319.200	67,32			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	13.920.600	13.920.600	100,00	-	-	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	11.589.800	10.669.800	92,06			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	3	2	17.123.900	13.820.600	80,71	-	-	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	12.856.200	3.266.100	25,40	-	-	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**327.798.400**	**224.112.000**	**68,37**			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jenis ATK	Jenis	30	28	84.798.100	21.026.200	24,80	-	-	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengadaan Jasa	Jasa	5	4	40.626.400	27.057.900	66,60			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Buku	Buku	5	5	202.373.900	176.027.900	86,98	-	-	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**1.077.779.400**	**771.410.500**	**71,57**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					299.950.000	299.918.800	99,99	-	-	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1	99.999.800	83.835.800	83,84	-	-	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan	Kegatan	2	1	41.299.800	8.612.000	20,85	-	-	
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang pensiun	Orang	5	5	106.750.000	106.650.000	99,91	-	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan diklat SDM Waktu Pelaksanaan	Kegatan	4	0	349.999.900	167.978.900	47,99	-	-	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kecamatan Jumlah Kelurahan Desa Jumlah Penayangan	Kecamatan Keluarahan Kali	17 192 12	17 100 12	119.519.900	104.415.000	87,36	-	-	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan SDM Waktu Pelaksanaan	Kegatan	2	2	60.260.000	0	0,00	-	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**11.827.905.600**	**10.132.933.200**	**85,67**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik Jumlah Jenis Lampu Jumlah Pengadaan Pemasanagan Lampu	Jenis Buah Paket	10 400 1	10 400 1	399.986.200	349.638.000	87,41	-	-	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Jumlah Paket Jumlah Perlengkapan Kantor	Paket Paket Paket	2 2 2	1 1 1	1.745.391.300	1.372.628.350	78,64	-	-	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Jumlah Perlengkapan Jamuan Tamu	Jenis Jenis Jenis	10 10 10	10 10 10	251.087.900	209.678.200	83,51	-	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jasa sewa jumlah paket	Jasa Paket	4 84	4 84	7.450.000.000	6.323.909.600	84,88	-	-	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis cetak yang dibutuhkan	Jenis	7	6	650.000.000	649.491.000	99,92	-	-	
		Penyediaan Bahan/Material	jumlah bahan material	Paket	1	1	90.000.000	90.000.000	100,00	-	-	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu	Paket	1	1	350.000.000	349.920.000	99,98	-	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumllah Penyediaan Koordinnas	Paket	1	1	706.442.000	673.269.850	95,30	-	-	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip	Paket	1	1	14.998.200	14.998.200	100,00	-	-	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem	Paket	1	1	170.000.000	99.400.000	58,47	-	-	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**8.655.162.700**	**7.420.316.800**	**85,73**			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					4.420.000.000	4.420.000.000	100,00	-	-	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Kendaraan	Jenis	1	0	1.327.000.000	819.950.000	61,79	-	-	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Paket	1	1	561.402.700	399.211.500	71,11	-	-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Paket	1	1	685.000.000	583.830.900	85,23	-	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan	Paket	1	1	1.111.760.000	647.324.400	58,23	-	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan	Paket	1	1	550.000.000	550.000.000	100,00	-	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**11.672.580.086**	**10.380.798.586**	**88,93**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis ATK	Jenis	5	5	49.999.400	49.999.400	100,00	-	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening	Rekening	3	3	3.109.560.822	2.698.302.934	86,77	-	-	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Jasa	Jasa	5	5	449.990.000	424.890.000	94,42	-	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tahun	Tahun	1	1	8.063.029.864	7.207.606.252	89,39	-	-	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**5.976.127.400**	**4.720.415.750**	**78,99**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Persen Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Persen	100	97	499.985.400	493.277.000	98,66	-	-	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Paket Pemeliharaan Mebeleur	paket	2	2	100.000.000	100.000.000	100,00	-	-	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan	Paket	1	1	155.000.000	150.000.000	96,77	-	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang diperbaiki Jumlah paket penataan Jumlah paket pengadaan	Paket Paket Paket	1 4 4	1 3 4	2.338.276.000	1.931.745.450	82,61	-	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang diperbaiki Jumlah paket penataan Jumlah paket pengadaan	Gedung Paket Paket	1 4 4	1 2 2	309.200.000	308.590.000	99,80	-	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang diperbaiki Jumlah paket penataan Jumlah paket pengadaan	Gedung Paket Paket	1 4 4	1 4 3	2.573.666.000	1.736.803.300	67,48	-	-	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					**3.520.325.897**	**2.774.304.866**	**78,81**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah tahun	Tahun	1	1	1.702.130.697	1.558.930.809	91,59	-	-	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas KDH dan WKDH	Paket	1	1	393.000.000	392.425.000	99,85	-	-	
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Tahun	Tahun	1	1	36.000.000	8.712.000	24,20	-	-	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional	Jumlah Tahun	Tahun	1	1	1.389.195.200	814.237.057	58,61	-	-	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					**1.384.623.984**	**1.281.421.665**	**92,55**			
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Peralatan Kebersihan Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Jumlah Perlengkapan Jamuan Tamu	jenis Jenis jenis	10 10 10	6 6 6	634.623.996	633.180.440	99,77	-	-	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Peralatan Kebersihan Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Jumlah Perlengkapan Jamuan Tamu	jenis Jenis jenis	10 10 10	6 6 6	399.999.996	299.094.800	74,77	-	-	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan Kebersihan Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Jumlah Perlengkapan Jamuan Tamu	jenis Jenis jenis	10 10 10	8 8 8	349.999.992	349.146.425	99,76	-	-	
		Penataan Organisasi					**1.690.814.500**	**1.481.604.980**	**87,63**			
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Kegiatan Jumlah Paket	Dokumen Kegiatan Paket	2 2 2	5 6 2	730.422.500	664.623.456	90,99	-	-	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Kegiatan Jumlah Paket	Dokumen Kegiatan Paket	2 4 2	6 9 1	494.327.000	374.147.524	75,69	-	-	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Kegiatan Jumlah Paket	Laporan Kegiatan Paket	2 2 1	5 5 1	391.065.000	378.652.500	96,83	-	-	
		Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Kegiatan Jumlah Paket	Laporan Kegiatan Paket	2 2 0	1 1 1	25.000.000	14.181.500	56,73			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Kegiatan Jumlah Paket	Dokumen Kegiatan Paket	1 2 2	3 5 3	50.000.000	50.000.000	100,00	-	-	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Kegiatan**	**100**	**94**	**2.499.311.950**	**2.444.143.000**	**97,79**	**Masih Kurangnya sumber daya manusia yang**	**Adanya penambahan pegawai dan diberikannya pelatihan/bimt**	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
										dimiliki oleh bagian Prokompim	**ek bagi pegawai prokompi**	
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Jenis cenderamata yang dibutuhkan Jumlah Kegiatan Keprotokolan yang dilaksanakan Jumlah Pakaian Keprotokolan yang dibutuhkan	Jenis Persen Stel	6 100 128	6 99 128	1.161.838.650	1.130.220.450	97,28	-	-	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Alat Komunikasi Jumlah Kegiatan Komunikasi yang dilaksanakan Jumlah Pemeliharaan yang dibutuhkan	Unit Persen Jenis	4 100 10	4 99 10	727.119.700	705.504.400	97,03	-	-	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Alat Dokumentasi Jumlah Kegiatan Dokumentasi yang dilaksanakan Jumlah Pemeliharaan yang dibutuhkan Jumlah Sarana Dokumentasi yang dibutuhkan	Unit Persen Unit Unit	8 100 4 10	8 99 4 10	610.353.600	608.418.150	99,68	-	-	
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	3,50	3,50	**17.981.618.100**	**15.246.991.150**	**84,79**			
			Persentase Kerjasama Daerah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Persen	100,00	100,00						
			Persentase Fasilitasi Naskah Kerjasama Daerah	Persen	96,00	100,00						
			Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan Yang Difasilitasi	Persen	100,00	100,00						
			Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan:									
			- Perda	Persen	100,00	100,00						
			- Perbup	Persen	100,00	100,00						
			- Kepbup	Persen	100,00	100,00						

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	Persen	100,00	100,00						
			Persentase Sosialisasi Produk Hukum	Persen	100,00	0,00						
			Indeks Reformasi Biroktasi	Poin	60,00	62,42						
		Administrasi Tata Pemerintahan					**1.434.851.000**	**884.952.200**	**61,68**			
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	0	543.151.000	334.949.300	61,67			
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kegiatan Jumlah Peserta	Kegiatan Orang	3 54	0 0	488.200.000	345.612.300	70,79	-	-	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LPPD Jumlah dokumen SPM	Dokumen Dokumen	2 3	0 0	403.500.000	204.390.600	50,65	-	-	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					**14.569.767.100**	**12.644.232.100**	**86,78**			
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Kegiatan	8	10	7.980.837.100	7.415.887.100	92,92	-	-	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan Kesejahteraan Sosial: yang di fasilitasi	Kegiatan	10	12	3.603.980.000	2.314.380.000	64,22	-	-	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kegiatan Kesejahteraan Masyarakat: yang di fasilitasi	Kegiatan	7	12	2.984.950.000	2.913.965.000	97,62	-	-	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					**1.877.000.000**	**1.654.215.850**	**88,13**			
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Pembentukan Peraturan Daerah Pembentukan Peraturan Bupati Pembuatan Naskah Akademik Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	12 12 1 12	12 12 1 6	820.000.000	692.250.650	84,42	-	-	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Penanganan perkara hukum litigasi Penanganan bantuan hukum masyarakat miskin Penanganan perkara hukum non Litigasi Penyampaian laporan aksi HAM dan KKP HAM Daerah	Kasus Kasus Sengketta Laporan	3 5 12 4	1 0 15 4	800.000.000	741.166.600	92,65	-	-	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan	Pendokumentasian produk hukum daerah sosialisasi	Dokumen Kegiatan	30 1	30 1	257.000.000	220.798.600	85,91	-	-	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengelolaan Informasi Hukum	pertauran perundang-undangan									
		Fasilitasi Kerjasama Daerah					**100.000.000**	**63.591.000**	**63,59**			
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah MOU/PKS	Dokumen	5	25	100.000.000	63.591.000	63,59	-	-	
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	Persentase Implementasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian daerah	Persen	100,00	91,00	**5.271.211.779**	**4.369.563.370**	**82,89**			
			Persentase Ketersediaan Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pembangunan dan Analisis Standar Belanja (ASB)	Persen	100,00	100,00						
			Persentase Ketersediaan Dokumen Pengembangan Teknologi Informasi	Persen	100,00	0,00						
			Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa	Persen	96,77	94,70						
			Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Selesai Ditenderkan	Persen	100,00	100,00						
			Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Persen	100,00	100,00						
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					**942.298.145**	**867.257.900**	**92,04**			
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah jasa konsultasi manajemen Jumlah koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Kegiatan Kegiatan	1 36	1 21	157.350.000	146.560.500	93,14	kegiatan monev secara fisik tidak bisa terealisasi secara maksimal karena adanya PPKM	Melakukan Monev secara virtual	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan distribusi kecamatan Jumlah rakor DBH CHT Jumlah rakor pengendalian	Kecamatan Kegiatan Kegiatan	17 4 1	30 2 1	650.812.145	602.464.900	92,57			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			dan distribusi perekonomian									
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengawasan ekonomi mikro kecil Jumlah paket pengadaan barang/jasa pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Kecamatan Kegiatan	17 1	29 1	134.136.000	118.232.500	88,14			
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					**2.462.825.634**	**1.715.688.004**	**69,66**			
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen yang disusun Jumlah Kegiatan Jumlah Paket	Dokumen Kegiatan Paket	2 1 2	2 1 2	1.833.540.034	1.244.152.974	67,86			
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen yang disusun Jumlah Kegiatan Jumlah Paket	Dokumen Kegiatan Paket	12 12 2	12 12 2	520.461.800	373.332.900	71,73			
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen eavluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah Jumlah dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban bupati purwakarta Jumlah kegiatan Jumlah paket	Dokumen Dokumen Kegiatan Paket	1 1 2 2	1 1 2 2	108.823.800	98.202.130	90,24			
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					**1.560.800.000**	**1.512.667.566**	**96,92**			
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Jumlah Pegawai	Kegiatan Orang	5 10	6 40	610.800.000	568.408.700	93,06	-	-	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Jumlah Tahun	Kegiatan Tahun	2 1	2 13	620.000.000	619.227.000	99,88	-	-	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan RLP	Kegiatan RLP	2 2	2 1	330.000.000	325.031.866	98,49	-	-	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					**305.288.000**	**273.949.900**	**89,73**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah rakor,Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah wilayah pemantauan kebijakan	Kegiatan BPP	1 17	1 22	100.000.000	84.892.000	84,89	kegiatan monev secara fisik tidak bisa terealisasi secara maksimal karena adanya PPKM	Melakukan Monev secara virtual	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah rakor, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah wilayah pemantauan kebijakan	Kegiatan Kegiatan	1 17	1 19	91.741.000	88.066.000	95,99	kegiatan monev secara fisik tidak bisa terealisasi secara maksimal karena adanya PPKM	Melakukan Monev secara virtual	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah rakor, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah wilayah pemantauan kebijakan	Kegiatan Kegiatan	1 17	1 28	113.547.000	100.991.900	88,94			
		Sekretariat DPRD					**86.825.403.531**	**82.695.320.132**	**95,24**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**B**	**53.147.831.581**	**49.875.443.287**	**93,84**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**%**	**90,00**	**57,44**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**228.914.800**	**214.599.636**	**93,75**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja Perangkat daerah	Dokumen	2	2	81.289.800	74.488.260	91,63	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA kegiatan	Dokumen	1	1	140.000.000	132.486.376				

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	1	7.625.000	7.625.000	100,00	-	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persen**	**100**	**100**	**6.928.652.397**	**5.818.951.446**	**83,98**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	6.835.544.097	5.726.688.731	83,78	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan	Dokumen	1	1	93.108.300	92.262.715	99,09	-	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase**	**100**	**100**	**557.810.000**	**448.958.224**	**80,49**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, tersedianya pengadaan pakaian korpri	Bulan	12	12	172.810.000	71.550.000	41,40	-	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Formal	Persen	100%	100%	385.000.000	377.408.224	98,03	-	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase**	**100**	**100**	**2.376.238.810**	**2.041.281.000**	**85,90**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	50.600.800	49.856.000	98,53	-	-	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan Alat Tulis Kantor, tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	Dokumen	12	12	329.365.700	298.475.000	90,62	-	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya penyediaan Makanan dan Minuman	Dokumen	12	12	1.850.772.310	1.547.750.000	83,63	-	-	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dokumen	12	12	145.500.000	145.200.000	99,79	-	-	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		**Persentase**	**100**	**100**	**1.557.012.309**	**1.037.919.000**	**66,66**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Urusan Pemerintah Daerah										
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Fasilitas Kantor	Paket/Unit	2	2	150.000.000	99.700.000	66,47	-	-	
		Pengadaaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Tersedianya sarana gedung kantor	Presentase			851.013.009	548.464.000				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	Bulan	12	12	555.999.300	389.755.000				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase**	**100**	**100**	**3.458.469.594**	**2.882.913.651**	**83,36**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Bulan	12	12	12.000.000	12.000.000	100,00	-	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	450.024.190	423.272.815	94,06	-	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Administrasi keuangan, tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	2.996.445.404	2.447.640.836	81,68	-	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase**	**100**	**100**	**1.226.845.000**	**1.190.249.146**	**97,02**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Operasional, tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	12	330.895.000	296.431.146	89,58	-	-	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanya pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor, terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	12	345.950.000	345.260.000	99,80			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanaya pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor, terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Bulan	12	12	200.000.000	199.270.000	99,64	-	-	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanaya pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor, terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Bulan	12	12	350.000.000	349.288.000	99,80	-	-	
		layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		**Prosentase**	**100**	**100**	**36.074.477.671**	**35.524.629.554**	**98,48**			
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedinya Gaji dan Tunjangan DPRD	Bulan	14	14	35.859.477.671	35.310.089.554	98,47	-	-	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksanaya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persen	100	100	155.000.000	154.690.000	99,80	-	-	
		Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Persen Orang	100 45	100 45	60.000.000	59.850.000	99,75	-	-	
		Layanan Administrasi DPRD					**739.411.000**	**715.941.630**	**96,83**	-		
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya Fasilitasi Rapat DPRD	Bulan	12	12	739.411.000	715.941.630	96,83	-	-	
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	**Persentase pemenuhan referensi perundang-undangan**	**Persen**	**100,00**	**38,02**	**33.677.571.950**	**32.819.876.845**	**97,45**			
			Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD	**Persen**	**100,00**	**38,02**						
			Persentase penyusunan risalah rapat	**Persen**	**100,00**	**38,02**						
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		**Persentase**	**100,00**	**100,00**	**8.012.071.000**	**7.809.047.279**	**97,47**			
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersedianya penyusunan dan pembahasan Program dan pembentukan Peraturan Daerah, tersedianya Rapat-rapat DPRD	Dokumen Bulan	2 10	2 10	756.320.000	695.374.056	91,94	-	-	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya pembahasan Rancangan Perda	Dokumen Bulan	21 10	21 10	6.500.627.000	6.408.394.623	98,58	-	-	
		Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Tersedianya penyelenggaraan kajian perundang undangan	Dokumen Bulan	12 12	12 12	245.880.000	203.204.500	82,64	-	-	
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan	Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik	Dokumen Bulan	6 12	6 12	509.244.000	502.074.100	98,59	-	-	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		dan/atau Naskah Akademik										
		Pembahasan Kebijakan Anggaran		**Persentase**	**100,00**	**100,00**	**1.382.490.250**	**1.257.701.893**	**90,97**			
		Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksanannya pembahasan KUA dan PPAS	Kegiatan	6	6	205.552.750	196.813.650	95,75	-	-	
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksanya pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Kegiatan	1	1	206.552.750	186.184.832	90,14	-	-	
		Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	Kegiatan	1	1	218.671.250	136.440.709	62,40			
		Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semesteran	Kegiatan	1	1	244.776.750	239.021.777	97,65	-	-	
		Pembahasan Pertanggung JawabanAPBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggung jawaban DPRD	Kegiatan	1	1	202.041.000	194.345.175	96,19			
		Pembahasan APBD	terlaksanya Pembahasan APBD	Kegiatan	1,00	1,00	304.895.750	304.895.750	100,00	-	-	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		**Persentase**	**100,00**	**100,00**	**502.352.000**	**349.064.500**	**69,49**			
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Tersedianya pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum	Bulan	12	12	140.063.000	102.016.500	72,84	-	-	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Tersedianya pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	Bulan	12	12	121.988.000	87.926.500	72,08	-	-	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Tersedianya pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	Bulan	12	12	122.363.000	83.285.000	68,06	-	-	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Tersedianya pengawasan urusan pemerintah bidang perekonomian	Bulan	12	12	117.938.000	75.836.500	64,30	-	-	
		Peningkatan Kapasitas DPRD		**Persentase**	**100,00**	**100,00**	**4.859.661.800**	**4.565.373.085**	**93,94**			
		Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Persen	100	100	2.865.039.500	2.732.931.000	95,39	-	-	
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Bulan	12	12	1.078.806.300	996.358.300	92,36	-	-	
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persen	100	100	495.816.000	416.083.785	83,92	-	-	
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Persen	100	100	420.000.000	420.000.000	100,00	-	-	
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		**Persentase**	**100,00**	**100,00**	**7.287.551.000**	**7.267.724.846**	**99,73**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pelaksanaan Reses	Tersedianya pelaksanaan kegiatan Reses Anggota DPRD	Kegiatan Dapil	26	26	7.287.551.000	7.267.724.846	99,73			
		Fasilitasi Tugas DPRD		**Persentase**	**100,00**	**100,00**	**11.633.445.900**	**11.570.965.242**	**99,46**	-	-	
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tersedianya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Bulan	12	12	7.526.850.300	7.516.076.500	99,86	-	-	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Badan Musyawarah	Tersedianya Undangan DPRD	Bulan	12	12	1.248.607.300	1.224.449.742	98,07	-	-	
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tersedianya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Bulan	12	12	2.857.988.300	2.830.439.000	99,04	-	-	

3.1.5 Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Tingkat pencapaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta sangat didukung oleh perangkat daerah pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan selama Tahun 2023. Kabupaten Purwakarta mengalokasikan Pagu anggaran sebesar Rp535.124.968.098,00 dan terealisasi sebesar Rp470.141.135.203,00 atau 92,10%, dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Tahun 2023

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					**535.124.968.098**	**470.141.135.203**	**92,10**			
1		**Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah**					**14.930.668.186**	**12.188.882.720**	**89,12**			
		Perencanaan					**14.496.668.186**	**11.798.438.533**	**81,39**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**AA**	**10.889.768.186**	**9.220.563.852**	**84,67**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**%**	**90,00**	**84,67**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun**	**Dokumen**	**7**	**7**	**105.000.000**	**101.577.700**	**96,74**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	2	2	25.000.000	23.420.900	92,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD Yang Disusun	Dokumen	1	1	15.000.000	14.971.700	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang Disusun	Dokumen	1	1	10.000.000	10.000.000	99,40			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD Yang Disusun	Dokumen	1	1	15.000.000	14.758.100	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Yang Disusun	Dokumen	1	1	10.000.000	10.000.000	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	Dokumen	1	1	30.000.000	28.427.000	93,57			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**1**	**1**	**8.296.875.050**	**7.400.930.564**	**89,20**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Yang Dibayar	Orang	40	39	8.246.875.050	7.372.769.164	89,40			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Yang Disusun	Dokumen	1	1	50.000.000	28.161.400	56,32			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kegiatan**	**2**	**2**	**193.000.000**	**148.615.000**	**77,00**			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Orang	1	1	50.000.000	6.125.000	12,25			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	40	143.000.000	142.490.000	99,64			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Paket**	**7**	**7**	**1.028.330.400**	**754.173.757**	**73,34**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	96.246.080	86.367.900	89,74			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	277.906.000	148.705.000	53,51			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	Paket	1	1	125.000.000	120.382.900	96,31			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	2	2	123.600.000	73.736.700	59,66			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	Paket	1	1	142.000.376	131.493.929	92,60			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Bulan	12	11	150.000.000	142.067.428	94,71			
		Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	36.600.000	35.802.400	97,82			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	1	76.977.944	15.617.500	20,29			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Paket**	**2**	**2**	**350.000.000**	**148.653.000**	42,47			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor Bappelitbangda	Paket	1	1	150.000.000	148.653.000	99,10			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bappelitbangda	Paket	1	0	200.000.000	-	-			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kegiatan**	**4**	**4**	**534.062.736**	**428.852.229**	**80,30**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Dibutuhkan	Lembar	350	257	3.500.000	2.570.000	73,43			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta	Bulan	12	11	75.000.000	34.172.951	45,56			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	100.000.000	70.313.500	70,31			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	16	9	355.562.736	321.795.778	90,50			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Paket**	**1**	**3**	**382.500.000**	**237.761.602**	**62,16**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	23	12	145.000.000	88.988.602	61,37			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bappelitbangda	Paket	1	1	237.500.000	148.773.000	62,64			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Aturan**	**%**	**100,00**	**89,53**	**1.828.500.000**	**1.471.119.895**	**80,46**			
			Tingkat Capaian Program Kinerja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan	**%**	**95,00**	**70,84**						
			Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	**%**	**95,00**	**19,84**						
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun**	**Dokumen**	**7**	**7**	**1.419.700.000**	**1.271.036.770**	**89,53**			
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	160.000.000	153.492.300	95,93			
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi Publik Yang Telah Dilaksanakan	Dokumen	1	1	305.000.000	303.043.000	99,36			
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	49.700.000	49.700.000	100,00			
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten yang Telah Dilaksanakan	Dokumen	1	1	300.000.000	283.475.400	94,49			
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	75.000.000	74.572.000	99,43			
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	530.000.000	406.754.070	76,75			
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Yang Disusun**	Dokumen	**2**	**2**	**175.500.000**	**34.816.925**	**19,84**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	120.500.000	31.137.125	25,84	Dibayarkan Tahun 2024		
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku	1	1	55.000.000	3.679.800	6,69	Dibayarkan Tahun 2024		
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Yang Disusun**	Dokumen	**2**	**2**	**233.300.000**	**165.266.200**	**70,84**			
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen	1	1	125.300.000	110.878.000	88,49			
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	108.000.000	54.388.200	50,36	-	-	
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Kesesusaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**%**	**87,00**	**48,03**	**1.778.400.000**	**1.106.754.786**	**62,23**			
			Persentase Kesesusaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	**%**	**87,00**	**97,76**						
			Persentase Kesesusaian Capaian Program dan Kegiatan PD Terhadap Capaian RPJMD dan Renstra OPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**%**	**87,00**	**46,13**						
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang**	Dokumen	**3**	**3**	**805.000.000**	**386.661.161**	**48,03**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1	230.000.000	80.040.000	34,80			
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang Diasistensi	Dokumen	1	1	100.000.000	38.333.461	38,33			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	1	25.000.000	24.949.800	99,80			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1	450.000.000	243.337.900	54,08			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Dokumen**	**4**	**4**	**525.000.000**	**513.264.250**	**97,76**			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	1	1	190.000.000	188.099.450	99,00			
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam) Yang Diasistensi	Perangkat Daerah	6	6	100.000.000	98.666.500	98,67			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Dokumen	1	1	45.000.000	42.182.100	93,74			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Daerah Bidang Perekonomian	Daerah Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)									
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Manusia)	Dokumen	1	1	190.000.000	184.316.200	97,01			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Dokumen**	**4**	**4**	**448.400.000**	**206.829.375**	**46,13**			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Dokumen	1	1	269.200.000	60.718.475	22,56			
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Yang Diasistensi	Dokumen	1	1	30.000.000	18.425.000	61,42			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Dokumen	1	1	125.000.000	115.585.900	92,47			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Dokumen	1	1	24.200.000	12.100.000	50,00			
		Penelitian dan Pengembangan					**434.000.000**	**390.444.187**	**89,96**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase Penelitian Pembangunan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan**	**%**	**95,00**	**89,00**	**434.000.000**	**390.444.187**	**89,96**			
			Persentase Pemanfaatan Inovasi Berbasis Iptek Dalam Pembangunan Daerah	**%**	**95,00**	**90,00**						

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Dokumen	**1**	**1**	**100.000.000**	**91.313.287**	**91,31**			
		Penelitian dan Pengembangan Pengegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pengegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	**1**	**1**	100.000.000	91.313.287	91,31			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Dokumen	**1**	**1**	**100.000.000**	**88.400.300**	**88,40**			
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	1	100.000.000	88.400.300	88,40			
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Dokumen	**2**	**2**	**234.000.000**	**210.730.600**	**90,06**			
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	1	85.000.000	70.593.100	83,05			
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	1	149.000.000	140.137.500	94,05			
2		**Badan Keuangan dan Aset Daerah**					**446.936.803.466**	**397.470.538.722**	**88,93**			
		Keuangan					**446.936.803.466**	**397.470.538.722**	**88,93**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**A**	**72.496.414.814**	**44.935.652.227**	**61,98**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**90**	**90**						
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun**	**Dokumen**	**20**	**20**	**94.761.800**	**65.039.200**	**68,63**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	32.423.900	22.262.000	68,66			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	3	8.905.700	7.447.000	83,62	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	8.964.000	4.301.000	47,98	Efisiensi anggaran pada pelaksanaan rapat pembahasan	Mengurangi volume kegiatan rapat pada APBD TA 2024	
		Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	15.034.000	11.069.000	73,63	-	-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	29.434.200	19.960.200	67,81			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**96**	**96**	**64.985.933.886**	**38.585.317.309**	**59,37**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	55	55	64.944.525.586	38.572.698.709	59,39	Adanya keterlambatan Penerbitan SK Penetapan PPPK	Melaksanakan Koordinasi dan rekonsiliasi data kepegawaian dengan BKPSDM secara intensif dan berkala	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	14.239.600	3.275.000	23,00	Efisiensi anggaran pada pelaksanaan rapat pembahasan	Mengurangi volume kegiatan rapat pada APBD TA 2024	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5	19.024.300	9.343.600	49,11			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	8.144.400	0	-	Efisiensi Anggaran		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Pelaporan atas kebutuhan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD**	**Dokumen**	**10**	**11**	**25.618.500**	**17.399.000**	**67,92**			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	5	9.995.100	4.199.000	42,01			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	6	15.623.400	13.200.000	84,49			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun**	**Dokumen**	**3**	**3**	**705.955.000**	**693.666.500**	**98,26**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	4	255.630.000	255.346.000	99,89			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	50.325.000	38.820.500	77,14			
		Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	350	350	400.000.000	399.500.000	99,88			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Paket**	**25**	**25**	**1.819.457.638**	**1.388.441.855**	**76,31**			
		Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	20.503.900	20.469.000	99,83			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	104.473.800	74.806.900	71,60			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	431.408.088	326.341.600	75,65			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	10	625.419.500	523.261.000	83,67			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	25	25	14.400.000	3.900.000	27,08	Sesuai Kebutuhan		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	105.918.450	42.540.000	40,16	Sesui Kebutuhan		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	320.450.000	209.824.895	65,48			
		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	83.941.400	74.798.460	89,11			
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	112.942.500	112.500.000	99,61			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Unit**	**84**	**88**	**911.949.750**	**909.691.100**	**99,75**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	50	201.670.000	199.797.700	99,07			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	38	38	710.279.750	709.893.400	99,95			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Dokumen Pelaporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun**	**Dokumen**	**36**	**36**	**2.753.738.240**	**2.161.413.838**	**78,49**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	5.000.000	5.000.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	299.400.000	258.642.803	86,39			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	2.449.338.240	1.897.771.035	77,48			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik**	**Unit**	**138**	**139**	**1.199.000.000**	**1.114.683.425**	**92,97**			
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	8	86.000.000	73.198.958	85,12			
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	22	143.000.000	77.465.399	54,17	Sesuai kebutuhan kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya		
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	106	106	170.000.000	164.750.000	96,91			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	400.000.000	399.698.973	99,92			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	400.000.000	399.570.095	99,89			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Pelayanan Verifikasi Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai Dengan SOP Pelayanan**	**Persen**	**100**	**100**	**372.435.408.352**	**350.731.257.015**	**94,17**			
			Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	**Persen**	**100**	**100**						
			Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	**Persen**	**100**	**100**						
			Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	**Persen**	**100**	**100**						

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		**Persentase Penyerapan Anggaran**	**Persen**	**95**	**86**						
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					**3.196.140.200**	**2.948.328.295**	**92,25**			
		Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	4	4	174.095.900	171.433.000	98,47			
		Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	4	4	171.633.300	168.511.000	98,18	Tidak adanya perubahan APBD Tahun 2022		
		Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	2	2	496.043.200	377.250.000	76,05			
		Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	1	547.723.400	546.650.000	99,80			
		Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	2	2	35.957.100	35.846.300	99,69			
		Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	1	74.962.400	74.841.000	99,84	Tidak adanya perubahan APBD Tahun 2022		
		Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	10	10	743.929.100	713.961.500	95,97			
		Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	7	7	757.068.800	702.830.300	92,84			
		Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	1	194.727.000	157.005.195	80,63			
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					**796.631.800**	**696.802.200**	**87,47**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12	12	127.547.300	91.856.100	72,02			
		Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	3	3	92.891.700	77.997.900	83,97			
		Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	12	164.721.900	133.621.900	81,12			
		Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	4	4	124.940.000	111.280.000	89,07			
		Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	1	129.621.900	127.297.300	98,21			
		Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	100	100	156.909.000	154.749.000	98,62			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					**767.233.400**	**698.904.600**	**91,09**			
		Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	5	5	99.660.100	80.630.100	80,91			
		Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala	Dokumen	3	3	576.874.100	530.975.300				

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran	Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	2	90.699.200	87.299.200	96,25			
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					**367.164.864.752**	**345.925.912.220**	**94,22**			
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	204	204	305.603.970.000	292.771.687.800	95,80			
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12	12	16.598.701.646	9.290.031.314	55,97	Sesuai pengajuan kebutuhan atas BTT yang masuk dan terverifikasi	-	
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	204	204	44.962.193.106	43.864.193.106	97,56		-	
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					**510.538.200**	**461.309.700**	**90,36**			
		Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1		314.210.600	304.236.200	96,83	-	-	
		Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	120		196.327.600	157.073.500	80,01			
	Meningkatnya	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pengelola Asset OPD Yang Dibina**	**Persen**	**100**	**100**	**2.004.980.300**	**1.803.629.480**	**89,96**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		**Presentase Perangkat Daerah yang mengikuti Rekonsiliasi BMD**	**Persen**	**100**	**100**						
		Pengelolaan Barang Milik Daerah					**2.004.980.300**	**1.803.629.480**	**89,96**	**-**	**-**	
		Penyusunan standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	1	222.893.100	212.990.050	95,56	-	-	
		Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	0	27.411.500	9.866.500	35,99	Belum adanya usulan Standar Kebutuhan BMD berikut kajian terhadap standar dimaksud sebagai dasar usulan yang masuk dari Perangkat Daerah	Melaksanakan Koordinasi dengan Bidang Pengelolaan BMD pada BPKAD Provinsi Jawa Barat yang sedang melaksanakan Penyusunan Standar Kebutuhan BMD, sehingga diharapkan bisa membantu Perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Standar BMD secara optimal	
		Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	30.982.550	25.567.750	82,52			
		Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	169.674.350	166.399.250	98,07	-	-	
		Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	253.256.500	243.560.600	96,17	-	-	
		Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	100	70	814.084.700	683.705.830	83,98	-	-	
		Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	138.344.800	131.860.200	95,31			
		Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	4	4	40.745.700	40.681.700	99,84	-	-	

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2	2	155.589.200	140.531.700	90,32	-	-	
		Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	100	100	151.997.900	148.465.900	97,68	-	-	
3		**Badan Pendapatan Daerah**					**32.905.507.080**	**28.791.679.831**	**87,50**			
		Keuangan					**32.905.507.080**	**28.791.679.831**	**87,50**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	BB	A	**28.963.549.780**	**25.631.461.338**	**88,50**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**%**	100,00	88,50						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**195.537.800**	**105.020.600**	**53,71**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	**2**	**2**	117.243.900	59.617.300	**50,85**			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	**1**	**1**	12.604.000	8.333.300	**66,12**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perecanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	**1**	**1**	15.354.200	8.434.200	**54,93**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	**1**	**1**	13.705.700	11.331.700	**82,68**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	**1**	**1**	13.464.000	7.058.100	**52,42**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	**1**	**1**	11.678.100	5.218.100	**44,68**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	**1**	**1**	11.487.900	5.027.900	**43,77**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persen**	**100**	**100**	**21.611.530.827**	**19.591.211.061**	**90,65**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	60	60	21.529.873.227	19.524.321.461	90,68			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	63.194.300	60.720.300	96,09			
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	11.628.900	2.334.900	20,08			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	3	6.834.400	3.834.400	56,10			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persen**	**100**	**100**	**32.980.400**	**20.520.400**	**62,22**			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	**1**	**1**	15.203.400	10.823.400	71,19			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	**1**	**1**	10.797.900	6.757.900	62,59			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	6.979.100	2.939.100	42,11			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**283.750.000**	**253.755.000**	89,43			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang	Orang	10	11	25.000.000	17.625.000	70,50			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Mengikuti Pendidikan dan Pelatihanpenuhi									
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	138.750.000	116.250.000	83,78			
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	120.000.000	119.880.000	99,90			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**2.011.554.650**	**1.647.025.044**	**81,88**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	24.280.700	24.178.000	99,58	-	-	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Paket	3	3	470.036.200	349.572.900	74,37	-	-	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1	14.980.000	14.862.000	99,21	-	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	3	3	332.072.200	268.068.000	80,73	-	-	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	3	3	443.385.550	356.335.000	80,37	-	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	6.000.000	4.800.000	80,00			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	184.800.000	184.800.000	100,00			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	270.000.000	267.136.344	98,94			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	66.000.000	78.000.000	118,18			
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	4	200.000.000	99.272.800	49,64			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Barang Milik**	**Persen**	**100**	**100**	**683.916.000**	**563.165.000**	**82,34**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	99.266.500	99.265.000	100	-	-	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	15	15	580.962.000	463.900.000	79,85			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	1	3.687.500	0	0			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Kualitas Administrasi Pelayanan Perkantoran**	**Persen**	**100**	**100**	**2.927.063.303**	**2.445.473.653**	**83,55**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	628.024.575	586.292.039	93,35			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	11	2.283.538.728	1.852.768.914	81,14	-	-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	15.500.000	6.412.700	41,37	-	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**1.217.216.800**	**1.005.290.580**	**82,59**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	27.500.000	27.314.700	99,33	-	-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	50	46	150.100.000	127.875.800	85,19	-	-	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	70	64	175.050.000	151.341.560				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangdipelihara/direhabilitasi	Unit	1	2	854.566.800	688.758.520	80,60	-	-	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	2	2	10.000.000	10.000.000	100,00	-	-	
	Meningkatnya Kualitas	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);**	**%**	**72,50**	**60,95**	**3.941.957.300**	**3.160.218.493**	**80,17**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE		**Persentase Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**%**	**7,00**	**3,67**						
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persen**	**100,00**	**99,85**	**3.941.957.300**	**3.160.218.493**	**80,17**			
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan pajak daerah	Dokumen	1	1	100.000.000	0	0,00			
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah.	Laporan	12	12	185.468.300	83.360.300	44,95	-	-	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kegiatan	5	5	86.400.000	86.290.400	99,87	-	-	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jenis	9	9	239.387.700	209.364.588	87,46	-	-	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jenis Pajak	8	8	509.915.400	468.832.084	91,94			
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Perusahaan	6	6	450.000.000	99.800.000	22,18	-	-	
			Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Kecamatan	16	17	344.180.500	329.287.150	95,67	-	-	
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	NOP	452232	464766	209.999.800	209.153.980	99,60			
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	12000	12000	325.571.500	306.883.000	94,26	-	-	
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Bimtek Penagihan Pajak Daerah	Kegiatan	1	1	1.281.100.000	1.177.564.891	91,92			
			Jumlah Laporan Pengamanan, Pengendalian, dan Pengawasan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Laporan	12	12						
			Jumlah Laporan Penyebaran SKPD	Laporan	12	12						
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Laporan	12	12	31.399.900	28.064.500	89,38			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Kegiatan	4	4	141.598.500	125.763.400	88,82	-	-	-
			Jumlah Laporan Pengendalian Potensi Pajak Daerah (Uji Petik)	Laporan	12	12						
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	4	36.935.700	35.854.200	97,07	-	-	
4		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**					**40.171.480.366**	**31.621.141.830**	**78,72**			
		Kepegawaian					**40.171.480.366**	**31.621.141.830**	**78,72**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**A**	**A**	**30.285.926.616**	**24.723.929.037**	**81,64**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**90,00**	**81,64**						
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkar Daerah					**138.968.400**	**80.305.500**	**57,79**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	3	3	52.335.700	34.527.700	65,97			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	12.071.700	6.831.700	56,59			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	9.910.000	8.979.100	90,61			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	14.404.000	8.736.000	60,65			
		Evaluasi Kinerja Perangkar Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	4	50.247.000	21.231.000	42,25			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**25.878.361.784**	**21.428.096.602**	**82,80**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	65	58	25.856.117.084	21.409.811.902	82,80			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2	11.320.300	10.400.300	91,87			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	10.924.400	7.884.400	72,17			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**24.517.900**	**21.457.900**	**87,52**			
		Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	24.517.900	21.457.900	87,52			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**127.502.900**	**46.460.000**	**36,44**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	36.450.000	-	**0,00**			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Kegiatan Pedidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Paket	1	1	50.000.000	46.460.000	**92,92**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	0	41.052.900	-	**0,00**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**1.336.449.494**	**1.025.713.415**	**76,75**			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	56.751.400	56.518.000	99,59			
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	384.285.800	196.781.950	51,21			
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	36.560.900	36.148.250	98,87			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	203.280.000	180.544.000	88,82			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	106.003.000	86.747.000	81,83			
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	159.697.094	159.686.800	99,99			
		Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	67.000.000	11.200.000	16,72			
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	6	242.861.000	218.077.115	89,80			
		Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	80.010.300	80.010.300	100,00			
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	-	-				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**640.265.200**	**392.950.000**	**61,37**			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	441.604.000	392.950.000	88,98			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	14	14	198.661.200	-	0,00			
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					**1.738.354.938**	**1.373.168.220**	**78,99**			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	8.990.000	7.500.000	83,43			
		Pengadaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	12	468.224.450	218.159.893	46,59			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	1.261.140.488	1.147.508.327	90,99			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**401.506.000**	**355.777.400**	**88,61**			
		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	23	19	132.000.000	112.320.400	85,09			
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	88	88	48.950.000	48.940.000	99,98			
		Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	194.696.000	194.517.000	99,91			
		Pemeliharaan/rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	35	35	25.860.000	-	0,00			
	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Penurunan Indisipliner pegawai**	**Persen**	**3,33**	**4,46**	**5.782.865.450**	**4.140.933.543**	**71,61**			
			Persentase Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian Yang Disosialisasikan	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Persentase ASN Berprestasi/Berinovasi/Teladan dan Berdedikasi Yang Mendapat Penghargaan	**Persen**	**1,28**	**2,27**						
			Persentase ASN Purna bhakti/ Pensiun Yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	**Persen**	**4,23**	**4,62**						
			Persentase Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	**Persen**	**0,35**	**0,34**						
			Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan	**Persen**	**100,00**	**97,99**						

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Administrator, dan Jabatan Pengawas									
			Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	**Persen**	**100,00**	**99,75**						
			Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu	**Persen**	**100,00**	**97,69**						
			Persentase Data ASN Yang Mutakhir	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
			Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
		Pengadaan, Pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN					**1.993.607.850**	**1.317.207.493**	**66,07**			
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinais dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	1	1.463.619.550	920.230.893	62,87			
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	1	329.988.300	251.352.100	76,17			
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	200.000.000	145.624.500	72,81			
		Mutasi, dan Promosi ASN					**1.890.005.000**	**1.263.812.000**	**66,87**			
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	2	2	100.000.000	83.150.100	83,15			
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2	2	159.992.000	128.152.600	80,10			
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Laporan	1	1	1.630.013.000	1.052.509.300	64,57			
		Pengembangan Kompetensi ASN					**1.209.252.900**	**905.175.300**	**74,85**			
		Peningkatan kapasitas kinerja	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	150	150	840.003.500	616.738.200	73,42			
		Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	1	1	250.010.000	211.334.000	84,53			
		Pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	50	10	69.584.200	54.478.300	78,29			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	3	3	49.655.200	22.624.800	45,56			
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					**689.999.700**	**654.738.750**	**94,89**			
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	1	1	260.000.000	252.929.300	97,28			
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	250	250	329.999.700	325.615.450	98,67			
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	29	19	100.000.000	76.194.000	76,19			
		Pendidikan dan Pelatihan					**4.102.688.300**	**2.756.279.250**	**67,18**			
	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase Calon ASN Yang Telah Mengikuti Pelatihan Dasar**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**4.102.688.300**	**2.756.279.250**	**67,18**			
			Persentase ASN Yang Diklat Fungsional/Teknis/Bimtek/Seminar/ Lokakarya dan Tugas Belajar	**Persen**	**1,53**	**1,49**						
			Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	**Persen**	**12,15**	**11,15**						
		Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi Manajerial dan fungsional					**2.820.090.000**	**2.030.251.000**	**71,99**			
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Aparatur ASN yang Mengikuti Kompetensi Jumlah Diklat Kepemimpinan, Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan Laporan	122 2	119 2	2.820.090.000	2.030.251.000	71,99			
		Pengembangan Kompetensi Teknis					**1.282.598.300**	**726.028.250**	56,61			
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	120	12	1.282.598.300	726.028.250	56,61			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
5		**Sekretariat Daerah**					**180.509.000**	**68.892.100**	**38,17**			
		Pengelolaan Perbatasan					**180.509.000**	**68.892.100**	**97,03**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Pengelolaan Perbatasan**	**Persentase Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Perbatasan dan Rupa Bumi Buatan dan Alam Yang Terdokumentasikan**	**Persen**	**100,00**	**100**	**180.509.000**	**68.892.100**	**38,17**			
		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	**Persentase identifikasi dan inventarisasi wilayah perbatasan dan rupa bumi buatan dan alam yang terdokumentasikan**				**180.509.000**	**68.892.100**	**38,17**			
		Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	9	9	180.509.000	68.892.100	38,17	1. Peta dasar yang di keluarkan oleh BIG belum sesuai dengan kondisi yang ada di desa, 2. batas alam yang menjadi batas desa sudah beralih fungsi, 3. saling klaim wilayah yang memiliki potensi SDA yang berbatasan antar desa.	1. Dilaksanakan sosialisasi ke aparatur desa tentang peta dasar yang dikeluarkan oleh BIG, 2. melaksanakan penelusuran/pelacakan batas desa ke lokasi, 3 melakukan mediasi dengan desa yang saling mengkalim batas desa	

3.1.6 Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Tingkat pencapaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Purwakarta sangat didukung oleh perangkat daerah pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan selama Tahun 2023. Kabupaten Purwakarta mengalokasikan Pagu anggaran untuk Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebesar Rp31.600.872.503,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp28.348.364.151,00 atau terealisasi sebesar 89,71%, dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Tahun 2023

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					**31.600.872.503**	**28.348.364.151**	**89,71**			
		Inspektorat Daerah					**31.600.872.503**	**28.348.364.151**	**89,71**			
		Inspektorat					**31.600.872.503**	**28.348.364.151**	**89,71**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**A**	**26.927.284.003**	**24.591.810.151**	**91,33**			
			Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**90,00**	**92,70**						
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**26.402.900**	**26.395.500**	**99,97**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	26.402.900	26.395.500	99,97			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah kegiatan Layanan Administrasi Keuangan yang dilaksanakan**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**21.599.973.413**	**19.778.351.555**	**91,57**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan	Orang/ Bulan	65	65	21.577.913.413	19.771.102.055	91,63			-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang selesai disusun	Dokumen	1	1	22.060.000	7.249.500	32,86			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Kegiatan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah yang Dilaksanakan**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**9.600.000**	**4.800.000**	**50,00**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokuman Laporan BMD Yang selesai Disusun dan dilaporkan	Kegiatan	1	1	9.600.000	4.800.000	50,00			-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**616.512.000**	**465.381.210**	**75,49**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat yang diikuti dalam rangka Pengembangan Tenaga Pengawas dan Aparatur Pengawas	Orang	33	33	616.512.000	465.381.210	75,49			-
		Administrasi Umum Perangkar Daerah	**Jumlah Kegiatan Layanan Umum yang dilaksanakan**	**Kegiatan**	**7**	**7**	**2.158.484.050**	**2.047.363.656**	**94,85**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat/komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Paket	1	1	98.724.000	97.336.000	98,59	-		-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun kebutuhan	Paket	3	3	1.069.678.150	1.065.739.850	99,63			-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga selama satu tahun terhadap kebutuhan	Paket	1	1	144.504.000	107.901.000	74,67			-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan Logistik kantor selama satu tahun kebutuhan	Paket	3	3	298.485.000	284.081.500	95,17	-		-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan selama satu tahun terhadap kebutuhan	Paket	1	1	183.052.900	165.671.000	90,50	-		-
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman dalam rangka fasilitasi kunjungan tamu selama satu tahun terhadap kebutuhan	Laporan	3	3	141.000.000	122.500.000	86,88			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah fasilitasi kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi selama satu tahun terhadap kebutuhan	Laporan	1	1	223.040.000	204.134.306	91,52			-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Daerah yang Dibutuhkan**	**Item**	**3**	**3**	**2.101.811.640**	**1.902.188.590**	**90,50**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	145.354.800	115.414.225	79,40			-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- jumlah frekuensi pembayaran gaji/tenaga piket malam di kantor inspektorat daerah - jumlah frekuensi pembayaran Gaju tenaga PTT di Inspekorat Daerah - Jumlah Frekuensi pembayaran premi angsuran BPJS Kesehatan Non PNS yang dibayarkan	Bulan	12	11	1.956.456.840	1.786.774.365	91,33	-		-

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			- jumlah petugas kebersihan kantor yang dibutuhkan									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Dibutuhkan**	**item**	**4**	**4**	**414.500.000**	**367.329.640**	**88,62**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara/ditingkatkan/ ditata	Unit	25	25	287.500.000	257.520.300	89,57	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan	jumlah kendaraan dinas / Operasional yang dibayarkan pajaknya	Unit	25	25	60.000.000	43.109.340	71,85	-	-	-
		Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan dan mesin di inspektorat Daerah	Unit	50	50	67.000.000	66.700.000	99,55	-	-	-
	Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD Yang Telah Dilaksanakan**	**OPD**	**47**	**47**	**3.133.050.000**	**2.483.796.000**	**91,81**			
			Opini Penilaian LKPD Kabupaten	**Opini**	**WTP**	**WTP**						
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	**Persen**	**90**	**92**						
			Capaian SAKIP Kabupaten	**Opini**	**B**	**B**						
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Jumlah OPD yang Dilakukan Pengawasan**	**OPD**	**47**	**47**	**2.867.600.000**	**2.296.896.000**	**80,10**			
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilaksanakan pengawasan kinerja	Laporan	1	1	1.195.150.000	995.918.000	83,33	-	-	-
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilaksanakan pengawasan Keuangan	Laporan	1	1	872.700.000	726.978.000	83,30	-	-	-
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen yang direviu	Laporan	1	1	84.700.000	79.650.000	94,04	-	-	-
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen yang direviu	Laporan	1	1	24.200.000	15.920.000	65,79	-	-	-
		Pengawasan Desa	Jumlah desa yang dilakukan audit	Laporan	1	1	522.550.000	362.190.000	69,31	-	-	-
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut	Persentase rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti	Dokumen	5	5	168.300.000	116.240.000	69,07	-	-	-

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Hasil Pemeriksaan BPK - RI, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP										
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Jumlah Kasus yang Dilaksanakan Atas Kasus Kerugian Negara / Daerah dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Kasus**	**12**	**12**	**265.450.000**	**186.900.000**	**70,41**			
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah kasus yang ditangani	Laporan	1	1	21.000.000	1.500.000	7,14	-	-	-
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang dilakukan audit dengan tujuan tertentu	Laporan	1	1	244.450.000	185.400.000	75,84	-	-	-
	Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**Peningkatan Level Kapabilitas APIP**	**Level**	**3**	**3**	**1.540.538.500**	**1.264.388.000**	**82,07**			
			Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	**OPD**	**2**	**2**						
			Persentase OPD yang mendapatkan nilai diatas 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	**Persen**	**90,00**	**100,00**						
		Pendampingan dan Asistensi	**Jumlah pengawasan, Pendampingan dan Asistensi OPD**	**OPD**	**47**	**47**	**1.540.538.500**	**1.264.388.000**	**82,07**			
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Perangkat Daerah	47	47	1.007.153.500	832.666.000	82,68	-	-	-
		Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan Penilaian Reformasi dan Birokrasi dan Zona Instegritas	OPD	10	10	10.950.000	10.950.000	100,00	-	-	-
		Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Survei Penilaian Integritas	OPD	10	10	522.435.000	420.772.000	80,54	-	-	-

3.1.7 Pelaksanaan Unsur Kewilayahan

Tingkat pencapaian Unsur Kewilayahan di Kabupaten Purwakarta sangat didukung oleh perangkat daerah pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan Unsur Kewilayahan selama Tahun 2023. Kabupaten Purwakarta mengalokasikan Pagu anggaran untuk Unsur Kewilayahan sebesar Rp82.708.405.160,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp70.930.271.545,00 atau terealisasi sebesar 85,76%, dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pelaksanaan Unsur Kewilayahan
Tahun 2023

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		UNSUR KEWILAYAHAN					**82.343.533.660**	**70.575.198.045**	**85,71**			
1		**Kecamatan Jatiluhur**					**3.432.956.503**	**2.797.130.315**	**81,48**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**B**	**3.338.119.103**	**2.702.292.915**	**80,95**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**100,00**	**80,95**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**34.949.800**	**34.949.800**	**100,00**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	8.191.500	8.191.500	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.573.300	5.573.300	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.331.600	5.331.600	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	8.051.600	8.051.600	100,00			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	7.801.800	7.801.800	100,00			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**2.500.688.373**	**2.088.511.894**	**83,52**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	2.485.296.473	2.075.493.994	83,51			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	15.391.900	13.017.900	84,58			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**48.000.000**	**47.850.000**	**99,69**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	48.000.000	47.850.000	99,69			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**192.074.450**	**97.055.750**	**50,53**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	20.084.900	18.251.300	90,87			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	10.021.600	2.969.000	29,63			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	143.622.950	58.290.450	40,59			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	*12*	*12*	5.005.000	5.005.000				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	13.340.000	12.540.000	94,00			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**40.346.600**	**40.270.000**	**99,81**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	40.346.600	40.270.000	99,81			
		Penyediaan Jasa Penungjang Urusan Pemerintahan Daerah					**386.052.880**	**279.049.471**	**72,28**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	5.500.000	4.310.000	78,36			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	38.330.700	22.599.092	58,96			
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Laporan	12	12	8.803.000	8.390.000	95,31			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Perlengkapan Kantor yang Disediakan									
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	333.419.180	243.750.379	73,11			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**136.007.000**	**114.606.000**	**84,26**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	7	7	36.000.000	15.000.000	41,67			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	2	2	100.007.000	99.606.000				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**	**Kategori**	**Baik**	**Baik**	**4.832.800**	**4.832.800**	**100,00**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan					**4.832.800**	**4.832.800**	**100,00**			
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	4.832.800	4.832.800	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**21.492.800**	**21.492.800**	**100,00**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**16.976.000**	**16.976.000**	**100,00**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Dokumen	12	12	16.976.000	16.976.000	100,00			
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					**4.516.800**	**4.516.800**	**100,00**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	1	4.516.800	4.516.800	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**4.548.900**	**4.548.900**	**100,00**			
		Koordinasi Upaya Penyeleggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					*4.548.900*	*4.548.900*	**100,00**			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	4.548.900	4.548.900	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**29.827.500**	**29.827.500**	**100,00**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Darah					*29.827.500*	*29.827.500*	**100,00**			
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Meningkatnya kualitas pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan Jatiluhur	Dokumen	1	1	29.827.500	29.827.500	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan**	**Persen**	**51,00**	**51,00**	**34.135.400**	**34.135.400**	**100**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					***34.135.400***	***34.135.400***	***100***			
		Fasillitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	10	10	30.149.000	30.149.000	100			
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen	1	1	3.986.400	3.986.400	100			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Daerah dengan Pembangunan Desa	Daerah dengan Pembangunan Desa									
2		**Kecamatan Sukasari**					**3.384.326.071**	**2.908.674.465**	**85,95**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**CC**	**3.258.119.871**	**2.804.238.265**	**86,07**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**80,00**	**100,00**						
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**6.306.400**	**6.306.400**	**100,00**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1.710.000	1.710.000	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1.194.900	1.194.900	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Penyusunan DPA SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	2.184.900	2.184.900	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	jumlah dokumen Penyusunan Perubahan DPA SKPD yang disusun	Dokumen	1	0	1.216.600	1.216.600	100,00			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**2.332.821.455**	**2.040.053.826**	**87,45**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Orang/Bulan	13/14	13/14	2.314.729.055	2.028.609.426	87,64			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun skpd yang disusun	Dokumen	1	1	15.442.800	8.794.800	56,95			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd yang disusun	Dokumen	1	1	2.649.600	2.649.600	100,00			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**2.971.000**	**1.591.000**	53,55			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	Laporan	1	1	2.971.000	1.591.000	53,55			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**278.728.699**	**213.527.400**	**76,61**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Item	9	9	10.550.200	10.550.200	100,00			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Item	4	4	47.140.400	47.040.000	99,79			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang Disediakan	Paket	1	1	10.520.700	10.520.700	100,00			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	131.309.399	128.670.900	97,99			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	Item	3	3	6.650.000	6.045.600	90,91			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman jamuan tamu yang dibutuhkan	Paket	27	27	5.450.000	4.200.000	77,06			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dibutuhkan	Orang/Hari	204	25	67.108.000,00	6.500.000	9,69			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**56.741.300**	**56.375.000**	99,35			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Item	3	3,00	56.741.300	56.375.000	99,35			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**381.346.017**	**325.287.639**	85,30			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Pelaporan penyediaan jasa Sumber Daya Air dan listrik	Laporan	12	12	45.931.000	40.975.000	89,21			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga non ASN yang disediakan	Orang	11	11	335.415.017	284.312.639	84,76			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**199.205.000**	**161.097.000**	80,87			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	10	2	39.000.000	30.000.000	76,92			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	Unit	11	11	12.110.000	12.110.000	100,00			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	Unit	1	1	148.095.000	118.987.000	80,35			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Penyelenggaran Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**	**Persen**	**Baik**	**Baik**	**3.000.000**	**3.000.000**	**100,00**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					**3.000.000**	**3.000.000**	**100,00**			
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	jumlah perencanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kegiatan	2	2	1.500.000	1.500.000	100,00			
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kegiatan	2	2	1.500.000	1.500.000	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan**	**Persen**	**80,0**	**100,0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**100,00**			
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					**3.000.000**	**3.000.000**				
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	1	3.000.000	3.000.000	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**Persen**	**80,00**	**89,44**	**76.200.000**	**57.065.000**	**74,89**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					**76.200.000**	**57.065.000**	74,89			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	dan Modern melalui Penerapan SPBE	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Laporan	1	1	76.200.000	57.065.000	74,89			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan**	**Persen**	**80,00**	**100,00**	**44.006.200**	**41.371.200**	**94,01**			
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	jumlah penyusunan peraturan desa yang difasilitasi	Desa	5	5	4.110.000	3.600.000	**87,59**			
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa yang difasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Desa	5	5	4.880.000	4.200.000	86,07			
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Desa	5	5	4.880.000	4.200.000	86,07			
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah desa yang difasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Desa	5	5	3.600.000	3.600.000	100,00			
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Desa	5	5	3.600.000	3.600.000	100,00			
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Desa	5	5	4.365.000	3.600.000	82,47			
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi kewajiban-kewajiban tugas dan fungsinya	Desa	5	5	4.880.000	4.880.000	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	1	8.853.700	8.853.700	100,00			
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dan pelaksanaan pemberdayaan masyaraka	Desa	5	5	4.837.500	4.837.500	100,00			
3		**Kecamatan Maniis**					**3.161.282.244**	**2.691.530.089**	**85,14**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**B**	**3.059.083.644**	**2.615.494.489**	**85,50**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah Yang disusun**	**Dokumen**	**3**	**3**	**35.922.400**	**35.922.400**	**100,00**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	7.954.200	7.954.200	**100,00**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	6.552.500	6.552.500	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.160.600	5.160.600	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	3.760.400	3.760.400	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	1	1	6.736.000	6.736.000	**100,00**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	5.758.700	5.758.700	100,00			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Yang Disusun**	**Org/Bulan/Laporan**	**1**	**1**	**2.392.343.140**	**2.081.543.858**	87,01			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menrima gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bulan	15	15	2.366.903.240	2.061.795.958	**87,11**			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	19.282.700	13.590.700	70,48			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	Laporan	1	1	6.157.200	6.157.200	100,00			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang milik Daerah Yang Disusun**	**Laporan**	**1**	**1**	**5.215.600**	**4.340.600**	83,22			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	5.215.600	4.340.600	83,22			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Pengelolaan Penyediaan Admisnistrasi Umum yang Dilaksanakan**	**Paket/Laporan**	**5**	**5**	**147.827.620**	**122.525.120**	82,88			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	19.400.000	19.330.400	99,64			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	5.916.900	0	-			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	17.323.400	17.314.400	99,95			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	83.107.320	63.800.320	76,77			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	22.080.000	22.080.000	**100,00**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dibutuhkan**	**Unit**	**2**	**2**	**17.187.500**	**0**	-			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2	2	17.187.500	0	-			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dibutuhkan**	**Laporan**	**26**	**26**	**379.010.384**	**296.911.511**	78,34			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	46.808.280	41.921.300	89,56			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	332.202.104	254.990.211	**76,76**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan**	**Unit**	**2**	**2**	**81.577.000**	**74.251.000**	91,02			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	10.000.000	3.000.000	30,00			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	71.577.000	71.251.000	99,54			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**	**Predikat**	**Baik**	**Sangat Baik**	**61.820.000**	**39.107.000**	63,26			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan**	**Dokumen**	**1**	**1**	**61.820.000**	**39.107.000**	**63,26**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Penerapan SPBE	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	22.600.000	18.994.500	**84,05**			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	39.220.000	20.112.500	51,28			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**16.168.600**	**12.718.600**	**78,66**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**16.168.600**	**12.718.600**	**78,66**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	1	1	16.168.600	12.718.600	**78,66**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**24.210.000**	**24.210.000**	**100,00**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**24.210.000**	**24.210.000**	**100,00**			
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Orang	360	360	24.210.000	24.210.000	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
4		**Kecamatan Tegalwaru**					**3.508.979.866**	**3.085.868.482**	**87,94**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**BB**	**3.306.183.066**	**2.964.117.682**	**89,65**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**100,00**	**100,00**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**11.072.000**	**11.072.000**				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	5.493.500	5.493.500	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	5.578.500	5.578.500	100,00			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**2.562.554.847**	**2.327.783.132**				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	2.546.028.047	2.323.383.132	91,26	Ada penguranga n pegawai (Pensiun)		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	1	1	16.526.800	4.400.000	26,62			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**7.343.400**	**5.963.400**				
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	7.343.400	5.963.400	81,21			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**43.730.000**	**23.750.000**				
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	23.750.000	23.750.000	100,00			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	0	19.980.000	0	0,00	Yang melaksanakan diklatpim dibiayai oleh BKPSDM Kab.Purwakarta		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**326.355.035**	**310.555.900**				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	21.174.300	21.174.300	100,00			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	143.812.600	143.197.000	99,57			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	10.163.100	10.163.100	100,00			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	127.325.035	127.321.500	100,00			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	8.700.000	8.700.000	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	15.180.000	0	0,00			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**304.327.784**	**253.453.250**				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	12.000.000	12.000.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	36.270.960	28.682.558	79,08			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	18.950.000	18.950.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	237.106.824	193.820.692	81,74	Terdapat rincian belanja bulan desember yang belum dibayarkan (Honorarium PTT,THL, BMD, TIK, Premi Asusransi, JKK,JKN)		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**50.800.000**	**31.540.000**				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	5	50.800.000	31.540.000	62,09			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**	**Kategori**	**Baik**	**Sangat Baik**	**37.907.600**	**20.353.200**	**53,69**			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					**37.907.600**	**20.353.200**				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	37.907.600	20.353.200	53,69			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**16.868.200**	**10.888.200**	**64,55**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**13.588.200**	**10.888.200**				
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	13	13	13.588.200	10.888.200	80,13			
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					**3.280.000**	**0**				
		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	0	3.280.000	0	0,00	Kegiatan tidak terlaksana karena tidak tersedianya Kas Daesah		

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**12.810.000**	**0**	**0,00**			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					**12.810.000**	**0**				
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	0	12.810.000	0	0,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**86.704.000**	**83.000.000**	**95,73**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					**86.704.000**	**83.000.000**				
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN dan PHBI yang dilaksanakan	Kegiatan	4	4	86.704.000	83.000.000	95,73			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**75,00**	**48.507.000**	**7.509.400**	**15,48**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**48.507.000**	**7.509.400**				
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	10.119.400	7.509.400	74,21			
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	0	9.104.900	0	0,00			
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	0	9.700.000	0	0,00			
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1	0	9.442.200	0	0,00			
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	1	0	10.140.500	0	0,00			
5		**Kecamatan Plered**					**3.655.187.644**	**2.905.625.014**	**79,49**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**CC**	**3.592.414.244**	**2.852.471.614**	**79,40**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**100,00**							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**29.815.300**	**24.516.300**	**82,23**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	9.154.100	8.105.900	88,55			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	11.263.600	11.232.500,00	99,72			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	9.397.600	5.177.900	55,10			
		Administrasi Keuangan Perangakat Daerah					**2.673.926.647**	**2.210.608.462**	**82,67**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	2.655.358.047	2.202.928.762	82,96			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang Keuangan Disusun	Dokumen	1	1	18.568.600	7.679.700	41,36			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**10.000.000**		**-**			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	2	2	10.000.000		-			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**321.161.329**	**237.749.700**	**74,03**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	15	15	43.861.900	35.796.600	81,61			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disediakan	Bulan	12	12	16.407.000	0				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bulan	12	12	29.771.100	24.021.000	80,69			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Item Alat Tulis Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	208.158.529	157.572.700	75,70			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah item Bahan Cetak yang Disediakan	Bulan	12	12	17.202.800	15.839.400	92,07			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	Bulan	12	12	5.760.000	4.520.000	78,47			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**124.218.800**	**0**	**-**			
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	5	5	73.501.100		-			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Item Pengadaan Peralatan dan Mesin	Tahun	4	4	50.717.700		-			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**313.385.168**	**278.365.352**	**88,83**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengadaan Benda Pos	Tahun	1	1	10.000.000	10.000.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	40.805.520	27.835.799	68,22			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan tenaga Non ASN	Bulan	12	12	262.579.648	240.529.553	91,60			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**119.907.000**	**101.231.800**	**84,43**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Paket	1	1	28.200.000	15.056.800	53,39			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Unit	7	7	11.680.000	6.570.000	56,25			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyelengaran Urusan Pemerintah Umum	Paket	1	1	80.027.000	79.605.000	99,47			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Indeks**	**Baik**	**Baik**	**9.748.300**	**8.348.300**	**85,64**			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					9.748.300	8.348.300	85,64			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	9.748.300	8.348.300	85,64			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**30.447.600**	**30.447.600**	**100,00**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kegiatan Musrembang Kecamatan yang Dilaksanakan**	**Kegiatan**	**1**	**1**	**20.037.600**	**20.037.600**	**100,00**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	1	1	11.077.900,00	11.077.900,00	**100,00**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persen	1	1	8.959.700,00	8.959.700,00	**100,00**			
		Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**10.410.000,00**	**8.760.000,00**	**84,15**			
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Deajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Lembaga Kemasyarakatan	1	1	10.410.000,00	8.760.000,00	**84,15**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**22.577.500,00**	**14.357.500**	**63,59**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**1**	**1**	**22.577.500,00**	**14.357.500**	**63,59**			
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi,dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasillitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persen	1	1	22.577.500,00	14.357.500,00	**63,59**			
6		**Kecamatan Sukatani**					**4.091.535.575**	**3.727.830.677**	**91,11**			
	Meningkatnya		**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**BB**	**B**	**3.969.702.975**	**3.626.468.677**	**91,35**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran**	**%**	**100,00**	**91,35**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**10.000.000**	**5.920.000**	**59,20**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	1.980.000	1.900.000	95,96			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1.980.000	1.980.000	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2.040.000	2.040.000	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	1.960.000	-	-			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	2.040.000	-	-			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**3.251.110.071**	**2.992.258.134**	**92,04**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	Bulan	14	14	3.239.474.271	2.992.258.134	92,37			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	laporan	2	1	11.635.800	-	-			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**151.519.448**	**128.786.500**	**85,00**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Item	15	15	17.994.800	17.900.000	99,47			
		Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Item	27	27	16.711.500	16.700.000	99,93			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Makanan Minuman Rapat yang disediakan	Item/Dus	31	31	83.193.248	67.100.000	80,66			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Item	5	5	14.999.900	14.074.500	93,83			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan	OH	44	44	18.620.000	13.012.000	69,88			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**88.509.700**	**88.320.000**	**99,79**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Item	3	3	38.575.800	38.520.000	99,86			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Item	6	6	49.933.900	49.800.000	99,73			
		Penyediaan Jasa Penungjang Urusan Pemerintahan Daerah					**329.175.456**	**292.495.843**	**88,86**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan/Bulan	12	11	10.000.000	8.500.000	85,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bulan	12	12	36.325.152	29.751.286	81,90			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bulan	14	13	282.850.304	254.244.557	89,89			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**139.388.300**	**118.688.200**	**85,15**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar pajaknya	Unit	9	6	32.300.000	25.327.000	78,41			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesinnya Lainnya	Unit	15	12	9.340.000	7.640.000	81,80			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitas	Unit	1	1	48.200.000	47.967.000	99,52			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	Unit	4	4	49.548.300	37.754.200	76,20			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**	**Kategori**	**Baik**	**Baik**	**55.347.000**	**36.507.000**	**65,96**			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					**55.347.000**	**36.507.000**	**65,96**			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	10	10	55.347.000	36.507.000	65,96			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan**				**52.600.000**	**50.980.000**	**96,92**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					**52.600.000**	**50.980.000**	**96,92**			
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terselenggaranya kegiatan PHBN dan PHBI	Kegiatan	2	2	52.600.000	50.980.000	96,92			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan**	**Persen**	**51,00**	**51,00**	**13.885.600**	**13.875.000**	**99,92**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**13.885.600**	**13.875.000**	**99,92**			
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kegiatan	1	1	10.190.000	10.190.000	100,00			
		Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kegiatan	1	1	3.695.600	3.685.000	99,71			
7		**Kecamatan Darangdan**					**3.814.112.989**	**3.465.807.884**	**90,87**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**B**	**3.595.097.589**	**3.248.467.484**	**90,36**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**80,00**	**80,00**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**24.619.800**	**24.418.600**	**99,18**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	2	2	4.175.900	4.175.900	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Dokumen	1	1	6.431.700	6.431.700	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	Dokumen	1	1	6.190.000	5.988.800	96,75			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	4.036.000	4.036.000	100,00			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	3.786.200	3.786.200	100,00			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**2.745.028.813**	**2.496.329.611**	**90,94**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	2.736.228.513	2.487.530.411	90,91			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan yang Disusun	Dokumen	1	1	8.800.300	8.799.200	99,99			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**6.203.400**	**6.203.400**	**100,00**			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Yang Di Susun	Dokumen	1	1	6.203.400	6.203.400	100,00			
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah					**23.200.000**	**23.200.000**	**100,00**			
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas	stell	99	99	23.200.000	23.200.000	100,00			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**191.929.838**	**184.968.800**	**96,37**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan penerangan bangunan kantor	Item	14	14	20.687.500	20.687.500	100,00			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Item	26	26	22.306.106	22.306.100	100,00			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan Logistik kantor	Item	43	43	58.008.232	58.007.200	100,00			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Item	4	4	24.200.000	23.750.000	98,14			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OH	430	430	66.728.000	60.218.000	90,24			
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					**72.805.300**	**42.340.000**	**58,16**			
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Item	5	5	72.805.300	42.340.000	58,16			
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					**357.885.688**	**331.985.873**	**92,76**			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	32.270.040	29.823.490	92,42			
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Orang / Bulan	10	10	325.615.648	302.162.383	92,80			
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					**173.424.750**	**139.021.200**	**80,16**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	jumlah pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Unit	12	12	44.800.000	39.382.200	87,91			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharan peralatan dan mesin lainnya	Unit	32	32	29.940.000	29.790.000	99,50			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan /rehabilitas gedung kantor	Lokasi	1	1	98.684.750	69.849.000	70,78			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**					**26.200.000**	**26.200.000**	**100,00**			
		Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan					**26.200.000**	**26.200.000**	**100,00**			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pembinaan kegiatan Pemerintahan dan Peningkatan Kinerja Kecamatan	Persen	100%	100%	26.200.000	26.200.000	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**90,32**	**150.130.000**	**149.655.000**	**99,68**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					**150.130.000**	**149.655.000**	**99,68**			
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	150.130.000	149.655.000	99,68			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**95,72**	**27.385.400**	**26.185.400**	**95,62**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan					**27.385.400**	**26.185.400**	**95,62**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	dan Modern melalui penerapan SPBE	**Pengawasan Pemerintahan Desa**										
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya Tertib Administrasi di Tingkat Desa	Persen	100	100	10.128.000	8.928.000	88,15			
		fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan	Persen	100	100	17.257.400	17.257.400	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**					**4.000.000**	**4.000.000**	**100,00**			
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					**4.000.000**	**4.000.000**	**100,00**			
		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Masyarakat	Kegiatan	1	1	4.000.000	4.000.000	**100,00**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**					**11.300.000**	**11.300.000**	**100,00**			
		Kordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					**11.300.000**	**11.300.000**	**100,00**			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Soliditas serta Sinergitas Antar Lembaga	Kegiatan	2	2	11.300.000	11.300.000	**100,00**			
8		**Kecamatan Bojong**					**3.798.357.778**	**3.135.078.706**	**82,54**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**BB**	**3.636.311.378**	**2.976.632.306**	**81,86**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**80,00**	**93,10**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**				**15.363.600**	**13.963.600**	**90,89**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	9.467.600	8.067.600	85,21			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	5.896.000	5.896.000	100,00			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**3.041.247.762**	**2.454.615.387**	**80,71**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Bulan	14	14	3.022.585.862	2.438.331.887	80,67			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaporan keuangan Yang Disusun	Dokumen	1	1	18.661.900	16.283.500	87,26			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**3.803.400**	**2.313.400**	60,82			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1,00	1,00	3.803.400	2.313.400	**60,82**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**36.250.000**	**31.900.000**	**88,00**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel	50,00	44,00	36.250.000	31.900.000	88,00			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**148.994.288**	**140.037.000**	**93,99**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Item	13,00	13,00	7.980.600	7.980.600	100,00			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Item	23,00	23,00	8.690.600	8.690.600	100,00			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Item	28,00	28,00	66.416.088	65.831.800	99,12			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Item	5,00	5,00	12.545.000	11.620.000	92,63			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	12,00	53.362.000	45.914.000	86,04			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**86.058.000**	**75.363.500**	**87,57**			
		Pengadaan Sarana da Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7,00	6,00	86.058.000	75.363.500	87,57			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**220.854.328**	**202.689.519**	**91,78**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12,00	12,00	6.300.000	6.300.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12,00	12,00	32.022.960	27.174.000	84,86			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Festival yang Dilaksanakan, Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kegiatan, Orang	1 Kegiatan, 6 Orang	2 Kegiatan, 6 Orang	182.531.368	169.215.519	92,70			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**83.740.000**	**55.749.900**	**66,57**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemerliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	8	32.400.000	23.054.900	71,16			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	37.040.000	24.865.000	67,13			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	15	15	14.300.000	7.830.000	54,76			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**	**Kategori**	**Baik**	**Baik**	**18.000.000**	**16.500.000**	**43,01**			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					**18.000.000**	**16.500.000**	**91,67**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	dan Modern melalui Penerapan SPBE	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	10	10	18.000.000	16.500.000	91,67			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan**	**%**	**80**	**100**	**21.496.400**	**21.496.400**	**100,00**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					21.496.400	21.496.400	**100,00**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	21.496.400	21.496.400	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**%**	**80**	**100**	**107.310.000**	**105.210.000**	**100,00**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					**107.310.000**	**105.210.000**	**98,04**			
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	400	400	107.310.000	105.210.000	98,04			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan**	**%**	**80**	**100**	**15.240.000**	**15.240.000**	**100,00**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**15.240.000**	**15.240.000**	**100,00**			
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	1	15.240.000	15.240.000	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
9		**Kecamatan Wanayasa**					**3.928.525.265**	**3.580.329.325**	**91,14**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**B**	**3.788.000.265**	**3.489.754.325**	**92,13**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**80,00**	**92,13**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**33.390.400**	**26.483.600**	**79,32**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	10.275.900	7.215.000	**70,21**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	1	1	6.231.700	5.356.700	**85,96**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.218.100	4.718.100	**90,42**			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	1	1	8.136.000	7.776.000	**95,58**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	3.528.700	1.417.800	**40,18**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**2.943.499.228**	**2.735.059.870**	**92,92**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	orang/ bulan	21	21	2.921.874.528	2.722.284.570	**93,17**			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	17.750.300	9.930.300	**55,94**			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan LaporanTriwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan	Laporan	4	2	3.874.400	2.845.000	**73,43**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Laporaan Keuangan Bulanan/									
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**5.000.000**	**5.000.000**	**100,00**			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Dokumen	1	1	5.000.000	5.000.000	**100,00**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**32.300.000**	**32.300.000**	**100,00**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Paket	2	2	32.300.000	32.300.000	**100,00**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**136.415.137**	**114.963.000**	**84,27**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	11.733.900	11.111.900	**94,70**			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1	11.546.900	11.535.400	**99,90**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	5	60.664.337	49.383.700	**81,40**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	14.750.000	12.442.000	**84,35**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	37.720.000	30.490.000	**80,83**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**61.995.800**	**61.667.000**	**99,47**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	unit	64	64	31.997.000	31.900.000	**99,70**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	2	2	29.998.800	29.767.000	**99,23**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**474.881.500**	**431.561.655**	**90,88**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya	bulan	12	12	26.952.660	20.008.340	**74,24**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Air dan Listrik yang disediakan									
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	447.928.840	411.553.315	**91,88**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**100.518.200**	**82.719.200**	**82,29**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	9	9	39.800.000	30.197.300	**75,87**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	10	10	7.300.000	7.000.000	**95,89**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	unit	2	2	53.418.200	45.521.900	**85,22**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**31.625.000**	**25.625.000**	**81,03**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**20.825.000**	**20.825.000**	**100,00**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	1	1	20.825.000	20.825.000	**100,00**			
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					**10.800.000**	**4.800.000**	**44,44**			
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	3	1	10.800.000	4.800.000	44,44			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**Persen**	**80,00**	**80,00**	**40.100.000**	**40.100.000**	**100,00**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					**40.100.000**	**40.100.000**	**100,00**			
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	orang	50	50	40.100.000	40.100.000	**100,00**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan**	**Persen**	**80,00**	**56,96**	**68.800.000**	**24.850.000**	**36,12**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**68.800.000**	**24.850.000**	**36,12**			
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala Desa	Dokumen	2	1	15.600.000	6.450.000	**41,35**			
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	1	12.000.000	4.800.000	**40,00**			
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1	8.600.000	4.400.000	**51,16**			
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1	8.400.000	2.100.000	**25,00**			
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kegiatan	3	0	11.000.000	-	**-**			
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	kegiatan	1	1	13.200.000	7.100.000	**53,79**			
10		**Kecamatan Kiarapedes**					**3.645.525.928**	**3.340.211.288**	**91,62**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelengga	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**C**	**3.580.576.728**	**3.277.355.488**	**91,53**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**80,00**	**96,55**						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**2.776.069.404**	**2.499.989.595**	**90,06**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	raan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	Orang	18	18	2.756.029.604	2.479.989.795	89,98			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	20.039.800	19.999.800	99,80			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**10.000.000**	**10.000.000**	**100,00**			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKDP	Laporan	1	1	10.000.000	10.000.000	100,00			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**264.134.644**	**264.004.400**	**99,95**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	Jenis	3	3	24.983.700	24.914.800	99,72			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kualitas Peralatan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	1	1	29.087.500	29.080.000	99,97			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	7	7	119.667.544	119.613.700	99,96			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	3	3	24.499.900	24.499.900	100,00			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	1	65.896.000	65.896.000	100,00			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**25.048.800**	**24.540.000**	**97,97**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	2	2	25.048.800	24.540.000	97,97			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**347.823.080**	**323.559.693**	**93,02**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	25.095.200	25.041.800	99,79			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Jumlah Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kpunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan	2	2	17.107.880	16.499.715	96,45			
		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tahun	1	1	305.620.000	282.018.178	92,28			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**157.500.800**	**155.261.800**	**98,58**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	7	7	40.000.000	38.116.800	95,29			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya yang dipeihara	Unit	11	11	8.030.000	8.030.000	100,00			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direahbilitasi	Unit	1	1	109.470.800	109.115.000	99,67			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan**	**Persen**	**80,00**	**96,55**	**64.949.200**	**62.855.800**	**96,78**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**19.949.200**	**19.949.200**	**100,00**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga yang berpartisipasi dalam Forum musyawarah perencanaan pembangunan Di desa	Lembaga	10	10	19.949.200	19.949.200	100,00			
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					**45.000.000**	**42.906.600**	**95,35**			
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	25	25	15.000.000	13.994.200	93,29			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	JumlahPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	15	15	15.000.000	14.964.400	99,76			
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	20	20	15.000.000	13.948.000	92,99			
11		**Kecamatan Pasawahan**					**3.251.032.948**	**2.548.056.669**	**78,38**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**B**	**3.129.131.948**	**2.453.516.819**	**78,41**	Adanya beberapa Jabatan struktural yang kosong karena pensiun (Sekcam, Kasi PMD, Kasubag Kepeg dan Umum) serta jabatan pengelola PPAT, Pengelola Program dan kegiatan pengelola yang kosong sehingga anggaran Gaji dan Tunjangan ASN kurang terserap	Membuat surat permohonan penambahan Pegawai yang ditujukan ke BKPSDM	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**100,00**	**92,08**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas dan ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**				**19.750.200**	**19.750.200**	**100,00**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Perangkat Daerah yang di susun									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	4	5.243.500	5.243.500	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	dokumen	1	1	4.399.300	4.399.300	100,00			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumalah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	5.153.600	5.153.600	100,00			
		Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	4.953.800	4.953.800	100,00			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Refornasi Birokrasi**				**2.504.690.515**	**1.856.374.540**	**74,12**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	14	2.478.272.015	1.837.291.240	74,14			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	1	1	2.882.900	2.851.800	98,92			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	18.691.900,00	11.387.800	60,92			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	4.843.700	4.843.700	100,00			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**172.429.301**	**169.211.900**	**98,13**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	17.499.300	17.495.000	99,98			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	25.074.901	25.074.000	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	16.022.600	16.021.500	99,99			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	84.179.500	84.048.400	99,84			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	9.625.000	9.625.000	100,00			
		Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	20.028.000	16.948.000				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah					**291.351.932**	**272.392.502**	**93,49**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	11	55.072.680	33.945.550	61,64			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	2.920.000	2.750.000	94,18			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	11	282.002.104	254.110.211,00	90,11			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**140.910.000**	**135.787.677**	**96,36**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran pajak dan kendaraan dinas yang disediakan,jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas yang disediakan	2 unit Kendaraan roda4 dan 7 unit kendaraan roda 2	9	9	35.800.000	31.377.500	87,65			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	4	4	5.110.000	5.110.000				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3	100.000.000	99.300.177	99,30			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**13.309.000**	**7.947.850**	**59,72**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**					13.309.000	7.947.850	59,72			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan musrembang Tingkat Kecamatan di Tingkat Kecamatan	kegiatan	1	1	13.309.000	7.947.850	59,72			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**					**22.000.000**	**22.000.000**	**100,00**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					**22.000.000**	**22.000.000**	**100,00**			
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Revublik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	orang	200	200	22.000.000	22.000.000	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**86.592.000**	**86.592.000**	**100,00**			
		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				1	**86.592.000**	**86.592.000**	**100,00**			
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang dipasilitasi dalam rangka Tata administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	25.728.000	25.728.000	100,00			
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumentasi Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	13.200.000	13.200.000				
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka	Dokumen	1	1	28.464.000	28.464.000	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pemberdayaan Masyarakat Desa	penyusunan program dan PMD									
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kegiatan	1	2	19.200.000	19.200.000	100,00			
12		**Kecamatan Pondoksalam**					**3.596.386.559**	**3.025.685.302**	**84,13**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**B**	**3.403.593.559**	**2.863.649.202**	**84,14**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**100,00**	**84,58**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**10.779.600**	**6.438.600**	**59,73**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	2	2	2.809.800	2.730.400	97,17			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	1.584.900	1.545.200	97,50			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	2.795.000	2.163.000	77,39			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	3	3	3.589.900	-	-			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**2.791.875.003**	**2.408.392.428**	**86,26**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	14	2.779.667.103	2.406.190.528	86,56			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	12.207.900	2.201.900	18,04			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**2.605.000**	0	-			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Yang Di Susun	Dokumen	1	0	2.605.000	0	-			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**239.301.831**	**137.434.900**	**57,43**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	21.847.600	17.053.200	78,06			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1	34.239.400	27.244.700	79,57			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	147.720.831	79.437.000	53,78			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	20.106.000	10.650.000	52,97			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OH	73	73	15.388.000	3.050.000	19,82			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**41.043.750**	**40.850.000**	**99,53**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	2	2	41.043.750	40.850.000	99,53			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**239.168.375**	**210.515.474**	88,02			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	3	3	17.995.183	13.384.437	74,38			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	221.173.192	197.131.037	89,13			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**78.820.000**	**60.017.800**	**76,15**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit yang dipelihara dan pajak yang dibayarkan	Unit	11	11	37.200.000	23.724.800	63,78			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	6	2	5.920.000	1.460.000	24,66			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Paket	1	1	35.700.000	34.833.000	97,57			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persentase Penanganan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**0**	**10.000.000**					
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**10.000.000**					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**95,81**	**3.780.000**	**3.000.000**	79,37			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					**3.780.000**	**3.000.000**	79,37			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persen	100	79,37	**3.780.000**	**3.000.000**	79,37			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**81,38**	**123.985.600**	**111.800.000**	**90,17**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**				**123.985.600**	**111.800.000**	**90,17**			
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan PHBN dan PHBI Tingkat Kecamatan	Persen	100	90,17	123.985.600	111.800.000	90,17			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**93,40**	**55.027.400**	**47.236.100**	**85,84**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**55.027.400**	**47.236.100**	**85,84**			
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persen	100	52,81	14.580.000	7.700.000	52,81			
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	100	95,48	20.150.300	19.239.000				
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	100	100	20.297.100	20.297.100	100,00			
13		**Kecamatan Purwakarta**					**24.679.907.959**	**20.459.096.672**	**82,90**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**BB**	**BB**	**15.088.999.815**	**12.874.018.421**	**85,32**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**80,00**	**80,00**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**29.187.800**	**21.111.900**	72,33			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	9	8	21.051.800	12.975.900	61,64			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Dokumen	1	1	8.136.000	8.136.000	100,00			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**11.448.243.335**	**10.758.780.953**	93,98			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	14	11.426.469.035	10.753.381.153	94,11			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1	21.774.300	5.399.800	24,80			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**956.805.772**	**374.255.700**	39,12			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan Komponen Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	199.997.900	58.102.900	29,05			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga yang disediakan;jumlah pemenuhan BMD yang disediakan	Paket	1	1	200.956.600	97.525.900	48,53			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor ;jumlah penyediaan makanan dan minum rapat .	Paket	3	3	345.683.272	150.108.900	43,42			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan	Paket	1	1	100.000.000	36.540.000	36,54			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Laporan	100	45	110.168.000	31.978.000	29,03			
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					**367.236.900**	**367.159.300**	99,98			
		Pengadaan Mebel	Jumlah kebutuhan perlengkapan kantor	Unit	66	66	100.159.300	100.159.300	100,00			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	35	35	267.077.600	267.000.000	99,97			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1	**1.677.856.008**	**1.300.304.168**	77,50			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan jasa surat menyurat	laporan	1	1	8.750.000	7.070.000	80,80			
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	3	3	259.799.500	101.283.762	38,99			
		Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	1	40.330.000	22.600.000	56,04			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jasa Tenaga Administrasi Non PNS;Jumlah pemenuhan Premi BPJS bagi Pegawai Non ASN	Laporan	12	12	1.368.976.508	1.169.350.406	85,42			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**609.670.000**	**52.406.400**	8,60			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Unit	46	46	139.000.000	52.406.400	37,70			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas	Unit	10	0	302.745.000	-	-			
		Pemeliharaan/Rehabiliatasi/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas	Unit	1		167.925.000	-				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**	**Kategori**	**Baik**	**Baik**	**199.999.600**	**98.500.000**	**2,09**			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					**199.999.600**	**98.500.000**	**49,25**			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyampaian kegiatan di tingkat Kecamatan	Kegiatan	132	66	199.999.600	98.500.000	49,25			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan**	**Persen**	**80,00**	**83,09**	**8.675.134.800**	**7.375.278.251**	**85,02**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**101.294.800**	**62.269.800**	**61,47**			
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan	Persentase Rencana Pembangunan di wilayah Kecamatan	Dokumen	1	1	51.294.800	46.244.800	**90,15**			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase Rencana Pembangunan di wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	50.000.000	16.025.000	**32,05**			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					**8.573.840.000**	**7.313.008.451**	**85,29**			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rencana Pembangunan di wilayah Kecamatan	Unit	**2**	**2**	1.429.993.600	1.426.573.651	**99,76**			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pokmas/Ormas	8	8	7.143.846.400	5.886.434.800	**82,40**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan**	**Persen**	**80,00**	**100,00**	**585.773.744**	**6.600.000**	**50,07**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**					**585.773.744**	**6.600.000**	1,13			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia,dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Satgas Desa Berbudaya	**Bulan**	**12**	**12**	585.773.744	6.600.000	1,13			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**Persen**	**80,00**	**36,15**	**130.000.000**	**104.700.000**	**80,54**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					**130.000.000**	**104.700.000**	**80,54**			
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan	Kegiatan	2	2	130.000.000	104.700.000	80,54			
14		**Kecamatan Babakan Cikao**					**3.518.755.737**	**3.090.150.232**	**87,82**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**BB**	**3.362.796.137**	**2.960.792.932**	**88,05**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**100,00**	**88,05**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**11.197.100**	**5.000.000**	**44,65**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	7.593.500	5.000.000	65,85			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Dokumen	1	1	3.603.600	-	0,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**2.680.042.491**	**2.496.053.018**	**93,13**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	19	19	2.660.292.191	2.493.303.018	93,72			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	19.750.300	2.750.000	13,92			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**42.500.000**	**42.500.000**	**100,00**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel	25	25	42.500.000	42.500.000	100,00			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**133.635.623**	**65.538.900**	**49,04**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	15	15	16.743.100	13.117.500	78,35			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	2	2	6.061.300	6.061.300	100,00			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis	16	16	12.610.100	12.610.100	100,00			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Item	50	50	51.581.123	27.890.000	54,07			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	46.640.000	5.860.000	12,56			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**106.106.800**	**84.188.000**	**79,34**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel	Unit	14	14	18.750.000	18.750.000	100,00			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	4	4	21.550.000	-	0,00			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Unit	9	9	65.806.800	65.438.000	99,44			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**267.567.023**	**219.476.114**	**82,03**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan dan laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	75.404.287	42.296.249	56,09			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang dan laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	orang	7	7	192.162.736	177.179.865	92,20			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**121.747.100**	**48.036.900**	**39,46**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara	Unit	10	10	44.200.000	25.816.900	58,41			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	31	31	22.220.000	22.220.000	100,00			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	14	14	55.327.100	-	0,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**	**Kategori**	**Baik**	**Baik**	**5.856.300**	**5.856.300**	**100,00**			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					**5.856.300**	**5.856.300**	**100,00**			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	5.856.300	5.856.300	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**76,00**	**22.340.300**	**16.876.000**	**0,00**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**22.340.300**	**16.876.000**	**75,54**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	17.372.800	16.876.000	97,14			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	2	0	4.967.500	-	0,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilkasanakan**	**Persen**	**100,00**	**0,00**	**10.223.000**	**-**	**0,00**			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**				**10.223.000**	**10.223.000**	**100,00**			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan yang disusun	Laporan	1	1	10.223.000	10.223.000	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**87.580.000**	**76.745.000**	**87,63**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**87.580.000**	**76.745.000**	**87,63**			
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	87.580.000	76.745.000	87,63			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**29.960.000**	**29.880.000**	**99,73**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**29.960.000**	**29.880.000**	**99,73**			
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	5	0	29.960.000	29.880.000	99,73			
15		**Kecamatan Campaka**					**3.516.600.493**	**3.156.184.582**	**89,75**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**BB**	**3.405.466.893**	**3.045.982.182**	**89,44**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**80,00**	**70,00**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**7.454.400**	**7.259.100**	**97,38**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	5.075.900	4.966.700	97,85			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	2.378.500	2.292.400	96,38			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**2.664.772.019**	**2.340.588.630**	**87,83**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	17	16	2.650.621.719	2.326.545.030	87,77			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	3	14.150.300	14.043.600	99,25			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**6.865.900**	**6.401.200**	**93,23**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	6.865.900	6.401.200	93,23			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**27.600.000**	**27.600.000**	**100,00**			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	27.600.000	27.600.000	100,00			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**127.698.698**	**115.716.600**	**90,62**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	8.192.800	8.163.400	99,64			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	8.159.200	8.159.200	100,00			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	70.720.698	70.410.000	99,56			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	7.916.000	7.916.000	100,00			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7	32.710.000	21.068.000	64,41			
		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**157.965.500**	**157.446.000**	**99,67**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Unit	2	2	17.187.500	17.100.000	99,49			
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	140.778.000	140.346.000	99,69			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**261.961.376**	**241.472.452**	**92,18**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	2.400.000	2.390.000	99,58			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	12	11	39.588.184	35.768.520	90,35			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan									
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	11	219.973.192	203.313.932	92,43			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**151.149.000**	**149.498.200**	**98,91**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	5	25.800.000	24.887.700	96,46			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara	Unit	3	2						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	9	5.640.000	5.640.000	100,00			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	119.709.000	118.970.500	99,38			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**	**Kategori**	**Baik**	**Baik**	**22.137.200**	**21.638.600**	**97,75**			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					**22.137.200**	**21.638.600**	**97,75**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	7.134.900	6.636.300	93,01			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	4	15.002.300,00	15.002.300	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**0,00**	**5.999.800**	**5.999.800**	**100,00**			
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					**5.999.800,00**	**5.999.800,00**	**100,00**			
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	30	30	5.999.800,00	5.999.800,00	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilkasanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**7.722.300**	**7.722.300**	**100,00**			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					**7.722.300,00**	**7.722.300,00**	**100,00**			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	3	3	7.722.300,00	7.722.300,00	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**59.449.400**	**59.016.800**	**99,27**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**59.449.400**	**59.016.800**	**99,27**			
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kegiatan PHBN dan PHBI yang dilaksanakan	Orang Kegiatan	1003	953	59.449.400,00	59.016.800,00	99,27			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**15.824.900**	**15.824.900**	**100,00**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**15.824.900,00**	**15.824.900,00**	**100,00**			
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	15.824.900,00	15.824.900,00	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
16		**Kecamatan Cibatu**					**4.097.161.910**	**3.724.093.081**	**90,89**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**B**	**3.921.305.810**	**3.569.158.981**	**91,02**	-		
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**90,00**	**90,00**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**56.608.500**	**50.108.500**	**88,52**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	1	11.925.800	9.425.800	79,04			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	dokumen	1	1	8.145.500	7.545.500	92,63			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	dokumen	1	1	8.088.000	7.188.000	88,87			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	dokumen	1	1	7.441.200	6.841.200	91,94			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumalah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	21.008.000	19.108.000	100,00			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**2.921.002.948**	**2.816.897.515**	**96,44**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	14	2.912.177.448	2.808.072.015	96,43			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	8.825.500,00	8.825.500	100,00			
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					**54.837.600**	**13.400.000**	**24,44**			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	14.337.600,00	13.400.000	93,46			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	24		40.500.000,00	0	0			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**252.345.596**	**187.494.128**	**74,30**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	30.893.400	30.846.700	99,98			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	28.481.300	28.400.810	99,72			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	119.253.896	89.984.118	75,46			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	27.825.000	27.796.500	99,90			
		Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	45.892.000	10.466.000	22,81			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**186.803.300**	**185.065.000**	**99,07**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Paket	1	1	27.578.600	27.540.000	99,86			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	1	159.224.700	157.525.000	98,93			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**286.127.866**	**258.298.538**	**90,27**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Lembar	350	350	3.500.000	3.500.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	25.033.762	21.267.500	84,96			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	257.594.104	233.531.038,00	90,66			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**163.580.000**	**57.895.300**	**35,39**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran pajak dan kendaraan dinas yang disediakan,jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas yang disediakan	Kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2	10	10	43.600.000	37.915.300	86,96			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang Dipelihara	unit	4	4	19.980.000	19.980.000	100,00			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100.000.000					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	100	**47.148.200**	**47.148.200**	**100,00**			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan yang dilaksanakan	Laporan	1	1	47.148.200	47.148.200	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	80	33	**31.347.900**	**10.425.900**	**33.26**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan musrembang Tingkat Kecamatan di Tingkat Kecamatan	kegiatan	1	1	18.225.900	10.425.900	57,20			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					13.122.000					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	80	100	**97.360.000**	**97.360.000**	**100,00**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					97.360.000	97.360.000	100,00			
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan	orang	200	200	97.360.000	97.360.000	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Revublik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian									
17		**Kecamatan Bungursari**					**3.262.898.191**	**2.933.845.262**	**89,92**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**BB**	**3.185.657.991**	**2.860.285.062**	**89,79**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**Persen**	**100,00**	**89,05**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**21.581.700**	**21.268.500**	**98,55**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	6.075.900	6.013.600	98,97			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.031.700	4.969.700	98,77			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.038.100	4.912.200	97,50			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	1	1	5.436.000	5.373.000	98,84			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**2.448.654.613**	**2.239.900.836**	**91,47**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	15	15	2.433.354.313	2.227.385.336	91,54			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1	1	15.300.300	12.515.500	81,80			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**26.600.000**	**26.460.000**	**99,47**			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel	20	20	26.600.000	26.460.000	99,47			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**199.268.839**	**155.824.828**	**78,20**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Item	10	10	11.842.000	11.841.000	99,99			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Item	3	3	26.642.550	-	0,00			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Item	30	30	30.159.800	30.159.800	100,00			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Item	50	50	56.510.539	52.231.728	92,43			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	50	53.901.450	41.380.000	76,77			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	20.212.500	20.212.500	100,00			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**304.084.339**	**235.019.598**	**77,29**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Paket	1	1	6.000.000	6.000.000	100,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan dan laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	35.348.150	27.553.131	77,95			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang dan laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	6	6	262.736.186	201.466.467	76,68			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**185.468.500**	**181.811.300**	**98,03**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang dipelihara, dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan	Unit	7	7	14.200.000	11.073.300	77,98			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
			Perorangan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara									
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13	13	11.170.000	11.107.000	99,44			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	160.098.500	159.631.000	99,71			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat**	**Kategori**	**Baik**	**Baik**	**18.243.200**	**18.163.200**	**99,56**			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					**18.243.200**	**18.163.200**	**99,56**			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	18.243.200	18.163.200	99,56			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan**	**Persen**	**30,00**	**30,00**	**5.291.000**	**5.291.000**	**100,00**			
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					**5.291.000**	**5.291.000**	**100,00**			
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Paket	1	1	5.291.000	5.291.000	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**50,00**	**7.200.000**	**3.600.000**	**50,00**			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					**7.200.000**	**3.600.000**	**50,00**			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Laporan yang disusun	Laporan	1	1	7.200.000	3.600.000	50,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Penerapan SPBE	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**39.506.000**	**39.506.000**	**100,00**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					**39.506.000**	**39.506.000**	**100,00**			
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	39.506.000	39.506.000	100,00			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**7.000.000**	**7.000.000**	**100,00**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**7.000.000**	**7.000.000**	100,00			
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	1	1	7.000.000	7.000.000	100,00			

3.1.8 Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum

Tingkat pencapaian Unsur Pemerintahan Umum di Kabupaten Purwakarta sangat didukung oleh perangkat daerah pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan Unsur Pemerintahan Umum selama Tahun 2023. Kabupaten Purwakarta mengalokasikan Pagu anggaran untuk Unsur Pemerintahan Umum sebesar Rp32.118.894.331,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp30.147.222.518,00 atau terealisasi sebesar 93,86%, dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.10
Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum
Tahun 2023

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					**32.118.894.331**	**30.147.222.518**	**93,86**			
		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik					**32.118.894.331**	**30.147.222.518**	**93,86**			
		Kesatuan Bangsa dan Politik					**32.118.894.331**	**30.147.222.518**	**93,86**			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**Opini**	**B**	**B**	**3.834.040.931**	**3.239.346.418**	**84,49**			
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	**%**	**100,00**	**88,86**						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**46,29**	**19.857.900**	**9.191.900**	**46,29**			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	40,61	9.963.900	4.045.900	40,61			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1,00	52,01	9.894.000	5.146.000	52,01			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**88,69**	**1.774.030.370**	**1.573.381.687**	**88,69**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	13,00	88,82	1.765.936.070	1.568.581.387	88,82			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	59,30	8.094.300	4.800.300	59,30			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**67,11**	**6.323.400**	**4.243.400**	**67,11**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	67,11	6.323.400	4.243.400	67,11			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**69,,88**	**125.374.300**	**87.616.300**	**69,,88**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	64,75	5.219.300	3.379.300	64,75			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	99,81	68.800.000	68.672.000	99,81			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6,00	30,31	51.355.000	15.565.000,00	30,31			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				**87,32**	**544.904.497**	**475.789.109**	**87,32**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	100,00	46.498.000	46.498.000	100,00			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	100,00	29.998.600	29.998.600	100,00			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	100,00	155.013.897	155.011.997	100,00			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	75,53	100.000.000	75.525.000	75,53			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1,00	91,19	43.509.000	39.671.500	91,19			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	66,33	119.885.000	79.522.512	66,33			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	99,12	50.000.000	49.561.500	99,12			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**62,15**	**529.426.700**	**329.031.000**	**62,15**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	53,00	62,15	529.426.700	329.031.000	62,15			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**90,16**	**727.217.764**	**655.660.930**	**90,16**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	82,35	20.000.000	16.470.000	82,35			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12,00	94,15	64.519.100	60.747.200	94,15			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	90,00	642.698.664	578.443.730	90,00			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**97,69**	**106.906.000**	**104.432.092**	**97,69**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7,00	90,81	26.900.000	24.428.292	90,81			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tahun	1,00	100,00	30.040.000	30.040.000	100,00			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	47,00	100,00	49.966.000	49.963.800	100,00			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi LSM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru dan Pelajar:**	**Persen**	**100,00**	**83,48**	**762.038.700**	**636.171.000**	**83,48**			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				**83,48**	**762.038.700**	**636.171.000**	**83,48**			
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	100,00	83,48	762.038.700	636.171.000	83,48			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Politik**	**Persen**	**100,00**	**96,75**	**25.702.176.300**	**24.866.551.800**	**96,75**			
			Persentase Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkades	**Persen**	**100,00**							
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				**96,75**	**25.702.176.300**	**24.866.551.800**	**96,75**			
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Orang	50,00	97,3	25.602.176.600	24.842.505.400	97,03			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
		Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	3,00	24,05	99.999.700	24.046.400	24,05			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Forum Masyarakat Untuk Ketertiban dan Keamanan (FKUB, FPK, dan FKDM) Yang Dibina;**	**Persen**	**100,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**			
			Pembinaan Forum Penanganan Keamanan Daerah	**Persen**	**100,00**							
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Persen	100,00							

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;**	**Persen**	**100,00**	**28,53**	**394.590.700**	**112.582.100**	**28,53**			
			Persentase Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama	**Persen**	**100,00**							
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				**28,53**	**394.590.700**	**112.582.100**	**28,53**			
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	11,00	52,71	95.289.900	50.224.000	52,71			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	20,00	49,58	22.302.400	11.058.100	49,58			
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	3,00	18,52	276.998.400	51.300.000	18,52			
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi**	**Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial di Purwakarta**	**Persen**	**100,00**	**89,82**	**1.426.047.700**	**1.292.571.200**	**90,64**			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase			
	dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	**Penanganan Konflik Sosial**										
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					**1.426.047.700**	**1.292.571.200**	**90,64**			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	50,00	83,83	99.511.000	83.422.200	83,83			
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	2,00	84,94	761.747.200	647.009.500	84,94			
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	99,53	564.789.500	562.139.500	99,53			

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya.

Arah kebijakan tersebut selaras dengan tema atau fokus pembangunan tahunan di Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2023 yaitu: "PEMBANGUNAN PARIPURNA MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA", dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Pemajuan Kebudayaan;
2. Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi;
3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern;
4. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah;
5. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Optimalisasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna Mewujudkan Kualitas SDM yang Unggul dan Mandiri;
2. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern;

3. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar, dan Strategis yang Terintegrasi;
4. Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing.

Adapun Kebijakan Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan
Tahun 2023

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
1	Optimalisasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna Mewujudkan Kualitas SDM yang Unggul dan Mandiri;	Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2023 Tentang Penyelenggara Sentra Intervensi Masalah Gizi Terpadu Kabupaten Purwakarta di Kabupaten Purwakarta	Untuk percepatan penurunan masalah gizi pada Balita yang dilakukan dengan langkah strategi intervensi secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta	Dinas Kesehatan
		Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Kesehatan Pekerja Hamil dan Pekerja Perempuan di Kabupaten Purwakarta	Dalam rangka menjamin keselamatan dan kesehatan kerja khususnya pekerja hamil dan pekerja perempuan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting di kabupatn Purwakarta	Dinas Kesehatan
		Surat Keputusan Bupati Nomor 441.1.05/Kep.348-Dinkes/2023 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Sentra Intervensi Masalah Gizi Terpadu Kabupaten Purwakarta	Pembentukan Tim dalam upaya mendukung percepatan penurunan masalah gizi yang dilakukan dengan langkah strategi dan terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan	Dinas Kesehatan
		Surat Keputusan Bupati Nomor 440/Kep.342-Dinkes/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rumah Sakit Prioritas Surveilans Epidemiologi Aktif Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi Di Kabupaten Purwakarta	Menetapkan rumah sakit untuk melaksanakan tugas pencatatan dan pelaporan terhadap semua kasus (rawat inap/rawat jalan) yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan melakukan pelaporan ke Dinas Kesehatan.	Dinas Kesehatan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 443/Kep.217-Dinkes/2023 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Penyakit Polio di Kabupten Purwakarta	Menetapkan status Kabupaten Purwakarta dalam keadaan Kejadian Luar Biasa penyakit polio. Dengan SK ini memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta untuk melakukan fungsi koordinatifnya sehingga terwujud sinergi dan peran masing-masing sektor dalam upaya penanggulangan KLB Polio	Dinas Kesehatan
		Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 443/ 2694 - Dinkes/III/2023 Tentang Penggunaan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) Untuk Imunisasi Rutin	Kementerian Kesehatan sedang melakukan Transformasi Digitalisasi Kesehatan untuk memudahkan pengambilan kebijakan baik di pusat maupun daerah membuat keputusan secara cepat, tepat dan akurat. Salah satu upaya adalah tersedianya Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) yang merupakan aplikasi terpusat untuk input data dan monitoring data perkembangan individu / pasien untuk seluruh tenaga Kesehatan layanan primer, termasuk layanan imunisasi	Dinas Kesehatan
		Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 443/2558-Dinkes/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023 Tentang Kewaspadaan Kejadian Luar Biasa Flu Burung (h5n1) Clade Baru 2.3.4.4b	Untuk melakukan kewaspadaan ternadap kemungkinan KLB Avian Influenza (Flu Burung) pada manusia	Dinas Kesehatan
		Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 443/1654 /Dinkes/I/2023 tentang Pencegahan dan pengendalian *corona virus Disease 2019* pada masa transisi menuju endemi.	Menindaklanjuti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dihentikan sejak 30 Desember 2022 dengan upaya pengendalian dan pencegahan terhadap penyebarluasan infeksi Covid-19	Dinas Kesehatan
		Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 443/5462-Dinkes/X/2023 Tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Virus Nipah	Untuk memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit virus nipah	Dinas Kesehatan
		Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 443/5463-Dinkes/X/2023 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap *MPOX* (*Monkeypox*)	Untuk memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit MPOX nipah	Dinas Kesehatan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 443/1945-Dinkes/I/2023 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Dini Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah	Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi KLB polio	Dinas Kesehatan
		Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Nomor: 443.33/1646/P2P/I/2023 perihal Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji Tahun 2023	Untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan haji yaitu pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji	Dinas Kesehatan
		Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 443.33/1718-Dinkes/I/2023 Tentang Pelaksanaan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) oleh Tenaga Kesehatan	Upaya mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai Kabupaten Sehat melalui peningkatkan keberhasilan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan pencegahan terjadinya peningkatan kasus atau Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan
		Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 43.25/2219/P2P/II/2023 Tentang Optimalisasi Penggunaan Obat ARV	Upaya untuk mengoptimalkan penggunaan obat ARV agar layanan VCT untuk menggunakan obat-obatan tersebut bagi pasien ODHIV baru.	Dinas Kesehatan
		Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 433/-Dinkes/IV/2023 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Bagi Jemaah Haji Tahun 2023	Pelaksanaan vaksinasi Meningitis Meningokokkus bagi jemaah haji tahun 2023	Dinas Kesehatan
		Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 433/4698-Dinkes/VIII/2023 Tentang Penanggulangan Dampak Polusi Udara Bagi Kesehatan	Meminimalisir dampak polusi udara terhadap potensi penyakit pada masyarakat melalui peningkatan pemantauan kualitas udara, prilaku hidup bersih dan sehat serta penanggulangan penyakit ang ditimbulkan polusi udara	Dinas Kesehatan
		Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 443/6334-Dinkes/XII/2023 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid-19	Hal yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus Covid-19 bagi laboratorium kesehatan masyarakat dan Rumah Sakit, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 443/6439-Dinkes/XII/2023 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Penerapan Sanksi Administratif dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan	Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan rekam medis elektronik akan dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dan dalam rangka tersebut Menteri dapat mengenakan sanksi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak menyelenggarakan rekam medis secara elektronik	Dinas Kesehatan
		Telaahan Staff Bidang P2P Dinas Kesehatan Tentang Peningkatan Insidensi Kasus Tuberkulosis Pada Tahun 2021 - 2022 Di Kabupaten Purwakarta	Mengidentifikasi dan menganalisis masalah adanya peningkatan insidensi TBC, upaya yang telah dilakukan serta rencana tindak lanjut	Dinas Kesehatan
		Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024	Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Secara Non Diskriminatif, Objektif, Transparan, Akuntabel, Mudah, Lancar dan Penyaluran Peserta Didik Baru setiap Jenjang Pendidikan Negeri dan Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
		Kepbup Nomor 420.05/Kep.176-Disdik/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Dana bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023	Membantu Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dalam Tata Kelola Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri Jenjang PAUD, SD dan SMP	Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
		Kepbup Nomor 954/Kep.177-Disdik/2023 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri dan Penetapan Nomor Rekening Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023	Membantu Kelancaran Dalam Tata Kelola Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri Jenjang PAUD, SD dan SMP	Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
		Kepbup Nomor 420.05/Kep.450-Disdik/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Kekerasan Seksual dan Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta untuk Jenjang PAUD, SD dan SMP serta Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
		Peraturan Bupati No 35 Tahun 2023 tentang	Melaksanakan pelatihan berdasarkan unit kompetensi sehingga menciptakan tenaga	Dinas Ketenagakerj

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
			kerja yang berkompeten dan berdaya saing. Melaksanakan konsulitasi produktivitas kepada Perusahaan sehingga menciptakan tenaga kerja yang produktif. Melaksanakan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja sehingga membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi Masyarakat.	aan dan Transmigrasi
2	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern;	Peraturan Bupati No 73 tahun 2023 tentang Pedoman Alih Media Arsip Dinamis	Melindungi, memelihara dan menjaga ketersediaan arsip dinamis	DISIPUSDA
		Peraturan Bupati No135 tahun 2023 tentang klasifikasi Arsip	Penyesuaian Kode Klasifikasi arsip	DISIPUSDA
		Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700.05/Kep.242 – Inspektorat/ 2023 tentang Penetapan Rencana Aksi / Monitoring Ceter For Prevention (MCP) Korsupgah dan Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi / *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Korsupgah Tahun 2023	Tujuan untuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Tingkat Daerah Kabupaten Purwakarta, maka ditetapkan Rencana Aksi / *Monitoring Center For Prevention* (MCP)	Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
		Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep.333-Inspektorat/ 2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Daerah Tahun 2023	Tujuan agar Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor : 88 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinrtah Daerah Tahun 2023, dan mampu mengakomodir target – target Pengawasan yang di tetapkan dalam *Monitoring Center For Prevention* (MCP) KPK.	Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
		Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Purwakarta	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Purwakarta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipl Kabupaten Purwakarta

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Purwakarta	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 63 Tahun 2023	Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2027	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Keputusan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 473.41.05/Kep.212.A-Diskominfo/2023	Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purwakarta	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Keputusan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 473.41.05/Kep.212.B-Diskominfo/2023	Pembentukan Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Keputusan Sekda Kabupaten Purwakarta Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Purwakarta Nomor : KPG.03.01.01/2102-Diskominfo/2023	Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta guna meningkatkan optimalisasi pelayanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Keputusan Sekda Kabupaten Purwakarta Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Purwakarta Nomor : KPG.03.01.01/2107-Diskominfo/2023	Klasifikasi informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai pengklasifikasian informasi yang ditetapkan berdasarakan berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar, dan Strategis yang Terintegrasi;	Peraturan Bupati Nomor 973/Kep.347-DPUTR/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
4	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing.	Keputusan Pj. Bupati Purwakarta Nomor 426/Kep.451-Dispangtan/ 2023 Tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	Tujuan untuk mengetahui situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa, baik aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai dasar untuk intervensi daerah rentan rawan pangan	Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
		Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Pembinaan, Pemberdayaan, Pelindungan, dan Pengawasan Perkoperasian dan Usaha Mikro	untuk memudahkan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bagi para pelaku UMKM	DKUPP

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

DPRD kabupaten Purwakarta memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2022, rekomendasi tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: KU.10 /Kep. 06 -DPRD/2023.

Tabel 3.12

Tindak Lanjut Catatan/ Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Bupati Purwakarta TA 2022

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
Sekretaris Daerah	A	Belum Optimalnya Fungsi Koordinatif Sekretariat Daerah	Fungsi Koordinatif Yang Melekat Pada Sekretariat Daerah Perlu Untuk Dimaksimalkan, Mengingat Itu Sangat Penting Untuk Kelancaraan Komunikasi Dan Koordinasi Antar Perangkat Daerah Yang Poros Utamanya Dari Sekretaris Daerah.	Akan memaksimalkan koordinasi dengan bagian-bagian dilingkungan Sekretariat Daerah agar berjalan sesuai dengan kinerja masing-masing	Agar koordinasi dengan bagian-bagain dilingkungan Sekretariat Daerah bisa maksimal
	B	Kurang Cermatnya Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Tapd) Dalam Menyusun Anggaran	Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kurang Cermat Menyusun Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn, Sehingga Ada Sisa Anggaran Rp. 109,6 Milyar. Dengan Rincian, Anggaran: Rp. 939,6 Milyar Realisasi : Rp. 830 Milyar Sisa : Rp. 109,6 Milyar Yang Harus Menjadi Perhatian: A. Dinas Pendidikan, Sisa Anggaran Rp. 38,45 Milyar B. BKAD, Sisa Anggaran Rp. 17,20 Milyar C. BKPSDM, Sisa Anggaran Rp.14,42 Milyar	TAPD akan memformulasikan secara cermat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Penggaran Gaji dan Tunjangan ASN lebih terukur sesuai kebutuhan
	C	Kurang Cermatnya Tim Penyusun LKPJ Dalam Menyusun	Karena Tim Penyusun LKPJ Di Bawah Sekretariat Daerah, Agar Kedepan Lebih Cermat Lagi. Contoh : Belanja Tidak	Akan dilakukan kroscek data penyusunan LKPJ dengan OPD dan BKAD	Data yang disajikan dalam LKPJ akurat dan sesuai

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		LKPJ Bupati Purwakarta Ta. 2022.	Terduga, Anggaran Murni Rp23.820.000.000 Di Buku LKPJ Masih Tetap 23 Milyar, Padahal Sudah Dirubah Melalui Peraturan Bupati No.86 Tahun 2022 Tanggal 17 Oktober 2022 Menjadi Rp.4.087.780.404 Sehingga Anggarannya Berkurang Sebesar Rp. 19.723.219.596		
	D	Kurang Optimalnya Pengadministrasian Peta Desa.	Pembuatan 97 Buah Peta Desa, Kedepannya Agar Di Inventarisasi Sengketa Perbatasan Agar Dihasilkan Peta Yang Bisa Diterima Oleh Warga Desa.	Telah dilaksanakan sosialisasi, inventarisasi permasalahan dan penyelesaian terhadap sengketa batas desa	Peta batas desa sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan dan dapat diterima oleh warga masyarakat
	E	Inefisiensi Pegawai Dengan Jumlah THL Yang Cukup Tinggi, Yaitu Sekitar 300 Orang Di Bagian Umum.	Pengadaan THL Agar Ditinjau Kembali Untuk Tugas, Pokok Dan Fungsinya, Sehingga Tidak Hanya Menumpang Nama Dan Tanpa Ada Tupoksi Yang Jelas.	Bagian Umum sudah membuat Surat Perjanjian Kerja antara masing-masing Tenaga Harian Lepas dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya	Monitoring Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Harian Lepas berkelanjutan.
	F	Kurang Optimalnya Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Perumda BPR Purwakarta	Bagian Perekonomian Setda Diharapkan Dapat Membina Perumda BPR Purwakarta Terkait Dengan Kredit Macet.	Bagian Perekonomian dan SDA Setda melakukan pembinaan terhadap BPR Purwakarta dan sudah terbentuk tim/bagian yang menangani kredit bermasalah/macet	Tim bertugas melakukan penagihan Kredit bermasalah/macet secara persuasif, restrukturisasi kredit dan hapus buku
	G	Kurang Optimalnya Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu	Bagian Perekonomian Setda Harus Bekerja Lebih Keras Untuk Membina Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Dari Segi Tata Kelola Perusahaan. Terutama Yang Paling Disorot Terkait Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Pelayanan Air Bersih Terhadap Masyarakat.	1. Bagian Perekonomian selalu berkoordinasi dengan Pihak Perumda dalam hal pelaksanaan pembinaan, baik segi keuangan maupun dari segi kebijakan direksi. Sebagai contoh misalnya keterlibatan dalam penyusunan Rencana	1. Pembinaan di lakukan sebagai upaya peningkatan pendapatan atau laba sehingga berpengaruh pada peningkatan setoran deviden Perumda Air Minum

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				Kerja dan Anggaran Perumda setiap tahunnya. 2. Rekomendasi perihal pelayanan air bersih terhadap Masyarakat sudah ditekankan kepada Perumdam GTR, dan diketahui bahwa sangat terkendala dengan sumber air baku (terutama musim kemarau) juga asset SPAM yang sudah berusia diatas 30 tahun.	kepada Pemerintah Daerah. 2. Pihak Perumda AM GTR akan bekerjasama dengan investor untuk menambah pelayanan air bersih kepada masyarakat Purwakarta, diantaranya perumahan permata, bukit suryo, bamala indah, buana indah, hegarmanah, dan perumnas royal campaka. Di samping itu juga, perumda AM GTR sedang merencanakan untuk membuat SPAM baru dengan maksud untuk menambah kapasitas produksi dan jaringan perpipaan baru dengan target green area campaka, cibatu, bungursari, dan babakan cikao)
	H	Belum Optimalnya Bagian Hukum Setda Mengunggah Dokumen Peraturan-Peraturan Daerah Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat Luas	Bagian Hukum Setda Diharapkan Bahwa Untuk Kelengkapan Dokumen – Dokumen Peraturan Daerah Dan Turunannya Harap Bisa Di Update Terus Dalam Jdih.	Telah laksanakan setiap hari, unggahan dokumen Produk hukum daerah terbaru pada website jdih.purwakarta.go.id	Produk hukum daerah dapat diakses oleh masayarakat Kabupaten Purwakarta

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purwakarta	A	Hubungan Antara Perangkat Daerah Terkait Dengan Bantuan Untuk Masyarakat	Koordinasi Dengan Dinas Teknis Terkait Bantuan Masyarakat Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan Dan Jaminan-Jaminan Yang Lainnya;	Akan kami koordinasikan dengan Dinas Sosial P3A dan Dinas Kesehatan	Agar bisa dilaksanakan kedepannya sesuai arahan dewan
	B	Belum Dimanfaatkannya Kegiatan Phb Dikaitkan Dengan Komunikasi Antar Perangkat Daerah	Jadikanlah Momen-Momen Hari Besar Keagamaan Untuk Menambah Sarana Silaturahmi Berbagai Pihak.	Akan ditindaklanjuti berkoordinasi dengan Stakeholder dan Ormas Islam serta FKUB	Terjalinya komunikasi dan Silaturahmi yang baik dari berbagi pihak
Inspektorat	A	Pengawasan Terhadap Pengelolaan Investasi Pemda Pada Bumd Dirasa Masih Kurang Maksimal Dengan Alasan Terbentur Regulasi Yang Tidak Memungkinkan Inspektorat Turun Langsung Ke BUMD Untuk Mengaudit Tetapi Harus Menunggu Hasil Audit Dari Akuntan Publik Sesuai Dengan Peraturan Perundang – Undangan.	Harus Dicari Celah Untuk Inspektorat Bisa Masuk Melakukan Pengawasan Dan Pemantauan Atas Aset Daerah Yang Ada Pada Bumd. Ada Opsi Bisa Masuk Dengan Dasar Usulan Langsung Dari Bupati Untuk Inspektorat Bisa Melakukan Pengawasan Langsung Ke Bumd.	Inspektorat Daerah hanya Bisa Melaksanakan Monitoring terhadap BUMD	Sampai saat ini belum ada usulan Bupati Purwakarta untuk melakukan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sudah melakukan pengawasan ke BUMD tahun 2023 terkait dengan tatakelola BUMD dan sudah dijadwalkan juga pada PKPT tahun 2024 dengan tujuan pengawasan adalah untuk menilai dan meningkatkan tata Kelola BUMD sesuai dengan PP no. 54 tahun 2017 tentang BUMD pasal 134 ada kewenangan Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap BUMD untuk menegakkan tata Kelola Perusahaan yang baik.

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	B	Belum Kompetennya Akuntan Publik Yang Saat Ini Ditunjuk Oleh Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu	Penunjukan Akuntan Publik Oleh Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Hendaknya Ditentukan Oleh Pemerintah Daerah Dan Dipilih Akuntan Publik Yang Berkompeten Dan Mempunyai Integritas.	Inspektorat Daerah akan Memonitoring, terkait Penunjukan Akuntan Publik oleh Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Agar memilih Akuntan Publik yang lebih Berkompete dan Mempunyai Integritas.	-
	C	Belum Optimalnya Pengawasan Terhadap Bumdes	Agar Inspektorat Dapat Berkolaborasi Dengan Dinas Teknis Yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Dpmd), Karena Fakta Di Lapangan Bahwa Banyak Bumdes Di Kabupaten Purwakarta Yang Bermasalah Dan Perlu Perhatian Khusus, Mengingat Rencana Kedepannya Akan Ada Bumdes Bersama.	Inspektorat Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan Audit Kinerja terkait Bumdes desa – desa pada Pengawasan tahun 2024 yang bermasalah dan perlu di perhatikan lebih khusus lagi supaya tidak ada lagi Bumdes yang bermasalah.	Untuk memberikan penilaian atas pengelolaan keuangan BUMDes berdasarkan parameter pada 4 aspek sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020.
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	A	Fungsi Disdukcapil Sebagai Penyaji Data Kependudukan Dan Catatan Sipil Yang Mutakhir Belum Optimal.	Peningkatan Fungsi Disdukcapil, Mengingat Mobilitas Penambahan Penduduk Di Purwakarta Saat Ini Cukup Tinggi, Sehingga Data Yang Ada Dapat Terus Terupdate, Dan Dapat Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Yang Ada.	Disdukcapil Kabupaten Purwakarta telah mengimplementasikan Aplikasi SIAK Terpusat, sehingga Database dan Aplikasi menjadi terpusat dan satu di Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil. Dengan terintegrasinya data seluruh Indonesia akan memudahkan proses verifikasi data penduduk ganda dan proses mutasi penduduk menjadi lebih terpantau, sehingga kebutuhan data kependudukan yang dimutakhirkan akan mudah dicapai. Disdukcapil Kabupaten Purwakarta menyajikan data mutakhir dalam kurun waktu 2 Tahun sekali dengan menerbitan	Penyajian data penduduk dengan menggunakan data yang sudah dikonsolidasikan secara nasional melalui Penerbitan Buku Data Konsolidasi Bersih Per Semesteran telah dilakukan oleh Disdukcapil Purwakarta sehingga terkait dengan Penyajian Data Kependudukan sudah menggunakan data termutakhirkan dan ini sudah sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2023 pada Pasal 7 Ayat 1.

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				buku Data Agregat Penduduk Per Semestera.	
	B	Data Kependudukan Agar Akurat Dan Terkini.	Data Kependudukan Di Lingkungan Kabupaten Purwakarta Dipersiapkan Dengan Seakurat Mungkin, Supaya Dapat Dipakai Data Tersebut Oleh Penyelenggara Pemilu Serentak Saat Tahun 2024 Nanti.	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk kepentingan Pembangunan Demokrasi menjadi kewenangan Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan dalam negeri yaitu Ditjen Dukcapil. Dalam proses pembuatan Data Kependudukan dilakukan serangkaian proses agar data kependudukan yang disajikan memang sudah dilakukan konsolidasi secara nasional sehingga meminimalisir kesalahan atau duplikasi data. Disdukcapil Kabupaten purwakarta berperan dalam melaksanakan layanan administrasi kependudukan Dimana didalamnya terdapat proses pendaftaran pendudukan dan pencatatan peristiwa penting.	Penyiapan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan / atau Penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dilakukan langsung oleh Kementerian dalam negeri melalui Ditjen Dukcapil kemendagri. Data kependudukan yang disajikan merupakan data yang sudah melalui proses konsolidasi dan pembersihan secara nasional.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	A	Pembinaan Terhadap Bumdes Harus Menjadi Perhatian Khusus Mengingat Banyak Bumdes Yang Bermasalah.	Pembenahan Bumdes, Dapat Melalui Program Dari Pemerintah Pusat Yaitu Bumdes Bersama.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta melalui Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa telah melaksanakan sosialisasi dan sekaligus memfasilitasi pembentukan Bumdesma LKD (Lembaga Keuangan Desa) sesuai dengan Permendes PDTT Nomor.15 Tahun 2021 tentang Transformasi UPK menjadi Bumdesma.	Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di BUMDes dan meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMDes.

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	B	Belum Optimalnya Pengawasan Terhadap Bumdes.	Pengawasan Terhadap Bumdes Oleh Dpmd Dapat Bekerjasama Dengan Pihak Kecamatan Untuk Masuk Melalui Tatanan Administrasinya.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta melalui Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Kasi PMD dan Kasi Ekbang kecamatan perihal pembinaan Bumdes.	Melakukan optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan BUMDes.
	C	Belum Maksimalnya Pelaksanaan Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 13 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa.	Pelaksanaan Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 13 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa Harus Maksimal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta melalui Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa telah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2019 tentang Bumdes kepada Pemerintah Desa dan telah memberikan Peningkatan Kapasiytas bagi para pengelola Bumdes melalui kegiatan Pembinaan Teknis pengelolaan Bumdes/Bumdesma.	Memberikan pemahan kepada Pemerintahan Desa dan Para Pengelola BUMDes agar dalam pelaksanaan Manajemen BUMDes berpedoman pada regulasi yang sudah ditetapkan.
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	A	Kekurangan PNS Di Dppkb.	Agar Dapat Dipenuhi Dengan Pengajuan Ke Bkpsdm, Sehingga Dapat Menunjang Pada Kinerja Organisasi.	Terlayaninya Pasangan Usia Subur (PUS) di daerah padat penduduk	Melakukan Kegiatan Pelayanan KB
	B	Kurangnya Perhatian Terhadap Kesejahteraan Dari Para Kader Kb.	Kesejahteraan Dari Para Kader Kb Mohon Untuk Lebih Diperhatikan, Mengingat Mereka Sebagai Ujung Tombak Dari Dppkb.	Terhindar dari keluarga dengan kelainan Stunting yang baru.	Pembentukan Tim TPK dan melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting.
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan	A	Kurangnya Penyediaan Lapangan Kerja Di Kabupaten Purwakarta, Padahal Nilai Investasi Terus	Nilai Investasi Yang Terus Meningkat Di Kabupaten Purwakarta, Harus Berbanding Lurus Juga Ke Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Penyediaan Lapangan Kerja, Sehingga Dpmptsp	Melaksanakan Pengawasan terhadap kewajiban Perusahaan Besar agar dapat menjalin kemitraan dengan Sektor UMKM serta berkoordinasi dengan Disnaker agar dapat	Penyerapan 8.446 tenaga kerja terutama pada lima sektor investasi yang terbesar pada tahun 2023 yaitu : sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi. sektor

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
Terpadu Satu Pintu		Meningkat Setiap Tahunnya.	Dapat Berkoordinasi Dengan Dinas Teknis Terkait.	mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan sektor yang dibutuhkan oleh investor.	perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Sektor industri kimia dan farmasi, sektor industri tekstil dan sektor konstruksi
	B	Belum Selektifnya Pemberian Izin Pembangunan Dan Usaha.	Pemberian Izin Pembangunan Dan Usaha Harus Lebih Selektif Sehingga Dapat Meminimalisir Bangunan Yang Mangkrak.	Telah dilaksanakan pemberian perizinan secara selektif	Meminimalisasi adanya pembangunan yang tidak berizin
	C	Pemberian Perizinan Yang Masih Tidak Sesuai Dan Kurangnya Pengawasan Terhadap Bangunan-Bangunan Yang Belum Memiliki Perizinan.	Pengawasan Atas Perusahan – Perusahaan Yang Belum Lengkap Perizinannya Ataupun Bangunan Yang Belum Sesuai Dengan Peraturan Dapat Ditindak Tegas Tanpa Tebang Pilih, Sehingga Akan Menimbulkan Efek Jera Bagi Perusahan Tersebut Dan Perusahaan Lain Yang Masih Lalai Atas Perizinannya.	Telah dilaksanakan pengawasan secara teratur dan pengawasan insidential serta berkoordinasi dengan dinas teknis yang mempunyai kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terhadap perusahaan yang telah dilaksanakan pengawasan, diberikan pembinaan dan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan implementasi OSS RBA ataupun pelaporan kegiatan penanaman modal
Dinas Pemadam Kebakaran	A	Kekurangan PNS Di Dinas Pemadam Kebakaran.	Kekurangan PNS Di Damkar Harap Dapat Dipenuhi Dengan Pengajuan Ke BKPSDM, Sehingga Akan Berdampak Juga Pada Kinerja Organisasi.	Pengiriman ke BKPSDM terkait kekurangan jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Damkar	Tersedianya jumlah P3K yang dimiliki oleh dinas damkar walaupun belum sesuai dengan usulan yang diajukan
	B	Peningkatan Pelatihan Dan Pendidikan Teknis Terhadap Para Pegawai Damkar.	Pelatihan Dan Pendidikan Teknis Terhadap Para Pegawai Damkar Harus Dilakukan Secara Berkala Dan Dipastikan Seluruh Pegawai Damkar Mendapatkan Pelatihan Dasar Untuk Penanggulangan Kebakaran.	Pelatihan Dan Pendidikan Teknis Terhadap Para Pegawai Damkar diakomodir dalam sub kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi 2. Pembinaan Aparatur Pemadam kebakaran	Peningkatan kompetensi pegawai dinas damkar dalam Upaya pencegahan kebakaran.

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	C	Kurang Optimalnya Pengoperasian Hydrant Kota.	Hydrant Kota Yang Terpasang 11 Titik, Fungsinya Agar Dioptimalkan Baik Ketersediaan Air Maupun Tekanannya.	Pemeriksaan Hydran kota dilaksanakan secara berkala oleh Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan	Dari Hasil pemeriksaan, dari 11 hidran, yang masih berfungsi 1 buah berlokasi di depan Hotel Priyangan
	D	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana.	Sarana Dan Prasarana Yang Ada Di Damkar Untuk Selalu Dipelihara Dan Dirawat Dengan Baik Sehingga Masih Layak Ketika Akan Digunakan Dalam Setiap Waktu.	Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pada Tahun 2023 terakomodir dalam kegiatan : 1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah 2. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Terpeliharanya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan sehingga siap pakai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas untuk memberikan pelayanan bagi Masyarakat dalam urusan trantibumlinmas sub urusan kebakaran.
Satuan Polisi Pamong Praja	A	Pengadaan Pegawai Satpol Pp Terbentur Aturan Bahwa Anggota Satpol Pp Harus Berstatus Pns, Sehingga Saat Pembukaan Penerimaan Pppk Kemarin Tidak Bisa Mengajukan Ke Bkpsdm, Sedangkan Porsi Pegawai Satpol Pp Dengan Tipe A Dan Jumlah Pns Yang Ada Di Satpol Pp Saat Ini Masih Belum	Pengajuan Pegawai Pns Untuk Satpolpp Ke Bkpsdm Agar Lebih Diperhatikan.	Adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3540/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024 serta adanya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan adanya kedua dasar hukum tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja telah mengajukan	Pendataan dan pengajuan pegawai Non PNS masih menunggu tindak lanjut dan persetujuan dari BKPSDM Kabupaten Purwakarta

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Memadai, Sehingga Tetap Mengandalkan Pegawai Non Pns. Tetapi Untuk Penindakan Pelaksanaan Perda Dan Penyidik Harus Berstatus Pns.		formasi PPPK, diantaranya Pranata Trantibum sebanyak 306 formasi dan Pengelola Trantibum sebanyak 144 formasi ke BKPSDM Kabupaten Purwakarta dan telah diinputkan juga ke dalam aplikasi SIASN.	
	B	Pembuatan Tugas, Pokok Dan Fungsinya Untuk Pegawai Non Pns.	Pegawai Non PNS Yang Ada Di Satpol PP Dapat Dibuatkan Tugas, Pokok Dan Fungsinya Agar Terlihat Jelas Peruntukan Tugasnya Ditempatkan Dimana Saja, Sehingga Dalam Proses Kerjanya Menjadi Efektif Dan Efisien.	Tugas pokok dan fungsi serta penempatan setiap anggota Satpol PP telah ada dan tercantum dalam Surat Perintah Global.	Efisiensi kinerja berdasarkan regu kewilayahan dan di bawah Komandan Regu atau Kasi Tramtib tiap kecamatan.
	C	Fungsi Satpol PP Sebagai Penegak Peraturan Daerah Diharapkan Lebih Proaktif Di Lapangan.	Fungsi Satpol PP Sebagai Penegak Peraturan Daerah Agar Lebih Proaktif Di Lapangan, Sehingga Pelanggaran – Pelanggaran Yang Terjadi Bisa Dengan Cepat Teratasi. Terutama Terkait Dengan Penegakan Perda Terhadap Izin – Izin Usaha Ataupun Bangunan Yang Belum Lengkap Dari Perusahaan – Perusahaan.	Dibentuknya Tim Pengawasan Perizinan yang melibatkan Satpol PP dan dinas terkait.	Terciptanya integritas antar dinas-dinas terkait sehingga dapat memecahkan permasalahan tersebut.
	D	Peningkatan Monitoring Satpolpp.	Monitoring Terhadap Perusahaan – Perusahaan Yang Telah Disegel Dapat Dilaksanakan Secara Rutin Dan Berkala Sehingga Dapat Mencegah Dan Meminimalisir Perusahaan Yang Belum Lengkap Izinnya Beroperasi Kembali.	Diadakan monitoring atau pengawasan secara berkala dan dibentuk Tim Monitoring atau Pengawasan yang melibatkan Satpol PP dan dinas terkait.	Sebagai *controlling* tertib perizinan di Kabupaten Purwakarta.
	E	Fungsi Satpol Pp Sebagai Penjaga Ketentraman Masyarakat Dapat	Fungsi Satpol PP Sebagai Penjaga Ketentraman Masyarakat Dapat Dilaksanakan Dengan Patroli Rutin Yang Sudah Dilaksanakan Sehingga	Diadakan patrol rutin oleh regu operasional tiga kali sehari dalam 24 jam (pagi, sore, malam).	Lebih efisien dalam menangani pengaduan masyarakat.

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Dilaksanakan Dengan Patroli Rutin.	Ada Rasa Aman Dari Masyarakat Purwakarta.		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A	Kekurangan Jumlah Pegawai Di Bpbd.	Jumlah Pegawai Di BPBD Masih Dianggap Kurang Dengan Tugas Yang Berisiko Tinggi, Sehingga Butuh Penambahan Personil.	Penambahan Non ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta tidak diperbolehkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 Bab XIII Pasal 65. Pada UU tersebut dijelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Berdasarkan UU tersebut Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penambahan Non ASN tidak diperbolehkan sehingga BPBD Kabupaten Purwakarta memaksimalkan SDM yang ada dan melakukan kolaborasi dengan relawan dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.
	B	Peningkatan Pelatihan Dan Pendidikan Bagi Para Pegawai Di Lingkungan Bpbd.	Pelatihan Dan Pendidikan Bagi Para Pegawai Di Lingkungan BPBD Harus Dijadwalkan Secara Berkala Sehingga Keahlian Dan Keterampilan Dalam Tugas Bisa Terus Meningkat.	Pelatihan dan Pendidikan bagi para pegawai di lingungan BPBD telah dimasukkan kedalam RKA dan DPA pada sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten Kota.	Pelatihan dan Pendidikan bagi para pegawai di lingungan BPBD telah dilaksanakan yang ditunjukkan dengan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana di Gedung SKB UPTD Disdik Kabupaten Purwakarta.

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	C	Pengoptimalan Pengadaan Sarana Dan Prasarana.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di BPBD Butuh Untuk Penambahan Serta Sarana Dan Prasarana Yang Sudah Ada Untuk Dipelihara Dan Dirawat Dengan Baik.	Pengadaan sarana dan Prasarana telah dianggarkan dan masuk kedalam RKA dan DPA BPBD pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Pengadaan sarana dan Prasarana telah dilakukan hal ini difokuskan kedalam pengadaan sarana prasarana penunjang penanggulangan bencana dan sarana prasarana Gedung kantor dan pendukung. Selain itu, dilakukan pemeliharan rutin terhadap sarana prasarana yang tersedia
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A	Sistem Rotasi Dan Mutasi Asn Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta Perlu Lebih Ditingkatkan Kembali.	Sistem Rotasi Dan Mutasi ASN Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta Dapat Dengan Mengadopsi *Merit System* Dan Memanfaatkan Teknologi Yang Ada, Sehingga Dalam Prosesnya Dapat Lebih Transparan Dan Kompeten.	Pemerintahan Kabupaten Purwakarta telah menerapkan *Merit System* sejak tahun 2021. Salah satu aspek dari *Merit System* adalah Promosi dan Mutasi, yang diwujudkan dalam bentuk: 1. kebijakan yang objektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan Talent Pool. Salah satu bentuk kebijakan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta telah memiliki kebijakan internal yang mengatur tentang pedoman pola karir sesuai dengan manajemen talenta yaitu	Penilaian atas penerapan *Merit System* pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Secara keseluruhan, nilai *Merit System* pada tahun 2023 sebesar 278 poin, mengalami peningkatan sebesar 36,5 poin dibandingkan tahun 2022. Salah satu aspek penilaian yang meningkat adalah aspek promosi dan rotasi dengan nilai 32,5 poin, mengalami peningkatan sebesar 12,5 poin dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan Kesadaran dan Komitmen yang lebih tinggi

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2022. 2. Terselenggaranya pengisian JPT, Jabatan Administrasi secara terbuka dan kompetitif yang mengacu pada talent pool dan rencana suksesi. 3. Dalam mendukung *Merit System* khususnya aspek promosi dan mutasi, Pemerintahan Kabupaten Purwakarta telah memiliki SIAKANG. Penerapan sistem rotasi dan mutasi ASN yang berbasis *merit system* dan penggunaan system informasi SIAKANG dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penempatan ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta, yang mana akan meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN, dan pada akhirnya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.	dalam menerapkan sistem yang adil dan transparan dalam promosi dan rotasi ASN.
	B	Peninjauan Kembali Pegawai Non ASN/THL Di Kabupaten Purwakarta.	Jumlah THL Yang Meningkat Drastis Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, Perlu Ditinjau Kembali Dari Segi Tupoksinya Jangan Sampai In-Efisiensi Pegawai Tanpa Tupoksi Yang Jelas.	1. Jumlah Non ASN per 31 Desember 2023 sebanyak 4.299 orang, mengalami pengurangan sebanyak 1.638 orang dibandingkan jumlah ASN per 31 Desember 2022 sebanyak 5.937 2. Adapun rincian status penyelesaian Non ASN pada	Telah dilaksanakannya seleksi PPPK tahun 2022 dan seleksi PPPK tahun 2023 yang mana terdapat kategori Pelamar Khusus yang diperuntukkan pegawai Non ASN di Pemerintahan Kabupaten Purwakarta yang ada di database BKN yang merupakan hasil pendataan

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				Tahun 2023 sebanyak 1.638 orang antara lain: a. Lulus CPNS sebanyak 1 Orang. b. Lulus PPPK sebanyak 1.468 Orang. c. Pensiun sebanyak 5 Orang. d. Mengundurkan Diri sebanyak 139 Orang. e. Pemberhentian sebanyak 5 Orang	Non ASN tahun 2022 yang terdiri dari eks Tenaga Honorer Kategori II dan Non ASN dengan tujuan: 1. Memberikan Kesempatan /peluang yang besar bagi Non ASN yang telah berbhakti dan mengabdi untuk mendapatkan prioritas dalam Seleksi Penerimaan ASN. 2. Memenuhi Kebutuhan ASN di bidang tertentu melalui system seleksi agar mendapatkan pegawai ASN yang kompeten dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sesuai tupoksi masing-masing.
	C	Penempatan Pegawai Non Asn/Thl Agar Ditempatkan Sesuai Surat Perintah.	Bkpsdm Harus Bersikap Tegas Terhadap Thl Yang Tidak Ditempatkan Sesuai Dengan Surat Perintahnya, Karena Ada Indikasi Pegawai Thl Ditugaskan Bukan Untuk Kepentingan Dinas.	Dalam rangka meningkatkan disiplin dan akuntabilitas Tenaga Non ASN serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, BKPSDM akan melaksanakan langkah-langkah antara lain: 1. Melakukan verifikasi dan validasi data Non ASN, termasuk jumlah, kualifikasi dan kompetensi Non ASN serta Penempatannya sesuai Surat Perintah (SP) di setiap Perangkat Daerah.	Tenaga Non ASN yang melanggar ketentuan akan diberikan sanksi berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat dan pemutusan perjanjian kerja dilakukan dalam rangka penegakkan disiplin sehingga Non ASN dapat bekerja produktif, efektif, efisien dan sesuai dengan norma-norma dan ketetuan yang ada.

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				2. Melakukan pembinaan dan pengawasan Non ASN secara berkala, melalui Monitoring dan evaluasi kinerja.	
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		Belum Sesuainya Pendanaan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Dan Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan.	Pendanaan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Dan Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan Agar Mengacu Kepada Peraturan Peemrintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah.	A. Kami akan menyesuaikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan kecamatan sesuai sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022. B. Kami akan menyesuaikan mengenai pendanaan FORKOPIMDA dan FORKOPIMCAM sesuai dengan peratuan yang berlaku	A. Membuat Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati mengenai Susunan dan Pendanaan FORKOPIMDA ; B. Kami akan berkoordinasi dengan kecamatan se- kabupaten purwakarta mengenai pendanaan FORKOPIMCAM
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	A	Belum Sesuainya Penganggaran Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Dengan Ded.	Penganggaran Untuk Pemantapan Pemeliharaan Jalan Agar Disesuaikan Dengan Ded Rancangan Teknis Bangunan, Sehingga Tidak Ada Lagi Kegiatan- Kegiatan Pembangunan Yang Sifatnya Bertahap.	Pada tahun anggaran 2022 anggaran Pembangunan /rekonstruksi jalan sebesar ± Rp. 61 M untuk 34 lokasi kegiatan, sedangkan di kabupaten purwakarta terdapat 309 ruas jalan yang membutuhkan penanganan dengan peningkatan dan pemeliharaan jalan. Berdasarkan hal tersebut maka proses Pembangunan jalan dilakukan secara bertahap mengingat banyaknya ruas jalan yang butuh penanganan. Selain itu juga disesuai dengan kebutuhan penanganan berdasarkan data kondisi kerusakan jalan	Beberapa ruas jalan kabupaten sudah dilakukan peningkatan dan pemeliharaan untuk meningkatkan kondisi kemantapan jalan kabupaten.

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	B	Proses Perencanaan Belum Focus Untuk Menyelesaikan Pembangunan Sesuai Dengan Visi Dan Misi Pembangunan Di Kabupaten Purwakarta, Terutama Dalam Melanjutkan 9 Langkah Menuju Purwakarta Istimewa.	Dalam Proses Perencanaan, Pembuat Kebijakan Diharapkan Untuk Lebih Focus Menyelesaikan Pembangunan Sesuai Dengan Anggaran Serta Visi Dan Misi Pembangunan Di Kabupaten Purwakarta, Terutama Dalam Melanjutkan 9 Langkah Menuju Purwakarta Istimewa.	Sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum dalam Renstra Perubahan Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah secara teknis difokuskan pada hal-hal yang bersifat teknis di bidang pembangunan jalan, jembatan, pengairan, Tata Ruang dan Tata Bangunan. Dan pelaksanaan anggaran pun telah sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan tersebut.	Proses perencanaan akan kami fokuskan Kembali dengan arah kebijakan yang memang tertuang dalam Renstra Perubahan Tahun 2018-2023.
	C	Pengkajian Ulang Kondisi Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Purwakarta.	Agar Segera Melakukan Kajian Ulang Serta Pendataan Ulang Dan Pengupdatean Dengan Turun Langsung Kelapangan Jalan - Jalan Yang Ada Di Kabupaten Purwakarta Atau Dengan Adanya Pemutahiran Data Atau Validasi Data Baru Untuk Diperbaiki.	Pada tahun 2023 telah dilakukan pengkajian ulang mengenai data kondisi jalan dengan adanya sub kegiatan survey kondisi jalan dan hasilnya adalah kondisi jalan baik sebesar 429,268 KM atau 58,89%, kondisi jalan sedang sebesar 164,378 KM atau 22,60%, kondisi jalan rusak 80,372 KM atau 11,03%, dan kondisi jalan rusak berat sebesar 54,546 KM atau 7,48%.	Kondisi kemantapan jalan pada tahun 2023 adalah 81,49% atau sebesar 594,006 KM
	D	Jalan Sukajadi Kecamatan Bojong Yang Sekarang Rusak Berat Sepanjang 8 Kilometer.	Peningkatan Jalan Tersebut Sebagai Jalan Alternatif Menuju Berbagai Akses Ketempat Wisata Sehingga Aktifitas Perekonomian Masyarakat Tidak Terhambat.	Berdasarkan kondisi jalan tersebut memang dalam kondisi rusak berat oleh sebab itu memerlukan biaya yang sangat besar untuk penangangannya. Mengingat karena keterbatasan alokasi anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, untuk jalan tersebut belum bisa dilaksanakan penanganan	Akan kami usulkan untuk dianggarkan pada tahun 2024 dianggaran perubahan.

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				jalannya dengan peningkatan/rekonstruksi jalan ataupun pemeliharaan jalan. Disamping itu untuk lokasi tersebut terkendala oleh biaya pembebasan tanah untuk Pembangunan jalan.	
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	A	Terkait Beban Kerja Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Terlalu Berat.	Perubahan Tupoksi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.	Draft SOTK	Pembagian Beban Kerja dibagi menjadi 3 Bidang
	B	Peningkatan Inventarisir Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Perumahan Dengan Pihak Pengembang.	Terkait Serah Terima Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Perumahan Dengan Pihak Pengembang, Agar Bekerjasama Dengan Pihak Kejaksaan. Sebelumnya Diinventarisir Terlebih Dahulu, Perumahan Mana Sajakah Yang Akan Dikerjasamakan Dengan Pihak Kejaksaan Tersebut.	Sedang dilaksanakan pendataan perumahan sekabupaten purwakarta	Inventarisasi data perumahan sekabupaten purwakarta
	C	Masih Banyaknya Perumahan-Perumahan Yang Belum Menyerahkan Psu-Nya Ke Pemerintah Daerah, Prosentase Masih Dibawah 10% (Sepuluh Prosen) Dari Total Keseluruhan Perumahan Yang Berjumlah 183 (Seratus Delapan Puluh Tiga).	Harus Menjadi Perhatian Serius Dari Pemerintah Daerah Terutama Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Terkait Serah Terima Psu.	Menjalankan amanat pemendagri nomor 09 tahun 2009 dan perda nomor 02 tahun 2023	Terselesaikannya serah terima psu 10 Perumahan

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	D	Belum Optimalnya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh.	Peningkatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh, Terutama Di Daerah Munjul Dan Desa Gandasoli, Agar Lebih Diprioritaskan.	Mengadakan koraborasi dengan peningkatan pembangunan jalan lingkungan perumahan (munjul) dan jalan lingkungan menuju sekolah (gandasoli)	Mengurangi angka kumuh (Luasan kumuh di kabupaten purwakarta sesuai SK kumuh tahun 2022
	E	Belum Cermatnya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Anggaran Rp. 15,85 Milyar, Realisasi Rp. 2,64 Milyar (16,08%). Pemda Agar Lebih Cermat Dan Seksama Dalam Membuat Perencanaan Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan, Supaya Tidak Menghambat Proses Pembangunan. Tahun 2022 Belanja Modal Tanah Dianggarkan Rp. 19.094.000.000, Terdiri Dari: A. Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja 3 Milyar B. Tanah Persil Lainnya 15,4 Milyar C. Tanah Untuk Bangunan Air 684 Juta	Anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp19.094.000.000,00 pada tahun 2022 tidak dilaksanakan karena adanya Refokusing, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp2,64 Milyar atau sebesar 16,08% merupakan penyelesaian sisa hutan pada tahun 2021.	
Bappelitbangda	A	Belum Samanya Persepsi Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Purwakarta.	Harus Ada Persamaan Persepsi, Dan Rencana Antara Bappelitbangda Dengan Dinas Teknis. Termasuk Dinas Putr Contoh Sementara Kajian Atau Fakta di Lapangan Ternyata Yang Jadi Keluhan Masyarakat Adalah Kondisi Jalan, Berbanding Terbalik Dengan Data Hasil Penelitian Dinas. Berarti Kita Diatas Rata- Rata Kondisi Jalan Mantap Dan Layak. Perlu Sinkronisasi Kebijakan Kedepan Agar Langkah Dan Prioritas Programnya Jelas, Sehingga Fungsi Bappelitbangda Ini Sesuai.	• Perlu mengarahkan DPUTR untuk melakukan sinkronisasi data dan Update data, sehingga data tersedia telah sesuai dengan data dilapangan. • Melakukan komunikasi dan pemahaman kepada Masyarakat tentang kewenangan status jalan. • Bappelitbangda melalui forum musrenbang memfasilitasi usulan kegiatan infrastruktur ke dalam kamus usulan	• Terselesaikannya Permasalahan Perbedaan data Jalan • Pemetaan Status jalan, Jalan Provinsi dan jalan Kabupaten • Agar usulan infrastuktur dapat diakomodir oleh Perangkat Daerah Teknis didalam Renja nya masing-masing

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				musrenbang sehingga prioritas pembangunan di Perangkat Daerah terkait.	
	B	Pemerintah Daerah Agar Memiliki Komitmen Yang Tinggi Dalam Meningkatkan Inovasi Di Daerah Masing-Masing, Sehingga Bisa Mempercepat Akses Pembangunan Dan Mempermudah Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.	Inovasi Harus Dijadikan Sebagai Kekuatan Kemajuan. Kita Harus Terus Mengembangkan Cara-Cara Baru, Nilai-Nilai Baru. Jangan Sampai Kita Terjebak Dalam Rutinitas Yang Monoton Sehingga Menghambat Pelayanan Kepada Masyarakat.	Adanya surat edaran Bupati agar setiap perangkat daerah untuk melaporkan inovasinya dan di apresiasi dalam penghargaan PADI (Purwakarta dalam Inovasi), setiap inovasi juga diikutsertakan dalam KIJB (kompetisi Inovasi Jawa Barat) dan IGA (Innovative Government Award).	• Meningkatkan capaian indeks inovasi daerah, salah satumya melalui pendampingan pengisian indikator inovasi • Meningkatkan indeks daya saing daerah melalui ekosistem inovasi
Dinas Komunikasi Dan Informatika	A	Belum Optimalnya Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Sistem E-Government Dan Merawat Sistem E-Government.	Pemerintah Daerah Diharapkan Dapat Terus Mengembangkan Sistem E-Government Dan Merawat Sistem E-Government Yang Telah Dikembangkan Agar Dapat Membantu Mempermudah Masyarakat Maupun Pemerintah Itu Sendiri. Dan Pemerintah Daerah Diharapkan Selalu Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Digital Ini (E-Government).	Dengan membuat landasaran kebjakan terkait dengan pengembangan aplikasi dan mereviu kembali kebijakan terkait dengna mpbev SPBE agar selaras dan menjadi acuan dalam Roadmap pekasanaan pengembangan Sistem E-Government dilingkungan pemerintah kabupaten Purwakata	Terselesaokan dengan baik karena dengan adanya landasan dalam Perbup yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pengembangan E-Government akan lebih terarah dan meningkat sesuai dengna yang diharapkan
	B	Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Terhadap E-Government.	Pemerintah Daerah Diharapkan Selalu Mengadakan Sosialisasi Kepada Masyarakat Terhadap E-Government Ini Agar Masyarakat Dapat Mengetahui Dan Dengan Mudah Mengaksesnya Dengan Baik.	Dengan melakukan monitoring aplikasi yang dilaksankan setiap tahun dan melaksanakan audit aplikasi dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengembanganE-Government	Dengan dilakukan Auuidt aplikasi dan monev aplikasi dapat menov evaluasi dan bahan pengembangan selanjutnya dalam pengembangan aplikasi yang dapat meningkatkan

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
					pelayanan public ke masyarakat
Dinas Perhubungan	A	Peningkatan Monitoring Ke Setiap Kantong Parkir Yang Ada.	Untuk Mengantisipasi Adanya Kecurangan Dari Petugas Parkir, Agar Lebih Ditingkatkan Monitoring Ke Setiap Kantong Parkir Serta Pengelolaan Retribusi Parkir Agar Lebih Ditingkatkan Kembali.	• Meningkatkan pengawasan dan monitoring kinerja petugas parkir dengan melakukan pengawasan secara rutin/periodik ataupun melaksanakan inspeksi mendadak (sidak); • Mengevaluasi kinerja petugas parkir yang tidak memenuhi target • Secara tegas mencabut Surat Penugasan petugas parkir yang tidak kinerja nya tidak baik.	Dengan adanya peningkatan pengawasan, kinerja petugas parkir menjadi lebih baik
	B	Peningkatan Pelayanan Transportasi Yang Handal	Pemerintah Daerah Diharapkan Agar Dapat Menciptakan Penyelenggaraan Transportasi Yang Aman, Selamat, Nyaman, Tepat Waktu, Terpelihara, Mencukupi Kebutuhan, Menjangkau Seluruh Wilayah Kabupaten Serta Mampu Mendukung Pembangunan Kabupaten Purwakarta.	• Berupaya untuk meningkatkan pelayanan perizinan, yaitu perizinan trayek, perizinan parkir, serta terkait rekomendasi/ persetujuan dokumen andalalin; yaitu dengan meningkatkan/ menyempurnakan SOP dengan memanfaatkan pelayanan secara elektronik, serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas pelayanan; • Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan kompetensi petugas/ penguji, serta meningkatkan/	• Kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan pengujian kendaraan bermotor dapat ditingkatkan • Dengan adanya penyediaan perlengkapan jalan yang lebih baik, serta dengan penempatan petugas Gatur akan meningkatkan ketertiban, keamanan serta keselamatan lalu lintas; • Dengan adanya operasi pemeriksaan kendaraan dan pemberiaan bimbingan/ sosialisasi kepada

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				menyempurnakan SOP pelayanan; • Secara bertahap, sesuai dengan ketersediaan anggaran menyediakan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka, penerangan jalan, pengaman jalan dll); • Mengupayakan peningkatan keselamatan lalu lintas dengan melaksanakan operasi/pemeriksaan kelaikan kendaraan, serta memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat; • Berperan aktif menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas dengan menempatkan petugas untuk melaksanakan tugas penjagaan/pengaturan (gatur);	masyarakat diharapkan akan mereduksi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Dinas Lingkungan Hidup	A	Kurang Tertibnya Administrasi Pada Klinik Dan Rumah Sakit Bersalin Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Untuk Dilakukan Penertiban Prosedur Atau Administrasi Pada Klinik – Klinik Atau Rumah Sakit Bersalin.	Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Purwakarta ***wajib*** taat tehadap PermenLHk No.56/2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari Fasyankes.	Mengadakan pembinaan kepada Klinik dan Rumah Sakit Bersalin salah satunya dengan kegiatan Properda (Program Peningkatan Kinerja Perusahaan) tingkat Kabupaten kepada 8 (delapan) Rumah Sakit di Kabupaten Purwakarta

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	B	Pengelolaan Limbah Medis Yang Sesuai Prosedur Di Purwakarta Terlihat Belum Optimal Sehingga Dikhawatirkan Dapat Merugikan Masyarakat	Lebih Di Tingkatkan Dan Dikaji Dalam Pengelolaan Limbah Medis Baik Sarana Dan Prasananya.	Limbah Medis ***wajib*** dikelola sesuai PermenLHk No.56/2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari Fasyankes	Mengadakan ***sosialisasi*** kepada pelaku usaha penghasil limbah medis baik Rumah Sakit dan Klinik terkait pengelolaan limbah medis yang dihasilkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku bekerjasama dengan stakeholder.
	C	Dinas Lingkungan Hidup Harus Meningkatkan Pengawasan Terhadap Para Penghasil Limbah	Evaluasi Atas Peraturan Pada Perusahaan Yang Melanggar Terhadap Pengelolaan Limbah Serta Perijinan Amdal / Ukl-Upl Limbah B3, Domestic Dan Indrustri.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta melaksanakan pengawasan reguler dan insidental terhadap pelaku usaha yang memiliki perizinan lingkungan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta aturan teknis lainnya. Dalam pelaksanaannya, peraturan pemerintah tersebut telah diperinci dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta telah melaksanakan pengawasan reguler terhadap 49 pelaku usaha dan atau kegiatan dengan output: • 1 Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah • 8 teguran tertulis • 8 surat hasil pengawasan Selain itu, DLH Kab. Purwakarta juga melaksanakan pengawasan insidental berupa pelayanan atau respon terhadap 11 pengaduan masyarakat. Tujuan dari pengawasan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk: • Mengurangi Keresahan Masyarakat • Meminimalisir Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
					Lingkungan Hidup yang lebih besar • Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	A	Kurang Optimalnya Promosi Dan Tata Kelola Kepariwisataan Di Kabupaten Purwakarta	Peningkatan Pengembangan Wisata Alam, Religi Dan Kuliner Sehingga Dapat Menunjukkan Bahwa Purwakarta Memiliki Destinasi Wisata Alam, Religi Dan Kuliner Unggulan Yang Dapat Dibanggakan Dan Menarik Wisatawan.	1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 435/Kep.829-Disporaparbud/2018 Tentang Penetapan Obyek Wisata yang Berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019; 2. Keputusan Kepala Disporaparbud Nomor: 556/35/Pariwisata/2020 Tentang Jenis-jenis Daya Tarik Wisata yang Berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Purwakarta; 3. Terbentuknya Perda No.8 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Purwakarta 2022-2025; 4. Terbentuknya Perda No.1 Tahun 2023 Tentang Desa Wisata; 5. Terbentuknta Perda Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; 6. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 556/Kep.489-Disporaparbud/2022 Tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Purwakarta; 7. Keputusan Bupati Nomor 377 Tahun 2023 Tentang	1. Kabupaten Purwakarta telah memiliki Pedoman Pembangunan kepariwisataan 2022-2025; 2. Kejelasan Jenis-jenis Daya Tarik Wisata di Kabupaten Purwakarta; 3. Kabupaten Purwakarta telah memiliki Pedoman Desa Wisata; 4. Adanya Penetapan Kuliner Khas Purwakarta; 5. Adanya Pedoman Pengembangan Ekonomi Kreatif; 6. Terbentuknya Organisasi Mitra Pariwisata; 7. Terlahirnya Beberapa Desa Wisata di Kabupaten Purwakarta.

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Daerah Kabupaten Purwakarta; 8. Kuliner Sate Maranggi sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai Warisan Budaya Jawa Barat. 9. Keputusan Bupati Nomor: 558/Kep.330-Disporaparbud/2022 Tentang Penetapan "Rica Entog" sebagai Kuliner Khas Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta; 10. Keputusan Kepala Disporaparbud Nomor: 556/1017/Pariwisata/2022 Tanggal 10 Oktober 2022, Tentang Penetapan Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata (FK POKDARWIS) Kabupaten Purwakarta;	
	B	Disporaparbud Harus Memberikan Atensi Lebih Terhadap Sarana Dan Prasarana Olahraga Yang Menjadi Milik Pemerintah Daerah	Perbaikan Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Olahraga Yang Berstandar Nasional.	Menganggarkan Biaya Pemeliharaan untuk setiap sarana olahraga yang dikelola setiap tahun	Untuk menjaga agar kondisi sarana olahraga tetap terjaga baik
	C	Perhatian Pemerintah Daerah Untuk Para Atlet, Seperti Kesejahteraan Mereka Dapat Memotivasi Para Atlet Untuk Meraih Prestasi Dan	Peningkatan Kesejahteraan Dan Pengembangan Potensi Para Atlet Di Kabupaten Purwakarta, Sehingga Dapat Menoreh Lebih Banyak Prestasi Di Tingkat Provinsi, Nasional Maupun Dunia.	Memberikan kadeudeuh atau bonus bagi para atlet, pelatih dan official yang meraih prestasi di kejuaraan multi event	Agar memotivasi para olahragawan untuk meningkatkan prestasi dalam olaharaga

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Mengharumkan Nama Baik Purwakarta			
	D	Disporaparbud Direkomendasikan Untuk Menjalin Kerjasama Dengan Perhutani Perihal Pengelolaan Lahan Untuk Menjadi Lokasi Wisata	Pemerintah Daerah Agar Dapat Mengupayakan Pelepasaan Lahan Yang Dijadikan Wisata Dalam Wilayah Perhutani, Sehingga Dapat Dikelola Oleh Pemerintah Daerah;	1. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor: 119/102/Pem Tanggal 18 Januari 2021 Perihal Pengajuan Kerjasama; 2. Surat Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Barat Banten Nomor: 3/073.1/kum/Divre-Janten/2021 Tertanggal 15 Maret 2021 Perihal Pengajuan Kerjasama; 3. Surat Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Nomor: 2087/ 041.4/DIVREJANTEN/2022 Tertanggal 07 September 2022, Perihal Pengajuan Kerjasama Penyampaian Surat Kuasa Khusus Kesepakatan Bersama Tentang Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Wilayah Kabupaten Purwakarta dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta; 4. Surat Kepala Disporaparbud Nomor 556/2034/Pariwisata/ 2022 Tentang Lanjutan Pembahasan Kesepakatan Kerjasama Kegiatan Pemanfaatan Hutan; 5. Hasil-hasil Rapat Pembahasan Tanggal 6 Januari 2022, 6 April 2022, 12 Oktober 2022.	Belum terselesaikannya MoU antara Perum Perhutani KPH Purwakarta dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	E	Seleksi Pegawai Di Disporaparbud Untuk Mendapatkan Sdm Yang Mempunyai Kompetensi Di Bidang Kepemudaan	Untuk Bidang Kepemudaan Perlunya Penambahan Pegawai Yang Berwawasan Kepemudaan Kekinian Serta Peningkatan Pelatihan Dan Studi Banding Tentang Kepemudaan Ke Daerah-Daerah Yang Sudah Mapan.	1. Sub Koordinator/Pejabat Fungsional Pranata Humas 2. Penyuluh Kepemudaan 3. Analisis Kepemudaan 4. Analisis Kelembagaan	Untuk melengkapi dan memenuhi pelaksanaan peran dan fungsi bidang kepemudaan dalam mencapai target kinerj sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta
	F	Program Sadar Wisata Belum Terasa Dampaknya Di Kalangan Masyarakat	Peningkatan Sosialisasi Sadar Wisata Kepada Masyarakat, Karena Masih Banyak Masyarakat Yang Belum Sadar Wisata, Itu Ditunjukan Dengan Ego Sektoral Local;	1. Pada Tahun 2019 telah diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata di Seluruh Kecamatan di Kabupaten Purwakarta; 2. Dengan Kegiatan Sadar Wisata di Tahun 2019 hanya terlahir 1 Desa Wisata yaitu Kampung Kahuripan Tajur terletak di Desa Pasanggrahan Kecamatan Bojong. 3. Pada Tahun 2020-2022 Awal Kegiatan Sadar wisata terhenti dikarenakan Wabah Covid-19; 4. Pada Tahun 2022 Semester kedua dilaksanakan Kembali kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata di seluruh Desa atau 9 (Sembilan) Desa di Kecamatan Kirapedes; 5. Pada akhir semester kedua tahun 2022 dan Tahun 2023 telah terbentuk Desa Wisata Rintisan, yaitu : 6 Desa di Kec. Kiarapedes 1 Desa di Kec. Wanayasa 1 Desa di Kec. Cibatu	Secara fakta peningkatan kegiatan sosialisasi sadar wisata telah meningkatkan beberapa desa menjadi desa wisata; Mengingat jumlah Desa wisata yang masih relative sedikit maka Kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata masih harus di tingkatkan lagi.

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				2 Desa di Kec. Tegalwaru Ditambah 1 Desa di Kec. Bojong Maka Kabupaten Purwakarta telah memiliki 11 Desa Wisata melalui Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 556/Kep-Disporaparbud/2022 Tertanggal 30 Desember 2022.	
	G	Disporaparbud Dapat Menjalin Kerjasama Dengan Stakeholder Terkait Olahraga	Lebih Meningkatkan Komunikasi Dengan Semua Unsur Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Olahraga Dengan Koni/Korni;	Sinkronisasi program kegiatan dengan Koni/Korni dan NPCI sehingga informasi data sectoral terlengkapi Kalender of event dibuat berlandaskan setiap kegiatan yang telah disusun, dari kegiatan sinkronisasi dengan Dispora Provinsi yang tertuang dalam DPA	Koordinasi dan komunikasi akan ditingkatkan secara periodic dalam perumusan kebijakan keolahragaan
	H	Penjadwalan Agenda Rutinan Tahunan Dapat Memudahkan Disporaparbud Untuk Memitigasi Kegiatan Apa Saja Yang Harus Disiapkan Oleh Dinas.	Agar Dibuatkan Kalender Of Event Setiap Tahunnya Pada Cabang Olahraga, Sehingga Perencanaan Anggaran Tepat Sasaran;	Kalender of event dibuat berlandaskan setiap kegiatan yang telah disusun, dari kegiatan sinkronisasi dengan Dispora Provinsi yang tertuang dalam DPA	Agar persiapan kegiatan lebih matang dan terukur secara sistematis
	I	Peningkatan Kinerja Dan Inovasi Untuk Bidang Kebudayaan	Pada Bidang Kebudayaan Agar Meningkatkan Kinerja Dan Inovasi Dalam Mengembangkan Kebudayaan Di Kabupaten Purwakarta, Serta Melakukan Inventarisasi Peninggalan-Peninggalan Sejarah Yang Mengandung Nilai Budaya Asli Purwakarta.	• Penelitian terhadap ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) menuju penetapan menjadi CB (Cagar Budaya) • Inventarisasi, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan	• 14 ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) sudah ditetapkan menjadi CB (Cagar Budaya) • 3 WBTb (Warisan Budaya Takbenda) Indonesia

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan) • Pengusulan WBTb (Warisan Budaya Takbenda) ke Tingkat Provinsi • Pengembangan, Peningkatan dan pengelolaan museum	• 4 WBTb (Warisan Budaya Takbenda) Jawa Barat • 6 WBTb (Warisan Budaya Takbenda) dalam proses pengusulan • Pemberlakuan E-ticket ke museum
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	A	Fungsi Anggaran Untuk Sosialisasi Uhc Di Dinsosp3a Belum Memperlihatkan Output Yang Jelas	Optimalisasi Anggaran Untuk Sosialisasi Universal Health Coverage (Uhc) Kepada Masyarakat	Akan Berkoodinasi dengan Dinas Kesehatan dan Leading sector UHC dan memiliki anggaran Sosialisasi untuk Health Coverage (UHC) Kepada Masayarakat.	Masyarakat Kabupaten Purwakarta mendapatkan Jaminan Kesehatan
	B	Dinsosp3a Harus Memastikan Kemudahan Masyarakat Untuk Mengakses Layanan Kesehatan	Memastikan Setiap Warga Purwakarta Memiliki Akses Mudah Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Baik Promotif, Preventif, Kuratif, Dan Rehabilitatif, Bermutu Dengan Biaya Terjangkau.	Akan Berkoodinasi dengan Dinas Kesehatan dan mengakses layanan kesehatan, Namun Dinsos P3A memberikan fasilitasi Bantuan Sosial bagi masyarakat yang rentan miskin.	Terfasilitasinya Bantuan Sosial kepada Masyarakat
	C	Peningkatan Sdm Dan Kinerja Dinsosp3a Dampaknya Dapat Terasa Langsung Oleh Masyarakat	Dinas Sosial Dan P3a Agar Lebih Meningkatkan Kinerja, Sehingga Pencapaian Uhc Dapat Dipertahankan Dan Juga Berdampak Pada Kemudahan Pelayanan Dilapangan Sehingga Tidak Menghasilkan Uhc Saja Tetapi Dampaknya Bisa Dirasakan Langsung Oleh Masyarakat Purwakarta;	Dinsos P3A melaksanakan Rakor Evaluasi Kinerja Tiap 3 bulan sekali dalam memantau dan memeriksa target pencapaian Kinerja maupun Keuangan dan menyusun Rencana Aksi serta menyusun Kertas Kerja Manajemen Resiko dalam Pengendalian Target Kinerja di tiap sub Kegiatan.	Monev Pencapaian Kinerja Dan Manajemen Resiko
	D	Upaya Untuk Mempertahankan Status Uhc Harus Digalakan Oleh Dinsosp3a	Status Uhc Agar Terus Dipertahankan Dengan Melibatkan Stake Holder Dalam Keikutsertaan Bpjs Baik Di Pemerintah Daera, Perusahaan Maupun Pribadi.	Berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dalam rangka mempertahankan status UHC.	Dinsos P3A memfasilitasi layanan Pelaksanaan Pendataan Fakir Miskin melalui Mekanisme DTKS dan Mekanisme Verifikasi serta Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
Dinas Pendidikan	A	Rekomendasi Agar Pemerintah Daerah Dapat Memberikan Beasiswa Untuk Guru Paud Agar Memenuhi Syarat Kualifikasi Dan Kompentensi Sebagai Pengajar Sesuai Standar Yang Telah Ditetapkan	Untuk Dinas Pendidikan Agar Dialokasikan Beasiswa Untuk Guru Paud Bagi Yang Belum Bisa Melanjutkan Pendidikan Guna Memenuhi Kualifikasi Sebagai Pengajar Yang Kompeten.	Pada Tahun Anggaran 2024 telah dianggarkan beasiswa S1 untuk Guru PAUD dengan Total anggaran Rp.555.000.000,-/tahun (2 semester) Untuk 37 orang guru, serta beasiswa pendidikan Kesetaraan Paket C1 sebanyak 50 orang guru PAUD yang belum berijazah SMA/SMK/sederajat dengan anggaran Rp.1.870.000/orang/tahun	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Purwakarta melalui "Pertumbuhan Pendidik PAUD di S1/D-IV"
	B	Rekrutmen Pppk Dibawah Dinas Pendidikan Dengan Sistem Yang Selektif Dan Kompetitif Untuk Mendapatkan Sdm Yang Unggul	Diupayakan Penambahan Formasi Pppk Yang Profesional Di Kabupaten Purwkarta.	Pada tahun 2023 sudah diusulkan 1000 formasi Guru PPPK jenjang SD dan SMP dengan rincian sebagai berikut: ***(table tersedia di bawah)***	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Purwakarta melalui "Kecukupan Formasi Guru ASN"
	C	Tata Kelola Sarana Dan Prasarana Pendidikan Harus Dilaksanakan Sesuai Standar Sebagai Salah Satu Penyangga Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Dan Menengah Pertama Di Purwakarta	Perbaikan Sarana Dan Prasarana Sekolah-Sekolah Dan Pembangunan Bangunan Kelas Baru Yang Layak Dan Memadai Disesuaikan Dengan Produk Disekitarnya.	Mengajukan permohonan anggaran untuk kegiatan Rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) pada Tahun Anggaran Berikutnya	Untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas baru yang layak di sekolah sehingga dapat menciptakan suasan pembelajaran yang lebih kondusif.
Dinas Arsip Dan Perpustakaan	A	Belum Optimalnya Upaya Konservasi Arsip Sejarah Nusantara Yang Ada	Lakukan Recovery Ulang Pembaharuan Yang Progresif Terhadap Diorama Nusantara Dan Panyawangan;	Mengusulkan Kegiatan Pemeliharaan Gedung Diorama	Terpeliharanya Gedung Diorama yang Progresif

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Dalam Tanggung Jawab Dinas Arsip Dan Perpustakaan			
	B	Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam Penerapan Sistem Arsip Yang Handal Dan Terbaru	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Agar Meningkatkan Koordinasi Dengan Perangkat Daerah Lain Berkaitan Dengan Kearsipan Yang Standar Dan Mudah Diakses Dalam Bentuk Digital Maupun Manual;	Mengadakan Kegiatan Bimtek SRIKANDI di tiap OPD	Terlaksananya Implementasi Penggunan Aplikasi SRIKANDI di tiap OPD
	C	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Harus Berinisiatif Dalam Menjaga Depo-Depo Arsip	Depo-Depo Arsip Untuk Penyimpanan Fisik Dokumen Harus Selalu di Update Baik Pemisahan Maupun Pemilahan Umur Asrip Dan/Atau Arsip-Arsip Penting;	Melaksanakan Kegiatan Pemilahan daftar Arsip, Pengkode klasifikasian dan penyimpanan arsip	Tertatanya pengelolaan arsip yang telah dipilah berdasarkan umur arsip
	D	Upaya Peningkatan Daya Literasi Masyarakat Dapat Diwujudkan Di Era Disrupsi Media Sosial Ini	Motivasi Dan Inovasi Ditingkatkan Agar Minat Baca Masyarakat Tumbuh Kembali.	Memberikan Pelayanan Perpustakaan Keliling setiap hari kerja dengan 3 (tiga) armada Mobil Pelayanan ke 17 Kecamatan	Meningkatnya minat baca masyarakat
	E	Rekomendasi Pelayanan Arsip Digital Untuk Warga, Dengan Dinas Arsip Dan Perpustakaan Selaku Leading Sector	Wujudkan Pelayanan Arsip Digital Kepada Masyarakat Dengan Penyediaan Data Base Yang Cukup Menampung Data-Data Pribadi Yang Mudah, Akte Ktp, Dan Ijazah Sehingga Masyarakat Dengan Mudah Mengakses Dimanapun Tempatnya Dan Dimanapun Dibutuhkannya;	Membuat sitem informasi Pendaftaran dan Layanan akses arsip statis untuk masyarakat. Khusus data kependudukan berkordinasi dengan disdukcapil dalam akses system identitas kependudukan digital.	Terciptanya layanan akses arsip digital kepada masyarakat
	F	Rekomendasi Akselerasi Digitalisasi Perpustakaan	Digitalisasi Perpustakaan Sekaligus Sosialosasi Kepada Masyarakat Akan Pentingnya Membaca Terutama	Melaksanalan Kegiatan Perpustakaan Keliling sekaligus melaksanakan Kegiatan Sosialisasi tentang Keberadaan Perpustakaan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan membaca buku sejarah dan ketersediaan

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
			Sejarah-Sejarah Ketokohan Serta Teknologi Kekinian.	baik secara Konfensional ataupun Digital/Program TPBIS, dan mensosialisasikan lewat Media Sosial.	bacaan, referensi yang dibutuh kan.
Dinas Kesehatan	A	Dinas Kesehatan Selaku Leading Sector Pemerintah Daerah Dalam Hal Kesehatan, Harus Senantiasa Memperbaiki Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Semakin Hari Menuntut Pelayanan Yang Lebih Baik Lagi, Diantaranya Kebijakan Mengenai Penerima Pbi	Perbaikan Regulasi Penerima Bantuan Iuran Dari Pihak Pemerintah (Pbi).	Telah membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Tingkat Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 440.05/Kep.316-Dinkes/2022 dan Melaksanakan secara konsisten Pedoman Pengelolaan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) di Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 tahun 2022 serta Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor KPE.15.01/1139/Dinkes tanggal 13 April 2022 tentang Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Nasional di Kabupaten Purwakarta	Meningkatkan koordinasi dan perbaikan Regulasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau sekarang istilahnya Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja peserta Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Kabupaten Purwakarta
	B	Rekomendasi Untuk Selalu Memastikan Penyedia Layanan Kesehatan Menerapkan Standar Pelayanan Yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Koordinasi Dengan Tiap Rumah Sakit Di Kabupaten Purwakarta Agar Ditingkatkan.	Telah dilakukan pertemuan secara rutin dengan Rumah sakit serta pembinaan dan monitoring ke rumah sakit	Meningkatkan koordinasi dan kemitraan kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan
	C	Belum Adanya Solusi Tunggakan Bpjs,	Mencari Solusi Yang Terbaik Bagi Warga Yang Menunggak Bpjs.	Melakukan koordinasi secara rutin dengan Tim Koordinasi	Masalah kesehatan masyarakat/ Warga Yang

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Terkhusus Masyarakat Tidak Mampu		Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Tingkat Kabupaten Purwakarta maupun koodinasi langsung dengan perangkat daerah terkait seperti Dinas Sosial dan BKAD untuk menyelesaikan masyarakat/ Warga Yang Menunggak BPJS Kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan.	Menunggak BPJS Kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat tertangani.
	D	Pengawasan Terhadan Layanan Kesehatan, Agar Selalu Terpantau	Perbaikan Pelayanan Dasar Kesehatan Lebih Ditingkatkan.	Telah dilakukan pengawasan dan pembinaan secara langsung kepada layanan kesehatan dan kewajiban fasilitas kesehatan untuk menyampaikan secara berkala laporan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tersebut	Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sehingga selalu terpantau terhadap Layanan Kesehatan sehingga di fasilitas kesehatan sesuai standar
	E	Usaha-Usaha Untuk Mempertahankan Status Uhc Harus Selalu Digalakan Oleh Dinas Kesehatan	Status Uhc Terus Dipertahankan Bersama Dinas Terkait;	Meningkatkan koordinasi secara aktif dengan perangkat daerah terkait agar Status UHC Terus dipertahankan seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan BKAD	Dengan adanya koordinasi yang aktif dan efektif maka Status UHC Terus Dipertahankan Bersama Dinas Terkait;
	F	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Wujudkan Pelayanan Yang Sempurna, Karena Kesehatan Adalah Pelayanan Dasar Dan Menjadi Hak Rakyat Untuk Mendapat Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan fungsi puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan baik upaya kesehatan masyarakat (UKM) maupun upaya kesehatan perorangan (UKP) serta meningkatkan integrasi layanan primer (ILP)	Memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan sehingga dapat mewujudkan Pelayanan Yang Sempurna dan pemenuhan Kesehatan yang merata karena kesehatan adalah Pelayanan Dasar Dan

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
					Menjadi Hak Rakyat Untuk Mendapat Pelayanan Kesehatan
	G	Pencarian Solusi Atas Permasalahan Bpjs Masyarakat Miskin	Selesaikan Masalah Yang Tak Kunjung Selesai Seperti Tertolaknya Pasien, Tidak Aktif Nya Kartu Bpjs Karena Tunggakan Masyarakat Miskin	Meningkatkan koordinasi secara aktif dengan perangkat daerah terkait maupun BPJS kesehatan serta rumah sakit sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam pelayanan kesehatan seperti adanya pojok BPJS di setiap rumah sakit, adanya layanan 24 jam jabang tutuka sebagai pusat informasi terkait layanan kesehatan serta adanya layanan informasi di masing-masing badan/ perangkat daerah yang terkait BPJS kesehatan	Dengan adanya koordinasi dan informasi yang aktif dan efektif diharapkan tidak ada masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan Solusi Atas Permasalahan Bpjs Masyarakat Miskin
	H	Sosialisasi Pelayanan Kesehatan	Sosialisasikan Ke Rumah Sakit Bahwa Tidak Ada Penolakan Pasien Warga Masyarakat Purwakarta;	Telah dilakukan pertemuan secara rutin dengan Rumah sakit termasuk sosialisasi ke Rumah Sakit bahwa Tidak Ada Penolakan Pasien Warga Masyarakat Purwakarta;	Meningkatkan koordinasi dan kemitraan kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan
	I	Belum Terjalinnya Koordinasi Yang Ideal Antara Pemda Dan Penyedia Layanan Kesehatan	Upayakan Hubungan Yang Baik Antara Pemda Dengan Seluruh Rumah Sakit Agar Rumah Sakit Bisa Memberikan Jaminan Perawatan Kepada Siapapun Masyarakat Purwakarta Yang Datang Berobat.	Telah dilakukan pertemuan secara rutin dengan Rumah sakit dan membangun hubungan kemitraan yang sinergis termasuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang kesulitan dalam pembiayaan kesehatan seperti agar Rumah Sakit bisa bemberikan Jaminan Perawatan kepada siapapun masyarakat Purwakarta yang datang berobat.	Meningkatkan koordinasi dan kemitraan kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	A	Belum Idealnya Hubungan Pemerintah Daerah Dan Pebisnis Yang Dapat Memberikan Benefit Bagi Kedua Belah Pihak	Agar Menjalin Hubungan Baik Dengan Perusahaan-Perusahaan Yang Ada Di Purwakarta.	Selalu berupaya melakukan pendekatan, pembinaan ketenagakerjaan terhadap perusahaan juga selalu memberikan fasilitas mediasi antara pengusaha dan pekerjanya, termasuk	Agar tercegahnya perselisihan antara pengusaha dan pekerja sehingga tercipta iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan guna meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Purwakarta.
	B	Upaya Pembukaan Lapangan Kerja Yang Seluas-Luasnya Untuk Masyarakat Angkatan Kerja Di Purwakarta	Meningkatkan Upaya Dalam Menekan Angka Pengangguran Di Purwakarta.	Melaksanakan kegiatan JOB FAIR atau bursa kerja, membuka kelas kelas pelatihan berbasis kompetensi dan memberikan pelatihan keahlian agar pencari kerja dapat membuka usaha sendiri	Tahun 2023 selain memfasilitasi Perusahaan dalam membuka lowongan kerjanya melalui Disnakertrans secara personal, Disnakertrans juga memfasilitasi perusahaan dan pencari kerja dengan melaksanakan kegiatan bursa kerja atau Job Fair. Selain itu memberikan berbagai pelatihan yang dapat menjadi bekal keahlian pencari kerja untuk menjadi interpreuner juga selain menjadi pekerja pada industri.
	C	Belum Maksimalnya Upaya Pemanfaatan Tka	Agar Ada Tindak Lanjut Setelah Ada Perubahan Nomenklatur Perda Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Imta) Yang Semula Selama Beberapa Bulan Tidak Bisa Menarik Retribusi.	Telah diusulkan dan terbit Perda pengganti dan sejak 17 November 2022 yaitu Perda No. 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.	Dengan Perda No. 7 Tahun 2022, Pemda Kabupaten Purwakarta melalui Dinaskertrans dapat memungut kembali Retribusi Daerah RPTKA sebagai pengganti Retribusi IMTA. Sedangkan untuk beberapa bulan sebelumnya Perda tersebut terbit, Pemda tidak dapat memungutnya karena

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
					TKA sudah membayar kewajiban tersebut kepada pemerintah pusat.
	D	Pelatihan Kerja Yang Dilaksanakan Harus Memperlihatkan Hasil Yang Nyata Dan Dapat Dirasakan Langsung Oleh Masyarakat	Outcome Atau Hasil Akhir Dari Pelatihan Kerja Harus Terevaluasi Tingkat Keberhasilannya.	Pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pencari kerja dan dilakukan juga secara Mobile Training Unit atau mendatangi ke desa/kecamatan. Pelatihan yang dilakukan dikhususkan untuk membantu membuka peluang usaha mandiri dalam rangka menekan angka pengggangguran.	Membantu pencari kerja untuk lebih kreatif dan dapat membuka peluang usaha mandiri untuk menekan pengangguran.
Rsud Bayu Asih	A	Peningkatan Pelayanan Dasar Kesehatan Bagi Masyarakat	Agar Pelayanan Rsud Bayu Asih Ditingkatkan;	Untuk Pelayanan dasar di RSUD sudah terpenuhi dan akan terus ditingkatkan untuk pelayanan dasar lainnya	SDM dokter spesialis dan sub spesialis akan terus ditingkatkan dan beberapa inovasi untuk pelayanan dasar lebih di permudah dengan adanya antrian online, Customer Service yang siap melayani masyarakat.
	B	Belum Adanya Upaya Yang Nyata Dalam Penyelesaian Perkara Utang Piutang Rsud Bayu Asih	Tindak Lanjut Pelunasan Utang Jamkis Yang Senilai 14 Milyar;	Belum ada tindak lanjutnya karena harus berkoordinasi lagi dengan bagian keuangan agar segera di anggarkan	Tahun 2024 baru dianggarkan sebesar 3 M dan diperuntukan untuk Pembangunan sarana di RSUD Bayu Asih
	C	Akselerasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Blud	Peningkatan Kinerja Blud;	Sudah dilaksanakan secara simultan dengan adanya predikat Paripurna untuk RSUD Bayu Asih Purwakarta	Januari tahun 2023

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	D	Budaya 5s Harus Diterapkan Bagi Setiap Pegawai Rsud Bayu Asih, Agar Masyarakat Merasa Nyaman Dalam Menggunakan Fasilitas Kesehatan Rsud Bayu Asih	Pelatihan Sdm Ditingkatkan Agar Management Bayu Asih Menerapkan Pelayanan Standar Minimal Pelayanan Salam, Senyum Sapa Dan Salam Kepada Masyarakat Purwakarta Yang Datang Berobat Ke Rsud Bayu Asih;	Sudah dilaksanakan pelatihan service excellent untuk sdm RS	Oktober 2023
	E	Tidak Jelasnya Status Sopir Ambulance Desa Yang Dikhawatirkan Dapat Memengaruhi Kinerja Mereka	Agar Diupayakan Kesejahteraan Supir Ambulance Yang Bukan Dari Aparat Desa Dan Diperjelas Status Profesi Mereka.	Belum di tindak lanjuti, karena harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan	
Dinas Pangan Dan Pertanian	A	Konservasi Lahan Pertanian Yang Ada Di Purwakarta Harus Menjadi Perhatian Bagi Dinas Pangan Dan Pertanian Agar Tidak Terjadi Alih Fungsi Lahan Yang Masif Dilakukan	Lahan Pertanian Yang Rusak Agar Diperbaiki Secara Menyeluruh Guna Meningkatkan Produktifitas Pertanian;	berkoordinasi dengan UPTD alsintan dan fungsional penyuluhan mengenai penggunaan alsintan utk pengolahan lahan pertanian yg mengalami kerusakan dan melakukan penyuluhan kepada petani agar menggunakan pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah.	meningkatnya produktivitas pertanian dikarenakan telah dilakukan perbaikan pada lahan pertanian yg mengalami kerusakan.
	B	Dinas Pangan Dan Pertanian Diharapkan Mampu Untuk Memproduksi Produk Unggulan Khas Purwakarta	Ciptakan Produk Unggulan Di Bidang Ketahanan Pangan Yang Berkesinambungan Tidak Hanya Insidentil Namun Terprogram Dan Bisa Dibanggakan.	Berkoordinasi dengan bidang produksi komoditas tanaman pangan dan Perkebunan hortikultura serta UPTD balai benih, Alsin dan pembiayaan identifikasi pengembangan pangan lokal unggulan.	Memperoleh data potensi pangan lokal yang dapat dijadikan unggulan dalam pengolahan pangan lokal.

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
Badan Pendapatan Daerah	A	Belum Maksimalnya Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Yang Dapat Berdampak Langsung Terhadap Penerimaan Asli Daerah Di Purwakarta	Pajak Daerah Mempunyai Peran Penting Dalam Pembiayaan Pelaksanaan Pembangunan Di Daerah, Serta Dalam Melayani Masyarakat Kabupaten Purwakarta. Hal Ini Dapat Dilihat Dari Postur Apbd Pemerintah Kabupaten Purwakarta Yang Semakin Meningkat Prosentase Penerimaan Dari Sektor Pajak Daerah. Oleh Karena Itu, Penggalian Penerimaan Dari Sektor Pajak Daerah Harus Terus Dapat Dioptimalkan Dengan Berbagai Sarana. Misalnya Dengan Ekstensifikasi Pajak Daerah Yaitu Menambah Jumlah Wajib Pajak, Maupun Dengan Intensifikasi Pajak Daerah Yaitu Dengan Mengaktifkan Atau Menggali Potensi Pajak Dari Wajib Pajak Yang Sudah Ada.	A. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan pemutakhiran data khususnya pajak PBB P2 sebagai bentuk intensifikasi yang dilaksanakan oleh BAPENDA antara lain : • Pemutakhiran Objek Khusus PBB-P2 PT. Jasa Marga. • Pemutakhiran Buku 4,5 PBB-P2 6 perusahaan yaitu : 1. PT. Indo Bharat. 2. RSU Asri. 3. PT. Indofood CBP Sukses Makmur. 4. 3 Lokasi PT. Indorama. • Pemutakhiran NJOP Kawasan Jatiluhur Industrial Smart City (JISC). • Pendataan bangunan insidentil berdasarkan temuan lapangan. • Pendataan objek pajak PBB-P2 yang luas bumi dan bangunan pada SPPTnya nol. • Pendataan objek pajak PBB-P2 yang digunakan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) berjumlah 42.241 NOP. • Penyesuaian NJOP Perumahan sebanyak 46.052 NOP. • Pendataan nilai wajar atas bumi se-Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan capaian BPHTB.	• Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah • Penyesuaian nilai NJOP sesuai kondisi riil • Pemutakhiran data pajak daerah

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				B. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah Lainnya: • Jumlah potensi wajib pajak (WP) baru hasil ekstensifikasi: 1. Pajak Hotel (Kos dan Villa) : 21 WP 2. Pajak Restoran (Rumah Makan dan Catering): 95 WP 3. Pajak Hiburan: 22 WP 4. Pajak Reklame: 121 WP 5. Pajak PPJ: 19 WP 6. Pajak Parkir: 32 WP 7. Pajak Air Tanah: 21 WP 8. Pajak MBLB: 1 WP • Intensifikasi yang dilaksanakan pada wajib pajak daerah lainnya yakni : Pajak Hotel (Villa dan Rumah Kos), Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.	
	B	Belum Optimalnya Pendataan Ulang Objek Pajak Dengan Metode Yang Handal Dan Terbaru	Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Korupsi, Serta Dalam Rangka Mendukung Program Korsupgah Kpk Ri, Pemerintah Daerah Perlu Melakukan Langkah-Langkah, Diantaranya Inovasi Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Dengan Melakukan Pendataan Ulang Objek Pajak Yang Handal Dan Terbaru.	Inovasi yang di buat oleh Bapenda selain untuk kemudahan dalam pembayaran pajak inovasi itu juga merupakan Langkah yang di ambil oleh Bapenda dalam pencegahan korupsi	Kontak langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak terbatasi dengan adanya aplikasi dan itu merupakan salah satu upaya dalam pencegahan korupsi
	C	Peningkatan Kemudahan Membayar Pajak	Selanjutnya, Pemerintah Daerah Agar Terus Meningkatkan Kemudahan Bagi Masyarakat Yang Ingin Membayar	• Inovasi yang terus dibuat oleh BAPENDA merupakan penerapan digitalisasi untuk	• Mempermudah proses pembayaran pajak daerah khususnya Pajak PBB-P2

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Daerah Bagi Semua Kalangan Masyarakat	Pajak Daerah Secara Efektif Dan Efisien, Melalui Penerapan Digitalisasi Dalam Proses Pembayaran Pajak Daerah, Sehingga Dapat Mempercepat Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Purwakarta.	mempermudah proses pembayaran pajak, salah satu contohnya aplikasi BATOK SICEUPOL, BATOK SICEUPOL merupakan aplikasi yang digagas untuk mempermudah proses pembayaran pajak PBB P2. • Melakukan operasi sisir kecamatan/desa PBB-P2 yang telah ditentukan, operasi ini dalam pelaksanaannya memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran (jemput bola).	• Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Sektor Pajak PBB-P2
	D	Rekomendasi Peningkatan Sdm Internal Bapenda Dengan Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Selain Itu, Dari Sisi Internal Bapenda Harus Diperkuat Lagi Sumber Daya Manusia Nya. Artinya, Sumber Daya Manusia Tersebut Harus Memiliki Integritas Yang Berisi Kejujuran, Tanggung Jawab, Disiplin Serta Mampu Bersaing Untuk Berinovasi Di Era Digitalisasi Ini	Pada tahun 2023 telah dilaksanakan: 1. Diklat Pengelolaan penata usahaan keuangan dan pengelolaan aset daerah 2. Evaluasi kinerja pegawai 3. Bimbingan teknis analisa dan pengembangan pajak daerah 4. Bimbingan teknis penagihan pajak daerah 5. Bimbingan teknis pelayanan pajak daerah	Meningkatkan kapasitas, dan kompetensi pegawai serta meningkatkan integritas yang berisi kejujuran, tanggung jawab, disiplin serta mampu bersaing untuk berinovasi di era digitalisasi
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	A	Belum Optimalnya Fungsi Perencanaan Agar Terdeskripsi Secara Rinci Mengenai Keuangan	Dalam Mengelola Aset Daerah Demi Menunjang Pendapatan Asli Daerah, Perlu Adanya Perencanaan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Memperoleh Gambaran Kebutuhan Aset Serta Dapat	Perencanaan Aset Daerah dilakukan setiap tahun melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, baik pengadaan maupun pemeliharaan,	Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kebutuhan, sehingga efisiensi dan

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Dan Aset Di Purwakarta	Menjaga Dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat.	sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran setiap perangkat daerah dalam pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.	efektivitas pengelolaan barang milik daerah meningkat.
	B	Peninjauan Terhadap Sistem Informasi Data Aset Agar Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Transparan Dan Akuntabel	Pemerintah Daerah Perlu Melakukan Pemantauan Lebih Lanjut Mengenai Sistem Informasi Data Aset Pemerintah, Agar Meminimalisir Terjadinya Permasalahan Data Aset. Dengan Sistem Informasi Data Yang Baik Dan Lengkap, Pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah Akan Lebih Mudah Dan Cepat, Serta Dalam Pembuatan Penyusunan Laporan Menjadi Lebih Mudah Dan Informatif. Pemerintah Daerah Juga Harus Memperhatikan Strategi Dan Kebijakan Yang Tepat Terkait Pengelolaan Aset Daerah Agar Dapat Menentukan Langkah-Langkah Selanjutnya Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah.	Pengolahan Data Aset Tetap melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah - Barang Milik Daerah (Simda BMD) telah dilaksanakan Pemerintah Daerah secara berkesinambungan. Simda BMD digunakan pula sebagai kontrol dalam realisasi anggaran belanja modal melalui kewajiban perangkat daerah untuk melakukan input data belanja modal sebelum pencairan atas anggaran belanja modal tersebut dapat dilaksanakan.	Pencatatan terhadap barang milik daerah yang diperoleh Pemerintah Daerah dapat terlaksana sesuai dengan dokumen pengadaannya, sehingga laporan realisasi anggaran belanja modal sesuai dengan barang milik daerah yang diperoleh.
	C	Peningkatan Koordinasi Dengan Stakeholder Terkait Aset Pemerintah Daerah Yang Berupa Tanah Dan Bangunan	Dalam Hal Sertifikasi Aset Tanah, Upaya Penyelesaian Dengan Cara Koordinasi Intensif Dengan Bpn, Kemudian Melakukan Pendataan, Penelusuran Riwayat Tanah Dan Pengukuran Pra Pendaftaran.	Pelaksanaan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah telah diawali dengan penetapan bidang-bidang yang menjadi target sertifikasi serta memiliki kategori *clean and clear* sesuai kesepakatan bersama Koordina-tor Wilayah *Monitoring Center for Prevention*, Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.	

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				Bidang-bidang yang menjadi target sertifikasi kemudian ditelusuri riwayat administrasi dan perolehannya, dilengkapi berkas penguasaan fisiknya, sekaligus dilakukan pengukuran pra pendaftaran dan dipasangi patok batas sebagai bahan pelaksanaan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Purwakarta setelah dilakukan pendaftaran.	
	D	Pemerintah Daerah Diharapkan Tidak Mengabaikan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah	Dalam Tata Kelola Keuangan Agar Dikelola Secara Tertib, Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan, Tanggung Jawab Serta Memperhatikan Asas Keadilan, Kepatutan Dan Manfaat.	Pengeloaan Keuangan Daerah telah dikelola secara tertib dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan dan Tangungjawab serta dengan memperhatikan Asas Keadilan, Kepatutan Dan Manfaat. Dimulai dari proses Penganggaran, Penatausahaan sampai dengan Pelaporan. Dalam pelaksanaan nya Untuk mendukung hal tersebut telah diterbitkan serangkaian peraturan daerah, peraturan Bupati, dan keputusan Bupati tentang pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.	Proses penganggaran dilakukan secara cermat sesuai dengan kode rekening yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	E	Pemerintah Daerah Juga Diharapkan Untuk Selalu Melakukan Pemantauan Terhadap Aset-Aset Pemerintah Daerah Serta Memastikan Keberadaanya	Penelusuran Aset Tetap Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Senilai Rp. 45 Milyar Harus Terus Dilakukan.	Penelusuran terhadap aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dilakukan melalui kegiatan inventarisasi barang milik daerah, baik melalui sub kegiatan inventarisasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah maupun secara mandiri oleh masing-masing perangkat daerah.	Riwayat barang milik daerah dapat ditelusuri dan diinventarisasi serta dapat direncanakan tindakan atas hasil inventarisasinya.
Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian	A	Minimnya Sosialisasi Dengan Perangkat Daerah Terkait Seperti Kecamatan, Desa/Kelurahan Terkait Bantuan Untuk Masyarakat Yang Berhak	Dalam Hal Penyebaran Bantuan Tunai Langsung, Perangkat Daerah Terkait Mensosialisasikannya Terlebih Dahulu Secara Menyeluruh Ke Semua Kecamatan, Agar Persyaratan Untuk Mendapatkan Bantuan Tersebut Tersosialisasikan Kepada Masyarakat Secara Langsung, Sehingga Semua Masyarakat Yang Sesuai Kriteria Dapat Mendapatkan Haknya, Dan Tidak Ada Kecemburuan Sosial.	• Informasi pendaftaran melalui Online dengan persyaratan yang jelas • Sosialisasi sudah disampaikan kepada Kasi Ekbang Kecamatan-kecamatan.	Akan lebih digencarkan lagi sosialisasi secara menyeluruh
	B	Metode Funding Untuk Ukm Harus Ditinjau Ulang Dan Diperbaiki Lagi	Dalam Hal Tata Cara Penghimpunan Data Untuk Penerima Bantuan (Dalam Hal Ini Pelaku Ukm), Data Terkait Agar Langsung Didapat Dari Pihak Kepala Desa Atau Lurah, Karena Tidak Semua Masyarakat Dapat Menjangkau Atau Memahami Pendaftaran Secara Online.	Pengimpunan Data sudah sesuai dengan aturan yang ada, dimana data tersebut diterima melalui Kasi Ekbang ditiap Kecamatan Kecamatan atas usulan dari kepala Desa Masing-Masing.	Untuk Mempermudah dalam pengalokasian Bantuan, agar tiap desa untuk membentuk Kelompok UMKM (sesuai Peraturan Perundang-undangan)
	C	Rekomendasi Untuk Mengadopsi Program Jabar One Product	Inspirasi Dari Program Jabar One Product Bisa Menjadi Referensi Membuat Program Kedepannya, Tidak Banyak Bentuk Bantuannya, Akan Tetapi Jelas Arah Dan Sasaran Serta Outputnya, Sehingga Pemberi Bantuan	Dengan melakukan penataan Para Pelaku Usaha Mikro dengan Membentuk Kelompok Kelompok Usaha dengan Jenis produk yang sama sesuai dengan Perda Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Pembinaan,	Mempermudah Pembinaan yang disesuaikan dengan Jenis Produk, Menumbuhkan kewirausahaan sehingga Pelaku UMKM bias Naik Kelas

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
			Benar-Benar Langsung Turun Dan Melihat Langsung Kondisi Penerima Bantuan Tersebut, Selanjutnya Dilakukan Monitoring Dan Evaluasi.	Pemerdayaan Perlindungan dan Pengawasan Perkoperasian dan usaha Mikro.	
	D	Fokus Pada Perencanaan Sebelum Melaksanakan Kegiatan	Setiap Program Atau Kegiatan Yang Dibuat, Perencanaan Dan Outputnya Harus Jelas, Kebermanfaatan Untuk Masyarakatnya Harus Terasa Pula, Sehingga Anggaran Terserap Secara Efektif Dan Efisien.	Program dan Kegiatan yang dibuat Perencanaan sudah disesuaikan dengan Target Indikator di Renstra.	Akan lebih Mengoptimalkan Anggaran yang ada sehingga efektf dan Efisien
Dinas Pangan Dan Pertanian	A	Minimnya Perhatian Terhadap Eksistensi Petani Dikhawatirkan Dapat Berdampak Terhadap Pertanian Di Purwakarta	Pemerintah Daerah Agar Memfokuskan Untuk Memakmurkan Petani Dan Regenerasi, Karena Mereka Adalah Pahlawan Yang Menjaga Ketahanan Pangan Bangsa. Berikanlah Petani Edukasi, Pendampingan, Agar Nanti Ada Regenerasi Dalam Pengerjaan Lahan Sawah Yang Ada Di Kabupaten Purwakarta.	Mohon dukungannya untuk penambahan SDM penyuluh di lapangan dan berkaitan dengan petani milenial telah dibuatkan forum yang ditengahi oleh dinas pangan dan pertanian yang dicurahkan oleh Keputusan kepala dinas pangan dan pertanian kepengurusan forum petani milenial diserahkan oleh petani milenial usia 19 tahun s/d 30 tahun.	Agar sejalan dengan penambahan penyuluh pertanian di lapangan
	B	Transparansi Dan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan-Bantuan Bagi Petani Yang Lebih Tepat Sasaran	Pemerintah Daerah Menjadi Media Penyalur Bantuan Benih-Benih Varietas Unggul Bagi Para Petani Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Lingkup Pertanian Dan Demi Menunjang Produktivitas Petani Khususnya Di Kabupaten Purwakarta. Penyaluran Benih Varietas Unggul Ini Harus Tepat Sasaran, Sesuaikan Dengan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Petani Setempat Dengan Bantuan Varietas Yang	Bantuan Benih Tanaman Pangan meliputi program di komoditas padi, jagung dan kedelai. Varietas benih tanaman pangan yang disalurkan menyesuaikan program/kegiatan yang diluncurkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ada varietas benih tanaman yang merupakan paket rekomendasi program, dan ada yang merupakan pilihan petani.	Tujuan masalah yang diselesaikan dalam program bantuan benih varietas unggul tanaman pangan di antaranya: • untuk peningkatan luas panen padi melalui peningkatan indeks pertanaman (IP 400) (varietas direkomendasikan jenis super genjah/umur sangat pendek)

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
			Diajukan Atau Diperjuangkan Dinas Pangan Dan Pertanian.	Untuk komoditas padi didukung Pemerintah (melalui APBN) dan Pemerintah Daerah melalui (APBD Sub Kegiatan pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman). Kegiatan yang diluncurkan Pemerintah di antaranya pada komoditas padi terdapat kegiatan: 1)Padi Kaya Gizi/Biofortifikasi (untuk penanganan stunting) dengan luas bantuan 2.745 hektar, varietas yang ada adalah Inpari IR Nutri Zink. 2)Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman (IP 400) Padi dengan luas bantuan 1.401 hektar, varietas yang ditawarkan jenis super genjah Cakrabuana Agritan, Inpari Sidenuk dan Padjadjaran Agritan. 3)Budidaya Padi Ramah Lingkungan seluas 1.197 hektar, 4)Bantuan Benih Padi Inbrida (Reguler) seluas 2.400 hektar, dan 5)Bantuan Benih Padi Gernas El Nino seluas 2.160 hektar, varietas yang digunakan umumnya Inpari 32 yang disukai petani. 6)Optimalisasi Percepatan Peningkatan Produksi Padi seluas 50 hektar di lahan tebangan dengan varietas padi Inpari 42. 7)Budidaya Padi Hara Berimbang dengan luas bantuan 500 hektar, varietas yang digunakan IPB 3S, IPB 9G dan Inpari 48. Jumlah total bantuan benih yang	• untuk peningkatan produktivitas padi (varietas unggul baru, bersertifikat/berlabel) • untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman/penanganan dampak lingkungan ekstrim (varietas direkomendasikan beragam) • untuk diversifikasi produk tanaman pangan (yaitu ada 11 varietas unggul padi, 2 varietas unggul jagung dan 1 varietas unggul kedelai) untuk penanganan masalah kurang gizi dan stunting (varietas rekomendasi Inpadi IR Nutri Zink, yang kaya kandungan gizi unsur zink yang bermanfaat untuk perkembangan otak dan pertumbuhan badan)

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				disalurkan Pemerintah (APBN) di Kabupaten Purwakarta selama tahun 2023 sebanyak 261.325 kilogram seluas 10.453 hektar, atau mencapai 58,2 % dari luas baku sawah Purwakarta (17.970 hektar). Dari luas tersebut varietas rekomendasi program seluas 4.696 hektar (44,9%) dan varietas preferensi petani (umumnya Inpari 32) seluas 5.757 hektar (55,1%). Kegiatan yang diluncurkan Pemerintah Daerah pada sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (APBD) menggunakan varietas padi terbaru yaitu Inpari 49 sebanyak 185 hektar (4.625 kilogram benih). Bantuan Pemerintah (APBN) untuk program komoditas Jagung seluas 370 hektar dengan varietas Betras 1 dan RS002, dari APBD Pemerintah Kabupaten seluas 10 hektar varietas Betras 3. Untuk komoditas kedelai seluas 230 hektar dengan varietas Anjasmoro berasal dari bantuan Pemerintah (APBN).	
	C	Fungsi Perencanaan Harus Lebih Diperhatikan Lagi	Setiap Program Atau Kegiatan Yang Dibuat, Perencanaan Dan Outputnya Harus Jelas, Kebermanfaatan Untuk	Adanya perencanaan anggaran yang dilakukan dengan tepat akan membantu pengalokasian dana	menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Untuk Mencapai Hasil Kinerja Yang Ditargertkan	Masyarakatnya Harus Terasa Pula, Sehingga Anggaran Terserap Secara Efektif Dan Efisien.	yang lebih tepat sasaran, Anggaran sendiri merupakan sebuah pernyataan yang terkait dengan adanya estimasi kinerja yang nantinya hendak dicapai dalam periode tertentu yang sudah ditetapkan Didalam konstruksi APBD sendiri, belanja pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan nasional akan bisa didapatkan dengan adanya pembelanjaan yang tepat sasaran.	fungsi yaitu proses pengontrolan dan evaluasi.
Dinas Peternakan Dan Perikanan	A	Dinas Peternakan Dan Perikanan Selaku Leading Sector Dalam Hal Peningkatan Produksi Harus Mampu Menjaga Ketersediaan Bahan Pangan Ternak Dan Ikan	Pemerintah Daerah Agar Mengoptimalkan Program Atau Kegiatan Dalam Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Nilai Tambah Produk Peternakan Dan Perikanan, Yaitu Dengan Meningkatkan Ketersediaan Bahan Pangan Asal Ternak Dan Ikan Secara Berkesinambungan, Utamanya Diarahkan Untuk Meningkatkan Produksi Daging, Telur, Susu Dan Ikan Konsumsi. Produk Hasil Ternak Tersebut Tidak Hanya Sebatas Bahan Baku Tetapi Juga Diupayakan Memperoleh Sentuhan Pasca Panen Sehingga Memberikan Nilai Tambah Bagi Pelaku Usaha Peternakan Dan Perikanan.	Sebagai bentuk tindak lanjut untuk meningkatkan produksi perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan terus meningkatkan persediaan benih ikan melalui Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) serta peningkatan sarana dan prasarana pembudidaya ikan. Sedangkan untuk menindaklanjuti peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk peternakan dan perikanan, Dinas Perikanan dan Peternakan terus meningkatkan baik bantuan kepada masyarakat maupun kegiatan yang sifatnya meningkatkan diservikasi pangan. Guna meningkatkan nilai dan mengoptimalkan pemanfaatan produksi perikanan adalah dengan pengembangan produk bernilai tambah berupa olahan ikan,	Peningkatan produksi perikanan, baik perikanan budidaya maupun tangkap. Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan jumlah unit pengolah dan pemasar hasil perikanan, meningkatkan jumlah kelompok/UKM yang bergerak dibidang pengolahan ikan serta menciptakan produksi olahan ikan yang lebih variatif. Peningkatan populasi ternak serta terjaminnya keamanan pangan asal hewan (daging, telur dan susu).

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				diantaranya adalah fillet ikan patin, ikan asin fermentasi dan ekstrak ikan gabus. Pelaksanaan pelatihan/demo dengan peserta pelatihan UKM yang bergerak dibidang makanan/kuliner. Dilakukan juga pengambilan sample hasil olahan para UKM untuk di uji proksimat. Sehingga hasil uji tersebut dapat dicantumkan pada label kemasan produk, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan omset penjualan. Selain itu Dinas Perikanan dan Peternakan berhasil menyulap tanaman eceng gondok yang meresahkan masyarakat di Waduk Jatiluhur Purwakarta menjadi sebuah produk yang menghasilkan secara ekonomi. Bahkan pemasaran produk kerajinan eceng gondok dari Purwakarta ini sudah sampai belahan bumi Eropa. Pada saat ini kelompok pengrajin eceng gondok di Desa Kutamanah Kecamatann Sukasari terus mendapatkan pembinaan dari Dinas Perikanan dan Peternakan. Sedangkan untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan asal ternak, Dinas Perikanan dan peternakan terus berusaha	

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				meningkatkan populasi ternak melalui Inseminasi Buatan (IB) dan mulai diperkenalkannya teknologi Transfer Embrio (TE) pada ternak sapi. Upaya lain yaitu sentuhan pasca panen untuk memberikan nilai tambah bagi para peternak adalah salah satunya dengan melakukan survey harga pasar, pembinaan usaha peternakan berupa dukungan packaging/kemasan olahan hasil ternak, penyebarlusan informasi promosi produksi ternak dan produk hasil peternakan melalui pemanfaatan teknologi Pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat lebih beragam tidak hanya bantuan ternak, tetapi sudah berupa telur dan susu kepada mayarakat. Pemberian hasil ternak berupa telur difokuskan untuk program penanggulangan Stunting di 2023. Dari segi kesehatan hewan Dnas Perikanan dan Peternakan terus meningkatkan penanganan penyakit gangguan reproduksi dan Sinkronisasi birahi sebagai dukungan peningkatan produksi ternak serta Pelayanan konsultasi kesehatan hewan dengan aplikasi cekatan (cek kesehatan ternak dan hewan) dalam rangka kewaspadaan	

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				dini terhadap penyakit hewan menular zoonosis. Guna keamanan pangan Dinas Perikanan dan Peternakan terus meningkatkan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan (RPH). Tahun 2023 UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) sudah memiliki Nilai Kontrol Veteriner (NKV). NKV merupakan sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. Pengawasan terhadap Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH) terus ditingkatkan, sehingga masyarakat mendapatkan jaminan keamanan pangan asal hewan yang ASUH atau aman, sehat, utuh, dan halal (perlindungan kesehatan).	
	B	Dinas Peternakan Dan Perikanan Juga Harus Mampu Menciptakan Kompetisi Yang Sehat Antar Peternak Dan Akan Berdampak Bagi Masyarakat Selaku Konsumen Yang Diuntungkan Dengan Mendapatkan Bahan	Peningkatan Daya Saing Dan Penguatan Sentra Komoditas Unggulan Untuk Mengembangkan Komoditas Ternak Dan Ikan Yang Potensial Menjadi Unggulan Kabupaten Purwakarta, Mengembangkan Beberapa Komoditas Ternak Dan Ikan Yang Menjadi Unggulan Di Beberapa Wilayah. Produk Mentah Maupun Olahan Di Wilayah Pengembangan	Peningkatan daya saing dan penguatan sentra komoditas unggulan baik perikanan maupun peternakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan sudah sejak lama dilaksanakan, salah satunya adalah Peresmian Kampung Perikanan Budidaya. Pengembangan Kampung Perikanan Budidaya berbasis	Terciptanya komoditas unggulan di daerah mengikutsertakan partisipasi masyarakat sebagai penggerak utama, sehingga masyarakat setempat dapat menjadikan usaha baik perikanan mapupun peternakan sebagai sumber penghasilan utama.

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Pangan Yang Berkualitas	Komoditas Unggulan Tidak Saja Dipacu Untuk Peningkatan Kuantitas Produksinya Tetapi Juga Dari Sisi Kualitasnya. Diharapkan Dengan Produksi Yang Tinggi Dengan Kualitas Yang Baik, Produk Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Purwakarta Dapat Bersaing Di Tingkat Regional Maupun Nasional.	kearifan lokal di Desa Nagrog, Kecamatan Wayanasa, Kabupaten Purwakarta yang telah diresmikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). Jenis ikan yang dipilih adalah ikan nila. Hal ini karena pangsa pasar dan kondisi lingkungan di Purwakarta dinilai tepat untuk membudidayakan ikan nila. Sementara itu peningkatan komoditas unggulan ternak sapi terus ditingkatkan melalui pelayanan Inseminasi Buatan (IB), sesuai Kawasan Usaha Peternakan Jawa Barat 2022-2026 komoditas unggulan ternak di Kabupaten Purwakarta adalah sapi meliputi Kecamatan Cibatu, Campaka Darangdan, Tegalwaru. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah agar mampu berdaya saing, Dinas Perikanan dan Peternakan melakukan upaya penguatan kualitas pakan ternak dengan Pembangunan Gudang pakan di tahun 2023. Karena salah satu faktor daging ternak yang berkualitas ditentukan oleh kualitas pakan yang diberikan.	
	C	Belum Maksimalnya Penggunaan Teknologi	Penguatan Sistem Agribisnis Serta Penerapan Hasil Inovasi Teknologi Tepat Guna. Pengembangan	Sebagai tindak lanjut rekomendasi penerapan hasil inovasi teknologi tepat guna selain terus melakukan	Terciptanya penerapan hasil inovasi tepat guna secara terpadu dari hulu-hilir

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Pangan Di Kabupaten Purwakarta	Peternakan Dan Perikanan di Kabupaten Purwakarta Diarahkan Kepada Suatu Sistem Usaha Terpadu Hulu-Hilir Dengan Sentuhan Teknologi Tepat Guna	Inseminasi Buatan (IB) sebagai bentuk upaya peningkatan populasi ternak, Dinas Perikanan dan Peternakan juga memanfaatkan teknologi proses hidrolisis enzimatis pembakaran batok kelapa dengan kandungan karbonil dan phenolic complex untuk menghilangkan bau amoniak terutama banyak digunakan oleh para peternak komoditi ayam dengan caraq disemprotkan pada sekam atau kotoran ternak langsung, selain itu asap cair ini mampu digunakan sebagai desifektan, pengawet makananan seperti daging, mengusir lalat, tikus dan bisa sebagai pupuk. Selain itu sebagai upaya promosi produksi ternak dan olahan ternak, Dinas Perikanan dan Peternakan memanfaatkan penggunaan aplikasi Simental Montok di tahun 2023 sebagai layanan komunikasi/konsultasi, layanan administrasi, serta informasi lapak jual beli. KKP meluncurkan program korporasi untuk pembudidaya dan nelayan. Hal tersebut segera ditindaklanjut oleh pemerintah daerah Purwakarta melalui Dinas Perikanan dan Peternakan dengan menyusun rencana korporasi dan mendukung	

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				pembentukan koperasi pembudidaya di beberapa kecamatan dengan komoditas berbeda yaitu lele dan nila. Kegiatan korporasi akan mendorong usaha agribisnis dari hulu (pembenihan), budidaya untuk produk konsumsi dan pengolahan ikan serta pakan di hilir. Penggunaan teknologi pangan khususnya perikanan (ikan gabus) yaitu dengan mengembangkan ekstrak albumin yang berasal dari ikan gabus. Ekstrak albumin dari ikan gabus mempunyai pangsa pasar yang cukup besar dan dibutuhkan untuk kesehatan. Produk sisa dari ekstrak tersebut dapat dimanfaatkan untuk tepung dan abon. Kebutuhan ikan gabus untuk industri tersebut akan mendorong perkembangan budidaya ikan gabus di masyarakat. Sementara ini gabus berasal dari perairan umum	
	D	Belum Jelasnya Rincian Kegiatan Yang Berakibat Tidak Jelasnya Hasil Kinerja Yang Dihasilkan	Setiap Program Atau Kegiatan Yang Dibuat, Perencanaan Dan Outputnya Harus Jelas, Kebermanfaatan Untuk Masyarakatnya Harus Terasa Pula, Sehingga Anggaran Terserap Secara Efektif Dan Efisien.	Program dan Kegiatan yang dibuat Perencanaan sudah disesuaikan dengan Target Indikator di Renstra. Kebermanfaatan untuk masyarakat dievaluasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Output dari setiap program dan	Sasaran program dan kegiatan yang dibuat, perencanaan outputnya jelas dan manfaatnya dapat langsung di rasakan oleh masyarakat

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
				kegiatan melalui proses usulan di Tingkat Desa yang tentunya disesuaikan dengan pagu anggaran dan potensi kewilayahan. Hal ini untuk mendorong pengembangan sub sektor peternakan sesuai potensi kewilayahan baik itu pembibitan maupun budidaya ternak. Sehingga program yg dilaksanakan efektif dan efesien	
Badan Usaha Milik Daerah	A	Peningkatan Tata Kelola Dan Kinerja Lkm Mekar Asih	LKM Mekarasih Agar Meningkatkan Kinerjanya, Meskipun Dengan Segala Keterbatasan Yang Ada, Sehingga Mendapatkan Penilaian Yang Sehat Kembali.	1. Penilaian Kinerja pegawai (KPI) di berlakukan kepada setiap pegawai 2. Penetapan Target kinerja kepada setiap pegawai	1. Tujuan KPI untuk menjadi tolak ukur pegawai dalam melakukan tanggung jawab pekerjaannya 2. Tujuan untuk membantu dalam memisahkan karyawan yang berkinerja baik dari yang tidak berkinerja baik
	B	Efisiensi Terhadap Belanja-Belanja Yang Dilakukan Oleh Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu	Terkait Manajemen Keuangan Dan Transparansi, Untuk Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kedepannya Pengelolaan Belanja Operasional Yang Sekiranya Bukan Menjadi Prioritas Dan Tidak Urgent Harap Dibatasi Atau Dipangkas Saja.	1. Telah melaksanakan efisiensi biaya berdasarkan azas kepatuhan yang berpedoman pada anggaran Perusahaan tahun buku 2023. 2. Proses perencanaan bisnis perusahaan sudah mulai tertata berdasarkan Rencana Bisnis dan RKAP setiap tahunnya. 3. Setiap kegiatan belanja operasional difokuskan pada optimalisasi kualitas, kuantitas dan kontinuitas air bersih yang didistribusikan kepada pelanggan	1. Memprioritaskan Biaya Operasional Rutin dan kewajiban - kewajiban Perusahaan. 2. Rencana Bisnis sebagai landasan perencanaan bisnis perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun, disertai dengan perencanaan anggaran per tahun dalam RKAP. 3. Menangani permasalahan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air bersih yang kuantitas dan kontinuitas air bersih yang

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
					didistribusikan kepada pelanggan. merupakan kewajiban utama perusahaan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima.
	C	Pengembangan Pelayanan Terhadap Pelanggan Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu	Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Harus Bisa Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Serta Memperhatikan Jalur Jaringan Pelanggan Baru Sehingga Pemerataan Distribusi Air Minum Ke Seluruh Masyarakat Purwakarta Dapat Tercapai.	Sesuai hasil koordinasi dan diskusi antara Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu dengan Balai Prasarana Permukiman wilayah Jawa Barat sebagai pelaksana dari program Pemerintah Pusat, perihal kelanjutan Pembangunan SPAM Purwakarta dari slot anggaran Kementerian PUPR yang masih belum direalisasikan yang terkendala sejak refocusing COVID 19 sampai sekarang, Kepala Balai P2W Jabar sangat menyarankan kepada management Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu untuk secara mandiri bekerjasama dengan investor dan tidak mengandalkan dari dana APBN maupun APBD. Maka, Perumda AM GTR mulai menjajaki Kerjasama investasi skema BOT dengan 2 (dua) peminat Badan Usaha Swasta untuk mengembangkan Cakupan Layanan pada 4 (empat) Kecamatan (Campaka, Cibatu, Bungursari, BBC), Kerjasama ini ditargetkan untuk diselesaikan di akhir tahun 2024.	1. Sebagai solusi bagi permasalahan pengembangan jaringan distribusi air bersih perpipaan. 2. Pada jalur distribusi eksisting, Perumda telah merealisasikan penambahan SL ke wilayah perumahan : a. Bukit Suryo b. Buana Indah c. Bamala Indah d. Permata e. Perumnas Royal Campaka f. Hegarmanah Membuka peluang Kerjasama untuk pengembangan jaringan distribusi ke 4 (empat) Kecamatan (Campaka, Cibatu, Bungursari, BBC)

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	D	Penguatan Terhadap Manajemen Keuangan Yang Profesional	Dalam Hal Pengelolaan Transparansi Keuangan Dan Manajemen Pengelolaan Perusahaan Harus Diperkuat Lagi.	1. BPR Purwakarta secara bertahap akan meningkatkan persentase kredit produktif. 2. PT LKM Mekar Asih seharusnya melakukan penguatan dalam sektor tersebut dengan mengadakan pelatihan-pelatihan (training) managemen keuangan kepada setiap karyawan 3. Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu telah menerbitkan kebijakan Keputusan Direksi tentang Pedoman Harga Satuan Kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan.	1. Salah satu produk kredit produktif/modal kerja yang dimiliki BPR Purwakarta adalah Kredit SimpingKu (simpan pinjam angsur untuk kebutuhan usaha), dimana produk tersebut masuk kedalam program TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah). BPR Purwakarta akan secara bertahap meningkatkan persentase kredit SimpingKu. 2. Masalah untuk pengadaan pelatihan (training) belum terwujud dikarenakan keterbatasan biaya operasional PT LKM Mekar Asih. 3. Tujuan Pedoman tersebut atas azas pemerataan, keadilan dan analisa terukur
	E	Upaya Penyelesaian Utang Piutang Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu	Perumda Air Gapura Tirta Rahayu Dimohon Untuk Segera Menyelesaikan Kewajiban-Kewajiban Berupa Hutang Kepada Pihak-Pihak Terkait Harus Diutamakan Serta Penyetoran Pad Ke Kas Daerah Juga Perlu Diperhatikan.	Terjadi penurunan Kewajiban Jangka Pendek per 31/12/2023 sebesar Rp17.974.574,00 dan terjadi kenaikan utang usaha sebesar Rp720.492.104,00 Telah dilakukan upaya restrukturisasi utang usaha sejak tahun 2022, sehingga kewajiban jangka pendek menjadi kewajiban jangka Panjang. Upaya ini dilakukan dalam rangka menjaga rasio kas perusahaan tetap baik.	1. Penurunan kewajiban jangka pendek; 2. Rasio kas tetap baik

PD	Catatan DPRD		Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
	F	Belum Terfokusnya Kredit Produktif Sebagai Kredit Yang Dominan Di Bpr Purwakarta Dan Lkm Mekar Asih	Untuk Bpr Purwakarta Dan Lkm Mekarsih, Harus Mengutamakan Kredit Produktif Jangan Lebih Ke Konsumtif, Dalam Arti Lain Persentase Kredit Konsumtif Dengan Kredit Produktif Agar Dimaksimalkan Di Angka 60:40.	Penyaluran Kredit PT LKM Mekar Asih sudah tepat sasaran yaitu untuk kebutuhan modal kerja khususnya UMKM dengan persentase 30.55 % untuk Kredit Konsumtif dan 69.45 % untuk kredit Produktif	Tujuan untuk pemberdayaan dan pemulihan usaha UMKM pasca Covid-19
Mitra Kerja Komisi Ii	A	Belum Maksimalnya Persentase Kredit Konsumtif Dengan Kredit Produktif	Untuk Bjb Cabang Purwakarta, Persentase Kredit Konsumtif Dengan Kredit Produktif Agar Dimaksimalkan Di Angka 60:40.	1. Mendukung program pemerintah menyalurkan KUR kepada para pelaku UMKM. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur daerah melalui penyaluran kredit modal kerja kontrak.	Peningkatan portofolio kredit produktif.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintah yang di Tugas-Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pada tahun Anggaran 2023 Kabupaten Purwakarta tidak mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan Pusat maupun Tugas Pembantuan Provinsi.

4.2. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pada Tahun 2023 tidak ada hambatan atau permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian Pemerintah Daerah dikarenakan pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tidak melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta tidak memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Desa.

BAB V
PENUTUP

5.1 Penghargaan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya serta media telah mewujudkan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dianugerahi berbagai penghargaan. Berbagai prestasi dan penghargaan berhasil ditorehkan dalam berbagai bidang pembangunan dan memperoleh pengakuan baik pada tingkat Provinsi maupun Nasional.

Adapun penghargaan dan prestasi yang telah dicapai pada periode tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.1
Penghargaan/Prestasi Pemerintahan Daerah
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

No	Nama Penghargaan/ Prestasi	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
1	Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum daei Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia	Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Juara Stand Terbaik dalam Jabae Weekend Market	Tk. Provinsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan,dan Perindustrian
3	Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (Swasti Saba) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Awaed Tahun 2023	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Dinas Kesehatan

No	Nama Penghargaan/ Prestasi	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
4	Penghargaan Kabupaten/Kota dengan Capaian Hasil Pelayanan 289% dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2023	BKKBN Provinsi Jawa Barat	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berncana
5	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publiuk pada Badan Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	Dinas Komunikasi dan Informasi
6	Penghargaan Perlindungan Konsumen	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Kepala Daerah
7	Penghargaan LPS Award Tahun 2023 untuk kategori Bank Teraktif Dalam Kegiatan Literasi Keuangan	Lembaga Penjamin Simpanan	Perumda BPR Purwakarta
8	Penghargaan Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif (IP2K) Tahun Anggaran 2024	Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah
9	Apresiasi Penghargaan Juara 1 Terbaik sebagai Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Nasional KB pasca persalinan pada kegiatan pelayanan kb serentak sejuta akseptor dalam rangka Hari Keluarga Nasional Ke 30	BKKBN PUSAT	DPPKB
10	Penghargaan dari Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)	Kementerian PUPR	Dinas Perumahan dan Permukiman
11	Nilai Pelayanan Publik “A”	KEMENPAN RB	DPMPTSP
12	Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri	Kesbangpol
13	Juara 3 Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	DPMD
14	Penghargaan Lencana Bakti Desa Pertama	Kementerian Desa dan PDTT	DPMD

No	Nama Penghargaan/ Prestasi	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
15	Cabor Dayung Medali Emas 250 M U-24 Traditional Dragon Boat Sea Games	Sea Games	Disporaparbud
16	Cabor ITF Medali Emas Tag Team (12-14 Tahun Putra)	Fornas VII	Disporaparbud
17	Cabor ITF Medali Emas Individual Kyorugi 15-17 Tahun Putra	Fornas VII	Disporaparbud
18	Pembina Adminduk Perekaman KTP EL DP4 2024 Kategori Kabupaten Kecil	Disdukcail Provinsi Jawa Barat	Disdukcapil
19	Penghargaan Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Penyerahan Penghargaan Indeks Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2023	BKPSDM Provinsi Jawa Barat	BKPSDM

5.2 Penutup

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta kepada DPRD Tahun 2023 adalah laporan tahunan Kepala Daerah yang berupa hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan pada tahun 2023.

Hasil pencapaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta bersama DPRD berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan bahwa

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan lancar.

Capaian kinerja hasil pelaksanaan pembangunan tahun 2023, selain keberhasilan sebagian besar target pembangunan telah tercapai, namun tentu masih terdapat beberapa permasalahan dan kekurangan yang masih menjadi kendala dalam pencapaian target pembangunan.

Kami sangat mengapresiasi kepada seluruh pihak (stakeholder) dan masyarakat Kabupaten Purwakarta terutama kepada segenap Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang telah memberikan dukungan dan masukannya dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023 dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan oleh semua pihak.

Semoga dokumen LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023 ini dapat memberikan gambaran dan informasi terkait hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Purwakarta serta menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih baik demi “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam melanjutkan karya pengabdian membangun Kabupaten Purwakarta yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi.